



WALI KOTA BLITAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 30 April 2024

WALIKOTA BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
3. NERACA.....	3
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	5
5. LAPORAN ARUS KAS.....	7
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	10
7.1 PENDAHULUAN.....	10
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi	17
7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	20
7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	24
7.2.1 Ekonomi Makro	24
7.2.2 Kebijakan Ekonomi Daerah.....	37
7.2.3 Kebijakan Pendapatan Daerah	38
7.2.4 Kebijakan Belanja Daerah	45
7.2.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah	51
7.2.6 Strategi Pencapaian	53
7.2.7 Pencapaian Target Kinerja APBD	55
7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	56
7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	58

7.4.1	Tujuan Kebijakan Akuntansi.....	58
7.4.2	Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi.....	58
7.4.3	Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.....	59
7.4.4	Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA.....	59
7.4.5	Kebijakan Akuntansi Belanja.....	60
7.4.6	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.....	61
7.4.7	Kebijakan Akuntansi Pendapatan Lo.....	63
7.4.8	Kebijakan Akuntansi Beban.....	64
7.4.9	Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas.....	64
7.4.10	Kebijakan Akuntansi Piutang.....	65
7.4.11	Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	69
7.4.12	Kebijakan Akuntansi Investasi.....	70
7.4.13	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	73
7.4.14	Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	76
7.4.15	Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud.....	77
7.4.16	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.....	78
7.4.17	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.....	80
7.4.18	Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	81
7.4.19	Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.....	84
7.4.20	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.....	87
7.4.21	Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	88
7.4.22	Perubahan Estimasi Akuntansi.....	90
7.4.23	Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.....	90
7.4.24	Peristiwa Luar Biasa.....	91
7.5	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	93
7.5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	93
7.5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	144
7.5.3	Neraca.....	146

7.5.4	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	240
7.5.5	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)	261
7.5.6	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	269
7.5.7	Informasi Penting Lainnya Yang Diperlukan	276
7.5.8	Penutup	283
LAMPIRAN		284

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019-2023.....	25
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar (miliar rupiah), 2019-2023.....	26
Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar (miliar rupiah), 2018-2022	26
Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2019–2023	28
Tabel 5 Laju Inflasi Bulanan di Kota Kediri 2021-2023	30
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2023	31
Tabel 7 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin dikota Blitar, 2015-2023	32
Tabel 8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 2023.....	37
Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023	56
Tabel 10 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	57
Tabel 11 Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)	66
Tabel 12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih	67
Tabel 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Retribusi Daerah	68
Tabel 14 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	94
Tabel 15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.....	96
Tabel 16 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	99
Tabel 17 Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023	106
Tabel 18 Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023	107
Tabel 19 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2023	108
Tabel 20 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2023	110
Tabel 21 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023.....	111
Tabel 22 Rincian Pendapatan Bagi Hasil.....	112

Tabel 23 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.....	113
Tabel 24 Rincian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023	114
Tabel 25 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun 2023	114
Tabel 26 Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023.....	115
Tabel 27 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023	117
Tabel 28 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	119
Tabel 29 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023	123
Tabel 30 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023.....	126
Tabel 31 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022	126
Tabel 32 Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022	128
Tabel 33 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2023	129
Tabel 34 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022.....	130
Tabel 35 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022.....	133
Tabel 36 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022.....	134
Tabel 37 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022.....	135
Tabel 38 Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	137
Tabel 39 Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2023	137
Tabel 40 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	140
Tabel 41 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	141
Tabel 42 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	146
Tabel 43 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022	147
Tabel 44 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2023 dan 2022	149
Tabel 45 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Bosnas di Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022.....	150
Tabel 46 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Bosnas di Satuan Pendidikan Swasta per 31 Desember 2023 dan 2022.....	152
Tabel 47 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2023.....	153
Tabel 48 Rincian Saldo Akhir Kas BOP PAUD Tahun 2023 dan 2022	153

Tabel 49 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2023.....	154
Tabel 50 Rincian Kas di Bendahara Lainnya Tahun 2023 dan 2022.....	155
Tabel 51 Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023.....	156
Tabel 52 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2023	156
Tabel 53 Rincian Mutasi Piutang Retribusi	157
Tabel 54 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi	158
Tabel 55 Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	159
Tabel 56 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023	163
Tabel 57 Rincian Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022	164
Tabel 58 Perhitungan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023.....	164
Tabel 59 Daftar Persediaan per 31 Desember 2023	166
Tabel 60 Investasi Jangka Panjang	169
Tabel 61 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Tahun 2023 dan 2022	170
Tabel 62 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah sebelum Rescheduling.....	171
Tabel 63 Rescheduling Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022	173
Tabel 64 Investasi Dana Bergulir pada BPKAD.....	175
Tabel 65 Daftar Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	176
Tabel 66 Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih	177
Tabel 67 Klasifikasi Penyisihan Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria	177
Tabel 68 Klasifikasi Penyisihan Investasi Non Permanen (Investasi Dana Bergulir Tahun 2023	178
Tabel 69 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	179
Tabel 70 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2023.....	184
Tabel 71 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tahun 2023.....	184
Tabel 72 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tahun 2023.....	184
Tabel 73 Rincian Hibah Laptop pada Dinas Kesehatan.....	192
Tabel 74 Rincian Gedung dan Bangunan yang Sudah Dibongkar Tetapi Belum Dilakukan Penghapusan	197

Tabel 75 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	206
Tabel 76 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	207
Tabel 77 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	207
Tabel 78 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022.....	215
Tabel 79 Rincian Kas Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023 dan 2022	216
Tabel 80 Perhitungan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023	218
Tabel 81 Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023.....	220
Tabel 82 Rincian Aset Lain-lain Tahun 2023	225
Tabel 83 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023	226
Tabel 84 Rincian Akumulasi Aset Lain-lain Tahun 2023	227
Tabel 85 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022	230
Tabel 86 Rincian Utang belanja per 31 Desember 2023.....	234
Tabel 87 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2023.....	237
Tabel 88 Rincian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023	238
Tabel 89 Rincian Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023	240
Tabel 90 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023	241
Tabel 91 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023.....	242
Tabel 92 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023	243
Tabel 93 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023.	245
Tabel 94 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2023.....	246
Tabel 95 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2023.....	247
Tabel 96 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2023	249
Tabel 97 Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO.....	250
Tabel 98 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023	252
Tabel 99 Rincian Beban Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	253
Tabel 100 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2023	254

Tabel 101 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023	255
Tabel 102 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023.....	256
Tabel 103 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023	257
Tabel 104 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023	257
Tabel 105 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023	267
Tabel 106 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022.....	267
Tabel 107 Perhitungan Ekuitas Akhir.....	275
Tabel 108 Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	280

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023	28
Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kediri	29
Gambar 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar, 2020–2023	31
Gambar 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Blitar	33
Gambar 5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Blitar	34
Gambar 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota eks Karisidenan Kediri dan Provinsi Jawa Timur	34
Gambar 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Tahun 2020-2023 Menurut Jenis Kelamin.....	35
Gambar 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Tahun 2020-2023 Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas BOS di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2023.....	284
Lampiran 2 Pengelompokan Umur Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023.....	286
Lampiran 3 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih 2023 Kategori Lancar, Kurang Lancar, Diragukan.....	287
Lampiran 4 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih 2023 Kategori Macet.....	288
Lampiran 5 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tak Tertagih Tahun 2023	289
Lampiran 6 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tak Tertagih Tahun 2023	291
Lampiran 7 Daftar Persediaan Per Rekening Per SKPD	293
Lampiran 8 Investasi Dana Bergulir	305
Lampiran 9 Daftar Aset Tetap per SKPD.....	307
Lampiran 10 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD	309
Lampiran 11 Daftar Jaminan Bongkar Reklame pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	311
Lampiran 12 Rincian Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat per 31 Desember 2023	320
Lampiran 13 Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	324
Lampiran 14 Daftar Aset Tidak Berwujud per SKPD.....	326
Lampiran 15 Daftar Aset Lain-lain per SKPD.....	328
Lampiran 16 Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD	330
Lampiran 17 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD	332
Lampiran 18 Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023.....	334
Lampiran 19 Rincian Utang Belanja Per SKPD	336





PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	48.418.787.898,00	56.381.185.255,00	116,44	45.120.805.461,10
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	8.115.260.641,09	7.835.222.821,23	96,49	6.777.531.072,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	1.042.119.575,00	1.042.119.574,96	100,00	885.196.947,24
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	110.782.657.987,00	106.342.155.180,37	95,99	103.484.638.522,68
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		168.358.825.921,09	171.599.683.831,56	101,92	158.268.172.093,52
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1.1	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	97,06	130.286.308.030,00
11	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.2	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	100,63	392.628.748.070,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.2.1.3	11.081.818.000,00	9.770.554.891,00	88,17	18.028.861.209,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.1.1.2.1.4	68.367.653.860,45	67.415.595.576,00	98,61	54.940.729.877,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		588.150.072.818,45	586.700.318.147,00	99,58	595.884.648.186,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.2.1	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00	56.255.405.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16)		53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00	56.255.405.000,00
18	Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.3.1	89.385.629.082,00	108.195.788.000,00	111,83	90.589.850.687,00
20	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.3.2	1.524.913.621,00	1.624.913.621,00	106,60	11.507.063.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19 + 20)		90.890.542.713,80	107.720.701.621,00	118,52	102.096.913.687,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+21)		733.587.394.531,45	747.967.796.768,00	101,96	754.236.961.873,80
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
24	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.1	8.027.869.971,48	8.005.217.412,53	99,78	8.063.076.404,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)		8.027.869.971,48	8.005.217.412,53	99,78	8.063.076.404,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+24)		910.973.496.403,93	928.568.709.211,69	101,83	916.568.219.288,52
27	BELANJA	7.5.1.2				
28	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	328.603.981.307,00	314.885.862.902,00	95,82	323.977.811.820,00
30	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	467.615.800.255,00	443.446.489.987,38	94,83	500.968.796.379,88
31	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	42.005.585.057,00	40.779.317.144,00	97,07	25.885.473.481,00
32	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	20.675.918.120,00	20.627.654.900,00	99,77	23.569.922.320,00
33	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 32)		858.893.275.739,00	819.716.314.933,36	95,44	874.428.607.000,88
34	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
35	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	689.732.430,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	92,25	68.037.519.911,09
37	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	64.037.450.198,00	62.954.436.910,00	98,31	27.686.316.128,64
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	46.392.333.759,00	45.263.635.946,00	97,76	61.355.000.083,88
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	2.188.929.297,00	2.097.644.616,00	95,71	2.938.194.731,78
40	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	-
41	Jumlah Belanja Modal (35 s.d. 40)		141.042.677.285,00	136.638.625.990,00	96,88	160.877.763.265,39
42	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
43	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3.1	15.083.190.000,00	2.413.757.451,00	15,99	2.333.212.840,00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)		15.083.190.000,00	2.413.757.451,00	15,99	2.333.212.840,00
45	Jumlah Belanja (33+41+44)		1.015.028.533.024,00	958.762.698.374,36	94,46	1.037.830.383.196,27
46	SURPLUS/DEFISIT (26-45)		(194.055.042.820,07)	(30.193.398.362,67)	20,02	(119.062.772.825,75)
47	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
49	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA)	7.5.1.3.1.1	119.055.042.820,07	119.053.885.888,07	100,00	239.941.987.648,01
50	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.3.1.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1.3	0,00	133.830.522,46	0,00	175.827.797,81
52	Jumlah Penerimaan (49 s.d. 51)		129.055.042.820,07	129.187.716.510,53	100,10	240.117.815.445,82
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2				
54	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
55	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
56	Jumlah Pengeluaran (54 + 55)		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
57	PEMBIAYAAN NETTO (52-56)		104.055.042.820,07	104.187.716.510,53	100,13	238.117.815.445,82
58	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA) (48+57)	7.5.1.4	0,00	73.994.318.147,88		119.055.042.820,07

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini





PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	119.055.042.620,07	239.941.987.648,01
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	119.055.042.620,07	239.941.987.648,01
3	Sub total (1+2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLPA/SKPA)	7.5.2.3	73.996.474.779,86	119.055.042.620,07
5	Sub total (3 + 4)		73.996.474.779,86	119.055.042.620,07
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4	(1.156.632,00)	-
7	Lain-lain	7.5.2.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 s.d. 7)	7.5.2.6	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini





PEMERINTAH KOTA BLITAR
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Urutan	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
1	ASET	7.5.3.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	67.801.515.073,88	110.678.626.471,16
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3	24.486.183,21	34.016.309,09
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	7.5.3.1.1.4	3.623.702.172,79	5.891.140.308,28
7	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.5	1.482.006.958,06	2.287.545.568,42
8	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.5.3.1.1.6	188.674.201,08	151.265.154,48
9	Kas Dana BOP PAUD	7.5.3.1.1.7	0,00	1.159.632,00
10	Kas Dana BOK	7.5.3.1.1.8	723.715.460,00	0,00
11	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.9	49.917.195,00	11.280.176,64
12	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.10	11.830.740.522,00	10.353.006.391,00
13	Piutang Restitusi	7.5.3.1.1.11	7.271.742.095,00	7.201.626.595,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.12	11.900.033.821,81	8.443.697.391,85
15	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.1.13	0,00	6.210.167.100,00
16	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	7.5.3.1.1.14	82.087.000,00	19.918.000,00
17	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.15	(15.222.985.826,27)	(14.560.992.151,48)
18	Belanja Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.16	27.787.500,00	69.627.083,33
19	Persediaan	7.5.3.1.1.17	17.722.360.194,26	22.266.641.952,57
20	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 19)		107.606.083.454,56	159.058.746.982,34
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2		
22	Investasi Non Permanen	7.5.3.1.2.1		
23	Investasi kepada BUMD	7.5.3.1.2.1.1	778.619.000,00	840.788.000,00
24	Investasi Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1.2	5.384.595.371,81	5.518.425.894,27
25	Penyisihan Piutang (Investasi Non Permanen) Tak Tertagih	7.5.3.1.2.1.3	(3.741.810.501,27)	(3.835.392.276,99)
26	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s.d.25)		2.421.403.870,54	2.523.821.617,28
27	Investasi Permanen	7.5.3.1.2.2		
28	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.2.1	25.951.488.497,36	27.246.348.067,06
29	Jumlah Investasi Permanen (28)		25.951.488.497,36	27.246.348.067,06
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)		28.372.892.367,90	29.770.167.704,33
31	ASET TETAP	7.5.3.1.3		
32	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.654.274.940.770,00	1.556.848.763.241,00
33	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	688.497.285.677,82	653.613.141.650,72
34	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	935.702.884.743,14	879.158.174.243,70
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	932.407.532.986,78	886.214.906.722,32
36	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	43.660.247.409,34	42.253.155.547,34
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	3.354.089.541,00	1.513.433.175,00
38	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.4	(1.532.324.896.223,75)	(1.392.581.785.067,15)
39	Jumlah Aset Tetap (32 s.d. 38)		2.705.472.064.884,33	2.627.619.780.512,93
40	DANA CADANGAN	7.5.3.1.5		
41	Dana Cadangan	7.5.3.1.5	15.000.000.000,00	0,00
42	Jumlah Dana Cadangan (41)		15.000.000.000,00	-
43	ASET LAINNYA	7.5.3.1.6		
44	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.6.1	421.257.013,00	11.056.871.128,00
45	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.6.2	83.712.500,00	243.637.500,00
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.6.3	5.442.600.000,00	3.114.000.000,00
47	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.6.4	20.475.140.477,29	21.193.741.302,29
48	Aset Lain-lain	7.5.3.1.6.5	1.794.671.751,00	2.338.543.885,65
49	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.6.6	(14.857.461.705,55)	(13.365.067.164,34)
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.5.3.1.6.7	(771.571.751,00)	(2.338.543.885,65)
51	Jumlah Aset Lainnya (44 s.d. 50)		12.588.548.234,74	22.243.182.765,95
52	JUMLAH ASET (20+30+39+42+51)		2.889.039.588.941,53	2.836.091.886.965,55
53	KEWAJIBAN	7.5.3.2		
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	7.5.3.2.1.1	0,00	0,00
56	Pendapatan diterima dimuka	7.5.3.2.1.2	1.260.142.683,90	1.265.788.039,06
57	Utang Belanja	7.5.3.2.1.3	30.157.609.336,95	26.946.680.210,29
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	478.496.250,00	1.659.453.930,50
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s.d.58)		31.928.250.270,85	29.871.922.680,45

No	Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2		
61	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61)		0,00	0,00
63	JUMLAH KEWAJIBAN (59 + 62)		31.828.250,270,80	29.671.922.682,45
64	EKUITAS DANA	7.5.3.3	2.837.111.338.670,73	2.808.219.964.285,10
65	JUMLAH EKUITAS DANA (64)		2.837.111.338.670,73	2.808.219.964.285,10
66	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (63 + 65)		2.869.039.588.941,53	2.838.091.886.967,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini





PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Pemuncutan	(%)
1	PENDAPATAN	7.5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.4.1.1.1	58.016.800.324,00	45.824.175.215,10	12.382.625.108,90	27,16
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.4.1.1.2	7.877.491.553,33	6.782.325.952,50	1.095.165.600,83	16,15
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialokasikan	7.5.4.1.1.3	1.042.119.574,56	885.196.947,24	156.922.627,32	17,73
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.4.1.1.4	138.477.551.385,79	86.914.750.441,45	51.562.750.954,34	52,96
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d.6)		176.413.912.847,68	150.208.448.558,29	26.207.464.291,39	17,45
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.4.1.2				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERMBANGKANG	7.5.4.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	7.5.4.1.2.1.1	81.679.234.060,00	141.117.631.595,00	(59.438.397.535,00)	(42,12)
11	Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.2.1.2	417.053.510.313,00	392.626.749.070,00	24.374.761.243,00	6,21
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.4.1.2.1.3	9.770.554.661,00	18.028.861.209,00	(8.258.306.518,00)	(45,81)
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.4.1.2.1.4	57.365.935.454,00	54.940.729.977,00	2.425.205.577,00	4,41
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERMBANGKANG (11 s.d. 14)		565.819.235.458,00	598.715.971.751,00	(40.896.736.293,00)	(6,74)
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	7.5.4.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	7.5.4.1.2.2.1	53.546.779.000,00	56.255.400.000,00	(2.708.621.000,00)	(4,81)
17	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA (16)		53.546.779.000,00	56.255.400.000,00	(2.708.621.000,00)	(4,81)
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	7.5.4.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.4.1.2.3.1	99.985.620.900,00	91.449.075.373,00	8.536.545.527,00	9,33
20	Bantuan Keuangan	7.5.4.1.2.3.2	1.517.718.352,00	10.123.202.600,50	(8.605.484.248,50)	(95,01)
21	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH (22 s.d. 23)		101.503.339.252,00	101.572.277.973,50	(68.938.721,50)	(8,97)
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+24)		720.869.385.710,00	764.543.649.724,50	(43.674.264.014,50)	(5,71)
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.4.1.3				
24	Pendapatan Hibah	7.5.4.1.3.1	7.978.468.310,71	8.229.770.035,37	(251.312.744,66)	(3,08)
25	Pendapatan Lainnya	7.5.4.1.3.2	9.005.217.412,53	7.971.815.404,00	1.033.402.008,53	12,96
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (25 s.d. 26)		16.983.685.723,24	16.201.585.439,37	782.099.283,87	4,63
27	JUMLAH PENDAPATAN (7 +25 + 30)		914.266.958.280,92	930.951.692.740,36	(16.684.742.459,44)	(1,79)
28	BEBAN	7.5.4.2				
29	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1				
30	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	315.064.932.339,00	323.803.795.710,00	(8.748.863.371,00)	(2,70)
31	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	457.684.794.320,32	483.145.683.592,79	(25.461.029.262,57)	(5,27)
32	Beban Hibah	7.5.4.2.1.3	40.015.047.175,00	24.582.902.961,00	15.432.144.194,00	62,78
33	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.4	20.627.854.906,00	23.969.802.320,00	(2.942.267.420,00)	(12,48)
34	JUMLAH BEBAN OPERASI (36 s.d. 39)		833.392.285.744,32	855.195.304.633,79	(21.712.915.859,57)	(2,54)
35	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.2				
36	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		58.456.459.824,31	63.363.102.638,52	(5.536.442.814,21)	(8,65)
37	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		35.712.948.799,27	33.922.287.947,67	2.790.660.851,60	8,23
38	Beban Penyusutan Jalan, Jangkar, dan Jaringan		48.304.698.939,40	45.583.828.867,29	2.715.858.082,14	5,96
39	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		531.854.407,13	-	531.854.407,13	-
40	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
41	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		1.309.921.495,21	2.324.582.018,81	(414.670.523,60)	(17,84)
42	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (43 s.d. 48)		146.016.971.495,31	145.828.811.472,26	187.260.013,05	0,13
43	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	7.5.4.2.3				
44	Beban Penyisihan Piutang		585.905.058,00	782.911.736,75	(197.005.677,75)	(12,38)
45	JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (52)		585.905.058,00	782.911.736,75	(197.005.677,75)	(12,38)
46	BEBAN LAIN-LAIN	7.5.4.2.4				
47	Beban Lain-lain		1.294.957.179,69	1.304.814.828,71	(9.857.649,02)	(5,10)
48	JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN (56)		1.294.957.179,69	1.304.814.828,71	(9.857.649,02)	(5,10)
49	BEBAN TIDAK TERDUGA	7.5.4.2.5				
50	Beban Tak Terduga		2.410.844.851,30	2.189.702.506,00	220.942.351,08	10,09
51	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA (60)		2.410.844.851,30	2.189.702.506,00	220.942.351,08	10,09
52	JUMLAH BEBAN (40+49+53+57+61)		983.799.958.319,22	1.025.271.345.141,51	(21.471.376.822,29)	(2,14)

No	Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
64						
65	SURPLUS DEFISIT DARI OPERASI (32 - 63)		(69.533.318.038,30)	(74.319.652.491,15)	4.786.334.362,85	(6,44)
66						
67	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3				
68	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		109.418.288.136,00	-	109.418.288.136,00	
69	Jumlah Surplus Non Operasional (68)		109.418.288.136,00	-	109.418.288.136,00	
70	DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
71	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(5.290.213.797,75)	(251.147.136,55)	(5.039.086.861,20)	2.096,42
72	Jumlah Defisit Non Operasional (71)		(5.290.213.797,75)	(251.147.136,55)	(5.039.086.861,20)	2.096,42
73	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (69+72)		104.128.074.338,25	(251.147.136,55)	104.379.221.474,80	(41.560,98)
74						
75	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (65 + 73)		34.595.856.298,95	(74.570.799.537,70)	109.165.855.837,65	(146,39)
76						
77	POS LUAR BIASA	7.5.4.4				
78	PENDAPATAN LUAR BIASA					
79	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
80	Jumlah Pendapatan Luar Biasa (79)		-	-	-	-
81	BEBAN LUAR BIASA					
82	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
83	Jumlah Beban Luar Biasa (82)		-	-	-	-
84	JUMLAH POS LUAR BIASA (80 - 83)		-	-	-	-
85						
86	SURPLUS DEFISIT LG (75+84)	7.5.4.5	34.595.856.298,95	(74.570.799.537,70)	109.165.855.837,65	(146,39)

Salinan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama.





PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2023 dan 2022
Metode Langsung

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Pajak Daerah	55.351.185.255,00	45.120.805.461,10
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.830.222.821,23	6.777.531.072,90
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.042.119.574,56	885.196.947,24
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.895.016.411,37	103.346.106.522,68
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	92.510.557.565,00	130.286.306.030,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	417.003.510.313,00	392.626.746.070,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	9.770.354.891,00	18.026.861.208,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	67.415.885.576,00	54.940.729.877,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	53.646.779.000,00	56.255.400.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	106.195.788.000,00	90.589.850.687,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	1.524.913.621,00	11.507.063.000,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	9.005.217.412,53	8.083.076.404,00
15	Jumlah (3 s.d.14)	927.921.560.242,89	918.429.680.280,52
16	Arus Kas Keluar		
17	Pembayaran Pegawai	314.895.852.902,00	323.977.811.920,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	443.446.489.987,36	500.986.799.379,88
19	Pembayaran Hibah	40.770.317.144,00	25.885.473.481,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	20.627.654.900,00	23.586.922.320,00
21	Pembayaran Tidak Terduga	2.413.757.451,00	2.333.212.840,00
22	Jumlah (17 s.d. 21)	822.124.072.384,36	876.763.219.840,88
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 22)	105.797.487.858,53	41.666.460.439,64
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
25	Arus Kas Masuk		
26	Pencarian Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	483.780.436,00	83.200.000,00
28	Penjualan Aset Tetap Lainnya	63.980.000,00	55.330.000,00
29	Penjualan Aset Lainnya	119.384.333,00	0,00
30	Jumlah (26 s.d. 29)	10.667.164.769,00	138.530.000,00
31	Arus Kas Keluar		
32	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00
33	Perolehan Tanah	0,00	889.732.430,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.322.308.618,00	68.037.519.911,09
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	62.954.436.810,00	27.886.316.129,64
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.263.630.846,00	61.355.000.063,88
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.097.644.810,00	2.938.194.731,78
38	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
39	Pemeriksaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
40	Jumlah (32 s.d. 39)	161.638.025.990,00	162.877.763.265,39
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	(150.970.861.221,00)	(162.739.233.265,39)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
43	Arus Kas Masuk		
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	133.830.522,46	175.827.797,81
45	Jumlah (44)	133.830.522,46	175.827.797,81
46	Arus Kas Keluar		
47	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
48	Jumlah (47)	0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 - 48)	133.830.522,46	175.827.797,81
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
51	Arus Kas Masuk		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	71.185.258.464,00	81.069.885.517,87
53	Jumlah (52)	71.185.258.464,00	81.069.885.517,87
54	Arus Kas Keluar		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	71.185.258.464,00	81.069.885.877,87
56	Jumlah (55)	71.185.258.464,00	81.069.885.877,87
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53-56)	0,00	(360,00)
58	Kenalkan (Penurunan) Kas (23+41+49+57)	(45.059.567.840,21)	(120.886.945.387,94)
59	Koreksi Saldo Awal Kas Tahun Lalu	(1.156.632,00)	0,00
60	Saldo Awal Kas (61 s.d. 68)	119.055.042.820,87	239.941.988.008,01
61	Saldo Awal Kas BUD	110.676.628.471,16	135.692.032.351,00
62	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	9,00	0,00
63	Saldo Awal Kas BOSNAS	2.287.545.568,42	5.768.375.111,29
64	Saldo Awal Kas BLUD	5.891.149.308,28	98.141.163.548,83
65	Saldo Awal Kas JKN	151.263.154,48	346.421.995,89
66	Saldo Awal Kas BOP PAUD	1.156.632,00	0,00
67	Saldo Awal Kas Bendahara Penerimaan	34.816.309,09	0,00
68	Saldo Awal Kas Lainnya	11.298.176,94	0,00

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
69	Saldo Akhir Kas (70+71+72+73+74+75+76+77+78)	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07
70	Saldo Akhir Kas BUD	67.801.515.973,86	110.678.628.471,16
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
72	Saldo Akhir Kas BOSNAS	1.482.306.958,06	2.287.545.568,42
73	Saldo Akhir Kas BLUD	3.623.702.172,75	5.891.140.308,28
74	Saldo Akhir Kas JKN	188.674.201,98	151.265.154,48
75	Saldo Akhir Kas BOP PAUD	-	1.156.632,00
76	Saldo Akhir Kas BOK	723.715.460,00	0,00
77	Saldo Kas Bendahara Penerimaan	24.486.183,21	34.916.309,09
78	Saldo Kas Lainnya	49.917.198,09	11.290.176,04
79	Saldo Akhir Kas Daerah (58+59+60)	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	2.808.219.964.285,18	2.786.551.759.918,34
2	SURPLUS/DEFISIT L.O	7.5.6.2	34.505.056.299,95	(74.570.798.537,70)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	7.5.6.3		
4	Kurang/lebih catat atas Piutang	7.5.6.3.1	150.000,00	22.471.510,00
5	Kurang/lebih catat atas Penyisihan Piutang	7.5.6.3.2	23.902.364,21	172.800.848,50
6	Kurang/lebih catat atas Penyisihan Investasi Tak Tertagih	7.5.6.3.3	93.681.365,72	786.930.627,95
7	Kurang/lebih catat atas Hutang	7.5.6.3.4	1.380.815.299,50	(73.965.685,45)
8	Kurang/lebih catat atas Persediaan	7.5.6.3.5	25.816.385,00	812.101.010,00
9	Kurang/lebih catat atas Kas	7.5.6.3.6	(1.156.532,00)	0,00
10	Kurang/lebih catat atas Aset Tetap	7.5.6.3.7	1.581.993.643,00	94.861.890.723,01
11	Kurang/lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.5.6.3.8	(9.264.327.303,75)	636.239.512,88
12	Kurang/lebih catat atas Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.6.3.9	417.525.904,00	7.807.800,00
13	Koreksi Nilai Investasi Permanen	7.5.6.3.10	0,00	(586.223.081,00)
14	Kurang/lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.5.6.3.11	(85.519.000,00)	134.060.000,00
15	Kurang/lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Perubahan Masa Manfaat	7.5.6.3.12	133.635.040,00	(186.054.497,41)
16	Kurang/lebih catat atas Aset Lainnya	7.5.6.3.13	0,00	(348.338.200,00)
17	Kurang/lebih catat atas Pengadaan dibayar dimuka	7.5.6.3.14	0,00	(516.864,00)
18	EKUITAS AKHIR (1 s.d. 17)	7.5.6.4	2.837.111.338.670,73	2.808.219.964.285,18

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini





7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) dicabut sebagian dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- v. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

- w. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
- x. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
- y. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
- z. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
- aa. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
- bb. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
- dd. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
- ee. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
- ff. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- hh. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2)
- ii. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4);
- jj. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 5);
- kk. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 75);
- ll. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77);
- mm. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62)

- nn. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Hibah Langsung (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 70);
- oo. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 105)
- pp. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101)
- qq. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 64)

7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada koordinat $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $08^{\circ}2'$ - $08^{\circ}8'$ Lintang Selatan. Kota Blitar terletak pada jarak sekitar 160 km ke arah Barat Daya terhadap Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Kota Blitar terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Blitar merupakan batas langsung (border) dari Kota Blitar. Secara rinci, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Sedangkan dibagian barat



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berbatasan dengan Kecamatan Sanan Kulon dan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 32,59 km². Dengan luas ini, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Provinsi Jawa timur setelah Mojokerto. Kota Blitar terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Diantara ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km² (37,31%), kemudian Kecamatan Kepanjen Kidul 10,50 km² (32,22%), dan yang terkecil adalah Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar km² 9,93 (30,47%).

Berdasarkan wilayah administrasi, wilayah kota Blitar terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul, dan Sukorejo masing- masing terdiri dari 7 Kelurahan, adapun jumlah Kelurahan di Kota Biltar adalah 21 Kelurahan. Dari 21 Kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul dengan luas sekitar 2,68 km². Sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Karangsari dan Turi, yaitu dengan luas masing-masing sekitar 0,51 km² dan 0,52 km².

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Blitar disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Jumlah Perangkat Daerah (PD) sebanyak 30 PD, terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari 6 bagian, Inspektorat Daerah, 18 Dinas Daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, 5 Badan Daerah, RSUD Mardi Waluyo, 3 Kecamatan, sebagaimana dirinci sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah:

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Organisasi
- c) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- d) Bagian Pemerintahan
- e) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- f) Bagian Hukum
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat Daerah
- 4) Dinas Daerah terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan
 - b) Dinas Kesehatan
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e) Dinas Sosial
 - f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - g) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - h) Dinas Lingkungan Hidup
 - i) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - j) Dinas Perhubungan
 - k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - l) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
 - m) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
 - n) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - o) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - p) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - q) Satuan Polisi Pamong Praja
 - r) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 5) Badan Daerah terdiri dari:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) RSUD Mardi Waluyo
- 7) Kecamatan
 - a) Kecamatan Sananwetan
 - b) Kecamatan Sukorejo
 - c) Kecamatan Kepanjenkidul



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga memiliki BUMD dan BLUD, dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah BUMD

Pemerintah Kota Blitar memiliki dua BUMD yaitu PERUMDA AIR MINUM TIRTA PATRIA dan PERUMDA BPR KOTA BLITAR.

2) Jumlah BLUD

Pemerintah Kota Blitar memiliki satu BLUD yaitu RSUD Mardi Waluyo.

7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIANTARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan

7.2.1.1 Umum

7.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

7.2.1.3 Kebijakan Umum Belanja

7.2.1.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

7.2.2 *Mandatory Spending*

7.2.2.1 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Fungsi Pendidikan

7.2.2.2 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Fungsi Kesehatan

7.2.2.3 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Infrastruktur

7.2.2.4 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Kewilayahan



**PEMERINTAH KOTA BITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

7.2.2.5 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Pendidikan Dan Pelatihan Bagi ASN

7.2.2.6 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi

7.4.2 Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi

7.4.3 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

7.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

7.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

7.4.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

7.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban

7.4.9 Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

7.4.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

7.4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

7.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi

7.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

7.4.14 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

7.4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

7.4.17 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

7.4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

7.4.19 Penyajian Laporan Keuangan BLUD

7.4.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

7.4.21 Perubahan Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.4.22 Perubahan Estimasi Akuntansi

7.4.23 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

7.4.24 Peristiwa Yang Luar Biasa

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.5.1.1 Pendapatan LRA

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

7.5.1.2 Belanja

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

7.5.1.2.2 Belanja Modal

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

7.5.1.3 Pembiayaan

7.5.1.4 SiLPA/SiKPA

7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/
SiKPA)

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya

7.5.2.5 Lain-lain

7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

7.5.3 Neraca

7.5.3.1 Aset

7.5.3.1.1 Aset Lancar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
- 7.5.3.1.3 Aset Tetap
- 7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan
- 7.5.3.1.5 Dana Cadangan
- 7.5.3.1.6 Aset Lainnya
- 7.5.3.2 Kewajiban
 - 7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
- 7.5.3.3 Ekuitas
- 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan – LO
 - 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
 - 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO
 - 7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - DanaPerimbangan-LO
 - 7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO
 - 7.5.4.1.2.3 Transfer Antar Daerah-LO
 - 7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 - 7.5.4.2 Beban
 - 7.5.4.2.1 Beban Operasi
 - 7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 7.5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang
 - 7.5.4.2.4 Beban Lain-Lain
 - 7.5.4.2.5 Beban Transfer
 - 7.5.4.2.6 Beban Tak Terduga
 - 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

7.5.4.4 Pos Luar Biasa

7.5.4.5 Surplus/Defisit – LO

7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

7.5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.6.1 Saldo Awal Ekuitas

7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

7.5.7 Informasi Penting Lain Yang Diperlukan

7.5.7.1 Dana Tugas Pembantuan (TP)

7.5.7.2 Penerimaan Kas yang tidak Melalui RKUD

7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah

7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi

7.5.7.5 Dana Cadangan PILKADA

7.5.7.6 Penerapan Properti Investasi

7.5.8 Penutup

**7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

7.2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB ((Produk Domestik Regional





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bruto), pertumbuhan ekonomi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat ketimpangan pengeluaran. Secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Kondisi Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB	6.791,61M	6.708,14M	7.113,59M	7.833,93M	8.515,16 M
PDRB ADHK	4.832,89M	4.722,5M	4.924,57M	5.181,61M	5.455,81M
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	-2,28	4,28	5,22	5,29
Indeks Pembangunan Manusia	78,56	78,57	78,98	79,93	80,78
Kemiskinan (%)	7,13	7,78	7,89	7,37	7,30
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54	6,68	6,61	5,39	5,24

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024.

a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang umumnya dalam waktu satu tahun.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar (miliar rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha Industri		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	193,06	195,65	201,80	200,34	213,53
B	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,35	0,34	0,32	0,33
C	Industri Pengolahan	659,38	654,04	712,62	791,27	839,09
D	Pengadaan Listrik & Gas	4,59	4,48	4,60	5,05	5,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,06	9,54	10,32	11,23	12,11
F	Konstruksi	512,12	481,49	494,87	554,04	610,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.674,5	1.579,9	1.718,4	1.967,2	2.130,93
H	Transportasi dan Pergudangan	298,82	283,35	299,62	361,05	426,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365,96	338,44	376,59	429,55	486,12
J	Informasi dan Komunikasi	703,27	760,95	809,70	840,55	905,17
K	Jasa Keuangan & Asuransi	717,4	719,78	745,60	835,00	887,43
L	Real Estate	252,1	262,05	274,97	288,70	302,38
M	Jasa Perusahaan	53,15	50,77	52,87	56,51	61,48
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib	438,4	450,57	450,57	467,34	492,13
O	Jasa Pendidikan	461,5	487,44	495,11	504,67	548,35
P	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	129,14	143,49	153,20	159,07	174,75
Q	Jasa Lainnya	318,50	285,83	312,40	362,00	418,83
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		6.791,62	6.708,14	7.113,60	7.833,94	8.515,16

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar (miliar rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha Industri		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	120,75	120,96	123,13	114,55	116,31
B	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,24	0,24	0,21	0,21
C	Industri Pengolahan	444,15	431,23	449,71	479,53	491,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,41	3,40	3,48	3,74	3,94





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lapangan Usaha Industri		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,70	8,08	8,51	8,93	9,41
F	Konstruksi	342,69	321,09	324,88	349,13	371,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.190,38	1.110,56	1.187,03	1.268,53	1.327,99
H	Transportasi dan Pengudangan	201,35	190,38	201,05	227,68	250,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,74	230,16	244,65	266,86	288,75
J	Informasi dan Komunikasi	620,92	664,75	704,17	720,97	767,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	479,22	480,95	483,77	502,10	517,77
L	Real Estate	191,69	195,92	204,42	212,36	219,47
M	Jasa Perusahaan	39,85	37,08	37,71	39,48	41,83
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	292,61	289,58	290,39	297,56	299,79
O	Jasa Pendidikan	314,69	326,24	329,92	332,84	354,12
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	93,25	102,43	108,92	109,54	116,30
Q	Jasa Lainnya	296,23	209,51	222,56	247,61	278,48
Produk Domestik Regional Bruto		4.832,89	4.722,55	4.924,57	5.181,61	5.455,81

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan

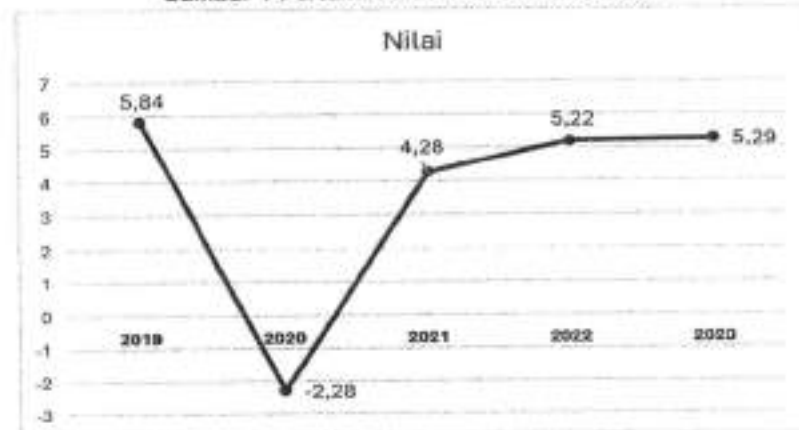




PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Pemulihan sosial ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari sebagian besar Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kota Batu merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, posisi berikutnya diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Bangkalan. Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,29 persen.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Kabupaten Paitan	5,08	-1,84	2,49	5,54	4,46
Kabupaten Ponorogo	5,01	-0,90	3,19	3,24	5,14
Kabupaten Trenggalek	5,08	-2,17	3,65	4,52	4,92
Kabupaten Tulungagung	5,32	-3,09	3,53	5,22	4,91
Kabupaten Blitar	5,12	-2,29	3,02	5,20	4,45
Kabupaten Kediri	5,06	-2,41	3,06	4,90	4,53
Kabupaten Malang	5,49	-2,68	3,12	5,13	5,00
Kabupaten Lumajang	4,61	-2,79	3,14	4,43	5,00
Kabupaten Jember	5,51	-2,98	4,00	4,53	4,93
Kabupaten Banyuwangi	5,55	-3,58	4,09	4,43	5,03
Kabupaten Bondowoso	5,30	-1,36	3,49	3,51	4,62
Kabupaten Situbondo	5,44	-2,33	3,26	4,39	4,90
Kabupaten Probolinggo	4,56	-2,12	3,35	4,52	4,73
Kabupaten Pasuruan	5,83	-2,03	4,34	5,32	5,21



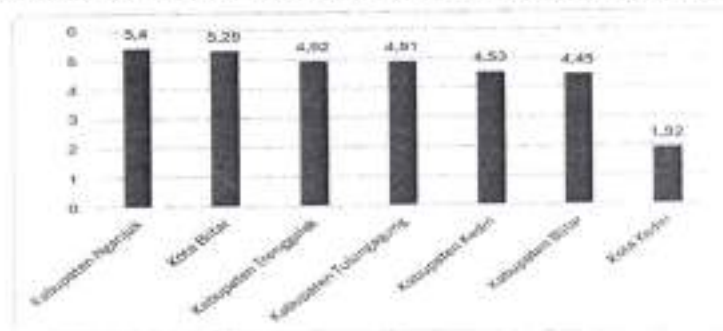
PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Sidoarjo	5,99	-3,69	4,21	7,53	0,10
Kabupaten Mojokerto	5,81	-1,11	4,12	5,82	5,15
Kabupaten Jombang	5,10	-1,98	3,24	5,37	5,04
Kabupaten Nganjuk	5,36	-1,71	3,61	4,84	5,40
Kabupaten Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12
Kabupaten Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89	4,47
Kabupaten Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49
Kabupaten Bojonegoro	6,34	-0,40	-5,54	-6,16	2,47
Kabupaten Tuban	5,14	-5,85	3,00	8,88	4,36
Kabupaten Lamongan	5,43	-2,65	3,43	5,56	4,28
Kabupaten Gresik	5,42	-3,68	3,79	7,38	4,62
Kabupaten Bangkalan	1,03	-5,59	-2,07	-1,12	1,20
Kabupaten Sampang	1,85	-0,29	0,22	2,31	2,56
Kabupaten Pamekasan	4,92	-2,54	3,41	4,68	4,96
Kabupaten Sumenep	0,14	-1,13	2,61	3,11	5,35
Kota/Municipality					
Kota Kediri	5,47	6,25	2,50	3,95	1,92
Kota Blitar	5,84	2,28	4,28	5,22	5,29
Kota Malang	5,73	2,26	4,21	6,32	6,07
Kota Probolinggo	5,94	3,64	4,06	6,12	6,04
Kota Pasuruan	5,56	4,33	3,64	5,22	5,65
Kota Mojokerto	5,65	3,69	3,65	5,56	2,79
Kota Madiun	5,69	5,34	4,79	5,52	5,80
Kota Surabaya	6,09	4,85	4,29	6,51	5,70
Kota Batu	6,51	6,46	4,04	6,16	6,19
Provinsi Jawa Timur	5,53	2,33	3,56	5,34	4,95

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Tiga daerah kabupaten/ kota di Eks-karesidenan Kediri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Nganjuk dengan pertumbuhan sebesar 5,4 persen. Diikuti Kota Blitar dengan pertumbuhan 5,29 persen. Selanjutnya Kabupaten Trenggalek sebesar 4,92 persen. Untuk kabupaten tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kota Kediri mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya.

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kediri



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Data Inflasi Kota Blitar mengadopsi Kota Kediri untuk pendekatan inflasinya dengan pertimbangan karakteristik antara kedua kota yang hampir sama.

Tabel 5 Laju Inflasi Bulanan di Kota Kediri 2021-2023

Bulan	2021	2022	2023
Januari	0,16	0,43	5,59
Februari	0,07	0,2	5,55
Maret	0,15	0,43	5,36
April	0,31	1,15	4,30
Mei	0,13	0,08	4,55
Juni	0,10	0,78	3,92
Juli	0,08	0,55	3,51
Agustus	-0,08	-0,01	3,56
September	-0,09	1,36	2,55
Oktober	0,18	5,87	2,97
November	0,25	5,93	3,06
Desember	0,74	5,76	2,64

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

d. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Pembangunan manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Kota Blitar sudah berada di level "sangat tinggi". Selama 2020–2023, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 0,80 persen per tahun, dari 78,88 pada tahun 2020 menjadi 80,78 pada tahun 2023.

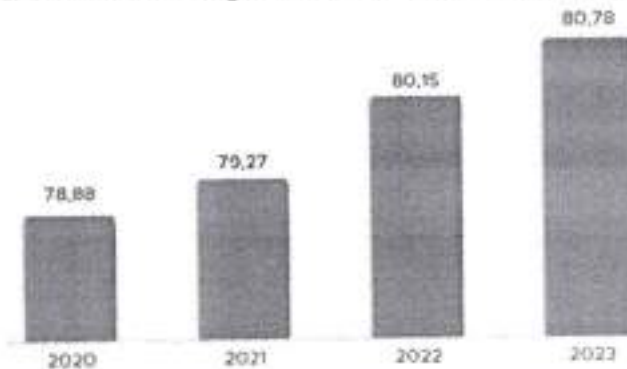
Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,49 persen dibanding tahun sebelumnya (1,75 persen) dan Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,35 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar (0,33 persen). Dua indikator dimensi pengetahuan yang mengalami pertumbuhan lambat yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2022 sebesar 1,61 persen menjadi 0,07 persen di tahun 2023. Sedangkan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 2,82 persen di tahun 2022 menjadi 1,22 persen di tahun 2023. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut

Gambar 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar, 2020–2023



Sumber : BPS Kota Blitar, 2023

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2023

Dimensi/Indikator	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup	74,39	74,46	74,71	74,97
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah	14,32	14,33	14,56	14,57
Rata-rata Lama Sekolah	10,11	10,35	10,65	10,78
Standar hidup layak				
Pengeluaran Riil per Kapita	13,733	13,816	14,058	14,548
IPM	78,88	79,27	80,15	80,78

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak.

31



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,97 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,56 menjadi 14,57 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 10,65 tahun menjadi 10,78 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 490 ribu rupiah (3,49 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret

e. Angka Kemiskinan

Secara umum, dalam periode 2003-2023 tingkat kemiskinan di Kota Blitar cenderung mengalami penurunan, dimana pada beberapa tahun tertentu mengalami kenaikan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 15,30 ribu jiwa, berkurang sebesar 4,69 ribu jiwa menjadi 10,61 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Blitar pada tahun 2003 sebesar 12,39 persen, berkurang sebesar 5,09 poin atau menjadi 7,30 persen pada tahun 2023.

Tabel 7 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin dikota Blitar, 2015-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	356.147	9,97	7,18
2016	383.021	11,22	8,03
2018	425.832	10,47	7,44
2019	456.778	10,1	7,13
2020	465.868	11,1	7,78
2021	481.229	11,33	7,89
2022	517.363	10,65	7,37

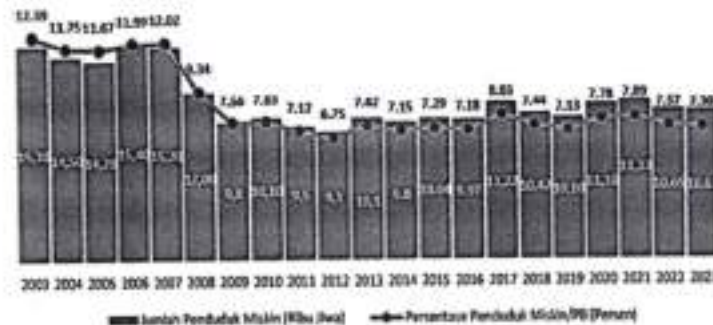


PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2023	558.280	10,61	7,3

Sumber : RPS Kota Blitar, 2024

Gambar 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Blitar



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan penurunan kemiskinan di Kota Blitar selama periode Maret 2022-Maret 2023 antara lain adalah:

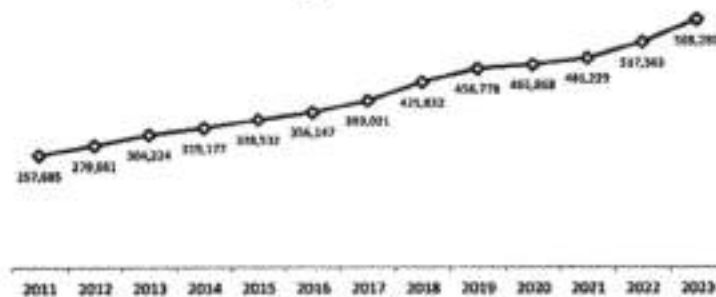
- 1) Penyaluran beras kesejahteraan daerah atau Rastrada setiap empat bulan sekali dengan total beras 40 kilogram per KPM (keluarga penerima manfaat) berdampak positif pada turunnya tingkat kemiskinan,
- 2) Keluarga penerima manfaat Rastrada di Kota Blitar tahun 2023 berkurang
- 3) Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial mengadakan pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu yang merupakan bentuk program pemberdayaan untuk warga miskin atau kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah penduduk miskin disuatu wilayah adalah Garis Kemiskinan (GK). Pengukuran GK berfungsi sebagai determinan atau penentu apakah seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin atau tidak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Blitar

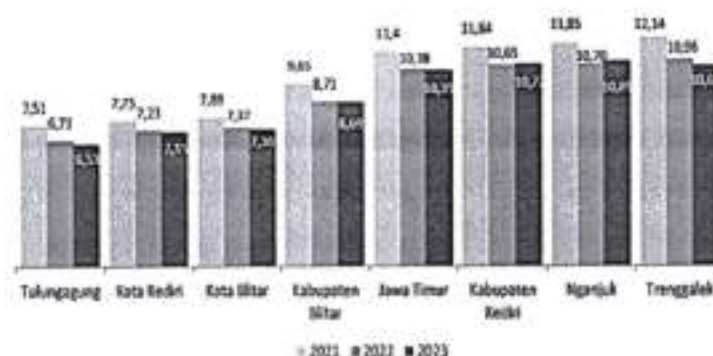


Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Besarnya angka kemiskinan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan disuatu daerah, terutama dalam upaya pengurangan Tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dapat dengan mudah dan cepat tercapai.

Angka kemiskinan di Kota Blitar sebesar 7,30 persen masih berada di bawah angka kemiskinan Jawa Timur. Sementara itu dibanding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kediri, angka kemiskinan Kota Blitar berada di urutan tiga terbawah setelah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri. Untuk posisi puncak masih diduduki Kabupaten Trenggalek.

Gambar 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kediri dan Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

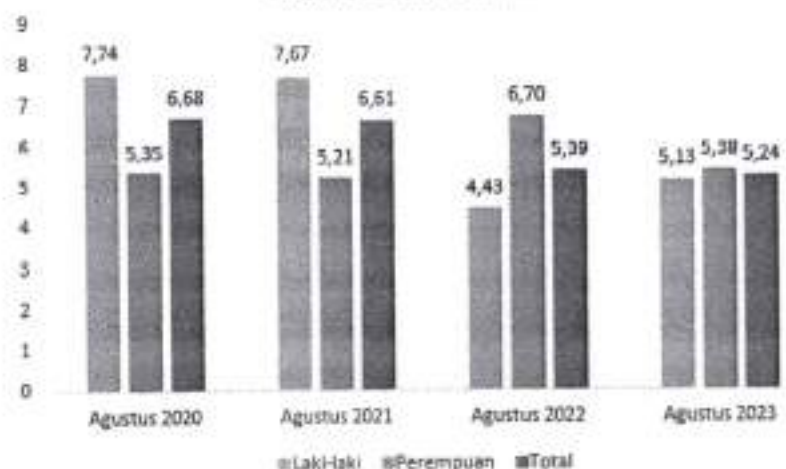


f. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengertian pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Gambar 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Tahun 2020-2023 Menurut Jenis Kelamin



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

TPT Kota Blitar selama kurun waktu 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 TPT Kota Blitar mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,22 persen poin, dari 6,61 persen pada tahun 2021 menjadi 5,39 persen di tahun 2022 dan kembali turun sebesar 0,15 persen poin di tahun 2023 menjadi 5,24 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya pemulihan kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi covid-19 di Kota Blitar.

Pada tahun 2020 dan 2021, TPT laki-laki di Kota Blitar lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, namun di tahun 2022 dan 2023 TPT perempuan sedikit lebih tinggi dibanding TPT laki-laki. Pada Agustus 2023 perbandingan TPT laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dimana TPT laki-laki sebesar 5,13 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 5,38 persen. TPT laki-laki pada Agustus 2023 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan TPT perempuan pada Agustus 2023 yang mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2022.

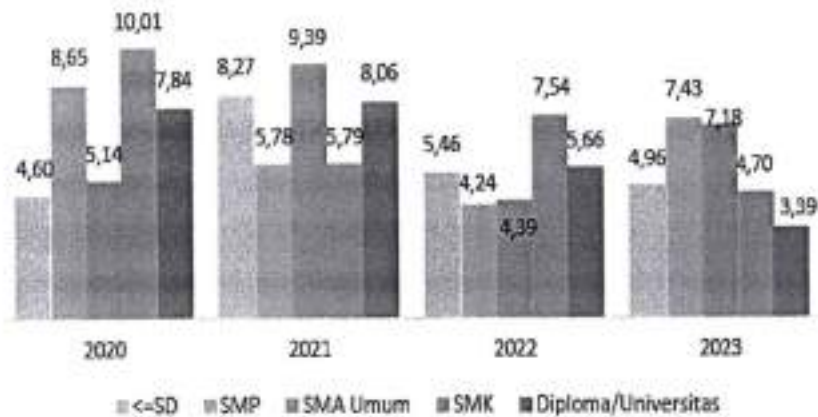
Mendapatkan pekerjaan layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka memilih untuk menganggur sementara waktu sambil menunggu pekerjaan dengan keahlian dan penghasilan yang sesuai.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2023, TPT untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 7,43 persen. Peningkatan TPT SMP dibanding tahun sebelumnya disebabkan para pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pekerja bebas sudah selesai masa kerjanya beralih ke pekerjaan lain atau sebagian lagi pada saat pencacahan sedang mencari pekerjaan lain (menganggur). TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar 7,18 persen. Peningkatan TPT jenjang SMU terjadi pada anak yang baru lulus SMU dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi namun sedang mencari pekerjaan. TPT terendah terdapat pada lulusan pendidikan Diploma/Universitas sebesar 3,39 persen. Adapun yang menganggur dari lulusan Pendidikan Diploma/Universitas adalah mereka yang baru lulus dari Pendidikan dan belum punya pengalaman bekerja.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Tahun 2020-2023 Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 2023

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	48.041	39.135	87.176
- Bekerja	45.575	37.030	82.605
- Pengangguran Terbuka	2.466	2.105	4.571
Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	11.334	22.134	33.468
Jumlah/Total	59.375	61.269	120.644
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,91	63,87	72,26
- Tingkat Pengangguran	5,13	5,38	5,24

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

7.2.2 Kebijakan Ekonomi Daerah

Bahwa untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Kebijakan perekonomian Kota Blitar mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2023 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

Dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi." Pembangunan diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro ekonomi tahun 2023 dengan mengacu pada target nasional, dan provinsi, serta dengan tetap mempedomani hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

7.2.3 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

7.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah Kota Blitar direncanakan berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi Daerah Kota Blitar terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan perkiraan atau perhitungan yang memadai atas target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 yang proyeksinya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan potensi penerimaan PAD.

a. Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan proses penyusunan naskah akademik penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, serta telah menetapkan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi atas pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi

b. Retribusi Daerah

Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Dasar hukum retribusi daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan
- 3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sedang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan evaluasi atau peninjauan Kembali terkait penerapan tarif retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
Pemanfaatan BMD didasarkan pada :
 - a) Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
 - b) Peraturan walikota nomer 88 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMD
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7.2.3.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Berdasarkan struktur APBD di Aplikasi SIPD, Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Blitar terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Blitar termasuk Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Penganggaran pendapatan transfer Kota Blitar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH direncanakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka alokasi DBH direncanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran sebelumnya.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pendapatan DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran sebelumnya

d. Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal

DID dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DID Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, atau informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DID didasarkan pada alokasi DID tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya

e. Pendapatan bagi hasil Provinsi Jawa Timur

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal APBD Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2021.

f. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (BK)

BK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari Provinsi Jawa Timur untuk tujuan tertentu.

BK dialokasikan sesuai ketetapan atau surat edaran dari Provinsi Jawa Timur. Apabila ketetapan atau surat edaran dari Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

belum ditetapkan, BK dialokasikan sesuai penerimaan tahun anggaran sebelumnya dengan memperhatikan sifat BK itu sendiri, BK Umum atau BK khusus.

7.2.3.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-lain Pendapatan Daerah direncanakan sebesar alokasi tahun anggaran sebelumnya.

7.2.4 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah tahun 2023 direncanakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah juga wajib memenuhi alokasi belanja tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) sebesar Rp294.986.741.307,00 atau 29,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.015.028.533.024,00. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja pegawai Pemerintah Kota Blitar telah memenuhi amanat yaitu tidak melebihi 30% dari APBD di luar belanja tambahan penghasilan guru.

- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun. Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah sebesar Rp 183.878.453.614,00 atau 18,12% dari total belanja daerah Rp1.015.028.533.024,00.

- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp 249.857.332.603,00 atau 24,62% dari total belanja daerah Rp 1.015.028.533.024,00. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan telah memenuhi amanat yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

gaji.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja bidang kesehatan sebesar Rp 251.724.387.439,00 atau 35,94% dari total belanja daerah diluar belanja gaji sebesar Rp 700.340.872.376,00. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja bidang kesehatan telah memenuhi amanat yaitu paling sedikit 10% (dua puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja gaji.

- e. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pemenuhan anggaran pengawasan Kota Blitar juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar Rp. 2.780.734.836,00 atau sebesar 0,27% dari total belanja daerah sebesar Rp 1.015.028.533.024,00.

- f. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar 2.842.716.630,00 atau sebesar 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp 1.015.028.533.024,00.

- g. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp 50.018.087.354,00 atau 6,02% dari total pendapatan setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar Rp 831.524.018.523,00.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
- b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan UPTD nya.
- c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. SPM urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2024, oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak dimaksud, Pemerintah Kota Blitar membentuk Dana Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pemerintah Kota Blitar juga menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022-2025 pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri.



Selanjutnya Belanja Daerah dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi pembangunan Walikota Blitar 2021-2026 “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tema pembangunan kota Blitar tahun 2023 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi” yang dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

- a. Prioritas 1: Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.
- b. Prioritas 2: Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi.
- c. Prioritas 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Prioritas 4: Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia.
- e. Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi.
- f. Prioritas 6: Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis

7.2.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan





penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) dan pencairan dana cadangan untuk pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. SILPA yang terbentuk bersumber dari pelampauan pendapatan dan penghematan (sisa) belanja daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 audited sebesar Rp.119.055.042.620,07.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Penyediaan dana hibah Kegiatan Pilkada wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama, maka perlu dilakukan tambahan sumber penerimaan daerah melalui pencairan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 pada Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran.

7.2.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan tetap untuk pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



7.2.6 Strategi Pencapaian

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target pajak daerah tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- 1) Penggalan dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah. Termasuk strategi untuk penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta penilaian secara individu terhadap objek pajak
- 2) Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara *online* maupun tradisional. Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara online (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Tokopedia, Indomart, Alfamart) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran
- 3) Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah, termasuk penilai individu atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- 5) Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan wajib pajak, petugas pelayanan pajak dan koordinator pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- 6) Peningkatan inovasi IT dalam pelayanan pajak daerah.
- 7) Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 8) Pemenuhan kualitas dan kuantitas yang memadai SDM pengelola pajak daerah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 9) Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah, DPRD, SKPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya.
- 10) Peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak daerah serta pemanfaatan pajak daerah.
- 11) Peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah.
- 12) Peningkatan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

Sedangkan strategi untuk pencapaian target retribusi daerah dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 2) Optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah, diantaranya penyewaan gedung pemerintah dan fasilitas umum.
- 3) Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana retribusi daerah.
- 4) Peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi daerah, terutama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 6) Peningkatan sosialisasi, monitoring, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan penegakan hukum dalam pengelolaan retribusi daerah.
- 7) Melakukan evaluasi/penilaian kembali penerapan tarif retribusi.

Strategi untuk mencapai target Lain-lain PAD yang Sah utamanya adalah melalui optimalisasi pengelolaan hasil usaha Badan Layanan Umum Milik Daerah RSUD Mardi Waluyo Blitar.

b. Pendapatan Transfer



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan transfer diproyeksikan sesuai alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi Jawa Timur. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan Dana Insentif Daerah dan Bantuan Keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik, perbaikan LPPD dan e-Government.
- 2) Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus bergantung sepenuhnya pada penetapan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Blitar akan terus berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penyediaan pelaporan tepat waktu dan reliabel. Mengupayakan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan proposal atau laporan terkait kondisi, prestasi, potensi Kota Blitar.

7.2.7 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dari sisi pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp928.568.700.011,69 dari anggaran Pendapatan sebesar Rp 910.973.490.403.93. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp171.595.683.831,16 atau 101,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 168.359.025.901,00 dan dari Pendapatan Transfer dengan realisasi 747.967.798.768,00 atau 101,96% dari anggaran sebesar Rp733.587.394.531,45. Sedangkan untuk Lain – lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp9.005.217.412.53 atau 99,76% dari target sebesar Rp9.027.069.971,48.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Sedangkan Belanja terealisasi sebesar Rp958.762.098.374,36 atau 94,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.015.028.533.024,00.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dari uraian di atas dapat kami rinci untuk pendapatan pada tabel berikut :

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	PENDAPATAN	910.973.490.403,93	928.568.700.011,69	17.595.209.607,76	101,93
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.359.025.901,00	171.595.683.831,16	3.236.657.930,16	101,92
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.416.787.696,00	56.381.185.255,00	7.962.397.557,00	116,44
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.115.260.641,00	7.830.222.821,23	(285.037.819,77)	96,49
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.042.119.575,00	1.042.119.574,58	(0,44)	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.782.857.987,00	106.342.156.180,37	(4.440.701.806,63)	95,99
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	168.359.025.901,00	171.595.683.831,16	3.236.657.930,16	101,92
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	733.587.394.531,45	747.967.798.768,00	14.380.404.236,55	101,96
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	589.150.072.818,45	586.700.318.147,00	(9.184.330.039,00)	99,58
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	(2.803.059.060,00)	97,06
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	2.616.526.000,00	100,63
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus - Fisik	11.081.818.000,00	9.770.554.691,00	(1.311.263.309,00)	88,17
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	68.367.653.880,45	67.415.695.578,00	(951.958.302,45)	98,61
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	589.150.072.818,45	586.700.318.147,00	(2.449.754.671,45)	99,58
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	0,00	100,00
1.2.2.1	Dana Intensif Daerah	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	16.830.158.908,00	118,52
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	89.365.629.092,00	106.195.788.000,00	16.830.158.908,00	118,83
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	16.830.158.908,00	118,52
	Total Pendapatan Transfer	733.587.394.531,45	747.967.798.768,00	14.380.404.236,55	101,96
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	(21.852.558,95)	99,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	(21.852.558,95)	99,76
	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	(21.852.558,95)	99,76
	JUMLAH PENDAPATAN	910.973.490.403,93	928.568.700.011,69	17.595.209.607,76	101,93

Sedangkan realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
2	BELANJA	1.015.028.533.024,00	958.762.098.374,36	(56.266.434.649,64)	94,46
2.1	BELANJA OPERASI	858.893.275.739,00	819.710.314.933,36	(39.182.960.805,64)	95,44
2.1.1	Belanja Pegawai	328.600.991.307,00	314.885.852.902,00	(13.735.138.405,00)	95,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	(24.169.310.267,64)	94,83
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	42.000.565.057,00	40.770.317.144,00	(1.230.247.913,00)	97,07
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	(48.264.220,00)	99,77
	Jumlah Belanja Operasi	858.893.275.739,00	819.710.314.933,36	(39.182.960.805,64)	95,44
2.2	BELANJA MODAL	141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	(4.404.051.295,00)	96,88
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.533.367.033,00	26.322.308.618,00	(2.211.058.415,00)	92,25
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	(1.083.013.286,00)	98,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	(1.038.697.913,00)	97,76
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	(71.281.681,00)	96,71
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	(4.404.051.295,00)	96,88



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	(12.679.422.549,00)	15,99
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	(12.679.422.549,00)	15,99
	Jumlah Belanja Tak Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	(12.679.422.549,00)	15,99
2.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	kpd Desa Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.015.028.533.024,00	958.762.098.374,36	(78.868.884.731,91)	94,46
	Surplus/(Defisit)	(104.055.042.620,07)	(30.193.398.362,67)	88.869.374.403,00	29,02

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan kebijakan akuntansi Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

7.4.2 Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

7.4.3 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar yaitu basis akrual, kecuali Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas di rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD).

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
- b. Klasifikasi menurut fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- d. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- e. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu

7.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplusanggaran.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



7.4.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Lo

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pendapatan-LO diakui pada saat: Timbulnya hak atas pendapatan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu :

- a. pendapatan asli daerah,
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan serta merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



7.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Terjadinya konsumsi aset; atau
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur dan dicatat sebesar nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta sumberdaya ekonomi yang dikonsumsi.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Rincian beban per perangkat daerah;
- Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.9 Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

- a. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya);
- b. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas;
- c. jumlah dan rincian kas yang dibatasi penggunaannya;
- d. selisih kas;
- e. selisih kurs atas kas;
- f. kurs yang digunakan pada tanggal neraca; dan atau
- g. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diukur sebesar nilai nominal.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Besaran tarif penyusutan piutang ditentukan dari penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kualitas Piutang Lancar
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar
- c. Kualitas Piutang Diragukan
- d. Kualitas Piutang Macet

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)

NO	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1.	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2.	Piutang Retribusi Daerah	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lancar	K L	R	R	Macet
4.	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	R	Macet



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
5.	Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan/Ganti Rugi	Lancar	KL	R	R	Macet
6.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Lancar	KL	R	R	Macet
7.	Piutang Pendapatan Transfer	Lancar	KL	R	R	Macet

Keterangan : KL = Kurang Lancar, R= Diragukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Tabel 12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		0 s.d 1 tahun	>1 s.d 2 tahun	> 2 s.d 5 tahun	>5 tahun
1.	Piutang Pajak Daerah	0 %	10 %	50 %	100%
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan	0 %	10 %	50 %	100%



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		0 s.d 1 tahun	>1 s.d 2 tahun	> 2 s.d 5 tahun	>5 tahun
	Daerah yang Dipisahkan				
3.	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	50 %	100%
4.	Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0 %	10 %	50 %	100%
5.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0 %	10 %	50 %	100%
6.	Piutang Pendapatan Transfer	0 %	10 %	50 %	100%

Berdasarkan peraturan perundang-undangan masa kadaluarsa untuk Piutang Retribusi adalah 3 tahun, maka penyisihan piutangnya sebagai berikut:

Tabel 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Retribusi Daerah

NO	Uraian	Penyisihan Piutang			
		0 s/d 1 tahun	1 s/d 2 tahun	2 s/d 3 tahun	> 3 tahun
1	Piutang Retribusi	0%	10%	50%	100%

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan pada akun beban, akumulasi penyisihan dan ekuitas.

Pencatatan piutang yang ternyata di kemudian hari terdapat Bukti Penerimaan yang telah diterima di Rekening Umum Kas Daerah maka dicatat sebagai koreksi lebih catat atas Piutang.

Pencatatan penghapusan piutang berdasarkan SK Penghapusan Piutang oleh Walikota Blitar sebagai dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusan piutang.

Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang;
- Jenis piutang;
- Umur piutang dan penyisihan; dan
- Informasi yang diperlukan lainnya.



7.4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau
- barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan Metode Periodik. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit. Persediaan dinilai dengan metoda harga pembelian terakhir. Pemeriksaan fisik persediaan dilaksanakan tiap akhir periode. Persediaan disajikan di Neraca pada kelompok aset lancar.

7.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi investasi jangka pendek dan investasi jangka Panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

7.4.12.1 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dapat diperjualbelikan/dicairkan;
- b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. berisiko rendah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash*



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dividend) diakui pada saat diperoleh haknya sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek disajikan sesudah akun kas di neraca.

Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- b. Obligasi (SUN, ORI, atau SBI); dan Saham.

7.4.12.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi jangka panjang nonpermanen dan investasi jangka panjang permanen.

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- 3) investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penychatan/penyelamatan perekonomian.

- 4) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pinjaman kepada BUMD.
 - 5) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana yang disalurkan kepada pemerintah kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat tersebut yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
 - 6) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan <20% tetapi Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka panjang pada CaLK adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

7.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Blitar dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
- b. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
- c. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selaintanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan.

Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar dikurangi nilai residu.

Aset tetap disajikan pada Neraca pada kelompok aset.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah; Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin; mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
- c. Gedung dan Bangunan; mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya; mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan. mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;



- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

7.4.14 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan keuangan.

KDP diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai KDP, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. masih dalam proses pembangunan; dan
- f. belum siap dipakai.

KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

KDP diukur sebesar biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca pada kelompok aset tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP di CaLK sebagai berikut:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;



- e. Retensi;
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset non keuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Dapat diidentifikasi;
- f. Dapat diukur dengan handal;
- g. Dapat dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari duabelas bulan.

ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilaipendaftarannya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periodetahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkansebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

aset tersebut selesai dan siap dipakai. ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. ATB yang diamortisasi adalah ATB yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti paten, hak cipta, waralaba selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.

Metode amortisasi adalah metode garis lurus. Amortisasi setiap periode diakui sebagaibeban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun akumulasi amortisasi ATB. ATB disajikan di Neraca pada kelompok asetlainnya.

7.4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Aset Tidak Berwujud; aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas
- b. Tagihan Penjualan Angsuran; Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- e. Aset Lain-lain. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Kas yang dibatasi penggunaannya
- f. Kas yang dibatasi penggunaannya; adalah kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Aset lainnya diakui pada saat:

- a. Memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa yang akan datang
- b. Nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengukuran aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan gantirugi keuangan daerah, kemitraan dengan pihak ketiga diukur sebesar nilai nominal.

Pengukuran aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna (BSG) diukur sebesar harga perolehan. Khusus untuk aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah (BGS) diukur berdasarkan nilai wajarnya.

Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku. Aset lainnya disajikan di Neraca setelah akun Dana Cadangan.



7.4.17 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Dokumen sumber atau penanda untuk pengakuan dana cadangan adalah SP2D LS.

Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku.

Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diakui sebagai Pendapatan-LO.

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada bagian aset setelah kelompok aset tetap. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian dana cadangan pada CaLK adalah:

- dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- tujuan pembentukan dana cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- hasil yang diperoleh dari dana cadangan;
- sumber dana cadangan;
- tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan;
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.



7.4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:

- a. terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
- b. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal. Kewajiban jangka panjang



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

diakui pada saat:

- 1) terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan

- 2) nilai kewajiban dapat diukur dengan handal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

- c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*local government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d) Kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (*local government-acknowledge events*)

Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban setelah kewajiban jangka pendek.

Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- g. Biaya pinjaman :



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
- 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan
- 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

7.4.19 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/defisit-LRA;
- 4) Penerimaan pembiayaan;
- 5) Pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pembiayaan neto; dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang dari kegiatan BLUD;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Aset lainnya;
- 8) Kewajiban jangka pendek;
- 9) Kewajiban jangka panjang; dan
- 10) Ekuitas.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d. Laporan

Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan nonoperasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos Luar Biasa; dan
- 7) Surplus/Defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya; dan
- b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- c) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Penggabungan laporan keuangan badan layanan umum ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 2) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 4) Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 5) Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun- akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

7.4.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi,



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.21 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya disajikan pada laporan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan

Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.



7.4.22 Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.23 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, kegiatan, atau satuan kerja terkait dengan tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian operasi yang



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.24 Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang suka diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas.
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang.
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisiaset/kewajiban.

Hakikat jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

7.5.1.1 Pendapatan LRA

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar sebesar Rp928.568.700.011,69 atau 101,95% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan sebesar Rp910.973.490.403,93. Realisasi Pendapatan Tahun 2023 naik 1,09% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp918.568.210.280,52. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp171.595.683.831,16 atau 101,92% dari anggaran sebesar Rp168.359.025.901. Realisasi PAD Tahun 2023 naik sebesar 9,81% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp156.268.172.003,52. Adapun rincian penerimaan PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Pajak Daerah	48.418.787.698,00	56.381.185.255,00	45.120.805.461,10

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp56.381.185.255,00 atau 116,44% dari anggaran sebesar Rp48.418.787.698,00 yang naik 24,96% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp45.120.805.461,10. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 14 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	BPKAD	1.137.717.025,00	1.347.019.263,00	118,40	1.191.988.013,00	155.031.250,00	13,01
2	Pajak Restoran	BPKAD	5.442.908.673,00	6.084.032.277,00	111,78	5.760.162.018,00	323.870.259,00	5,62
3	Pajak Hiburan	BPKAD	1.099.162.000,00	1.270.887.249,00	115,62	1.523.911.685,00	(253.024.436,00)	(16,60)
4	Pajak reklame	BPKAD	414.500.000,00	553.919.657,00	133,64	518.239.489,10	35.680.167,90	6,88
5	Pajak Penerangan Jalan	BPKAD	11.500.000.000,00	12.076.178.813,00	105,01	11.671.338.092,00	404.840.721,00	3,47
6	Pajak Parkir	BPKAD	459.500.000,00	505.470.199,00	110,00	476.750.657,00	28.719.542,00	6,02
7	Pajak Air Tanah	BPKAD	65.000.000,00	71.294.153,00	109,68	58.748.912,00	14.545.241,00	25,63
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BPKAD	14.800.000.000,00	15.098.444.047,00	102,02	13.900.098.727,00	1.198.345.320,00	8,62
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPKAD	13.500.000.000,00	19.373.939.597,00	143,51	10.021.567.868,00	9.352.371.729,00	93,32
Jumlah			48.418.787.696,00	56.381.185.255,00	116,44	45.120.805.461,10	11.260.379.793,90	24,96

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah di Kota Blitar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar. Kebijakan Umum Pajak Daerah Kota Blitar mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Ha atas Tanah dan Bangunan.
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- e. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan keputusan atas permohonan pengurangan PBB Pedesaan dan Perkotaan kepada Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- f. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Blitar.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- g. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelayanan Pajak Daerah melalui Sistem dan Transaksi Elektronik.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan *Official Assesment* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah. *Official Assesment* diterapkan pada pada Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.

Pada Tahun 2023 dari kesembilan jenis pajak daerah di Kota Blitar yang terdapat penurunan realisasi adalah Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak hiburan yang berasal dari tontonan film yaitu bioskop CGV yang tinggi rendah penerimaan pajaknya tergantung dari jumlah penonton bioskop tersebut

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
2. Retribusi Daerah	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	8.115.260.641,00	7.830.222.821,23	6.777.531.072,50

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.830.222.821,23 atau 96,40% dari anggaran sebesar Rp8.115.260.641,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 naik 15,53% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp6.777.531.072,50. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
A.	Retribusi Jasa Umum							
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	618.449.440,00	760.861.700,00	123,03	562.014.700,00	198.847.000,00	35,38
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	OPD Penghasil	395.107.200,00	363.508.000,00	92,00	342.634.000,00	20.874.000,00	5,09
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	1.891.873.000,00	1.353.561.000,00	71,55	1.315.570.000,00	37.991.000,00	2,89
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.105.471.000,00	962.385.000,00	87,06	844.654.000,00	117.731.000,00	13,94
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	427.227.901,00	342.409.700,00	80,15	392.750.200,00	(50.340.500,00)	(12,82)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup	70.864.800,00	84.625.000,00	119,42	40.809.000,00	43.816.000,00	107,37
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	OPD Penghasil	0,00	15.240.000,00	0,00	11.826.000,00	3.414.000,00	28,87
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.668.000,00	44.471.900,00	667,15	40.632.000,00	3.839.900,00	9,45
Jumlah A			4.515.659.341,00	3.927.062.300,00	86,97	3.556.889.900,00	376.172.400,00	10,59
B.								
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	OPD Penghasil	1.047.127.700,00	1.202.634.870,00	114,85	1.148.246.252,50	54.388.617,50	4,74
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	142.808.000,00	256.192.651,23	179,40	187.528.320,00	68.664.331,23	36,62
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	127.040.400,00	127.414.500,00	100,29	121.553.000,00	5.861.500,00	4,82
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	OPD Penghasil	700.500.000,00	558.133.000,00	79,68	467.975.000,00	90.158.000,00	19,27
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	356.889.200,00	384.075.000,00	107,62	373.903.000,00	10.172.000,00	2,72
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	1.073.843.000,00	1.002.168.500,00	93,33	855.929.000,00	146.239.500,00	17,09
Jumlah B			3.448.208.300,00	3.530.618.621,23	102,39	3.155.134.572,50	168.256.948,73	5,33
C.								
1	Retribusi Persetujuan	Dinas Pekerjaan	150.000.000,00	371.870.000,00	247,91	70.858.600,00	301.011.000,00	424,81



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bangunan Gedung	Umum dan Penataan Ruang						
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	1.393.000,00	672.000,00	48,24	648.000,00	24.000,00	3,70
Jumlah C			151.393.000,00	372.542.000,00	246,08	71.506.600,00	301.035.400,00	421,00
Jumlah keseluruhan (A+B+C)			8.115.260.641,00	7.830.222.821,23	96,49	6.777.531.072,50	1.052.691.748,73	15,53

Pengelolaan Retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Blitar. Secara umum terdapat kenaikan realisasi retribusi daerah sebesar 15,53% dari tahun lalu. Realisasi Retribusi parkir dan tempat rekreasi tergantung jumlah pengunjung. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan disebabkan adanya wacana retribusi Uji KIR yang dihapuskan tahun 2024 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengalami kenaikan karena adanya kenaikan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan dampak masa transisi peraturan dari Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		1.042.119.575,00	1.042.119.574,56	885.196.947,24

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pos penerimaan untuk menampung pendapatan dari penyertaan modal berupa deviden tunai. Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Peraturan daerah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Blitar memiliki Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Patria, Perumda BPR Artha Praja Kota Blitar dan PT Bank Jatim. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2023 merupakan penerimaan *cash dividen*/bagian laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim Tahun Buku 2022 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tanggal 12 April 2023 No 25 yang telah disetor ke Kas Daerah Kota Blitar pada Tahun 2023 sebesar Rp901.844.289,56 pada Tanggal 12 Mei 2023 dan bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perumda BPR Artha Praja sebesar Rp 140.275.285,00 pada tanggal 11 Mei 2023 . Adapun Perumda Tirta Patria belum menghasilkan deviden pada Tahun 2022 mengingat kondisi keuangan yang merugi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp1.042.119.574,56 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 naik 17,73% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp885.196.947,24.

4	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
-		110.782.857.987,00	106.342.156.180,37	103.484.638.522,68

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp106.342.156.180,37 atau 95,99% dari anggaran sebesar Rp110.782.857.987,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 naik 2,76% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp103.484.638.522,68. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 16 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
A	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan							
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	BPKAD	523.779.500,00	463.780.436,00	88,54	83.200.000,00	380.580.436,00	457,43
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	43.487.700,00	63.965.000,00	147,09	55.330.000,00	8.635.000,00	15,61
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	BPKAD	1.670.000,00	119.394.333,00	7.149,36	0,00	119.394.333,00	0,00
	Jumlah A		568.937.200,00	647.139.769,00	113,75	138.530.000,00	508.609.769,00	367,15
B	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan							
	Hasil Sewa BMD	SKPD Penghasil	2.875.451.339,00	2.257.366.720,00	78,50	2.419.030.448,00	(161.663.728,00)	(6,68)
	Jumlah B		2.875.451.339,00	2.257.366.720,00	78,50	2.419.030.448,00	(161.663.728,00)	(6,68)
C	Jasa Giro							
	Jasa Giro Kas Daerah	BPKAD	1.409.302.000,00	935.421.783,89	66,37	1.162.826.093,25	(227.404.309,36)	(19,56)
	Jumlah C		1.409.302.000,00	935.421.783,89	66,37	1.162.826.093,25	(227.404.309,36)	(19,56)
D	Pendapatan Bunga							
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	BPKAD	1.630.731.400,00	2.418.827.891,74	148,33	1.150.298.106,38	1.268.529.785,36	110,28
	Jumlah D		1.630.731.400,00	2.418.827.891,74	148,33	1.150.298.106,38	1.268.529.785,36	110,28
E	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah							
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	BPKAD	59.356.250,00	182.429.260,00	307,35	103.872.900,00	78.556.360,00	75,63
	Jumlah E		59.356.250,00	182.429.260,00	307,35	103.872.900,00	78.556.360,00	75,63
F	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain							
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	BPKAD	2.500,00	395.204,16	15.808,17	103.277.535,35	(102.882.331,19)	(99,62)
	Jumlah F		2.500,00	395.204,16	15.808,17	103.277.535,35	(102.882.331,19)	(99,62)
G	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan							
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan	BPKAD	66.240.200,00	205.101.199,33	309,63	310.576.766,48	(105.475.567,15)	(33,86)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenalkan/ Penurunan	%
	Pelaksanaan Pekerjaan							
	Jumlah G		66.240.200,00	205.101.199,33	309,63	310.578.768,48	(108.478.567,16)	(33,96)
H	Pendapatan denda Pajak Daerah							
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	BPKAD	462.190,00	2.904.784,52	628,48	2.225.960,00	678.824,52	30,50
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	BPKAD	1.185.500,00	5.560.287,48	469,02	1.597.294,80	3.962.992,68	248,11
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	BPKAD	631.600,00	2.300.903,00	364,30	4.500,00	2.296.403,00	51031,18
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	BPKAD	0,00	24.572.344,60	0,00	0,00	24.572.344,60	100,00
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	BPKAD	152.700,00	531.347,00	347,97	7.200,00	524.147,00	7279,82
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	BPKAD	725.700,00	2.129.361,80	293,42	38.275,00	2.091.086,80	5463,32
	Pendapatan Denda PBBP2	BPKAD	193.050,00	79.987.564,00	41433,60	113.352.518,00	(33.364.954,00)	(29,43)
	Jumlah H		3.350.740,00	117.986.592,40	3521,21	117.225.747,60	760.844,80	0,65
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	BPKAD	0,00	46.979.563,00	0,00	0,00	46.979.563,00	100,00
I	Pendapatan dari Pengembalian							
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	BPKAD	112.180.550,00	140.592.728,00	125,33	4.432.346,57	136.160.381,43	3.071,97
	Jumlah I		112.180.550,00	140.592.728,00	125,33	4.432.346,57	136.160.381,43	3.071,97
J	Pendapatan dari BLUD	RSUD Mardi Waluyo	103.786.538.147,00	98.850.950.817,36	95,24	97.685.063.884,13	1.165.886.933,23	1,19
K	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Dinkop	25.340.661,00	21.251.034,22	83,86	28.478.744,19	(7.227.709,97)	25,38
L	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan							
	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	BPKAD	0,00	3.000.000,00	0,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(16,67)
	Jumlah L		0,00	3.000.000,00	0,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(16,67)
M	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		245.427.000,00	514.713.617,27	209,72	257.425.950,73	257.287.666,54	99,95
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah (A s/d O)		110.782.857.987,00	106.342.156.180,37	95,99	103.484.638.522,68	2.857.517.657,69	2,76



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lain-lain PAD yang Sah merupakan kategori Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kelompok pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari :

- 1) Penjualan peralatan mesin atas penjualan alat angkutan dan peralatan kantor melalui lelang di KPKNL Malang, Penjualan aset lainnya atas penjualan hasil bongkaran Labkesda, hasil lelang aset tidak terpakai dan hasil penjualan scrap peralatan mesin/rosok di BPKAD;
- 2) Penjualan aset tetap lainnya atas penjualan hewan dan tanaman di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pendapatan hasil sewa BMD dibeberapa SKPD yaitu:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yaitu penerimaan tagihan listrik dan air penyewa Rusunawa
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu pendapatan Sewa *Coldstorage* RPH Dimoro
- 3) Dinas Lingkungan Hidup yaitu pendapatan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Blitar yang berlokasi di taman kehati dan sewa tanah aloon-aloon
- 4) Dinas Perhubungan yaitu pendapatan sewa kios di Terminal Tipe C Pemkot Blitar
- 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu Pendapatan Jasa Penyiaran dan Informasi di Radio Mahardika
- 6) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu pendapatan sewa Gedung KUD
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu pendapatan sewa gedung kesenian Aryo Blitar, sewa kios istana gebang, sewa Waterpark Sumberudel, Sewa Kios dan *Food Court* Gedung Kesenian Aryo Blitar
- 8) Bagian Umum yaitu pendapatan sewa kantin
- 9) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu penerimaan sewa tanah dan bangunan oleh BPR Artha Praja, sewa tanah masjid Hidayatulloh, sewa lahan di taman kebonrojo dan lapangan sananwetan untuk Menara Telekomunikasi dan sewa ruang milik jalan (RUMJA) untuk pembangunan dan penempatan tiang jaringan utilitas dalam rangka penempatan kabel udara fiber optik



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 10) Kecamatan Kepanjenkidul yaitu pendapatan sewa tanah bengkok
 - 11) Kecamatan Sukorejo yaitu pendapatan sewa tanah bengkok dan Sewa Menyewa Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karang Sari
 - 12) Kecamatan Sananwetan yaitu pendapatan sewa tanah bengkok
- c. Pendapatan Jasa Giro mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., dan Perumda BPR Artha Praja pada BPKAD.
 - d. Pendapatan Bunga merupakan realisasi pendapatan bunga deposito pada BPD Jatim, BPR Jatim, BRI dan BNI di BPKAD.
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada BPKAD yaitu atas temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 di Sekretariat DPRD yaitu kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dan temuan pemeriksaan BPK RI TA 2022 di BKPSDM atas kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan penerimaan atas:
 - 1) Kelebihan pembayaran pajak daerah Rp248.431,00 atas pajak PBB pada BPKAD
 - 2) Kelebihan pembayaran retribusi daerah Rp2.000,00
 - a) kelebihan bayar Retribusi Penyewaan Tanah an Achmad Fanany-Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp1.000,00
 - b) kelebihan bayar kelebihan bayar Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp1.000,00
 - 3) Kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang Sah Rp2.492,16 pada BPKAD
 - 4) Sisa Lain-lain Potongan Gaji Rp16.545,00 pada BPKAD
 - 5) Penerimaan dari pengembalian JKK dari PT Taspen Rp6.384,00 dan Penerimaan dari pengembalian JKM dari PT Taspen Rp19.152,00 karena ada pegawai yang meninggal



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan Pendapatan Denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa SKPD yaitu :
- 1) Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Blitar Tahap 2 oleh CV.Kita Bisa Maju pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Penerimaan denda keterlambatan pengadaan tambahan kesejahteraan keluarga CV.Nrimo Ing Pandum pada Dinas Sosial
 - 3) Penerimaan denda keterlambatan atas pengadaan kain seragam oleh CV. Widya Sarana pada SMPN 6 Blitar
 - 4) Penerimaan denda keterlambatan pengadaan kain seragam siswa oleh CV. Widya Sarana pada SMPN 7 Blitar
 - 5) Penerimaan denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan kain seragam siswa TK Negeri pada Dinas Pendidikan
 - 6) Penerimaan denda keterlambatan pengadaan kain seragam siswa sd negeri kelas 1 dan 4 oleh CV.Widya Sarana pada Dinas Pendidikan
 - 7) Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan seragam olahraga oleh CS. Sinar Jaya pada SMPN 7 Blitar
 - 8) Penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan paket pekerjaan pembangunan taman plosokerep tahap 2 oleh CV. Nusantara Sejati pada Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan paket pengadaan beras sejatera daerah (Rastrada) PT. Sucipto Hapsari Pambudi pada Dinas Sosial
 - 10) Penerimaan denda atas keterlambatan paket pekerjaan pembangunan taman sananwetan tahap 2 oleh CV.Elang Perkasa pada Dinas Lingkungan Hidup
 - 11) Penerimaan atas denda keterlambatan terhadap paket pekerjaan pemasangan paving dan pemeliharaan taman oleh CV. Mutiara Sejati pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 12) Penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan pengadaan gamelan oleh CV Bima Inti Perkasa pada Dinas Pendidikan
 - 13) Penerimaan atas denda keterlambatan paket pekerjaan pembangunan tanggul cell TPA oleh CV.Pilar Mas pada Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 14) Penerimaan atas denda keterlambatan pembangunan pujasera dan fasilitas penunjang kawasan terpadu bendo oleh CV. Putra Indah pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 15) Penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung SMPN 6 Kota Blitar oleh PT. Rajendra Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 16) Penerimaan atas denda keterlambatan pembangunan gedung kantor Kelurahan Tlumpu oleh CV. Putra Indah pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 17) Penerimaan atas denda keterlambatan rehabilitasi Jl. kawasan perumahan pakunden dan kawasan perumahan *green house* pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan denda yang berasal dari sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak daerah pada BPKAD.
- i. Pendapatan dari Pengembalian pada BPKAD merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan, pengembalian kelebihan belanja BTT atas santunan kematian, pengembalian belanja belanja bok atas belanja mamin rapat dan bahan bakar & pelumas serta pengembalian kelebihan bayar bea balik nama untuk pembelian ambulance .
- j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan bunga dari investasi dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- k. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan merupakan Pendapatan Denda keterlambatan atas pembayaran sewa menyewa tanah Masjid Hidayatulloh pada BPKAD.
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Pendapatan pengembalian untuk kekurangan volume paket pekerjaan, denda keterlambatan penyampaian Laporan PPAT, pengembalian atas kelebihan belanja, kelebihan penggunaan Dana BOS atas temuan pemeriksaan BPK-RI.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp747.967.798.768,00 atau 101,98% dari anggaran sebesar Rp733.587.394.531,45. Pendapatan Transfer Tahun 2023 turun 0,83% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Transfer Tahun 2022 sebesar Rp754.236.961.873,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah.

1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		589.150.072.818,45	586.700.318.147,00	595.884.648.186,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp586.700.318.147,00 atau 99,61% dari anggaran sebesar Rp589.150.072.818,45. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 turun 1,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp595.884.648.186,00. Dasar hukum Alokasi Dana Perimbangan adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik.

- a. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan uraian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

- a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
- b) DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lain-lain PAD yang Sah merupakan kategori Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kelompok pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari :
 - 1) Penjualan peralatan mesin atas penjualan alat angkutan dan peralatan kantor melalui lelang di KPKNL Malang, Penjualan aset lainnya atas penjualan hasil bongkaran Labkesda, hasil lelang aset tidak terpakai dan hasil penjualan scrap peralatan mesin/rosok di BPKAD;
 - 2) Penjualan aset tetap lainnya atas penjualan hewan dan tanaman di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pendapatan hasil sewa BMD di beberapa SKPD yaitu:
 - 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yaitu penerimaan tagihan listrik dan air penyewa Rusunawa
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu pendapatan Sewa *Coldstorage* RPH Dimoro
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup yaitu pendapatan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Blitar yang berlokasi di taman kehati dan sewa tanah aloon-aloon
 - 4) Dinas Perhubungan yaitu pendapatan sewa kios di Terminal Tipe C Pemkot Blitar
 - 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu Pendapatan Jasa Penyiaran dan Informasi di Radio Mahardika
 - 6) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu pendapatan sewa Gedung KUD
 - 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu pendapatan sewa gedung kesenian Aryo Blitar, sewa kios istana gejang, sewa Waterpark Sumberudel, Sewa Kios dan *Food Court* Gedung Kesenian Aryo Blitar
 - 8) Bagian Umum yaitu pendapatan sewa kantin
 - 9) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu penerimaan sewa tanah dan bangunan oleh BPR Artha Praja, sewa tanah masjid Hidayatulloh, sewa lahan di taman kebonrojo dan lapangan sananwetan untuk Menara Telekomunikasi dan sewa ruang milik jalan (RUMJA) untuk pembangunan dan penempatan tiang jaringan utilitas dalam rangka penempatan kabel udara fiber optik



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 10) Kecamatan Kepanjenkidul yaitu pendapatan sewa tanah bengkok
 - 11) Kecamatan Sukorejo yaitu pendapatan sewa tanah bengkok dan Sewa Menyewa Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karang Sari
 - 12) Kecamatan Sananwetan yaitu pendapatan sewa tanah bengkok
- c. Pendapatan Jasa Giro mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., dan Perumda BPR Artha Praja pada BPKAD.
- d. Pendapatan Bunga merupakan realisasi pendapatan bunga deposito pada BPD Jatim, BPR Jatim, BRI dan BNI di BPKAD.
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada BPKAD yaitu atas temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 di Sekretariat DPRD yaitu kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dan temuan pemeriksaan BPK RI TA 2022 di BKPSDM atas kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan penerimaan atas:
- 1) Kelebihan pembayaran pajak daerah Rp248.431,00 atas pajak PBB pada BPKAD
 - 2) Kelebihan pembayaran retribusi daerah Rp2.000,00
 - a) kelebihan bayar Retribusi Penyewaan Tanah an Achmad Fanany-Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp1.000,00
 - b) kelebihan bayar kelebihan bayar Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp1.000,00
 - 3) Kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang Sah Rp2.492,16 pada BPKAD
 - 4) Sisa Lain-lain Potongan Gaji Rp16.545,00 pada BPKAD
 - 5) Penerimaan dari pengembalian JKK dari PT Taspen Rp6.384,00 dan Penerimaan dari pengembalian JKM dari PT Taspen Rp19.152,00 karena ada pegawai yang meninggal



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan Pendapatan Denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa SKPD yaitu :
- 1) Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Blitar Tahap 2 oleh CV.Kita Bisa Maju pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Penerimaan denda keterlambatan pengadaan tambahan kesejahteraan keluarga CV.Nrimo Ing Pandum pada Dinas Sosial
 - 3) Penerimaan denda keterlambatan atas pengadaan kain seragam oleh CV. Widya Sarana pada SMPN 6 Blitar
 - 4) Penerimaan denda keterlambatan pengadaan kain seragam siswa oleh CV. Widya Sarana pada SMPN 7 Blitar
 - 5) Penerimaan denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan kain seragam siswa TK Negeri pada Dinas Pendidikan
 - 6) Penerimaan denda keterlambatan pengadaan kain seragam siswa sd negeri kelas 1 dan 4 oleh CV.Widya Sarana pada Dinas Pendidikan
 - 7) Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan seragam olahraga oleh CS. Sinar Jaya pada SMPN 7 Blitar
 - 8) Penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan paket pekerjaan pembangunan taman plosokerep tahap 2 oleh CV. Nusantara Sejati pada Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan paket pengadaan beras sejatera daerah (Rastrada) PT. Sucipto Hapsari Pambudi pada Dinas Sosial
 - 10) Penerimaan denda atas keterlambatan paket pekerjaan pembangunan taman sananwetan tahap 2 oleh CV.Elang Perkasa pada Dinas Lingkungan Hidup
 - 11) Penerimaan atas denda keterlambatan terhadap paket pekerjaan pemasangan paving dan pemeliharaan taman oleh CV. Mutiara Sejati pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 12) Penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan pengadaan gamelan oleh CV Bima Inti Perkasa pada Dinas Pendidikan
 - 13) Penerimaan atas denda keterlambatan paket pekerjaan pembangunan tanggul cell TPA oleh CV.Pilar Mas pada Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 14) Penerimaan atas denda keterlambatan pembangunan pujasera dan fasilitas penunjang kawasan terpadu bendo oleh CV. Putra Indah pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 15) Penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung SMPN 6 Kota Blitar oleh PT. Rajendra Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 16) Penerimaan atas denda keterlambatan pembangunan gedung kantor Kelurahan Tlumpu oleh CV. Putra Indah pada Dinas Pekerjaan Umum
 - 17) Penerimaan atas denda keterlambatan rehabilitasi Jl. kawasan perumahan pakunden dan kawasan perumahan *green house* pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan denda yang berasal dari sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak daerah pada BPKAD.
- i. Pendapatan dari Pengembalian pada BPKAD merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan, pengembalian kelebihan belanja BTT atas santunan kematian, pengembalian belanja belanja bok atas belanja mamin rapat dan bahan bakar & pelumas serta pengembalian kelebihan bayar bea balik nama untuk pembelian ambulance .
- j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan bunga dari investasi dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- k. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan merupakan Pendapatan Denda keterlambatan atas pembayaran sewa menyewa tanah Masjid Hidayatulloh pada BPKAD.
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Pendapatan pengembalian untuk kekurangan volume paket pekerjaan, denda keterlambatan penyampaian Laporan PPAT, pengembalian atas kelebihan belanja, kelebihan penggunaan Dana BOS atas temuan pemeriksaan BPK-RI.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp747.967.798.768,00 atau 101,98% dari anggaran sebesar Rp733.587.394.531,45. Pendapatan Transfer Tahun 2023 turun 0,83% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Transfer Tahun 2022 sebesar Rp754.236.961.873,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah.

	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1		589.150.072.818,45	586.700.318.147,00	595.884.648.186,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp586.700.318.147,00 atau 99,61% dari anggaran sebesar Rp589.150.072.818,45. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 turun 1,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp595.884.648.186,00. Dasar hukum Alokasi Dana Perimbangan adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik.

- a. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan uraian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

- a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
- b) DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

- c) DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terdiri atas 6 (enam) jenis yaitu:
 - a) DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan
 - b) DBH dari Pungutan Hasil Perikanan
 - c) DBH dari Pertambangan Minyak Bumi
 - d) DBH dari Pertambangan Gas Bumi
 - e) DBH dari Pertambangan Panas Bumi
 - f) DBH dari Pertambangan Umum

Jumlah realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp92.510.557.565,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp95.313.616.625,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 turun 28,99% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp130.286.308.030,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dibawah anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17 Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak dan Bangunan Bumi	2.265.494.926,00	3.031.895.957,00	133,83	5.481.763.104,00	(2.449.867.147,00)	(44,69)
2	DBH PPh Pasal 21	15.318.180.457,00	15.100.787.118,00	98,58	17.670.986.276,00	(2.570.201.158,00)	(14,54)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.449.335.894,00	2.422.578.332,00	98,91	949.496.400,00	1.473.081.932,00	155,14
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	31.560.760.967,00	32.349.507.717,00	102,50	23.867.400.297,00	8.482.107.420,00	35,54



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	38.056.138.821,00	34.397.538.561,00	90,39	72.651.294.238,00	(38.253.755.675,00)	(52,65)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	4.739.010.504,00	2.204.006.624,00	46,20	4.175.690.966,00	(1.891.604.342,00)	(45,30)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	14.800.980,00	0,00	46.240.672,00	(31.439.692,00)	(67,99)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.078.993.957,00	0,00	3.049.142.985,00	(1.970.149.028,00)	(64,61)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	133.487.601,00	252.797.502,00	189,38	435.980.094,00	(183.182.592,00)	(42,02)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	791.207.455,00	1.577.570.817,00	199,39	1.958.311.000,00	(380.740.183,00)	(19,44)
	Jumlah	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	97,06	130.286.308.030,00	(37.775.750.465,00)	(28,99)

b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU diukur dari total penerimaan transfer yang didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp417.003.510.313,00 atau 100,63% dari anggaran sebesar Rp414.386.984.313,00, naik sebesar 6,21% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp392.628.749.070,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 18 Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)							
No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	100,00	392.628.749.070,00	24.374.761.243,00	6,21
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	100,00	392.628.749.070,00	24.374.761.243,00	6,21

Realisasi Dana Alokasi Umum melebihi dari pagu sebesar Rp2.616.526.000,00 adalah alokasi DAU untuk Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 bagi ASN Guru Daerah yang pada Perpres



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

130 Tahun 2022 belum dialokasikan. Tambahan Pendapatan Tranfer DAU tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang mana menyebutkan komponen THR dan Gaji 13 untuk guru adalah termasuk 50% dari Tunjangan Profesi Guru (TPG).

- c. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun 2023 sebesar Rp9.770.554.691,00 atau 88,17% dari anggaran sebesar Rp11.081.818.000,00 turun 45,81% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.028.861.209,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemerintah Pusat berdasarkan Nilai kontrak Pemerintah Kota Blitar. Adapun realisasi kegiatan dibawah nilai pagu sehingga ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar nilai kontrak. Adapun Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 19 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	3.485.588.317,00	(3.485.588.317,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	992.390.100,00	(992.390.100,00)	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-PAUD	1.109.186.000,00	1.092.674.150,00	98,51	0,00	1.092.674.150,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SD	1.150.206.000,00	1.076.769.802,00	93,62	0,00	1.076.769.802,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMP	1.561.548.000,00	1.211.490.767,00	77,58	0,00	1.211.490.767,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	431.015.555,00	(431.015.555,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	323.156.521,00	(323.156.521,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	410.866.000,00	(410.866.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB	335.398.000,00	328.272.372,00	97,88	0,00	328.272.372,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	856.507.000,00	650.440.000,00	0,00	0,00	650.440.000,00	0,00
11	DAK Bidang Infrastruktur Jalan/Jembatan	0,00	0,00	0,00	878.072.000,00	(878.072.000,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.300.616.000,00	1.300.616.000,00	100,00	1.475.780.000,00	(175.164.000,00)	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Dan Kb-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.378.773.000,00	2.175.396.000,00	91,53	3.455.786.639,00	(1.280.390.639,00)	(37,05)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	6.576.206.077,00	(6.576.206.077,00)	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	120.923.000,00	120.000.000,00	99,24	0,00	120.000.000,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	2.270.661.000,00	1.814.895.600,00	79,93	0,00	1.814.895.600,00	0,00
	Jumlah	11.081.818.000,00	9.770.554.691,00	88,17	18.028.861.209,00	(8.258.306.518,00)	(45,81)

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah. Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp67.415.695.578,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp68.367.653.880,45 naik 22,71% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp54.940.729.877,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dibawah anggaran disebabkan oleh jumlah guru untuk realisasi TPG dan Tamsil dan jumlah murid untuk realisasi BOS Reguler. Adapun Rincian DAK Non Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.513.651.529,45	20.283.277.995,00	98,88	13.206.771.794,00	7.076.506.201,00	53,58
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	280.000.000,00	770.000.000,00	275,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.867.250.000,00	32.377.915.700,00	98,51	31.800.974.200,00	576.941.500,00	1,81
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	747.000.000,00	514.750.000,00	68,91	454.500.000,00	60.250.000,00	13,26
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.697.243.368,00	3.697.242.300,00	100,00	3.291.521.000,00	405.721.300,00	12,33
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.324.000.000,00	1.324.000.000,00	100,00	1.277.400.000,00	46.600.000,00	3,65
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.992.671.472,00	5.992.671.472,00	100,00	2.447.867.780,00	3.544.803.692,00	144,81
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.506.760.901,00	1.506.761.501,00	100,00	568.932.483,00	937.829.018,00	164,84
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	415.431.100,00	415.431.100,00	100,00	402.684.200,00	12.746.900,00	3,17
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.573.220,00	(438.573.220,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	253.645.510,00	253.645.510,00	100,00	200.205.200,00	53.440.310,00	26,69
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	571.300.000,00	(571.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	68.367.653.880,45	67.415.695.578,00	98,61	54.940.729.877,00	12.474.965.701,00	22,71

	Transfer Pemerintah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.	Pusat-Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	56.255.400.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp53.546.779.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2023 turun sebesar 4,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp56.255.400.000,00.

	Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.	Antar	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	102.096.913.687,00

Jumlah realisasi Transfer Antar Daerah adalah Transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp107.720.701.621,00 atau 118,52% dari anggaran sebesar Rp90.890.542.713,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 naik 5,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp102.096.913.687,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2022	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	89.365.629.092,00	106.195.788.000,00	118,83	90.589.850.687,00	15.605.937.313,00	17,23
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.828.590.000,00	29.749.779.800,00	110,89	28.499.530.400,00	1.250.249.400,00	4,39
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.960.591.000,00	12.369.315.100,00	112,85	11.456.369.580,00	912.945.520,00	7,97
	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.906.229.000,00	24.478.075.700,00	144,79	17.099.218.740,00	7.376.856.980,00	43,15
	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	232.029.000,00	374.181.000,00	101,27	270.478.040,00	103.703.560,00	38,34
	Bagi Hasil	34.438.190.092,00	39.224.435.800,00	113,90	33.264.253.927,00	5.960.181.873,00	17,92



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2022	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pajak Rokok						
2	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	100,00	11.507.063.000,00	(9.982.149.379,00)	(86,75)
	Jumlah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	118,52	102.096.913.687,00	5.623.787.934,00	5,51

a. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp106.195.788.000,00 atau melampaui sebesar 118,83% dari anggaran sebesar Rp89.365.629.092,00. Adapun Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut :

Tabel 22 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

No	Tanggal	SK Gubernur	Uraian	Nominal	Keterangan
1	25/01/2023	188/987/KPTS/013/2022	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.210.167.100,00	Triwulan IV Tahun 2022
2	28/04/2023	188/181/KPTS/013/2022	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.801.598.200,00	Desember Tahun 2022
3	28/04/2023	188/182/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.627.679.000,00	Triwulan I Tahun 2023
4	10/05/2023	188/180/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.636.820.000,00	Triwulan I Tahun 2023
5	10/05/2023	188/180/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.017.324.700,00	Triwulan I Tahun 2023
6	10/05/2023	188/180/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.481.072.400,00	Triwulan I Tahun 2023
7	10/05/2023	188/180/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	74.226.800,00	Triwulan I Tahun 2023
8	13/07/2023	188/288/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.833.967.500,00	Triwulan II Tahun 2023
9	13/07/2023	188/288/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.689.890.100,00	Triwulan II Tahun 2023
10	13/07/2023	188/288/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.533.622.200,00	Triwulan II Tahun 2023
11	13/07/2023	188/288/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	68.707.300,00	Triwulan II Tahun 2023
12	20/07/2023	188/292/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.408.176.600,00	Triwulan II Tahun 2023
13	20/07/2023	188/293/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.432.674.200,00	Tahun Anggaran 2022
14	20/07/2023	188/293/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.040.270.600,00	Tahun Anggaran 2022
15	20/07/2023	188/293/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.333.436.800,00	Tahun Anggaran 2022
16	20/07/2023	188/293/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	100.145.200,00	Tahun Anggaran 2022
17	21/09/2023	188/443/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil	4.200,00	Triwulan II



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Tanggal	SK Gubernur	Uraian	Nominal	Keterangan
			Pajak Air Permukaan		Tahun 2023
18	07/11/2023	188/556/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.595.790.600,00	Triwulan III Tahun 2023
19	16/11/2023	188/525/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.379.515.500,00	Triwulan III Tahun 2023
20	16/11/2023	188/525/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.419.823.900,00	Triwulan III Tahun 2023
21	16/11/2023	188/525/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.886.009.600,00	Triwulan III Tahun 2023
22	16/11/2023	188/525/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	87.198.500,00	Triwulan III Tahun 2023
23	20/11/2023	188/568/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	369.100,00	Triwulan III Tahun 2023
24	18/12/2023	188/688/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.466.802.600,00	Oktober dan November 2023
25	18/12/2023	188/688/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.735.820.100,00	Oktober dan November 2023
26	18/12/2023	188/688/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.710.120.400,00	Oktober dan November 2023
27	18/12/2023	188/688/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	43.530.500,00	Oktober dan November 2023
28	28/12/2023	188/743/KPTS/013/2023	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.581.024.300,00	Oktober dan November 2023
				106.195.788.000,00	

b. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.524.913.621,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp1.524.913.621,00.

Tabel 23 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

(dalam Rupiah)							
No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/Turun	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	100,00	11.507.063.000,00	(9.982.149.379,00)	(86,75)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.524.913.621,00, dalam pelaksanaan kegiatan hanya sebesar Rp1.517.718.352,00 sehingga dana bantuan tersebut tersisa sebesar Rp7.195.269,00. Rincian kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 24 Rincian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Khusus		Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus	Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus		Keterangan
		Tanggal Penerimaan	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Tgl Setor	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
1.	Pendidikan (Sesuai Keputusan Gubernur Jatim dan Surat Sekda Provinsi Jatim yang diterima Kab/Kota) :	02-05-2023 s.d. 23-12-2023	1.489.530.000,00	1.484.640.000,00	4.890.000,00		Belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
a.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)		1.311.930.000,00	1.311.840.000,00	90.000,00		
b.	Honorarium Kinerja Guru		177.600.000,00	172.000,00	4.800.000,00		
2.	Kesehatan (Sesuai Surat Sekda Provinsi Jatim yang diterima Kab/Kota) :	21-03-2023	35.383.621,00	33.078.352,00	2.305.269,00		Belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
c.	Pendampingan Poskestren		35.383.621,00	33.078.352,00	2.305.269,00		
TOTAL			1.524.913.621,00	1.517.718.352,00	7.195.269,00		

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

1. Pendapatan Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	8.063.076.404,00

Jumlah realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2023 Rp9.005.217.412,53 atau 99,76% dari target sebesar Rp9.027.069.971,48. Sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp8.063.076.404,00. Adapun rincian Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/Turun	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	50.354.798,53	0,00	91.261.000,00	(40.906.203,47)	(44,82)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.027.069.971,48	8.954.862.616,00	99,20	7.971.815.404,00	983.047.212,00	12,33
	Jumlah	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76	8.063.076.404,00	942.141.008,53	11,68



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan atas pengembalian hibah meliputi Pengembalian Hibah KONI dan PMI atas temuan pemeriksaan BPK-RI TA 2022 serta pengembalian sisa Dana BOS dari SMP Yamanu yang sekolahnya tidak beroperasi lagi yang selanjutnya disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka mempedomani aturan tersebut, pada Tahun 2023 pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2023

Realisasi Pendapatan Daerah pada masing-masing SKPD se-Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26 Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	55.550.000,00	55.850.000,00	100,54	19.450.360,00	36.399.640,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	641.249.440,00	783.681.700,00	122,21	585.514.700,00	198.147.000,00	33,84
3	RSUD Mardi Waluyo	103.786.538.147,00	98.850.950.817,36	95,24	97.685.063.884,13	1.165.886.933,23	1,19
4	Dinas Perumahan Rakyat	494.784.000,00	479.384.740,00	96,89	439.591.038,00	39.793.702,00	9,05
5	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	225.884.800,00	460.070.000,00	199,27	72.908.600,00	377.161.400,00	517,31
6	Dinas Perhubungan	2.532.763.901,00	1.895.756.200,00	74,85	1.910.405.800,00	(14.649.600,00)	(0,77)
7	Dinas Kominfo & Statistik	60.000.000,00	53.034.200,00	88,39	28.290.000,00	24.744.200,00	87,47
8	Dinas Lingkungan Hidup	265.326.823,00	303.507.900,00	114,39	285.445.000,00	18.062.900,00	6,33
9	Dinas Koperasi & UM	30.800.681,00	32.388.386,53	105,15	28.502.072,66	3.886.313,87	13,64
10	Kecamatan Kepanjenkidul	193.425.880,00	186.943.050,00	96,65	300.804.520,00	(113.861.470,00)	(37,85)
11	Kecamatan Sukorejo	507.258.680,00	507.258.680,00	100,00	411.522.090,00	95.736.590,00	23,26



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
12	Kecamatan Sananwetan	302.403.949,00	298.285.950,00	98,63	297.153.270,00	1.112.680,00	0,37
13	BPKAD	796.517.411.915,93	819.954.177.465,57	102,94	812.483.915.661,59	7.636.784.194,20	0,94
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,	484.436.900,00	497.015.000,00	102,60	447.056.000,00	49.957.000,00	11,17
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	394.345.000,00	406.867.500,00	103,18	359.248.000,00	47.619.500,00	13,26
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.443.229.230,00	1.797.945.000,00	73,59	1.418.627.000,00	379.318.000,00	26,74
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.988.102.077,00	1.984.732.251,23	99,83	1.744.475.920,00	240.256.331,23	13,77
18	Bagian Umum Setda	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	43.000.000,00	28.723.170,00	66,80	36.909.952,50	(8.186.782,50)	(22,18)
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	6.127.091,00	(6.127.091,00)	0,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	197.320,64	(197.320,64)	0,00
Jumlah		910.973.490.403,93	928.568.700.011,69	101,95	918.568.210.280,52	10.171.844.120,39	1,11

7.5.1.2 Belanja Dan Transfer

Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp958.762.098.374,36 atau 95,88% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.015.028.533.024,00 Realisasi Belanja Tahun 2023 turun sebesar Rp78.868.884.731,91 atau 7,60% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.037.630.983.106,27 Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp819.710.314.933,36 atau 95,44% dari anggaran sebesar Rp858.893.275.739,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 turun sebesar Rp54.709.692.067,52 atau 6,26% dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp874.420.007.000,88. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	328.600.991.307,00	314.865.852.902,00	323.977.811.820,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp314.865.852.902,00 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp328.600.991.307,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 turun sebesar Rp9.111.958.918,00 atau 2,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp323.977.811.820,00. Realisasi belanja pegawai turun karena adanya reklasifikasi belanja pegawai BLUD dari belanja pegawai pada tahun sebelumnya ke belanja barang dan jasa pada tahun berjalan. Adapun rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Naik/Turun	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	198.858.350.878,00	192.070.916.520,00	97,57	191.244.160.357,00	826.756.163,00	0,43
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	77.273.419.602,00	71.384.339.099,00	92,38	72.303.364.822,00	(919.025.723,00)	(1,27)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.570.907.226,00	38.116.666.328,00	93,95	38.644.563.237,29	(527.896.909,29)	(1,37)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.418.789.428,00	11.958.406.558,00	96,29	11.705.407.764,00	252.998.794,00	2,16
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDI I/WKDI I	677.924.173,00	533.924.397,00	78,76	380.298.350,71	153.626.046,29	40,40
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	801.600.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	8.898.417.289,00	(8.898.417.289,00)	(100,00)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Naik/Turun	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	BLUD						
	Jumlah	328.600.991.307,00	314.865.852.902,00	95,82	323.977.811.820,00	(9.111.958.918,00)	(2,81)

Belanja gaji dan tunjangan ASN digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK.

Belanja tambahan penghasilan ASN juga digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK, yang terdiri dari belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja ASN.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari belanja insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tamsil guru PNSD, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa.

Terdapat Belanja Pegawai yang tidak terserap dikarenakan tergantung dari beberapa syarat tertentu seperti tingkat kehadiran pegawai dan prestasi/kinerja untuk Tambahan Penghasilan dan insentif pajak dan retribusi.

Belanja pegawai BLUD pada tahun 2022 yang merupakan belanja gaji untuk pegawai BLUD, pada tahun 2023 dianggarkan pada belanja barang dan jasa BLUD.

2.	Belanja Barang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	500.986.799.379,88

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp443.446.489.987,36 atau 94,83% dari anggaran sebesar Rp467.615.800.255,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 turun sebesar Rp57.540.309.392,52 atau 11,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 sebesar Rp500.986.799.379,88. Realisasi barang dan jasa turun dibandingkan tahun lalu karena belanja barang dan jasa tahun berjalan sudah sesuai kebutuhan tanpa mengurangi target program dan kegiatan. Selain itu, belanja barang dan jasa BLUD RSUD Mardi Waluyo yang mengalami penurunan terbesar disebabkan oleh adanya peralihan status pandemi Covid-19 dari pandemic menjadi endemi. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/turun/ Penurunan	%
1	Belanja Barang	98.846.942.694,00	93.488.216.071,00	94,58	100.021.924.923,60	(6.533.708.852,60)	(6,53)
	Belanja Barang Pakai Habis	98.699.946.702,00	93.345.369.571,00	94,57	100.021.924.923,60	(6.533.708.852,60)	(6,53)
	Belanja Barang Tak Pakai Habis	146.995.992,00	142.846.500,00	97,18	0,00	142.846.500,00	100,00
2	Belanja Jasa	167.892.698.532,00	160.939.432.410,47	95,86	163.258.340.887,79	(2.318.908.477,32)	(1,42)
	Belanja Jasa Kantor	102.825.050.089,00	97.238.650.900,97	94,57	100.056.540.779,39	(2.817.889.878,42)	(2,82)
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.782.371.285,00	30.326.564.566,00	98,52	30.249.416.594,00	77.147.972,00	0,26
	Belanja Sewa Tanah	31.739.100,00	8.739.100,00	27,53	20.892.000,00	(12.152.900,00)	(58,17)
	Belanja Sewa dan Peralatan Mesin	6.823.053.668,00	6.402.522.168,00	93,84	4.579.764.602,00	1.822.757.586,00	39,80
	Belanja Sewa dan Gedung Bangunan	524.523.555,00	434.948.050,00	82,92	728.623.894,00	(293.675.844,00)	(40,31)
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.768.161.776,00	3.615.738.947,00	95,95	2.743.564.553,94	872.174.393,06	31,79
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.122.926.656,00	8.990.402.358,50	98,55	10.652.309.445,46	(1.661.907.086,96)	(15,60)
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	14.014.872.403,00	13.921.866.300,00	99,34	14.227.229.019,00	(305.362.719,00)	(2,15)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	dan						
3	Belanja Pemeliharaan	31.081.326.529,00	30.439.644.895,00	97,94	31.784.490.093,45	(1.344.845.198,45)	(4,23)
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.438.270.649,00	5.276.205.102,00	97,02	5.929.363.168,95	(653.158.066,95)	(11,02)
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.478.837.805,00	14.275.568.433,00	98,60	18.738.464.299,50	(4.462.895.866,50)	(23,82)
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	10.918.433.075,00	10.643.918.860,00	97,49	7.074.362.625,00	3.569.556.235,00	50,46
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.393.200,00	74.600.500,00	98,95	42.300.000,00	32.300.500,00	76,36
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	170.391.800,00	169.352.000,00	99,39	0,00	169.352.000,00	100,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	27.908.407.298,00	25.966.101.193,64	93,04	24.159.530.583,30	1.806.570.610,34	7,48
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.908.407.298,00	25.966.101.193,64	93,04	24.041.122.755,30	1.924.978.438,34	8,01
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00		118.407.828,00	(118.407.828,00)	(100,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.305.724.305,00	19.065.563.706,00	98,76	17.160.475.550,00	1.905.088.156,00	11,10
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.097.974.705,00	4.918.892.107,00	96,49	5.596.479.600,00	(677.587.493,00)	(12,11)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.207.749.600,00	14.146.671.599,00	99,57	11.563.995.950,00	2.582.675.649,00	22,33
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.691.988.158,00	13.379.012.899,36	91,06	13.489.666.710,87	(110.653.811,51)	(0,82)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.888.712.739,00	100.168.518.811,89	92,84	151.112.370.630,87	(50.943.851.818,98)	(33,71)
	Jumlah	467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	664,08	500.986.799.379,88	(57.540.309.392,52)	(11,49)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan/bibit ternak/bibit ikan, bahan lainnya, suku cadang, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir/cendera mata, obat-obatan, obat-obatan lainnya, barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, natura dan pakan, makanan dan minuman rapat, jamuan tamu, fasilitas pelayanan urusan kesehatan dan aktivitas lapangan, pakaian dinas dan sipil, pakaian adat, batik, olahraga dan paskibraka.

Realisasi Belanja Tak Pakai Habis meliputi belanja komponen peralatan, rambu-rambu dan peralatan lainnya.

Realisasi Belanja Jasa Kantor meliputi Belanja Honorarium (Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Penyuluhan atau Pendampingan, Rohaniwan, Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Penyelenggara Ujian, Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Belanja Jasa Tenaga (pendidikan, kesehatan, Laboratorium, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Bencana, Penanganan Sosial, Perhubungan, Kesenian dan Kebudayaan, Administrasi, Operator Komputer, Pelayanan Umum, Ahli, Kebersihan, Keamanan, Juru Masak, Audit/Surveillance ISO, Juri Perlombaan/Pertandingan, Tata Rias, Informasi dan Teknologi), Belanja Jasa (Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik, Pelaksanaan Transaksi Keuangan, Penulisan dan Penerjemahan, Pelayanan Kearsipan, Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Penyelenggaraan Acara, Kontribusi Asosiasi, Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Pengolahan Sampah, Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, Pengukuran Tanah, dan Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan), Belanja tagihan telepon, air dan listrik, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Penambahan Daya, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Pengolahan Air Limbah, Belanja Medical Check Up, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator.





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat meliputi belanja penghargaan atas suatu prestasi contohnya tali asih untuk janda perintis kemerdekaan, ongkos jahit seragam siswa dll, belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi, belanja penanganan dampak sosial, serta belanja TKDD untuk Bantuan Langsung Tunai dampak cukai pada buruh pabrik rokok.

Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat meliputi insentif RT/RW, insentif juru kunci makam, modin kematian, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan (TKSK), insentif guru ngaji dan guru minggu, jasa kader pendamping bumil, posyandu, posbindu serta jasa taruna siaga bencana.

Realisasi belanja barang dan jasa BOS adalah realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOSNAS di 57 Sekolah Negeri dan 24 Sekolah Swasta di Kota Blitar. Realisasi barang dan jasa tersebut tidak melalui kas daerah akan tetapi langsung dari rekening tiap-tiap sekolah tersebut. Sehingga, untuk pengakuan belanja tersebut melalui sistem SPB (Surat Pengesahan Belanja) dari BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD adalah realiasi belanja barang dan jasa BLUD di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Realisasi barang dan jasa tersebut tidak melalui kas daerah akan tetapi langsung dari Rekening BLUD. Sehingga, untuk pengakuan belanja tersebut melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran RSUD Mardi Waluyo.

Selain BOS dan BLUD, pengakuan realisasi belanja barang dan jasa yang melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) yaitu belanja BOK di 3 UPT Puskesmas berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.	Belanja Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		42.000.565.057,00	40.770.317.144,00	25.885.473.481,00

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp40.770.317.144,00 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp42.000.565.057,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 naik sebesar Rp14.884.843.663,00 atau 57,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp25.885.473.481,00. Belanja Hibah mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya belanja hibah ke KPU dan Bawaslu untuk keperluan Pilkada 2024 dan adanya belanja hibah Dana BOS di Sekolah Swasta yang mana pada tahun lalu belum termasuk dalam Perda tentang APBD 2022.

Adapun rincian Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.228.033.800,00	12.228.033.800,00	100,00	4.905.620.201,00	7.322.413.599,00	149,27
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.967.341.885,00	22.966.877.148,00	95,83	20.432.963.908,00	2.533.913.240,00	12,40
3	Belanja Hibah Dana BOS	5.258.300.000,00	5.028.516.824,00	95,83	0,00	5.028.516.824,00	100,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	546.889.372,00	546.889.372,00	100,00	546.889.372,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	Jumlah	42.000.565.057,00	40.770.317.144,00	97,07	25.885.473.481,00	14.884.843.663,00	57,50

Realisasi belanja hibah tahun 2023 terdiri dari belanja hibah uang dan barang, dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja hibah uang terdiri dari :

- 1) Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat (Kodim 008, Polres Kota Blitar, KPU dan Bawaslu Kota Blitar untuk keperluan Pemilu 2024)
- 2) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PMI KOTA BLITAR, PERTUNI KOTA BLITAR, PEMBANTU YAYASAN GERONTOLOGI ABIYOSO (PYGA) KOTA BLITAR, DEKOPINDA KOTA BLITAR, KOPERASI KONSUMEN WANITA DEWI KUNTHI, KOPERASI WANITA BELIMBING, KONI KOTA BLITAR, KWARCAB GERAKAN PRAMUKA KOTA BLITAR, DP KORPRI KOTA BLITAR, FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BLITAR, FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK), BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR), BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) KOTA BLITAR, DEWAN PENDIDIKAN KOTA BLITAR, PGRI KOTA BLITAR, HIMPAUDI (HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI), IGTKI-PGRI KOTA BLITAR, serta hibah sekolah gratis SD, SMP dan PAUD.
- 3) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yaitu Lembaga PAUD sebanyak 162 sekolah, AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR, KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KOTA BLITAR, NPCI (*National Paralympic Committee Indonesia*) Kota Blitar, Muslimat NU, BAZNAZ, MUI, PC GP ANSOR KOTA BLITAR, serta beberapa mushola, TPQ, masjid, gereja di Kota Blitar.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu untuk sekolah pendidikan kesetaraan non formal di PKBM BAHTERA DUA, PKBM ILMU BAROKAH, PKBM RASIO, PKBM TUNAS PERTIWI, dan PKBM TUNAS PRATAMA.
 - 5) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta SD dan SMP sebanyak 24 sekolah.
 - 6) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yaitu DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA BLITAR, DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BLITAR, DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA BLITAR, DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KOTA BLITAR, DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BLITAR, DPD PARTAI GOLKAR KOTA BLITAR, dan DPD PKS KOTA BLITAR.
- b. Belanja hibah barang terdiri dari :
- 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat yaitu pembangunan gedung Kejaksaan Kota Blitar
 - 2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yaitu Peralatan TIK, ruang kelas, ruang perpustakaan, mebelair RKB, toilet di beberapa sekolah swasta di kota blitar.
 - 3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu Pembangunan IPAL dan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM.

Pengakuan realisasi belanja hibah yang melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) yaitu belanja hibah BOP PAUD, BOP Kesetaraan serta Belanja Hibah Dana BOS ke Sekolah Swasta berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4.	Bantuan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Sosial	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	23.569.922.320,00

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp20.627.654.900,00 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp20.675.919.120,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 turun sebesar Rp2.942.267.420,00 atau 12,48% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp23.569.922.320,00. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	140.999.880,00	(140.999.880,00)	(100,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	99,77	23.428.922.440,00	(2.801.267.540,00)	(11,96)
	Jumlah	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	99,77	23.569.922.320,00	(2.942.267.420,00)	(12,48)

Tabel 31 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	2023	2022
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu			
a.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		0,00	140.999.880,00
	- Paket bahan pelatihan batik	Dinas Sosial	0,00	140.999.880,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		20.627.654.900,00	23.428.922.440,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga		5.373.252.000,00	5.835.680.000,00
	- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) warga kota Blitar	Dinas Pemukiman Rakyat	4.843.652.000,00	5.015.780.000,00
	- Santunan anak yatim dan atau piatu	Dinas Sosial	729.600.000,00	819.900.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	SKPD	2023	2022
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga		15.254.402.900,00	17.593.242.440,00
-	Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) dan bingkisan hari raya warga miskin kota blitar	Dinas Sosial	14.549.480.400,00	15.702.927.240,00
-	Alat-alat rumah tangga dalam pelatihan	Dinas Sosial	670.222.500,00	265.017.600,00
-	Pemasangan Instalasi dan Jaringan Listrik di MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Dinas Perumahan Rakyat	34.700.000,00	0,00
-	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) warga kota Blitar	Dinas Perumahan Rakyat	0,00	69.698.300,00
-	Belanja Bantuan Sosial Dampak Kenaikan Inflasi bagi pelaku transportasi, masyarakat miskin dan perempuan kepala keluarga	Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan DP3AP2KB	0,00	1.555.599.300,00
Total Belanja Bantuan Sosial			20.627.654.900,00	23.569.922.320,00

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 terdiri dari belanja bantuan sosial uang dan barang. Belanja bantuan sosial uang yaitu peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni pada masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan santunan anak yatim dan atau piatu di Dinas Sosial. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial barang yaitu beras dan bingkisan hari raya warga miskin kota blitar dan alat-alat rumah tangga dalam pelatihan-pelatihan di Dinas Sosial serta Pemasangan Instalasi dan Jaringan Listrik di MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) Kota Blitar pada Dinas Perumahan Rakyat.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp136.638.025.990,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp141.042.077.285,00 atau turun sebesar 15,07% dibandingkan dengan Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp160.877.763.265,39. Belanja modal tahun berjalan sudah sesuai kebutuhan tanpa mengurangi target program dan kegiatan. Selain itu, belanja modal BLUD RSUD Mardi Waluyo yang mengalami penurunan terbesar disebabkan oleh adanya peralihan status pandemi Covid-19 dari pandemic menjadi endemi.

Belanja modal tahun 2023 bersumber dari dana di RKUD, BOSNAS dan BLUD. Sehingga untuk pengakuan belanja modal yang bersumber dari dana BOSNAS dan BLUD melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) di Dinas Pendidikan dan RSUD Mardi Waluyo. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 32 Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi				
1	Belanja Tanah	0,00	0,00		880.732.430,00	(880.732.430,00)	(100,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	92,25	68.037.519.911,09	(41.715.211.293,09)	(61,31)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	98,31	27.666.316.128,64	35.288.120.781,36	127,55
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	97,76	61.355.000.063,88	(16.091.364.217,88)	(26,23)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	96,71	2.938.194.731,78	(840.550.115,78)	(28,61)
6	Belanja Aset Lainnya					-	
Jumlah		141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	96,88	160.877.763.265,39	(24.239.737.275,39)	(15,07)

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 termasuk di dalamnya Belanja Modal RSUD Mardi Waluyo Tahun 2023 sebesar Rp4.812.901.958,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal BLUD-dana APBD Rp 3.891.712.500,00
- b. Belanja Modal BLUD-dana BLUD Rp 921.189.458,00
- Jumlah Belanja Modal BLUD Rp 4.812.901.958,00**

Termasuk di dalamnya Belanja Modal BOS Tahun 2023 di Dinas Pendidikan sebesar Rp3.730.986.882,00 juga Belanja Modal Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 di Dinas Kesehatan sebesar Rp197.558.714,00

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Belanja Tanah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00	880.732.430,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 turun sebesar Rp880.732.430,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2022 sebesar Rp880.732.430,00. Rincian Belanja Modal pengadaan tanah pada tabel berikut ini:

Tabel 33 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	459.200.000,00	(459.200.000,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	421.532.430,00	(421.532.430,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	880.732.430,00	(880.732.430,00)	(100,00)

2	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	68.037.519.911,09

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp26.322.308.618,00 atau 92,25% dari anggaran sebesar Rp28.533.367.033,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 turun sebesar Rp41.715.211.293,09 atau 61,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp68.037.519.911,09. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 34 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Alat Besar						
	Belanja Modal Alat Besar Darat				1.037.533.484,00	(1.037.533.484,00)	(100,00)
	Belanja Modal Alat Bantu	834.818.378,00	804.974.181,00	96,43	465.362.125,00	339.612.056,00	72,98
2	Belanja Modal Alat Angkutan						
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	736.769.782,00	713.330.000,00	96,82	8.409.809.400,00	(7.696.479.400,00)	(91,52)
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	210.950.648,00	210.138.772,00	99,62	223.201.300,00	(13.062.528,00)	(5,85)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur						
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(100,00)
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin						
	Belanja Modal Alat Ukur	7.815.655,00	7.650.000,00	97,88	254.993.500,00	(247.343.500,00)	(97,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian						
	Belanja Modal Alat Pengolahan	146.573.363,00	146.375.535,00	99,87	215.574.500,00	(69.198.965,00)	(32,10)
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan						
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						
	Belanja Modal Alat Kantor	1.899.372.932,00	1.871.608.528,00	98,54	3.621.366.545,00	(1.749.758.017,00)	(48,32)
	Belanja Modal Alat Rumah	4.039.568.868,00	3.913.340.870,00	96,88	2.267.022.214,00	1.646.318.656,00	72,62



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	Tangga						
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	354.138.468,00	332.816.283,00	93,98	454.907.400,00	(122.091.117,00)	(26,84)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						
	Belanja Modal Alat Studio	905.930.481,00	857.597.738,00	94,68	1.236.078.300,00	(378.480.562,00)	(30,62)
	Belanja Modal Alat Komunikasi	156.346.214,00	155.182.900,00	99,26	176.191.000,00	(21.008.100,00)	(11,92)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan						
	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.159.486.516,00	6.457.515.900,00	90,20	8.872.328.188,00	(2.414.812.288,00)	(27,22)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.366.862.900,00	1.346.885.800,00	98,54	13.089.000,00	1.333.786.800,00	10.182,36
8	Belanja Modal Alat Laboratorium						
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	737.020.200,00	633.274.000,00	85,92	1.410.895.119,00	(777.621.119,00)	(55,12)
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	83.977.600,00	83.361.200,00	99,27	55.470.000,00	27.891.200,00	50,28
	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan						
	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	190.920.000,00	(190.920.000,00)	(100,00)
9	Belanja Modal Komputer						
	Belanja Modal Komputer Unit	3.518.801.660,00	3.471.210.857,00	98,65	6.295.384.381,92	(2.824.153.524,92)	(44,19)
	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.379.870.587,00	2.263.657.310,00	95,12	1.789.517.150,00	474.140.160,00	26,50
10	Belanja Modal						





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	Rambu-Rambu						
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	92.531.840,00	88.007.958,00	95,11	1.097.423.310,36	(1.009.415.352,36)	(91,98)
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja						
	Belanja Modal Alat Pelindung	179.980.732,00	175.319.300,00	97,41	0,00	175.319.300,00	100,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga						
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	336.056.951,00	336.032.040,00	99,99	173.531.800,00	162.500.240,00	93,64
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.177.484.772,00	2.066.796.646,00	94,92	2.458.576.758,00	(391.780.112,00)	(15,94)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.209.008.486,00	387.232.800,00	32,03	27.313.054.435,81	(26.925.821.635,81)	(98,58)
	Jumlah	28.633.367.033,00	26.322.308.618,00	92,25	68.037.519.911,09	(41.715.211.293,09)	(61,31)

Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3 Gedung dan Bangunan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	27.666.316.128,64

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp62.954.436.910,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp64.037.450.196,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 naik sebesar Rp35.288.120.781,36 atau 127,55% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp27.666.316.128,64. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 35 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Bangunan Gedung						
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.027.281.286,00	61.996.860.345,00	98,37	20.466.362.223,52	41.530.498.121,48	202,92
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.267.308.549,23	(1.267.308.549,23)	(100,00)
2	Belanja Modal Monumen						
	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	425.238.910,00	423.619.907,00	99,62	3.530.527.345,00	(3.106.907.438,00)	(88,00)
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti						
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	732.876.935,89	(732.876.935,89)	(100,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD						
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	584.930.000,00	533.956.658,00	91,29	1.669.241.075,00	(1.135.284.417,00)	(88,01)
Jumlah		64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	98,31	27.666.316.128,64	35.288.120.781,36	127,55

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan karena adanya pembangunan beberapa proyek strategis yaitu:

1. Pembangunan Mall Pelayanan Publik oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
2. Pembangunan SMPN 6 Blitar oleh Dinas Pendidikan.
3. Pembangunan Pasar Dimoro oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
4. Pembangunan Pasar Templek oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
5. Pembangunan Aloon-aloon Kota Blitar oleh Dinas Lingkungan Hidup.
6. Rehabilitasi Gedung UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo oleh Dinas Kesehatan.
7. Pembangunan Gedung Kelurahan Kepanjenlor oleh Kecamatan Kepanjenkidul.
8. Pembangunan Gedung Kelurahan Tlumpu oleh Dinas Pekerjaan Umum.
9. Pembangunan Gedung Kelurahan Sananwetan oleh Kecamatan Sananawetan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
4		46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	61.355.000.063,88

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp45.263.635.846,00 atau 97,76% dari anggaran sebesar Rp46.302.333.759,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 turun sebesar Rp16.091.364.217,88 atau 26,23% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp61.355.000.063,88. Adapun rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal dan Jembatan						
	Belanja Modal Jalan	17.686.886.830,00	17.415.327.565,00	98,46	23.845.546.846,88	(6.430.219.283,88)	(26,97)
	Belanja Modal Jembatan	913.939.999,00	855.409.992,00	93,60	198.694.542,00	656.715.450,00	330,52
2	Belanja Modal Bangunan Air						
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.499.524.827,00	12.198.326.567,00	97,59	12.845.931.341,78	(647.604.774,78)	(5,04)
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	106.638.132,00	106.638.131,00	100,00	564.589.329,17	(457.951.196,17)	(81,11)
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	11.337.530.313,00	10.990.589.538,00	96,94	14.708.119.394,73	(3.717.529.856,73)	(25,28)
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	(130.000.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Instalasi						
	Belanja Modal Instalasi	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	1.513.433.175,00	(1.393.433.175,00)	(92,07)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	Pengolahan Sampah						
	Belanja Modal Instalasi Listrik Gardu	1.193.020.882,00	1.132.557.670,00	94,93	4.156.509.473,32	(3.023.951.803,32)	(72,75)
	Belanja Modal Instalasi Lain	2.419.792.976,00	2.419.786.383,00	100,00	2.876.670.459,00	(456.884.076,00)	(15,88)
4	Belanja Modal Jaringan						
	Belanja Modal Jaringan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	25.000.000,00	100,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD						
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	515.505.500,00	(515.505.500,00)	(100,00)
Jumlah		46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	97,76	61.355.000.063,88	(16.091.364.217,88)	(26,23)

	Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5	Aset Tetap	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Lainnya	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	2.938.194.731,78

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp2.097.644.616,00 atau 96,71% dari anggaran sebesar Rp2.168.926.297,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 turun sebesar Rp840.550.115,78 atau 28,61% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.938.194.731,78. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan						
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	67.641.000,00	67.590.000,00	99,92	82.528.200,00	(14.938.200,00)	(18,10)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga						
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	239.416.336,00	228.120.000,00	95,28	201.365.000,00	26.755.000,00	13,29
3	Belanja Modal Hewan						
	Belanja Modal Hewan Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.199.000,00	(37.199.000,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Tanaman						
	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	335.500.000,00	(335.500.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud						
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	138.444.793,00	137.744.380,00	99,49	1.262.249.663,78	(1.124.505.283,78)	(89,09)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS						
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.723.424.168,00	1.664.180.236,00	96,56	1.019.352.868,00	644.837.368,00	63,26
	Jumlah	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	96,71	2.938.194.731,78	(840.550.115,78)	(28,61)

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1. Tidak	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	2.333.212.840,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp2.413.757.451,00 atau 15,99% dari anggaran sebesar Rp15.093.180.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 turun sebesar Rp80.544.611,00 atau 3,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp2.333.212.840,00. Belanja Tidak Terduga hanya tercalisasi 15,99% dari anggaran karena belanja tidak terduga memiliki sifat *standby budget* yang mana direalisasikan ketika dibutuhkan dan tidak direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga tahun 2023 terdiri dari bantuan makan panti, bantuan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

santunan kematian dan natura serta bantuan karena bencana lainnya (kekeringan, pohon tumbang dll).

Tabel 38 Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1.	Santunan Kematian	1.884.050.000,00	1.824.750.000,00
2.	Bantuan makan panti	48.500.000,00	59.111.000,00
3.	Pengembalian dana BOS atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI TA 2022 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)	129.315.000,00	0,00
4.	Pengembalian dana BOS atas SMP Yamanu yang sekolahnya tidak beroperasi lagi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)	1.084.589,00	0,00
5.	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi yang disetor ke RKUD Propinsi Jawa Timur	3.112.600,00	27.010.500,00
6.	Bantuan karena bencana lainnya (kekeringan, pohon tumbang, kebakaran rumah, gempa dll)	291.582.662,00	84.285.400,00
7.	Bantuan pengobatan dan makanan karena terdampak penyakit serta orang terlantar	58.112.600,00	21.355.000,00
8.	Bantuan untuk penanganan dampak Covid-19	0,00	316.700.940,00
	Total Belanja Tak Terduga	2.413.757.451,00	2.333.212.840,00

Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja pada masing-masing SKPD di Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39 Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan	205.210.332.883,00	192.268.047.997,36	93,69	181.564.569.030,37
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	1.445.135.296,00	1.277.247.748,00	88,38	868.473.296,75
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1.522.206.604,00	1.421.505.135,00	93,38	1.053.833.344,75
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	1.166.549.895,00	1.111.171.959,00	95,25	1.115.093.794,75
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1.455.235.247,00	1.261.982.213,00	86,72	1.111.207.199,25
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.625.021.500,00	1.512.594.224,00	93,08	929.352.349,00
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1.123.244.975,00	1.095.502.492,00	97,53	1.139.731.845,17
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.691.960.000,00	1.604.747.507,00	94,85	984.027.144,25
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1.325.850.113,00	1.275.358.562,00	96,19	1.275.215.324,00
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1.407.597.969,00	1.354.437.794,00	96,22	1.350.508.097,83
11	Dinas Kesehatan	93.901.357.444,00	90.473.631.111,70	96,35	82.816.421.898,68
12	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	2.978.287.346,00	2.675.693.665,00	89,84	2.685.599.424,00
13	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	2.899.332.589,00	2.506.274.283,00	86,44	2.103.056.535,00



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
14	UPTD Puskesmas Kecamatan Sanarwetan	3.242.451.678,00	2.996.564.977,00	92,42	2.919.669.411,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	148.929.229.382,00	139.804.588.790,89	93,87	230.913.896.063,60
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.632.032.810,00	50.104.664.716,00	95,20	50.312.695.201,40
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.488.008.658,00	14.096.387.885,00	97,30	25.118.988.279,15
18	Satuan Polisi Pamong Praja	12.746.171.606,00	12.423.461.106,60	97,47	9.933.744.632,61
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.620.880.694,00	4.506.154.452,00	97,52	3.779.463.135,28
20	Dinas Sosial	25.334.229.823,00	25.106.751.152,00	99,10	27.733.174.903,08
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.626.677.777,00	7.957.541.530,00	92,24	8.675.840.431,81
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.774.618.517,00	13.421.233.948,00	97,43	17.410.180.267,43
23	Dinas Lingkungan Hidup	27.229.159.556,00	26.915.476.570,00	98,85	32.083.137.551,73
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.641.057.432,00	6.452.839.183,00	97,17	6.760.890.905,00
25	Dinas Perhubungan	21.934.888.646,00	21.323.973.509,77	97,21	28.174.348.298,93
26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14.412.055.999,00	14.202.178.002,00	98,54	16.076.245.816,23
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	9.380.751.042,00	9.141.799.680,00	97,45	8.562.893.788,20
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.817.011.113,00	8.633.696.684,00	97,92	5.122.941.534,38
29	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15.746.116.357,00	15.418.212.524,00	97,92	17.217.394.453,00
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.395.270.555,00	11.057.431.279,00	97,04	13.105.947.235,82
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.940.659.412,00	6.793.831.197,00	97,88	5.584.902.148,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.379.172.101,00	28.017.007.282,00	98,72	21.277.290.845,84
33	Bagian Pemerintahan	3.581.004.260,00	3.524.259.140,00	98,42	3.064.825.204,60
34	Bagian Hukum	809.106.670,00	816.636.841,00	90,72	976.678.111,00
35	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	11.696.481.330,00	11.252.715.601,00	96,21	11.402.442.774,00
36	Bagian Umum	27.912.401.630,00	27.089.150.368,58	97,05	26.110.263.786,28
37	Bagian Organisasi	1.239.835.647,00	1.231.155.545,00	99,30	1.188.531.498,00
38	Bagian Layanan Pengadaan	778.859.448,00	730.211.315,00	93,75	1.297.204.931,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Barang/Jasa				
39	Sekretariat DPRD	31.507.958.340,00	28.990.175.234,64	92,01	29.283.205.808,52
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.595.814.635,00	8.068.467.141,00	93,87	7.584.214.776,12
41	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	35.398.073.528,00	21.819.123.426,00	61,64	26.632.075.148,00
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.645.969.413,00	12.794.779.239,00	87,36	13.941.435.761,00
43	Inspektorat	10.211.379.575,00	9.989.614.180,00	97,83	9.548.260.314,44
44	Kecamatan Kepanjenkidul	16.889.571.684,00	16.599.112.894,00	98,28	13.453.502.773,89
45	Kelurahan Kepanjenkidul	3.318.956.000,00	3.314.936.188,00	99,88	3.391.252.240,00
46	Kelurahan Ngadirejo	1.607.809.500,00	1.599.030.245,00	99,45	1.571.950.029,00
47	Kelurahan Sentul	2.340.780.000,00	2.336.905.507,00	99,83	2.382.303.529,00
48	Kelurahan Kauman	2.288.660.000,00	2.254.935.525,00	99,40	2.278.496.661,00
49	Kelurahan Tanggung	2.381.777.087,00	2.354.808.227,00	98,87	2.366.437.862,00
50	Kelurahan Bendo	2.365.195.000,00	2.351.331.624,00	99,41	2.180.164.046,00
51	Kelurahan Kepanjenlor	2.277.194.747,00	2.268.862.952,00	99,63	2.159.922.736,00
52	Kecamatan Sukorejo	13.039.194.743,00	12.933.784.909,82	99,19	13.492.682.841,03
53	Kelurahan Pakunden	2.678.516.643,00	2.669.269.146,00	99,65	2.585.285.207,00
54	Kelurahan Blitar	1.428.002.172,00	1.421.029.605,00	99,51	1.471.029.641,00
55	Kelurahan Tlumpu	1.402.891.800,00	1.394.824.468,00	99,42	1.435.379.673,00
56	Kelurahan Turi	1.229.089.896,00	1.199.380.503,00	97,58	1.253.855.642,00
57	Kelurahan Karang Sari	1.535.401.823,00	1.515.636.267,00	98,71	1.550.706.676,00
58	Kelurahan Sukorejo	3.654.390.354,00	3.613.584.405,00	98,88	3.572.389.789,00
59	Kelurahan Tanjungsari	2.873.299.283,00	2.850.949.210,00	99,22	2.905.014.210,00
60	Kecamatan Sananwetan	16.508.115.425,00	16.281.100.862,00	98,62	12.495.017.882,46
61	Kelurahan Gedog	3.383.860.346,00	3.329.521.377,00	98,39	3.589.115.864,00
62	Kelurahan Plosokerep	1.858.621.370,00	1.849.629.919,00	99,52	1.836.143.413,98
63	Kelurahan Klampok	1.965.071.637,00	1.959.692.680,00	99,73	2.017.723.603,00
64	Kelurahan Sananwetan	4.252.382.100,00	4.229.289.001,00	99,46	4.506.346.800,00
65	Kelurahan Rembang	1.362.276.116,00	1.358.333.524,00	99,71	1.360.764.320,00
66	Kelurahan Karangtengah	2.601.703.300,00	2.594.846.735,00	99,74	2.630.385.240,00
67	Kelurahan Bendogent	3.240.208.200,00	3.209.398.319,00	99,05	3.323.524.505,00
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.076.114.414,00	18.754.626.121,00	98,31	7.011.714.622,80
	Jumlah Belanja	1.015.028.533.024,00	958.762.098.374,36	94,46	1.037.630.983.106,27



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan	129.055.042.620,07	129.187.716.510,53	240.117.815.445,82

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp129.187.716.510,53 atau 100,10% dari anggaran sebesar Rp129.055.042.620,07. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 turun Rp110.930.098.935,29 atau 46,20% dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp240.117.815.445,82. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan / Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	119.055.042.620,07	119.055.042.620,07	100,00	239.941.987.648,01	(120.886.945.027,94)	(50,38)
2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000.000,00	100,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	133.830.522,46	0,00	175.827.797,81	(41.997.275,35)	(23,89)
Jumlah		129.055.042.620,07	129.188.873.142,53	100,10	240.117.815.445,82	(110.928.942.303,29)	(46,20)

Penerimaan kembali pemberian pembiayaan Tahun 2023 berupa penerimaan investasi dana bergulir (pembayaran pokok dana bergulir).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai STS Nomor 49/PPKD/XI/2023 tanggal 29 Nopember 2023, BUD melaksanakan pencairan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk belanja hibah kepada KPU sebesar Rp7.698.062.800,00 dan Bawaslu sebesar Rp2.301.937.200,00 dalam sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 naik sebesar Rp23.000.000.000,00 atau 1.150,00% dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Tabel 41 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
2	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00	100,00
Jumlah		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	23.000.000.000,00	1.150,00

Pembentukan dana cadangan pada tanggal 4 Juli 2023 sesuai SP2D Nomor 09642/LSKB, BUD melaksanakan pemindahbukuan dana cadangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito dana cadangan sebesar Rp 25.000.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1.4 SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp73.994.318.147,86 atau turun sebesar Rp45.060.724.472,21 atau 37,85% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp119.055.042.620,07. Perhitungan SiLPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Total Pendapatan Tahun 2023	Rp	928.568.700.011,69
b. Total Belanja Tahun 2023	Rp	958.762.098.374,36
c. Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	(30.193.398.362,67)
d. Pembiayaan Neto	Rp	104.187.716.510,53
SiLPA (c+d)	Rp	73.994.318.147,86

Jumlah SiLPA sebesar Rp73.994.318.147,86 terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	67.901.515.973,86
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	24.486.183,21
c. Kas di BLUD-RSD Mardi Waluyo	Rp	3.623.702.172,75
d. Kas di Kapitasi JKN		
1) UPT Puskesmas Kecamatan Kapanjenkidul	Rp	96.001.638,00
2) UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	Rp	42.606.859,98
3) UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	Rp	50.065.704,00
e. Kas di Kas BOSNAS	Rp	1.482.306.958,06
f. Kas di BOK Puskesmas		
1) UPT Puskesmas Kecamatan Kapanjenkidul	Rp	256.124.714,00
2) UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	Rp	217.312.925,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	Rp	250.277.821,00
g. Kas Lainnya	Rp	49.917.198,00
Jumlah SiLPA 2023	Rp	73.994.318.147,86





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) periode tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan komponen laporan keuangan yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, selain Laporan Arus Kas, Pos-pos LPSAL yang mencakup:

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	(Rp)	(Rp)
	119.055.042.620,07	239.941.987.648,01

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 119.055.042.620,07 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penggunaan SAL	(Rp)	(Rp)
	119.055.042.620,07	239.941.987.648,01

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp119.055.042.620,07 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang dipergunakan untuk pos-pos Pembiayaan tahun berjalan.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
SILPA	(Rp)	(Rp)
	73.995.474.779,86	239.941.987.648,01



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 73.995.474.779,86.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp1.156.632,00) yang merupakan saldo awal Kas di Bendahara BOP PAUD di Dinas Pendidikan.

7.5.2.5 Lain-lain

Pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 73.994.318.147,86 merupakan hasil dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, ditambahkan dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan kemudian disesuaikan dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Pos Lain-lain.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3 Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

7.5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar (Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya).

7.5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Penjelasan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1.	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		67.901.515.973,86	110.678.628.471,16

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah berupa kas yang tersimpan di RKUD (Rekening Umum Kas Daerah). Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.901.515.973,86 atau turun 38,65% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.678.628.471,16. Rincian Kas di Kas Daerah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
Giro:				
1	Bank Jatim (BPD)	141015672	67.901.515.973,86	110.678.628.471,16
Jumlah Total			67.901.515.973,86	110.678.628.471,16



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran berupa Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU, potongan pajak dan kas transitoris sampai dengan tanggal Neraca dan tidak termasuk komponen SILPA. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau tetap dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

3.	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		24.486.183,21	34.016.309,09

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.486.183,21 atau turun 28,02% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.016.309,09. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 43 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)			
No	SKPD	2023	2022
1	BPKAD	14.624,00	17.883.022,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.372.000,00	5.310.000,00
3	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	148.559,21	23.287,09
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.832.000,00	10.800.000,00
5	Dinas Perhubungan	110.000,00	0,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.009.000,00	
Jumlah		24.486.183,21	34.016.309,09

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. BPKAD

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Jasa giro pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0055308986 sebesar Rp14.624,00 dan sudah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 23 Pebruari 2024.

b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Terdapat penerimaan secara tunai yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.589.000,00;
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.533.000,00;
- 3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp695.000,00;
- 4) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp2.900.000,00;
- 5) Retribusi Pelayanan Tempat khusus parkir sebesar Rp2.655.000,00.

Pada tanggal 3 Januari 2024 telah disetorkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ke Kas Daerah sebesar Rp2.900.000,00 dan Rp9.472.000,00.

c. Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2023 yaitu Jasa Giro pada rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp148.559,21 pada:

- 1) PT BPD Jatim Tbk. nomor rekening 0142136341 sebesar Rp3.513,89;
- 2) PT BPD Jatim Tbk. nomor rekening 0142136325 sebesar Rp1.389,32;
- 3) PT BPD Jatim Tbk. nomor rekening 0142136217 sebesar Rp109.344,91; dan
- 4) Perumda BPR Artha Praja Kota Blitar nomor rekening 0011001000729 sebesar Rp34.311,09.

d. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2023 yaitu penerimaan jaminan bongkar reklame yang telah kadaluarsa sebesar Rp4.832.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

e. Dinas Perhubungan

Terdapat penerimaan secara tunai yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2023 atas Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp100.000,00. Pada tanggal 31 Januari 2024 telah disetorkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan ke Kas Daerah.

f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terdapat penerimaan secara tunai yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp1.879.000,00
- 2) Retribusi Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp5.130.000,00

Pada tanggal 2 Januari 2024 telah disetorkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ke Kas Daerah sebesar Rp2.900.000,00 dan Rp9.472.000,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4. Kas di BLUD	3.623.702.172,75	5.891.140.308,28

Kas di BLUD adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BLUD yang tersimpan di Bank Jatim dengan nomor rekening 0141007288 a.n. RSD Mardi Waluyo Kota Blitar. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Mardi Waluyo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.623.702.172,75 atau turun sebesar 38,49% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.891.140.308,28.

Tabel 44 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Saldo awal (1)	5.891.140.308,28	98.141.163.549,83
Penerimaan Kas Bank BLUD (2 *)	98.822.270.134,38	97.680.098.119,13
Jumlah {3=(1+2)}	104.713.410.442,64	195.821.261.668,96
Pengeluaran Kas Bank BLUD (4)	101.089.708.269,89	189.930.121.360,68
Saldo Kas di BLUD {5=(3-4)}	3.623.702.172,75	5.891.140.308,28



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*)Penerimaan Kas Bank BLUD = Pendapatan LRA - Kas Lainnya 31/12/2023
+ Kas Lainnya 31/12/2022
= 98.850.950.817,36 - 33.646.448 + 4.965.765
= 98.822.270.134,36

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5. Kas BOSNAS	(Rp)	(Rp)
	1.482.306.958,06	2.287.545.568,42

Kas BOSNAS adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara BOSNAS. Saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.482.306.958,06 atau turun 35,20% dibandingkan dengan saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.287.545.568,42. Kas BOSNAS merupakan penerimaan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.482.306.958,06 terdiri dari saldo di rekening bank sekolah yang diterima melalui rekening BOS Satuan Pendidikan Negeri. Rincian Kas BOSNAS pada UPT Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Bosnas di Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2023	2022
1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo	141040863	1.920,29	1.219.772,29
2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	141041118	-	-
3	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit	141040961	1.273.439,26	7.591.354,26
4	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit	141040995	0,22	0,22
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Blitar	141040588	60.446,49	856,49
6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog	141041029	99.585,12	49.590,12
7	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog	141041053	0,36	30.275,36
8	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog	141040979	0,82	1.674.279,82
9	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karang Sari	141040821	82,20	31.537,20
10	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karang Sari	141040812	905.382,49	382,49
11	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karang Sari	141040791	0,37	3.814.854,37
12	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah	141041169	24.098,12	87.094,12
13	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah	141041258	141,19	1.678.399,19
14	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangtengah	141041142	100.200,97	17.251,97
15	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Karangtengah	141041193	31.289,28	866.726,28
16	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman	141041126	30.000,17	823.013,17
17	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman	141040842	3.001,08	1.405.501,08
18	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul	141040758	0,89	121.700,89
19	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenkidul	141041081	73.147,00	687.938,36
20	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenlor	141040804	0,23	2.047.700,23



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2023	2022
21	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Keparjenlor	141040723	37,69	11.934.162,69
22	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Keparjenlor	141041070	-	-
23	UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok	141040871	56.000,09	354.771,09
24	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo	141040880	-	140.000,00
25	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo	141040896	0,56	0,56
26	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden	141040596	1.587.962,22	640.562,22
27	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden	141040600	0,89	1.950.000,89
28	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Plosokerep	141040855	0,16	1.353.757,16
29	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep	141040847	0,54	700,54
30	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang	141040910	2.273,98	2.991.186,98
31	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang	141040901	0,24	72.986,24
32	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan	141041223	0,46	397,46
33	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan	141040677	8.000,13	710.707,13
34	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sananwetan	141040766	0,13	76.948,13
35	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul	141041096	743.651,30	348.559,30
36	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul	141040944	0,56	10.110.228,56
37	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul	141040928	430,62	4.270.791,62
38	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul	141040731	869,37	91.012,37
39	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sukorejo	141040561	303.715,62	439.483,62
40	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sukorejo	141040570	662.200,32	4.900.320,32
41	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sukorejo	141040707	21.814,95	79.489,95
42	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung	141040715	0,51	1.522.761,51
43	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung	141041088	0,89	4.255.370,89
44	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari	141040618	4.619.412,23	1.473.062,23
45	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari	141040782	111.148,58	457.576,58
46	UPT Satuan Pendidikan SDN Tlumpu	141040740	0,26	0,26
47	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	141040839	39.526,44	661.806,44
48	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	141040774	96.000,77	3.887.650,77
49	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1	141040936	190.576.838,83	341.626.685,83
50	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2	141040685	212.908.662,08	320.230.482,08
51	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	141041002	214.510.809,42	191.151.354,42
52	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4	141041134	335.285.376,89	351.519.639,89
53	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	141040693	114.212.941,40	205.680.255,40
54	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	141040553	62.410.900,45	301.651.709,45
55	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	141040545	16.686.707,67	237.861.018,67
56	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8	141040537	101.743.887,60	112.045.388,60
57	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	141040626	223.115.047,56	150.706.510,66
Jumlah			1.482.306.958,06	2.287.545.568,42

Selanjutnya informasi terkait perhitungan rinci saldo akhir Kas di Bendahara BOSNAS di Satuan Pendidikan Negeri per sekolah disajikan pada **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Selain Sekolah Negeri, Dana BOSNAS juga diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta. Saldo akhir Dana BOS di Satuan Pendidikan Swasta per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.038.978,55 tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 dan 2023, namun hanya diungkapkan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Rincian Saldo Akhir Kas BOSNAS pada Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Bosnas di Satuan Pendidikan Swasta per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	No.Rekening	2023	2022
1.	SD Alam Al Ghifari	14106411	0,46	0,46
2.	SD Islam Kardina Massa	141046454	2.853.236,76	19.874.474,76
3.	SD Islam Kota Blitar	14106357	3.187.574,83	19.643.546,83
4.	SD Islam Maarif Kota Blitar	14106519	2.179.203,00	3.037.953,62
5.	SD Islam Mamba UI Hisan	14106420	1.188.230,96	5.262.630,96
6.	SD Islam Sukorejo	14106308	110,50	15.173.510,50
7.	SD Islam Tanjungsari	14106482	1.997.187,55	22.378.088,55
8.	SD Islam Tarbiyatul Fallah	14106438	1.310.281,91	312.889,91
9.	SD Istimewa 3 Kota Blitar	14106446	0,00	7.094,61
10.	SD Katolik Santa Maria	14106314	0,83	6.566.313,63
11.	SD Katolik Yos Sudarso	14106471	3.097.358,00	1.213.683,00
12.	SD Laboratorium UM Kota Blitar	14106331	99.062,20	2048977,2
13.	SD Little Angel School	14106764	0,00	0,00
14.	SD Muhammadiyah	14106381	0,57	2.048.889,57
15.	SMP Al Muhafizhoh	141046275	45.924,13	14.825.966,13
16.	SMP Alam Al Ghifari	14106411	0,90	3.102.579,90
17.	SMP Bustanul Mutaallimin	141046292	3.758.411,99	11.685.513,99
18.	SMP Katolik 3 Yos Soedarso Blitar	141046284	110107,55	5072292,55
19.	SMP Katolik Yohanes Gabriel	141046268	521.193,15	7.006.049,15
20.	SMP Laboratorium UM Kota Blitar	14106331	52.011.449,68	10.341.129,68
21.	SMP Muhammadiyah 1 Blitar	141046349	0,87	312.314,87
22.	SMP Muhammadiyah 2 Blitar	141046322	2.509.808,09	19.430.528,09
23.	SMP Tamansiswa	141046390	275.814,32	1.233.313,32
24.	SMP Tarbiyatul Fallah	141046373	1.824.350,94	776.847,94
Total			76.969.308,99	171.354.389,22

6.	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		188.674.201,98	151.265.154,48

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada masing-masing UPT Puskesmas dan merupakan nilai keseluruhan dari Kas Tunai dan Kas Bank.

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp188.674.201,98 atau naik 24,73% dibandingkan dengan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.265.154,48. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan sisa dana JKN pada tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan perhitungan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Awal JKN (31/12/2022)	Rp 151.265.154,48
Pendapatan Kapitasi JKN	Rp 8.954.862.616,00
Belanja	<u>(Rp 8.917.453.568,50)</u>
Sisa Dana JKN (31/12/2023)	Rp 188.674.201,98

Tabel 47 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per 31 Des 2022	Pendapatan	Belanja	Saldo per 31 Des 2023
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	UPT Puskesmas Sananwetan	0141031601	66.143.865,48	3.244.995.683,00	3.268.532.688,50	42.806.859,98
2	UPT Puskesmas Sukorejo	0141031635	84.860.196,00	2.913.350.071,00	2.948.144.563,00	50.065.704,00
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	0141031571	261.093,00	2.796.516.862,00	2.700.776.317,00	96.001.638,00
Jumlah			151.265.154,48	8.954.862.616,00	8.917.453.568,50	188.674.201,98

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
7. Kas BOP PAUD	(Rp)	(Rp)
	0,00	1.156.632,00

Kas BOP PAUD adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara BOP PAUD di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Swasta. Saldo Kas BOP PAUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan saldo Kas BOP PAUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.156.632,00. Saldo akhir Kas BOP PAUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.461.856,00 tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023, namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Saldo Akhir Kas BOP PAUD sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Saldo Akhir Kas BOP PAUD Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO.	LEMBAGA	2023	2022
1.	KB ANUGRAH	5.400.000,00	0,00
2.	TK AL HIDAYAH DARUL FARQI	1.540.000,00	1.121.000,00
3.	TK ISLAM AL AZHAR 67	1,00	0,00
4.	TK KATOLIK SANTA MARIA BLITAR	3.000,00	
5.	UPT SATUAN PENDIDIKAN TK NEGERI BLITAR KOTA BLITAR	18.800,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO.	LEMBAGA	2023	2022
6.	UPT SATUAN PENDIDIKAN TK NEGERI KEPANJENLOR KOTA BLITAR	55,00	35.632,00
7.	TP DEWI SETYOWATI	500.000,00	
	JUMLAH	7.461.856,00	1.156.632,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8. Kas BOK	723.715.460,00	0,00

Kas BOK adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara BOK pada masing-masing UPT Puskesmas. Saldo Kas BOK per 31 Desember 2023 sebesar Rp723.715.460,00 naik 100% dibandingkan dengan saldo Kas BOK per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Perhitungan Kas BOK sebagai berikut:

Saldo Awal Kas BOK (31/12/2022)	Rp 0,00
Pendapatan Transfer	Rp 3.525.398.000,00
Belanja	(Rp 2.801.682.540,00)
Sisa Dana Kas BOK (31/12/2023)	Rp 723.715.460,00

Tabel 49 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per	Pendapatan	Belanja	Saldo per
			31 Des 2022			31 Des 2023
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	UPT Puskesmas Sananwetan	BNI 1590001398	0,00	1.177.686.000,00	960.353.075,00	217.312.925,00
2	UPT Puskesmas Sukorejo	BNI 1590001387	0,00	1.168.851.000,00	918.573.179,00	250.277.821,00
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	BNI 1590001401	-	1.178.881.000,00	922.756.286,00	256.124.714,00
Jumlah			0,00	3.525.398.000,00	2.801.682.540,00	723.715.460,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
9. Kas Lainnya	49.917.198,00	11.290.176,64

Kas di Bendahara Lainnya adalah saldo kas yang tidak bisa diklasifikasikan ke akun Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BOSNAS, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Kapitasi JKN, Kas di Bendahara BOK dan Kas di Bendahara BOP PAUD. Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.917.198,00 atau



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

naik 342,13% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.290.176,64, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 50 Rincian Kas di Bendahara Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Saldo
		31/12/2023	31/12/ 2022
1	RSUD Mardi Waluyo		
	Penerimaan 30 dan 31/12/2022 yang belum disetor ke Kas Bank BLUD, telah disetor pada tanggal 2 Januari 2024 dengan STS Nomor 001/I/2024	33.646.448,00	0,00
	Penerimaan 31/12/2022 yang belum disetor ke Kas Bank BLUD, telah disetor pada tanggal 2 Januari 2023 dengan STS Nomor 001/I/2023	0,00	4.965.765,00
2.	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan		
	Pengembalian belanja bok atas :		
	a. belanja mamin rapat subkeg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.451.000		
	b. belanja bbm sub keg Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.669.750		
	Atas kelebihan bayar tersebut telah disetorkan ke Kas BOK BNI tanggal 4 Januari 2024.	7.120.750,00	0,00
3.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)		
	Pengembalian belanja atas Belanja Bantuan Tak Terduga untuk santunan kematian. Atas kelebihan bayar tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 19 Januari 2024 dengan STS Nomor 2/STS/I/2024.	9.150.000,00	0,00
4.	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD)		
	Pendapatan Jasa Giro bulan Juni sampai dengan Nopember 2022 yang belum disetor ke Kasda Atas kelebihan bayar tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 5 Januari 2023 dengan STS Nomor 6/PPKD/I/2023.	0,00	197.320,64
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)		
	Pengembalian kelebihan bayar sebagai tindak lanjut pokok-pokok pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar sebesar Rp6.127.091,00 terdiri dari :		
	a. SP2D Nomor 15192, Tanggal 7 September 2022 untuk belanja ATK sebesar 1.652.500,00;	0,00	6.127.091,00
	b. SP2D Nomor 19340, Tanggal 26 November 2022 dan Nomor 27055, Tanggal 26 Desember 2022 untuk belanja makanan dan minuman sebesar Rp4.474.591,00.		
	Atas kelebihan bayar tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 6 Maret 2023 dengan STS Nomor 383/STS/III/2023.		
Jumlah		49.917.198,00	11.290.176,64



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
10. Piutang Pajak	(Rp)	(Rp)
	11.830.740.522,00	10.353.008.391,00

Piutang pajak pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan pajak daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2023. Piutang Pajak dikelola oleh BPKAD dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.830.740.522,00 atau naik 14,27% dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.353.008.391,00. Piutang Pajak dicatat berdasarkan nilai nominal ketetapan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
1	Pajak Rumah Makan – BPKAD	322.930.637,00	410.699.740,00	262.448.439,00	471.181.938,00
2	Pajak Catering – BPKAD	25.826.974,00	30.796.528,00	25.826.974,00	30.796.528,00
3	Pajak Hotel – BPKAD	105.482.369,00	132.417.162,00	104.162.369,00	133.737.162,00
4	Pajak Kos – BPKAD	8.450.000,00	5.625.000,00	6.845.000,00	7.230.000,00
5	Pajak Hiburan – BPKAD	136.727.333,00	149.327.083,00	131.592.333,00	154.462.083,00
6	Pajak Reklame – BPKAD	34.966.180,00	80.907.262,00	8.470.500,00	107.402.942,00
7	Pajak Air Tanah – BPKAD	23.814.457,00	17.019.352,00	15.565.243,00	25.068.566,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan – BPKAD	8.683.109.421,00	1.341.063.077,00	292.575.849,00	9.711.596.649,00
9	Pajak Parkir – BPKAD	44.460.323,00	51.161.345,00	41.151.823,00	54.470.045,00
10	Pajak Penerangan Jalan Umum – BPKAD	987.440.697,00	1.134.794.609,00	987.440.697,00	1.134.794.609,00
	Jumlah	10.353.008.391,00	3.353.811.158,00	1.876.079.027,00	11.830.740.522,00

Pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Kategori Piutang			
			0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Pajak Rumah Makan – BPKAD	471.181.938,00	410.699.740,00	3.175.029,00	18.038.650,00	39.268.519,00
2	Pajak Catering – BPKAD	30.796.528,00	30.796.528,00	-	-	-
3	Pajak Hotel – BPKAD	133.737.162,00	132.417.162,00	-	-	1.320.000,00
4	Pajak Kos – BPKAD	7.230.000,00	5.625.000,00	1.605.000,00	-	-



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Kategori Piutang			
			0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
5	Pajak Hiburan – BPKAD	154.462.083,00	149.327.083,00	685.000,00	-	4.450.000,00
6	Pajak Reklame – BPKAD	107.402.942,00	80.907.262,00	1.485.000,00	9.144.000,00	15.866.680,00
7	Pajak Air Tanah – BPKAD	25.068.566,00	17.019.352,00	4.442.238,00	289.180,00	3.317.796,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan – BPKAD	9.711.596.549,00	1.341.063.077,00	727.786.569,00	1.743.503.021,00	5.899.243.982,00
9	Pajak Parkir – BPKAD	54.470.045,00	51.161.345,00	463.000,00	1.894.500,00	951.200,00
10	Pajak Penerangan Jalan Umum – BPKAD	1.134.794.609,00	1.134.794.609,00	-	-	-
	Jumlah	11.830.740.522,00	3.353.811.158,00	739.641.836,00	1.772.869.351,00	5.964.418.177,00

11. Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	7.271.742.095,00	7.201.626.595,00

Piutang Retribusi pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan retribusi daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi per 31 Desember 2023. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.271.742.095,00 atau naik 0,97% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.201.626.595,00. Piutang Retribusi dicatat berdasarkan nilai nominal tagihan retribusi yang belum terealisasi per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Mutasi Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)					
No	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :				
-	Sewa Toko Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	142.351.000,00	65.700.000,00	31.200.000,00	176.851.000,00
-	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.339.000,00	0,00	0,00	9.339.000,00
-	Sewa kios kebonorojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.240.000,00	3.240.000,00	1.620.000,00	4.860.000,00
-	Sewa Kios Shopping Centre - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.851.000,00	0,00	0,00	44.851.000,00
-	Sewa Tanah Jalan Mastrip, Kelud, A Yani, Mayang, Dr Wahidin,				
-	Shopping Centre - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	231.535.550,00	6.182.700,00	300,00	237.717.950,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.410.000,00	540.000,00	1.620.000,00	17.330.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mastrip - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.800.000,00	6.000.000,00	2.820.000,00	35.980.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
-	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi – BPKAD	10.285.000,00	0,00	0,00	10.285.000,00
-	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	2.640.000,00	1.592.600,00	0,00	4.232.600,00
-	Sewa Kios Souvenir MBK - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.008.000,00	0,00	0,00	77.008.000,00
-	Sewa Kios Terminal MBK - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41.848.000,00	0,00	0,00	41.848.000,00
-	Sewa Kios Los Bango PIPP - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
-	Sewa Kios Terminal - Dinas Perhubungan	274.555.000,00	0,00	0,00	274.555.000,00
-	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.541.700,00	0,00	0,00	19.541.700,00
-	Sewa Kafe Lesehan PIAIH - Dinas Ketahanan dan Pertanian	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
-	Sewa Rusunawa - Dinas Perumahan Rakyat	429.025.000,00	49.250.000,00	31.400.000,00	446.875.000,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:				
-	Sewa GOR - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.080.000,00	6.325.500,00	7.975.000,00	6.430.500,00
3	Retribusi Pasar/Grosir Pertokoan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.662.525.125,00	32.950.000,00	0,00	5.695.475.125,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.694.450,00	0,00	25.030.000,00	137.664.450,00
5	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (Izin Gangguan/Keramaian-HO) - Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00	0,00	0,00	2.477.770,00
	Jumlah	7.201.626.595,00	171.780.800,00	101.665.300,00	7.271.742.095,00

Pengelompokan umur piutang retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

Id	Uraian	Saldo 31 Des 2023	(0 s/d 1) Tahun	(1 s/d 2) Tahun	(2 s/d 3) Tahun	(>3 Tahun)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :					
-	Sewa Toko Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	176.851.000,00	65.700.000,00	9.000.000,00	6.800.000,00	95.351.000,00
-	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.339.000,00	0,00	0,00	0,00	9.339.000,00
-	Sewa kios kebonorojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.860.000,00	3.240.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
-	Sewa Kios Shopping Centre - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.051.000,00		0,00	0,00	44.051.000,00
-	Sewa Tanah Jalan Mastrip , Kelud , A Yani, Mayang, Dr Wahidin,					
-	Shopping Centre - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	237.717.950,00	6.182.700,00	0,00	5.582.700,00	225.952.550,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.330.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	15.170.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mastrip - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	(0 s/d 1) Tahun	(1 s/d 2) Tahun	(2 s/d 3) Tahun	(>3 Tahun)
-	Sewa Kios/Bedak Jl Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.980.000,00	6.000.000,00	3.180.000,00	1.140.000,00	25.660.000,00
-	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi – BPKAD	10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00
-	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	4.232.600,00	1.592.600,00	0,00	2.640.000,00	0,00
-	Sewa Kios Souvenir MBK - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.008.000,00	0,00	0,00	0,00	77.008.000,00
-	Sewa Kios Terminal MBK - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41.848.000,00	0,00	0,00	0,00	41.848.000,00
-	Sewa Kios Los Bango PIPP - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
-	Sewa Kios Terminal -Dinas Perhubungan	274.555.000,00	0,00	0,00	0,00	274.555.000,00
-	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit Pertanian -Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.541.700,00	0,00	0,00	0,00	19.541.700,00
-	Sewa Kafe Lesehan PIAIH - Dinas Ketahanan dan Pertanian	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
-	Sewa Rusunawa - Dinas Perumahan Rakyat	448.875.000,00	49.250.000,00	28.075.000,00	70.400.000,00	299.150.000,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga					0,00
3	Sewa GOR - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.430.500,00	6.325.500,00	0,00	0,00	105.000,00
4	Retribusi Pasar/Grosir Pertokoan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.695.475.125,00	32.950.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	5.650.525.125,00
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.664.450,00		0,00	989.000,00	136.675.450,00
6	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (Jln Gangguan/Keramaian-HO) - Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00	0,00	0,00	0,00	2.477.770,00
	Jumlah	7.271.742.095,00	171.780.800,00	53.615.000,00	93.431.700,00	6.952.914.595,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
12. Piutang Lain-Lain	(Rp)	(Rp)
PAD yang Sah	11.900.033.821,61	8.443.697.391,85

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.900.033.821,61 atau naik 40,93% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.443.697.391,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)					
No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha				
-	Piutang Denda Sewa Kios Stadion - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
-	Piutang Denda Sewa Kios Kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
-	Denda Sewa Kios Jl Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
-	Denda Sewa Kios Jl Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
-	Denda Sewa Kios Jl A Yani - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.654,00	0,00	0,00	39.654,00
2	Denda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Hasil Sewa BMD :				
-	Denda Sewa Waterpark Sumberdel - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	102.500.000,00	0,00	0,00	102.500.000,00
-	Denda Sewa Yayasan Masjid Hidayatullah	0,00			0,00
3	Hasil Sewa BMD				
	Kios Terminal Tipe C	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
	Fasilitas Rusunawa - Dinas Perumahan Rakyat	334.213.499,00	77.913.935,00	29.422.070,00	382.708.024,00
	Fasilitas Umum - BGS Blitar Square -	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	336.000.000,00





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
	BPKAD				
	Sewa sawah bengkok Kelurahan Kauman	420,00	0,00	420,00	0,00
4	Piutang BLUD :				
-	Piutang yayasan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)	3.935.751,00	99.852.850,00	103.157.172,00	631.429,00
-	Piutang Pasien Umum (BLUD)	291.126.438,00	5.924.756,00	658.000,00	296.422.928,00
-	Piutang BPJS (BLUD)	6.298.781.566,00	87.278.208.654,00	84.035.597.426,00	9.541.392.794,00
-	DINKES KABUPATEN - COVID 19	0,00			0,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)	0,00	87.246.877,00	72.336.640,00	14.910.237,00
-	Piutang Jasa Raharja BLUD	0,00	2.424.173.940,00	2.401.598.465,00	22.575.475,00
-	Piutang Sakordik BLUD	0,00	249.760.000,00	210.784.000,00	38.976.000,00
-	Piutang KEMENKES - COVID 19	0,00			0,00
-	Piutang Pemulasaran Jenazah	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir :	0,00			0,00
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - BNI (PPKD) - BPKAD	151.789.457,26	0,00	0,00	151.789.457,26
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	764.271.235,68	0,00	21.251.034,22	743.020.201,46
-	Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir-BPR JATIM - Bagian Perekonomian Setda	3.176.200,00	0,00	0,00	3.176.200,00
6	Piutang Jasa Giro Bank - Jatim (PPKD) - BPKAD	130.339.845,55	67.893.201,89	130.339.845,55	67.893.201,89
7	Piutang Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah :				
-	Bunga Perumda Tirta Patria - BPKAD)	181.004.700,00	12.611.820,00	0,00	193.616.520,00
-	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2.626.925,36	0,00	2.626.925,36	0,00
8	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - BPKAD	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Jumlah	8.443.697.391,85	90.473.236.033,89	87.016.931.998,13	11.900.033.821,61

a. Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha

- 1) Piutang denda sewa kios Kebonrojo dan piutang denda sewa kios stadion dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Piutang denda sewa kios bedak Jl. Mayang, piutang denda sewa kios bedak Jl. Kelud, piutang denda sewa kios bedak Jl. A.Yani dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

b. Piutang Denda Lain-Lain PAD yang Sah adalah Piutang Denda Hasil Sewa BMD dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan nilai piutang berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Agustus 2020 nomor 900/3323/410.107.3/2020 perihal Pemutusan Perjanjian Sewa Waterpark Sumber Udel Kota Blitar sebesar Rp102.500.000,00.

c. Piutang Hasil Sewa BMD

- 1) Piutang fasilitas rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dengan nilai piutang berdasarkan data tunggakan listrik dan air yang belum dibayar oleh penyewa rusunawa.





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Piutang hasil sewa BMD berdasarkan Surat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tanggal 20 Oktober 2022 nomor 032/3829/410.206.6/2022 perihal Tagihan ke-2 Kontribusi Tahunan Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dan berdasarkan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Linggajati Al Mushowa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya, sebagai upaya penagihan lagi, berdasarkan Surat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tanggal 11 Januari 2024 nomor 000.2.3.2/10/410.202/2024 perihal Tagihan Kontribusi Tahunan Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tahun 2022, 2023 dan 2024.
- d. Piutang BLUD dikelola oleh RSUD Mardi Waluyo dengan nilai piutang berdasarkan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023.
- e. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - 1) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46 adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh BPKAD dengan nilai piutang berdasarkan Surat dari PT Bank BNI (Persero) Tbk. tanggal 23 Januari 2024 nomor BLT/1/0138 perihal Konfirmasi Data KPUK.
 - 2) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja.
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Bank BPR Jatim adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar.
- f. Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah merupakan Piutang atas jasa giro pada PT BPD Jawa Timur Tbk.
- g. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah merupakan Piutang Bunga Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria.
- h. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yaitu piutang denda atas keterlambatan penyampaian Laporan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebesar Rp1.250.000,00 berdasarkan Surat Teguran



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 973/4410/410.206.2/2022.

Rincian pengelompokan umur piutang secara detail berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar disajikan pada **Lampiran 2**.

Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
13. Transfer Antar Daerah	(Rp) 0,00	(Rp) 6.210.167.100,00

Piutang Transfer Antar Daerah adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas Dana Bagi Hasil Provinsi yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
14.	82.087.000,00	19.918.000,00

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD adalah jumlah yang akan jatuh tempo atas Investasi Non Permanen kepada BUMD dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD merupakan reklasifikasi dari Pinjaman kepada Perumda Tirta Patria berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Rescheduling* Pinjaman PDAM Tahap I dan II. Perhitungan atas Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD terdapat pada Tabel 63 *Rescheduling* Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
15.	(15.222.985.826,27)	(14.560.982.151,48)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pengelompokan umur Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Piutang Bagi Hasil Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar (Rp15.222.985.826,27) atau naik 4,55% dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar (Rp14.560.982.151,48). Hal ini dikarenakan banyaknya piutang yang umurnya lebih dari 3 dan lebih dari 5 Tahun belum dilunasi sehingga mengakibatkan kenaikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih di Tahun 2023. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana tabel berikut:

Tabel 56 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Umur Piutang			
		2023	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
A.	Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 3 Tahun		0 s.d 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
1	Piutang Retribusi	7.271.742.095,00	171.780.800,00	53.615.000,00	83.431.700,00	6.952.914.595,00
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7.004.991.945,00	0,00	5.361.500,00	46.715.850,00	6.952.914.595,00
B.	Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 5 Tahun		0 s.d 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
2	Piutang Pajak	11.830.740.522,00	3.353.811.158,00	739.641.836,00	1.772.869.351,00	5.964.418.177,00
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.924.817.036,10	0,00	73.964.183,60	886.434.675,50	5.964.418.177,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.900.033.821,61	10.145.315.265,15	315.512.722,00	355.160.523,00	1.084.045.311,46
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.293.176.845,17	0,00	31.551.272,20	177.580.261,50	1.084.045.311,47
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang	31.002.516.438,61	13.670.907.223,15	1.108.769.558,00	2.221.461.574,00	14.001.378.083,46
	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.222.985.826,27	0,00	110.876.955,80	1.110.730.787,00	14.001.378.083,47
	Net Realizable Value (NRV)	15.779.530.612,34	13.670.907.223,15	997.892.602,20	1.110.730.787,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyajian umur piutang yang perlu diketahui nilai detail per Tahun khususnya Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada **Lampiran 3, s.d. Lampiran 6.**

16.	Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		27.787.500,00	69.627.083,33

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.787.500,00 atau turun 60,09% dibandingkan dengan saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.627.083,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2023	2022
1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	187.500,00	187.500,00
2	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika	27.286.868,67	69.106.250,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	333.333,33	333.333,33
	Jumlah	27.787.500,00	69.627.083,33

Tabel 58 Perhitungan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Beban Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
1.	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Surat perjanjian Nomor 003/C-03/ATN/III/2023 Pembayaran belanja domain/hosting alamat web smkn1blitar.sch.id sesuai SP2D Nomor 02890/LSBL tanggal 27 Maret 2023	750.000,00	187.500,00	562.500,00	24 Maret 2023 s/d 24 Maret 2024
2.	Dinas	Nota Nomor 0146/CORETECH/IX2	1.000.000,00	333.333,33	666.666,67	Juni 2023 s/d Mei



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Beban Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
	Pariwisata	023 Pembayaran belanja sewa domain website visitblitar.com Rp 1.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 06862/LSBL tanggal 23 Mei 2023				2024
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 28.088/PO/XI/2023 Pembayaran Belanja Jasa Layanan Wa Sender Rp7.200.000,00 sesuai SP2D Nomor 23104/LSBL tanggal 11 Desember 2023	7.200.000,00	6.600.000,00	600.000,00	Desember 2023 s/d Nopember 2024
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 25.003/andromeda/III/2023 Belanja Sewa Lisensi Antivirus ESET Internet Security dan Cyber Security Pro Rp1.500.000,00 sesuai SP2D Nomor 23104/LSBL tanggal 11 Desember 2023	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	Maret 2023 s/d Maret 2024
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 25.003/andromeda/XI/2023	15.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	Nopember 2023 s/d Oktober 2024
		Pembayaran Belanja Sewa Lisensi Imunify 360 Security Web Server Rp15.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 20957/LSBL tanggal 24 Nopember 2023				
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 3.0065/NP/V/2023	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	Juni 2023 s/d Mei 2024
		Pembayaran Belanja Sewa Layanan Socket Secure Layer Rp 6.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 07926/LSBL tanggal				



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Beban Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
		9 Juni 2023				
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 28.086/PQ/VI/2023	13.000.000,00	5.416.686,67	7.583.333,33	Juni 2023 s/d Mei 2024
		Pembayaran Belanja Sewa Layanan Google Playstore dan Google Routes Rp13.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 09117/LSBL tanggal 23 Juni 2023				
Jumlah			44.450.000,00	27.787.500,00	16.662.500,00	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
17. Persediaan	(Rp)	(Rp)
	17.722.360.194,36	22.266.641.952,57

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 17.722.360.194,36 tersebut terdiri dari:

Tabel 59 Daftar Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	2023	2022	Naik/(Turun) (Rp)	Naik/(Turun) (%)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	91.564.105,00	149.729.175,00	(58.165.070,00)	(38,85)
2	Bahan Kimia	500.067.431,48	436.950.106,81	63.117.324,67	14,44
3	Bahan Bakar dan Pelumas	244.250,00	17.974.000,00	(17.729.750,00)	(98,64)
4	Bahan/Bibit Tanaman	49.213.460,00	77.607.030,00	(28.393.570,00)	(36,59)
5	Isi Tabung Gas	1.200.010,00	2.342.000,00	(1.141.990,00)	(48,76)
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37.250.500,00	37.686.000,00	(435.500,00)	(1,16)
7	Bahan Lainnya	1.069.229.605,38	132.969.626,50	936.259.978,89	704,12
8	Suku Cadang Alat Angkutan	3.231.500,00	609.600,00	2.621.900,00	430,10
9	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	100,00
10	Suku Cadang Alat Laboratorium	10.193.100,00	0,00	10.193.100,00	100,00
11	Alat Tulis Kantor	396.731.128,00	505.782.592,00	(109.051.464,00)	(21,56)
12	Kertas dan Cover	56.438.916,82	32.520.192,00	23.918.724,82	73,55



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Rekening	2023	2022	Naik/(Turun) (Rp)	Naik/(Turun) (%)
13	Bahan Cetak	461.934.758,03	665.381.258,75	(203.446.501,72)	(30,58)
14	Benda Pos	412.960,00	100.000,00	312.960,00	312,96
15	Bahan Komputer	76.041.073,00	123.879.525,00	(47.838.452,00)	(38,62)
16	Perabot Kantor	243.055.329,00	382.984.733,00	(139.909.404,00)	(36,53)
17	Alat Listrik	105.764.542,00	133.582.270,00	(27.817.728,00)	(20,82)
18	Perlengkapan Dinas	907.340.800,00	927.666.550,00	(20.325.750,00)	(2,19)
19	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.175.000,00	23.305.400,00	(22.130.400,00)	(94,86)
20	Suvenir/Cendera Mata	8.877.500,00	8.446.800,00	430.700,00	5,08
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.244.156.018,00	592.826.195,00	651.329.823,00	109,87
22	Obat	5.170.379.534,11	7.444.102.287,83	(2.273.722.753,72)	(30,54)
23	Obat-obatan Lainnya	6.510.401.935,40	7.343.956.548,88	(833.554.613,48)	(11,35)
24	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	633.276.457,73	707.388.056,20	(74.111.598,47)	(10,48)
25	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	2.402.309.438,00	(2.402.309.438,00)	(100,00)
26	Pakan	571.000,00	1.479.150,00	(908.150,00)	(61,40)
27	Natura dan Pakan Lainnya	136.515.280,40	115.083.416,60	21.431.863,80	18,62
28	Komponen Peralatan	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	100,00
Jumlah		17.722.360.194,36	22.266.641.952,57	(4.544.281.758,21)	(20,41)

Untuk Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 terlampir pada **Lampiran 7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar menerima Hibah Persediaan sebesar Rp 5.128.998.318,06 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima hibah dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI berupa Bahan Cetak (Blangko KTP Elektronik) senilai Rp 112.002.000,00.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur senilai total Rp 280.886.842,50 berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerima hibah sebesar Rp 207.877.965,00 meliputi :
 - 1) Alat Tulis Kantor senilai Rp 1.350.000,00 berupa Buku Saku PMK dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Bahan Cetak senilai Rp 10.068.250,00 berupa Banner PHMS (PMK dan LSD) dan Leaflet PMK senilai dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
 - 3) Perabot Kantor berupa Box Plastik Shinpo senilai Rp 1.353.645,00 dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
 - 4) Obat sebesar Rp 223.436.765,00 yang berasal dari; Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- d. Dinas Kesehatan Menerima hibah persediaan berupa Obat sebesar Rp 1.026.531.929,54 dan Obat-obatan lainnya sebesar Rp 1.876.190.310,42 serta Bahan Cetak senilai Rp 5.205.812,25 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah persediaan berupa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai Rp 990.282.490,00 dan Obat senilai Rp 24.375.000,00. dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

Laporan persediaan di tahun anggaran 2023 terdapat persediaan yang dicatat melebihi satu tahun. Persediaan yang melebihi satu tahun yang terdapat pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

Terdapat perlengkapan dinas senilai Rp872.518.700,00 berupa seragam sekolah yang belum diserahkan.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persediaan yang melebihi satu tahun tercatat di rekening Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa peralatan untuk praktikum senilai Rp53.940.000,00. Persediaan peralatan praktikum ini tercatat melebihi satu tahun karena belum diserahkan.

Laporan persediaan di tahun anggaran 2023 terdapat persediaan yang telah melewati batas tanggal pemakaian (kadaluwarsa) dan telah dilakukan penghapusan yang terdapat pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat Barang Persediaan yang kadaluarsa berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp183.669.395,00.

b. Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Terdapat Barang Persediaan yang kadaluarsa berupa Obat sebesar Rp30.123.980,388.

c. Puskesmas Kepanjenkidul

Terdapat Barang Persediaan yang kadaluarsa berupa Obat sebesar Rp30.123.980,388.

7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Investasi Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Investasi Non Permanen				
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	840.788.000,00	-62.169.000,00	(7,39)
	Investasi Dana Bergulir	5.384.595.371,81	5.518.425.894,27	-133.830.522,46	(2,43)
	Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih	(3.741.810.501,27)	(3.835.392.276,99)	93.581.775,72	(2,44)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	2.421.403.870,54	2.523.821.617,28	-102.417.746,74	(4,06)
2	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.851.488.497,36	27.246.346.087,05	(1.294.857.589,69)	(4,75)
	Jumlah Investasi Permanen	25.851.488.497,36	27.246.346.087,05	(1.294.857.589,69)	(4,75)
	Jumlah Total	28.372.892.367,90	29.770.167.704,33	(1.397.275.336,43)	(4,69)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.372.892.367,90 mengalami penurunan sebesar 4,69% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.770.167.704,33. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana tabel di atas dirinci sebagai berikut:

1.	Investasi Permanen	Non	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
			2.421.403.870,54	2.523.821.617,28

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.421.403.870,54 mengalami penurunan sebesar Rp102.417.747 atau turun 4,06% dibandingkan dengan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.523.821.617,28. Investasi Non Permanen Tahun 2023 berupa Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp778.619.000,00 dan Investasi pada Dana Bergulir dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.384.595.371,81. *Net Realizable Value* (NRV) Investasi Non Permanen disajikan sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	840.788.000,00	(62.169.000,00)	(7,39)
Investasi Dana Bergulir	5.384.595.371,81	5.518.425.894,27	(133.916.729,36)	(2,43)
Jumlah Investasi (Harga Perolehan)	6.163.214.371,81	6.359.213.894,27	(195.999.522,46)	(3,08)
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(99.590,00)	0,00	(99.590,00)	0,00
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(3.741.710.911,27)	(3.835.392.276,99)	93.681.365,72	(2,44)
Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih	(3.741.810.501,27)	(3.835.392.276,99)	93.581.775,72	(2,44)
Net Realizable Value (NRV)	2.421.403.870,54	2.523.821.617,28	(102.417.746,74)	(4,06)

Penjelasan rinci atas Investasi Non Permanen adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.	Investasi Kepada BUMD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		778.619.000,00	840.788.000,00

Investasi Kepada BUMD merupakan Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 dengan nilai pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 yang telah dilunasi sebesar Rp492.164.000,00 sehingga nilai pinjaman per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.836.000,00.
- b. Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00 yang mana belum ada pelunasan sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2023 Rp778.619.000,00 mengalami penurunan sebesar 7,39% dari nilai pinjaman per 31 Desember 2022 Rp840.788.000,00 dikarenakan reklasifikasi dari Investasi Non Permanen ke Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Investasi Non Permanen kepada BUMD sebesar Rp82.087.000,00. Rincian mutasi pinjaman kepada perusahaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah sebelum Rescheduling

(dalam Rupiah)

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2023	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2023
I. PERJANJIAN NO 23/2002					
1	31/12/2011	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
2	31/12/2012	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
3	31/12/2013	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
4	31/12/2014	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
5	31/12/2015	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
6	31/12/2016	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
7	31/12/2017	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
8	31/12/2018	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
9	31/12/2019	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2023	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2023
10	31/12/2020	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
	Jumlah	820.870.000,00	0,00	820.870.000,00	0,00
II. PERJANJIAN NO 6/2001					
1	31/12/2006	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
2	31/12/2007	106.400.000,00	15.000.000,00	91.400.000,00	0,00
3	31/12/2008	106.400.000,00	212.164.000,00	(105.764.000,00)	0,00
4	31/12/2009	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
5	31/12/2010	106.400.000,00	225.000.000,00	(118.600.000,00)	0,00
6	31/12/2011	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00
	Jumlah	532.000.000,00	492.164.000,00	39.836.000,00	0,00
	Total	1.352.870.000,00	492.164.000,00	860.706.000,00	0,00

Pada Tanggal 8 Juni 2020 telah diajukan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor 903/192/410.400.01/2020 perihal permohonan penyelesaian pinjaman PDAM kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar. Surat tersebut menyatakan bahwa rencana pelunasan sisa pinjaman Tahap I berdasarkan perjanjian Nomor 6 Tahun 2001 sebesar Rp39.836.000,00 dan permohonan penyesuaian pinjaman Tahap II berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 sebesar Rp820.870.000,00 menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar kepada PDAM mengingat kondisi keuangan PDAM Kota Blitar masih mengalami kerugian. Menindaklanjuti surat tersebut, telah ditetapkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022 antara Pemerintah Kota Blitar dengan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Blitar tentang *Rescheduling* Pinjaman PDAM Tahap I dan Tahap II sebagai upaya penyelesaian pinjaman yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan penjelasan dalam tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 63 Rescheduling Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022

(dalam Rupiah)

<i>Rescheduling</i>	<i>Tahun Jatuh Tempo</i>	<i>Nilai</i>	<i>Bagian Lancar Tahun 2023</i>	<i>Investasi Non Permanen</i>
I. PERJANJIAN NO 23/2002				
	31/12/2024	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2025	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2026	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2027	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2028	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2029	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2030	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2031	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2032	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2033	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
		820.870.000,00		820.870.000,00
II. PERJANJIAN NO 6/2001				
	31/12/2023	19.918.000,00	0,00	19.918.000,00
	31/12/2023	19.918.000,00	0,00	19.918.000,00
		39.836.000,00	0,00	39.836.000,00
Jumlah		860.706.000,00	0,00	860.706.000,00

	Dana	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2. Investasi Bergulir		5.384.595.371,81	5.518.425.894,27

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Nilai Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.384.595.371,81 atau turun 2,43% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.518.425.894,27 dengan mutasi penambah dan pengurang atas Investasi Dana Bergulir terlampir pada **Lampiran 8** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

Rincian Investasi Dana bergulir pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Pemberdayaan Masyarakat Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp95.030.000,00

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.030.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan kategori macet dikarenakan peminjam sebagian besar tidak berdagang lagi pada kios pasar sehingga sulit ditelusuri keberadaannya, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar sebesar Rp40.071.250,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/1245/410.010.3/2020 atau Nomor : 251/KRD/BPR/BLT/2020 tentang Pengelolaan Kredit Modal Kerja Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 23 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 7 Tahun 2006 atau Nomor : 601/KRD/BLT/2006 yang telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 100 Tahun 2007 atau Nomor : 061/KRD/BLT/2007 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 3 Tahun 2013 atau Nomor : 0486/KRD/BPR/BLT/2013 dan telah diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 08 Tahun 2017 atau Nomor : 91/KRD/BPR/BLT/2017. Nilai Investasi dana bergulir pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.071.250,00 yang merupakan nilai pokok pinjaman yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.071.250,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 dengan kategori macet dikarenakan peminjam telah berusia lanjut dan tidak berdagang lagi, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KOTA BITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) melalui Bank BNI yang dikelola oleh BPKAD sebesar Rp550.000.000,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan Bank BNI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Terakhir Nomor 1097 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2023. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dan pembaruan Perjanjian Penyaluran dan Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 1 A Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan sekaligus menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 19 Maret 2020 serta pelaksanaan selanjutnya. Pengelolaan pinjaman KPUK dilaksanakan melalui dua rekening BNI, yakni rekening Nomor 0055308986 yang digunakan untuk menampung dana pokok dan pengembalian pokok pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.308.694,00 serta rekening nomor 0053545590 yang digunakan untuk menampung pendapatan bunga pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Sisa saldo pokok pinjaman KPUK – Bank BNI pada 31 Desember 2023 sama dengan saldo pada 31 Desember 2022 sebesar Rp550.000.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 64 Investasi Dana Bergulir pada BPKAD

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo di rekening 0055308986	39.294.070,00	39.294.070,00	0,00	0,00
Tunggakan pokok (baki debet)	510.705.930,00	510.705.930,00	0,00	0,00
Jumlah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00

- d. Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja sebesar Rp 4.699.494.121,81.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp4.699.407.914,91 atau turun 2,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.833.324.644,27 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 65 Daftar Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

(dalam Rupiah)

No	Jenis Perguliran	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	UM	3.625.060.464,65	3.751.888.428,69	(126.818.964,24)	(3,38)
2	Koperasi	1.074.424.657,16	1.081.436.215,38	(7.011.558,22)	(0,65)
	Jumlah	4.699.494.121,81	4.833.324.644,27	(133.830.522,46)	(2,77)

Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp4.785.210,78 Nilai tersebut terdiri dari:

- Rp148.559,21 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang belum disetorkan ke RKUD yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- Rp4.636.651,57 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan saldo untuk pemeliharaan rekening buku tabungan dana bergulir agar tetap aktif dengan realisasi SP2D Nomor 05.30/04.0/000041/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/P.05/12/2023 Tanggal 2 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00 dan SP2D Nomor 05.30/04.0/000034/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/P.05/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp200.000,00.

3.	Penyisihan Investasi Permanen Tertagih	Non Tak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			(Rp)	(Rp)
			(3.741.810.501,27)	(3.835.392.276,99)

Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih terdiri dari penyisihan investasi tak tertagih atas pinjaman kepada perusahaan daerah dan penyisihan investasi tak tertagih atas investasi dana bergulir sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 66 Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(99.590,00)	(745.784.200,00)
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(3.741.710.911,27)	(3.835.392.276,99)
Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih	(3.741.810.501,27)	(4.581.176.476,99)

Perhitungan atas penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2023 atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 67 Klasifikasi Penyisihan Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria

(dalam Rupiah)

Uraian	Belum Jatuh Tempo	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	Jatuh tempo pada periode > 2 s.d 3 Tahun	Jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	Jumlah
Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria	840.788.000,00	19.918.000,00	0,00	0,00	0,00	860.706.000,00
% penyisihan	0%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	99.590,00	0,00	0,00	0,00	99.590,00
Net Realizable Value	840.788.000,00	19.818.410,00	0,00	0,00	0,00	860.606.410,00

Berdasarkan *Rescheduling* Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022, perhitungan atas nilai bersih Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dengan mengelompokkan investasi yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*) yaitu jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun sebesar Rp19.918.000,00, jatuh tempo pada periode >2 s.d 3 Tahun sebesar Rp0,00, jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun sebesar Rp0,00, jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun sebesar Rp0,00.

Perhitungan atas penyisihan Investasi Dana Bergulir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 68 Klasifikasi Penyisihan Investasi Non Permanen (Investasi Dana Bergulir Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
A.	Investasi Dana Bergulir						
1	Pemberdayaan Masyarakat Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	95.030.000,00
2	Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071.250,00	40.071.250,00
3	Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil melalui BNI 46	39.294.070,00	0,00	0,00	0,00	510.705.930,00	550.000.000,00
4	Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.494.121,81	4.699.494.121,81
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	39.294.070,00	0,00	0,00	0,00	5.345.301.301,81	5.384.595.371,81
	% penyisihan	0,00	0,05	0,15	0,40	0,70	
	Penyisihan investasi dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.710.911,27	3.741.710.911,27
	Net Realizabel Value (NRV)	39.294.070,00	0,00	0,00	0,00	1.603.590.390,54	1.642.884.460,54

Berdasarkan tabel di atas, penyajian Investasi Dana Bergulir dalam kategori lancar sebesar Rp39.294.070,00 kategori dalam perhatian khusus Rp0,00, kategori kurang lancar sebesar Rp0,00, kategori diragukan sebesar Rp0,00 dan kategori macet sebesar Rp5.345.301.301,81.

2. Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	25.951.488.497,36	27.246.346.087,05

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen ini dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Patria dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja. Sedangkan Penyertaan modal pada PT Bank Jatim masih menggunakan metode biaya (*Cost Method*).

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.951.488.497,36 atau turun 4,75% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.246.346.087,05.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian saldo Investasi Permanen dibandingkan dengan Tahun lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)			
No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim - Metode Biaya	4.246.771.000,00	4.246.771.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria - Metode Ekuitas	12.085.709.868,37	13.139.609.843,05
3	Penyertaan Modal pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja -Metode Ekuitas	9.619.007.628,99	9.859.965.244,00
Jumlah		25.951.488.497,36	27.246.346.087,05

Penjelasan rinci atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim	(Rp)	(Rp)
	4.246.771.000,00	4.246.771.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.246.771.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 4.246.771.092,11. Nilai tersebut merupakan penyertaan modal sebanyak 16.987.084 lembar saham berdasarkan Surat Kolektif Saham Bank Jatim tanggal 10 Juli 2012. Penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Blitar menerima manfaat ekonomis dari investasi tersebut berupa dividen sejumlah 52,11 per saham yaitu sebesar Rp 885.196.947,24 atas bagian laba Tahun buku 2022 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tanggal 17 Maret 2023 No 51.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.		12.085.709.868,37	13.139.609.843,05

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang pendirian perusahaan air minum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, dikecualikan pasal yang mengatur tentang pendirian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.085.709.868,37. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sama dengan saldo per 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Perumda Tirta Patria per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.085.709.868,37. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria dihitung dengan menggunakan Metode Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar s.d. tahun 2023	Rp 40.282.368.963,58
2.	Penyertaan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp 5.981.471.897,50
3.	Hibah Pemerintah Provinsi Jatim	Rp 1.033.276.800,00
4.	Hibah Pemerintah Kota Blitar	<u>Rp 214.753.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal Kota Blitar	Rp 47.511.870.661,08
1.	Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(Rp 155.828.367,00)
2.	Rugi s.d 31 Desember 2022	(Rp 34.216.432.451,03)
3.	Rugi Tahun 2023	<u>(Rp 1.053.899.974,68)</u>
	Jumlah Ekuitas	Rp12.085.709.868,37

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.085.709.868,37 terdiri dari modal pendirian dan pembangunan sarana prasarana pengelolaan air minum.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sumber pencatatan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Patria diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp40.282.368.963,58, berdasarkan:
 - 1) Hibah Non Kas dari Pusat atas utang sebesar Rp19.284.423.541,58 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2) Penyertaan modal dari penyetoran sebesar Rp20.997.945.422,00.
- b. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.981.471.897,50, berdasarkan:
 - 1) Berita Acara Penyerahan Proyek Dari Walikota Blitar kepada Direktur Utama PDAM Nomor 024/26/422.021/2000 Tanggal 22 Juni 2000 nilai atas penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp5.715.623.000,00;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 02/BAST/PK-PAMJT/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp167.917.200,00;
 - 3) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp97.931.697,50.
- c. Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.033.276.800,00, berdasarkan:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 29/BAST/PK-PAMJT/2008 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp258.744.200,00;
 - 2) BAST Pengelolaan Sementara Hasil Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Blitar Nomor 602.1/750/121/PP/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Prasarana Perkotaan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur TA 2004 kepada Plt. Direktur Utama PDAM sebesar Rp645.389.800,00;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Surat perintah mengeluarkan barang Tanggal 29 April dan 11 Mei 2011 atas pekerjaan SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur di Kota Blitar sebesar Rp31.142.800,00;
 - 4) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp98.000.000,00.
- d. Hibah dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp214.753.000,00, berdasarkan:
- 1) Dokumen bantuan instalasi perpompaan sesuai SK Walikota Blitar Nomor 188/249/HK/422.010/06 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp38.500.000,00;
 - 2) Proposal Bantuan Renovasi Gedung Kantor PDAM Pagar Pengaman, Pengadaan Meubelair pada Tahun 2011 sebesar Rp176.253.000,00.

	Penyertaan Modal pada	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Perumda Bank	(Rp)	(Rp)
3.	Perkreditan Rakyat		
	Artha Praja	9.619.007.628,99	9.859.965.244,00

Pada Tahun 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Dengan ditetapkannya peraturan ini, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dikecualikan pasal yang mengatur tentang pendirian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9.619.007.628,99. Nilai Penyertaan Modal turun sebesar 2,44% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.859.965.244,00 dikarenakan penurunan laba dari tahun sebelumnya.

Kepemilikan modal Pemerintah Kota Blitar pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat adalah 100% sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Rp 8.000.000.000,00 Desember 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2)	Akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2023	Rp	1.759.282.913,99
3)	Pembagian deviden	Rp	(140.275.285,00)
	Nilai Investasi per 31 Desember 2023	Rp	9.619.007.628,99

Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

1)	Investasi awal Tahun 2004	Rp	1.000.000.000,00
2)	Penambahan modal Tahun 2010	Rp	250.000.000,00
3)	Penambahan modal Tahun 2012	Rp	750.000.000,00
4)	Penambahan modal Tahun 2015	Rp	1.500.000.000,00
5)	Penambahan modal Tahun 2016	Rp	2.000.000.000,00
6)	Penambahan modal Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
7)	Penambahan modal Tahun 2018	Rp	1.500.000.000,00
	Jumlah	Rp	8.000.000.000,00

Sedangkan akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

1)	Cadangan Umum	Rp	827.964.232,59
2)	Cadangan Tujuan	Rp	827.964.232,59
3)	Laba Tahun 2022	Rp	103.354.448,81
	Jumlah	Rp	1.759.282.913,99

7.5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah guna menjamin kepastian, ketepatan dalam pencatatan dan akurasi data sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah





**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

serta turunannya yaitu Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 105 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 70 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
1	Tanah	1.556.848.763.241,00	134.353.651.482,00	36.927.473.953,00	1.654.274.940.770,00
2	Peralatan dan Mesin	653.613.141.650,72	27.569.547.880,00	12.685.403.852,80	668.497.285.677,82
3	Gedung dan Bangunan	879.158.174.243,70	67.500.806.040,00	10.958.115.540,56	935.702.864.743,14
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	886.214.906.722,32	47.291.565.043,46	1.098.938.799,00	932.407.532.966,78
5	Aset Tetap lainnya	42.253.155.547,34	2.106.178.912,00	799.087.050,00	43.560.247.409,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.513.433.175,00	3.354.089.541,00	1.513.433.175,00	3.354.089.541,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.392.581.785.067,15)	(153.739.109.453,85)	(13.995.998.297,25)	(1.532.324.896.223,75)
Jumlah Aset Tetap		2.627.019.789.512,93	128.436.729.444,61	49.984.454.073,21	2.705.472.064.884,33

Tabel 71 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja Modal	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Hibah	Reklasifikasi Antar Akun	Kurang Catat Penilaian Aset	Realisasi Belanja BOS	Koreksi Kurang Catat Saldo Awal 2023	Jumlah Mutasi Tambah
Tanah	-	-	-	24.880.600,00	109.418.268.136,00	-	24.910.482.746,00	134.353.651.482,00
Peralatan dan Mesin	34.255.511.972,00	-	469.082.310,00	674.124.952,00	-	2.086.796.646,00	104.032.000,00	27.569.547.880,00
Gedung dan Bangunan	62.954.436.910,00	3.769.200,00	2.847.771.000,00	1.409.628.930,00	-	-	285.800.000,00	67.500.806.040,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	45.385.635.848,00	-	-	1.886.629.197,46	-	-	159.300.000,00	47.291.565.043,46
Aset Tetap Lainnya	295.710.000,00	-	104.808.676,00	41.679.000,00	-	1.664.190.236,00	-	2.106.178.912,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	3.354.089.541,00	-	-	-	3.354.089.541,00
Total	132.762.284.728,00	3.769.200,00	3.421.481.886,00	7.372.423.229,46	109.418.268.136,00	3.739.986.882,00	25.459.614.746,00	282.175.838.898,46

Tabel 72 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Reklasifikasi Antar Akun	Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	Penghapusan	Hibah keluar	Lebih Catat Penilaian Aset	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal 2023	Jumlah Mutasi Kurang
Tanah	3.351.500.000,00	-	-	7.379.973.000,00	2.628.338.850,00	23.599.261.103,00	36.927.473.953,00
Peralatan dan Mesin	41.679.000,00	738.627.487,00	6.031.646.965,90	3.873.265.400,00	-	-	12.685.403.852,80
Gedung dan Bangunan	4.218.678.241,46	373.381.000,00	4.606.836.295,10	1.445.880.000,00	-	311.360.000,00	10.958.115.540,56
Jalan, Irigasi & Jaringan	586.096.799,00	612.840.000,00	-	-	-	-	1.098.938.799,00
Aset Tetap Lainnya	303.302.050,00	8.750.000,00	467.635.000,00	-	-	-	799.087.050,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	1.513.433.175,00
Total	8.501.649.899,46	1.633.598.487,00	13.125.712.265,00	12.699.098.400,00	2.628.338.850,00	23.877.621.103,00	63.980.452.370,46



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.705.472.064.884,33 atau naik sebesar 2,99% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.627.019.789.512,93. Selanjutnya informasi terkait rincian Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 9** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Rincian Aset Tetap per jenis aset adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	1.654.274.940.770,00	1.556.848.763.241,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.654.274.940.770,00 atau naik 6,26% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.556.848.763.241,00. Rincian mutasi Tanah Tahun 2023 sebagai berikut

:

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 1.556.848.763.241,00

Mutasi Tambah:

- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap-Tanah berupa Appraisal Pengadaan Tanah Radius Lengkung Kel. Plosokerep pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 24.880.600,00 |
| b. Koreksi penambahan dan/atau hasil pemecahan data inventaris jalan karena sertifikat terbit tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 109.418.288.136,00 |
| c. Koreksi penambahan dan/atau hasil pemecahan data inventaris jalan karena sertifikat terbit tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 24.910.482.746,00 |
| Jumlah | Rp | 134.353.651.482,00 |

Mutasi Kurang:

- | | | |
|---|----|------------------|
| a. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah ke Aset Lainnya-Aset Lain-Lain berupa tanah bawah jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bukan | Rp | 1.023.300.000,00 |
|---|----|------------------|



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

merupakan kewenangan Kota Blitar		
b. Reklasifikasi atas pencatatan nilai BGS BPR Artha Praja dengan lokasi di PIAIH pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari Aset Tetap-Tanah ke Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	2.328.600.000,00
c. Hibah Tanah berdasarkan BAST antara Pemerintah Kota Blitar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Nomor 033.2/0114/410.202.7/2023 dan Nomor W.15.PAS.PAS.16.PB.05.03-004/2023 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar	Rp	4.020.919.000,00
d. Hibah Tanah berdasarkan BAST antara Pemerintah Kota Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor 033.2/3368/410.202.7/2023 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar sebesar Rp3.359.054.000,00 berupa:		
1). Kantor polsek Sananwetan	Rp	754.500.000,00
2). Kantor Polsek Sukorejo	Rp	405.854.000,00
3). Tanah sawah	Rp	2.198.700.000,00
e. Koreksi penyesuaian data tanah jalan yang disesuaikan nilainya karena sertifikat tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.629.339.850,00
f. Koreksi penyesuaian data tanah jalan yang disesuaikan nilainya karena sertifikat sd. tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	18.191.729.003,00
g. Koreksi penyesuaian data tanah saluran yang digabung dengan data tanah jalan karena sertifikat jadi satu sd. tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	5.374.532.100,00
Jumlah	Rp	36.927.473.953,00
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Tanah	Rp	97.426.177.529,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	1.654.274.940.770,00

2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
------------------------	--------------------------	--------------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

668.497.285.677,82

653.613.141.650,72

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp668.497.285.677,82 atau naik 2,28% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp653.613.141.650,72 Rincian mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 653.613.141.650,72

Mutasi Tambah:

- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2023 | Rp | 24.255.511.972,00 |
| b. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2023 | Rp | 2.066.796.646,00 |
| c. Penerimaan Hibah sebesar
Rp469.082.310,00 pada: | | |
| 1). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sebesar Rp192.660.000,00 dari
Perpustakaan Nasional berdasarkan
SP2HB tanggal 16 Januari 2023
Nomor 030/38/410.114.1/2023 berupa: | | |
| a) 4 unit PC all in one | Rp | 63.232.000,00 |
| b) 1 unit digital library station | Rp | 14.820.000,00 |
| c) 1 unit led 43 inch + bracket | Rp | 7.904.000,00 |
| d) 1 unit UPS | Rp | 2.964.000,00 |
| e) 1 paket interior meubelair dan
jaringan komunikasi | Rp | 83.980.000,00 |
| f) Tablet android | Rp | 19.760.000,00 |
| 2). Dinas Perhubungan berupa barrier dari
Bank Jatim berdasarkan Berita Acara
Bantuan Sponsorship Pengadaan
Barrier Jalan Merdeka Nomor
062/1158.1/BLT.UM/SRT | Rp | 29.304.000,00 |
| 3). Kelurahan Pakunden berupa Televisi
dari Perpustakaan Nasional berupa
Peralatan dan Mesin senilai
Rp82.372.770,00 berdasarkan BAST
Nomor : | | |
| a) 8840/4.2./PLK.03.01/X/2023 | Rp | 5.700.000,00 |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b) 8225/4.2./PLK.03.01/X/2023	Rp	9.049.760,00
c) 7170/4.2./PLK.03.01/IX/2023	Rp	46.549.200,00
d) 3536/4.2./PLK.03.01/VII/2023	Rp	4.889.650,00
e) 7163/4.2./PLK.03.04/IX/2023	Rp	16.184.160,00
4). Kelurahan Rembang berupa Televisi dari Perpustakaan Nasional berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp82.372.770,00 berdasarkan BAST Nomor :		
a) 8841/4.2./PLK.03.01/X/2023	Rp	5.700.000,00
b) 8226/4.2./PLK.03.01/X/2023	Rp	9.049.760,00
c) 7171/4.2./PLK.03.01/IX/2023	Rp	46.549.200,00
d) 3537/4.2./PLK.03.01/VII/2023	Rp	4.889.650,00
e) 7164/4.2./PLK.03.04/IX/2023	Rp	16.184.160,00
5). Kelurahan Kauman berupa Televisi dari Perpustakaan Nasional berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp82.372.770,00 berdasarkan BAST Nomor :		
a) 8839/4.2./PLK.03.01/X/2023	Rp	5.700.000,00
b) 8224/4.2./PLK.03.01/X/2023	Rp	9.049.760,00
c) 7169/4.2./PLK.03.01/IX/2023	Rp	46.549.200,00
d) 3535/4.2./PLK.03.01/VII/2023	Rp	4.889.650,00
e) 7162/4.2./PLK.03.04/IX/2023	Rp	16.184.160,00
d. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp473.315.352,00 pada RSUD Mardi Waluyo berupa elevator	Rp	473.315.352,00
e. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kelurahan Blitar berupa Lampu Lighting dan Rigging	Rp	140.000.000,00
f. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Aset tetap lainnya sebesar Rp60.809.600,00 pada:		
1). Dinas Pendidikan sebesar		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp35.159.600,00 berupa :		
a) Multimedia Speaker Sound System pada SDN Ngadirejo II	Rp	3.129.600,00
b) Soundsystem dan LCD pada SDN Kepanjenkidul II	Rp	16.600.000,00
c) Soundsystem pada SDN Kepanjenkidul I	Rp	7.000.000,00
d) Speaker pada SDN Bendo II	Rp	2.430.000,00
e) Microphone pada SDN Gedog I	Rp	2.000.000,00
f) Soundsystem pada SDN Sentul I	Rp	4.000.000,00
2). UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 sebesar Rp25.650.000,00 berupa :		
a) Sound System	Rp	7.000.000,00
b) Amplifier TOA/ZA-230W	Rp	2.200.000,00
c) Sound System	Rp	14.250.000,00
d) Mixer Audio Asley 8 Channel	Rp	2.200.000,00
g. Penilaian atas asset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.032.000,00 pada:		
1). Dinas Perumahan Rakyat berupa fire hydrant	Rp	6.400.000
2). Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp97.632.000,00 berupa:		
a) Sepeda motor honda nf 100lsd 4 buah	Rp	12.832.000,00
b) Pick Up Mitsubishi L200	Rp	84.800.000
Jumlah	Rp	27.569.547.880,00

Mutasi Kurang:

a. Belanja Modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria asset tetap	Rp	734.460.487,00
b. Reklasifikasi dari aset tetap - peralatan dan mesin ke persediaan sebesar Rp567.000,00		
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Wajan	Rp	117.000,00
2) Dinas Kesehatan berupa SD Card kamera digital	Rp	450.000,00
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap- Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan berupa baterai laptop yang direalisasikan pada belanja modal pada Dinas Kesehatan	Rp	Rp3.600.000,00
d. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap-Peralatan dan Mesin ke Aset
Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp41.670.000,00 pada:

- 1). UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
berupa:
 - a) Gitar Akustik Elektrik Yamaha Rp 3.800.000,00
 - b) Gitar Bass elektrik Rp 5.500.000,00
 - c) BASS DRUM 24" + Carrier Rp 26.370.000,00
- 2). UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
berupa alat hadrah Rp 6.000.000,00
- c. Penghapusan asset sebesar
Rp8.031.840.965,90 pada:
 - 1). Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan SK Penghapusan
Nomor 188 / 2 / KEP / 410.020.3 /
2023 tanggal 23 Januari 2023 Rp 24.750.000,00
 - 2). Dinas Kesehatan berdasarkan SK
Penghapusan Nomor 188 / 39 / KEP /
410.020.3 / 2023 Tanggal 05
Desember 2023 Rp 215.319.988,00
 - 3). Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian berdasarkan SK
Penghapusan Nomor 188 / 42 / KEP /
410.020.3 / 2023 Tanggal 20
Desember 2023 Rp 26.043.730,00
 - 4). UPTD DINAS KESEHATAN
KEC.SANANWETAN berdasarkan
SK Penghapusan Nomor 188 / 38 /
KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 05
Desember 2023 Rp 58.500.000,00
 - 5). UPTD DINAS KESEHATAN
KEC.SUKOREJO berdasarkan SK
Penghapusan Nomor 188 / 37 / KEP /
410.020.3 / 2023 Tanggal 05
Desember 2023 Rp 27.675.000,00
 - 6). Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kota Blitar berdasarkan SK
Penghapusan Nomor 188 / 190 / HK /
410.020.3 / 2023 Tanggal 09 Juni Rp 833.333.755,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2023

7). Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 288 / HK / 410.020.3 / 2023 Tanggal 31 Oktober 2023	Rp	68.800.000,00		
8). Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 332 / HK / 410.020.3 / 2023 Tanggal 29 Desember 2023	Rp	637.427.050,00		
9). Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188/ 198 / HK / 410.020.3 / 2023 tanggal 26 Juni 2023	Rp	6.139.991.442,90		
f. Pemberian Hibah sebesar Rp3.873.265.400,00 kepada:				
1). Kantor Pertanahan Kota Blitar dari BPKAD Kota Blitar berdasarkan BAST antara Pemerintah Kota Blitar dan Kantor Pertanahan Kota Blitar Nomor 033.2/5850/410.202.1/2023 dan 02/ HIBAH/ X/2023	Rp	291.907.400,00		
2). Kepolisian Resor Kota Blitar dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan BAST antara Pemerintah Kota Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor 033.2/3368/410.202.7/2023	Rp	3.581.358.000,00		
Jumlah	Rp	12.685.403.852,90		
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Peralatan dan Mesin			Rp	14.884.144.027,10
Saldo Akhir per 31 Desember 2023			Rp	668.497.285.677,82

Selain itu pada tahun 2023 terdapat hibah berupa laptop pada Dinas Kesehatan yang belum dilengkapi dengan BAST (hanya terdapat dokumen penyerahan barang) dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 73 Rincian Hibah Laptop pada Dinas Kesehatan

(dalam Rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Laptop Acer Travelmate	5	15.590.000,00	77.950.000,00
	Jumlah			77.950.000,00

Sehingga Laptop tersebut belum dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	935.702.864.743,14	879.158.174.243,70

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp935.702.864.743,14 atau naik 6,43% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp879.158.174.243,70. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 879.158.174.243,70

Mutasi Tambah:

- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2023 | Rp | 62.954.436.910,00 |
| b. Kapitalisasi Belanja Jasa berupa jasa penilai perawatan kelayakan gedung bangunan pada dinas pariwisata dan kebudayaan | Rp | 3.769.200,00 |
| c. Penerimaan Hibah pada Dinas Perdagangan berupa Pasar Rakyat Templek berdasarkan BAST Nomor 137/M-DAG/BAST/03/2023 Tanggal 15 Maret 2023 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Rp | 2.847.771.000,00 |
| d. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp190.907.200,00 pada: | | |
| 1) Kelurahan Ngadirejo berupa Tempat parkir Makam LK Bangsongan JL Cikandang RT 03 RW 04 | Rp | 37.450.000,00 |
| 2) Kelurahan Kepanjenlor berupa Taman bermain Posyandu Balita RW 6 | Rp | 14.750.000,00 |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Kelurahan Gedog sebesar Rp49.783.200,00 berupa :		
a)Rehab Balai Pertemuan lingkungan Asabri RW 15	Rp	13.941.600,00
b)Renovasi Gapura Masuk BTN Asabri RW 13	Rp	13.941.600,00
c)Rehab Gapura RW 05	Rp	21.900.000,00
4) Kelurahan Sananwetan berupa Pagar makam Makam Mbah Kandar	Rp	22.100.000,00
5) Kelurahan Bendogerit sebesar Rp66.824.000,00 berupa:		
a)Rehabilitasi Balai RW 07 (lanjutan)	Rp	20.100.000,00
b)Balai Makam Swangsang	Rp	26.502.000,00
c)Rehabilitasi Balai RW 02	Rp	20.222.000,00
e. Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.218.121.730,00 ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan pada:		
1). Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp123.358.240,00 berupa:		
1)Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu 2017	Rp	44.500.000,00
2)Review DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu	Rp	78.858.240,00
2). UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 berupa Perencanaan Atap Lapangan Basket	Rp	11.904.090,00
3). Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp580.162.400,00 berupa:		
a)penyusunan dokumen UKL- UPL/PKPLH Pembangunan Pasar Hewan Dimoro	Rp	97.047.500,00
b)Perencanaan Pembangunan Pasar Templek	Rp	98.597.400,00
c)Penyusunan UKL UPL Pembangunan Pasar templek	Rp	95.287.500,00
d)Perencanaan Pembangunan Pasar Dimoro	Rp	98.445.000,00
e)DED Kios PKL Jl Musi Barat	Rp	91.322.000,00
f) FS Kios PKL Jl Musi Barat Kota Blitar	Rp	99.463.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp157.724.500,00 berupa:		
a) Masterplan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.555.000,00
b) Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.417.500,00
c) Kajian BMX	Rp	58.752.000,00
5). Kecamatan Sananwetan Kajian DED Kelurahan Rembang	Rp	78.800.000,00
6). Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp266.172.500,00 berupa:		
a) Andalalin Pembangunan Sirkuit	Rp	94.847.500,00
b) Kajian Penyusunan Ded Pembangunan Sirkuit Bmx	Rp	95.892.500,00
c) Kajian Penyusunan UKL UPL Pembangunan Sirkuit BMX	Rp	75.432.500,00
f. Koreksi kurang catat atas Penilaian aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp285.800.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat berupa :		
1) Pagar Permanen Perum Wisma Indah Kepanjenlor	Rp	88.200.000
2) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Perum Tirtomadu Residence III	Rp	197.600.000
Jumlah	Rp	67.500.806.040,00

Mutasi Kurang:

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	Rp	373.381.000,00
b. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp473.315.352,00 pada:		
1). RSUD Mardi Waluyo berupa elevator	Rp	473.315.352,00
c. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp234.526.022,46 pada		
1). Dinas Perhubungan berupa Jaringan	Rp	121.489.700,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Listrik Lainnya		
2). Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa drainase pasar legi	Rp	53.000.000,00
3). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Duiker GEDUNG KESENIAN	Rp	14.536.322,46
4). Sekretariat DPRD berupa Perencanaan dan pengawasan pengaspalan halaman kntr dprd	Rp	10.500.000,00
5). Kelurahan Tanjungsari berupa Lampu Hias Tematik di RT 05 RW 05	Rp	35.000.000,00
d. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Lainnya -Aset Tidak Berwujud dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp156.747.326,00 pada:		
1) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa Jasa Konsultansi Perencanaan UTD	Rp	60.641.306,00
2) Dinas Kesehatan berupa Perencanaan Konstruksi Bangunan PSC	Rp	96.106.020,00
e. Koreksi Lebih Catat Gedung dan Bangunan pada dinas pariwisata berupa penilaian gedung pertemuan graha patria	Rp	311.360.000,00
f. Penghapusan sebesar Rp4.606.836.299,10 pada:		
1). Bagian umum berupa Halaman Parkir Kantor Walikota berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188/45/KEP/410.010.3/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Rp	194.745.000,00
2). Dinas Kesehatan berupa Rumah Dinas Dr. SpOG berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 32 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 07 November 2023	Rp	114.300.000,00
3). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Rumah Pompa berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 42 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 20 Desember 2023	Rp	16.295.000,00
4). Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp747.793.477,10 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 43 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 22 Desember 2023		
a) Penataan pagar aloon-aloon sebelah	Rp	197.858.000,00





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

selatan Ta 2017		
b)Perencanaan ,		
Pengawasan,pembangunan taman	Rp	351.258.780,99
selatan aloon-aloon TA 2018		
c)perencanaan,pengawasan,pembangun	Rp	198.676.696,11
an pagar pohon beringin di aloon-		
aloon		
5). Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	60.000.000,00
berupa bangunan kantor dan los pasar		
templek berdasarkan SK Penghapusan		
Nomor 188 / 35 / KEP / 410.020.3 /		
2023 Tanggal 24 November 2023		
6). UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	Rp	3.473.702.822,00
berupa Gedung Utama Pusk. Sukorejo		
berdasarkan SK Penghapusan Nomor		
188 / 33 / KEP / 410.020.3 / 2023		
Tanggal 07 November 2023		
g. Hibah sebesar Rp1.445.860.000,00 pada		
Bagian Umum berupa :		
1) Eks. Mahardhika/Polsek Sananwetan	Rp	160.000.000,00
2) Ruang Di Polsek Sanawetan	Rp	20.970.000,00
3) Gedung Polsek Sananwetan	Rp	263.637.000,00
4) Gedung Polsek Sukorejo	Rp	798.908.000,00
5) Rumah Dinas Jalan Muradi	Rp	202.345.000,00
h. Reklasifikasi antar akun asset tetap-Gedung		
dan Bangunan ke asset tetap-Konstruksi		
dalam Pengerjaan pada Dinas Penanaman	Rp	3.354.089.541,00
Modal dan PTSP berupa Mall Pelayanan		
Publik		
Jumlah	Rp	10.956.115.540,56
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Gedung dan	Rp	56.544.690.499,44
Bangunan	Rp	935.702.864.743,14
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		

Selain aset tersebut diatas, terdapat barang yang masih tercatat meski sudah dibongkar karena SK penghapusan diproses di bulan januari 2024, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 74 Rincian Gedung dan Bangunan yang Sudah Dibongkar Tetapi Belum Dilakukan Penghapusan

(dalam Rupiah)

No	OPD	Usulan Penghapusan	Nama Barang	Klasifikasi Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Akum. Penyusutan	Ket.
1	Kec Sananwetan	Pembongkaran/ Pemusnahan BMD	KANTOR KELURAHAN	Gedung dan Bangunan	1990	318.327.998,11	280.925.755,85	57.402.242,26	Pengajuan SK Penghapusan di bulan Januari 2024
			Kolam koi	Gedung dan Bangunan	2017	19.592.100,00	5.877.630,00	13.714.470,00	
			Galeri penjualan produk unggulan	Gedung dan Bangunan	2019	25.630.000,00	5.126.000,00	20.504.000,00	
			Tempat parkir untuk pelayanan masyarakat	Gedung dan Bangunan	2019	25.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	
			Pembangunan ruang laktasi dan tempat bermain anak	Gedung dan Bangunan	2019	32.000.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00	
			Taman kel. sananwetan	Gedung dan Bangunan	2019	49.860.000,00	9.972.000,00	39.888.000,00	
			Pagar pintu depan kantor	Gedung dan Bangunan	2021	16.423.400,00	1.642.340,00	14.781.060,00	

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(Rp)	(Rp)
4.		932.407.532.966,78	886.214.906.722,32

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp932.407.532.966,78 atau naik 5,21% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp886.214.906.722,32. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 886.214.906.722,32
Mutasi Tambah:	
a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2023	Rp 45.263.635.846,00
b. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Tanggul Cell TPA	Rp 1.513.433.175,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pada Dinas Lingkungan
Hidup

c. Reklasifikasi antar akun aset
tetap ke Aset Tetap-Jalan,
Irigasi dan Jaringan dari
Gedung dan Bangunan
sebesar Rp234.526.022,46
pada

- | | | |
|--|----|----------------|
| 1). Dinas Perhubungan
berupa Jaringan Listrik
Lainnya | Rp | 121.489.700,00 |
| a) Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
berupa drainase
pasar legi | Rp | 53.000.000,00 |
| b) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
berupa Duiker
GEDUNG
KESENIAN | Rp | 14.536.322,46 |
| 2). Sekretariat DPRD
berupa Perencanaan dan
pengawasan
pengaspalan halaman
kntr dprd | Rp | 10.500.000,00 |
| 3). Kelurahan Tanjungsari
berupa Lampu Hias
Tematik di RT 05 RW
05 | Rp | 35.000.000,00 |

d. Reklasifikasi dari Aset
Lainnya-Aset Tidak
Berwujud ke Aset Tetap-
Jalan, Irigasi dan Jaringan
sebesar Rp120.670.000,00
pada Dinas Pekerjaan
Umum berupa:

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1) Pembangunan Saluran
Drainase di Kecamatan
Sukorejo (Jl.
Bogowonto, Jl. Kali
Comal, Jl. Pinang Gg.
13, Jl. Tirtoyudo 1, RT
02 RW 14 Kel
Sukorejo) | Rp | 45.304.000,00 |
|--|----|---------------|



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Pembangunan Saluran Drainase di Kecamatan Sananwetan (Jl. Brau, Jl. Bunaken, Jl. Buru Barat, Jl. Buru Timur, Jl. Kalasan, Jl. Patimura, Jl. Ploso, Jl. Tidore Barat, Jl. Tidore Timur)	Rp	59.584.000,00
3) Pembangunan Saluran Drainase di Kecamatan Kepanjenkidul (Jl. Ahmad dahlan timur)	Rp	15.782.000,00
e. Koreksi Saldo awal berupa Penilaian aset pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp159.300.000,00 berupa:		
3) Saluran Drainage Perum Tirtomadu Residence I	Rp	44.200.000
4) Saluran Drainage Perum Tirtomadu Residence III	Rp	93.700.000
5) Jaringan Listrik Lainnya lampu Penerangan Jalan tanpa tiang Griya Tanggung Asri II	Rp	21.400.000
Jumlah	Rp	47.291.565.043,46

Mutasi Kurang:

- a. Belanja Modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Rp 512.840.000,00
- b. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada:
- 1). Kelurahan Blitar berupa Lampu Lighting dan Rigging Rp 140.000.000,00
- c. Reklasifikasi antar akun ke aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7). Rehabilitasi Jalan. Untuk
000850_LS_PPn Termin I
(80%) Perencanaan DAK
Jalan 2024. Sesuai Kontrak Rp 77.942.400,00
Nomor :
620/466.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 21/11/2023

Jumlah	Rp	1.098.938.799,00
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	46.192.626.244,46
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	932.407.532.966,78

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5. Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
Lainnya	43.560.247.409,34	42.253.155.547,34

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.560.247.409,34 naik 3,09% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.253.155.547,34. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 **Rp 42.253.155.547,34**

Mutasi Tambah:

- a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2023 Rp 295.710.000,00
- b. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2023 Rp 1.664.190.236,00
- c. Hibah senilai Rp104.608.676,00 pada:
- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku senilai Rp58.317.860,00 dari:
 - a) Perpustakaan Nasional Rp 44.009.660,00
berdasarkan BAST Bantuan Buku Siap Layan Pojok Digital untuk Pemerintah Daerah Nomor 10525/4.2/PLK.03.05/XII.2 022



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b) CSR Gramedia	Rp	14.308.200,00
2) Kelurahan Pakunden dari Perpustakaan Nasional berdasarkan BAST Bantuan Buku Siap Layan untuk Perpustakaan Desa/ Kelurahan Nomor 3790/4.2/PLK.03.07/VII.2023	Rp	15.430.272,00
3) Kelurahan Rembang dari Perpustakaan Nasional berdasarkan BAST Bantuan Buku Siap Layan untuk Perpustakaan Desa/ Kelurahan Nomor 3791/4.2/PLK.03.07/VII.2023	Rp	15.430.272,00
4) Kelurahan Kauman dari Perpustakaan Nasional berdasarkan BAST Bantuan Buku Siap Layan untuk Perpustakaan Desa/ Kelurahan Nomor 3789/4.2/PLK.03.07/VII.2023	Rp	15.430.272,00
d. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp41.670.000,00 pada:		
1). UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 berupa:		
2). Gitar Akustik Elektrik Yamaha	Rp	3.800.000,00
3). Gitar Bass elektrik	Rp	5.500.000,00
4). BASS DRUM 24" + Carrier	Rp	26.370.000,00
5). UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 berupa alat hadrah	Rp	6.000.000,00
Jumlah	Rp	2.106.178.912,00
Mutasi Kurang:		
a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.	Rp	8.750.000,00
b. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Aset tetap lainnya		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp60.809.600,00 pada:

1). Dinas Pendidikan berupa

Rp35.159.600,00

a) Multimedia Speaker Sound System SDN Ngadirejo II	Rp	3.129.600,00
b) Soundsystem dan LCD SDN Kepanjenkidul II	Rp	16.600.000,00
c) Soundsystem SDN Kepanjenkidul I	Rp	7.000.000,00
d) Speaker SDN Bendo II	Rp	2.430.000,00
e) Microphone SDN Gedog I	Rp	2.000.000,00
f) Soundsystem SDN Sentul I	Rp	4.000.000,00

2) UPTD Sekolah Menengah

Pertama Negeri 2 sebesar

Rp25.650.000,00 berupa :

a) Sound System	Rp	7.000.000,00
b) Amplifier TOA/ZA-230W	Rp	2.200.000,00
c) Sound System	Rp	14.250.000,00
d) Mixer Audio Asley 8 Channel	Rp	2.200.000,00

c. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari

Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
ke Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya
sebesar Rp190.907.200,00 pada:

1) Kelurahan Ngadirejo berupa Tempat parkir Makam LK Bangsongan JL Cikandang RT 03 RW 04	Rp	37.450.000,00
2) Kelurahan Kepanjenlor berupa Taman bermain Posyandu Balita RW 6	Rp	14.750.000,00
3) Kelurahan Gedog sebesar Rp49.783.200,00 berupa :		
4) Rehab Balai Pertemuan lingkungan Asabri RW 15	Rp	13.941.600,00
5) Renovasi Gapura Masuk BTN Asabri RW 13	Rp	13.941.600,00
6) Rehab Gapura RW 05	Rp	21.900.000,00
7) Kelurahan Sananwetan berupa Pagar makam Makam Mbah Kandar	Rp	22.100.000,00
8) Kelurahan Bendogerit sebesar Rp66.824.000,00 berupa:		
9) Rehabilitasi Balai RW 07 (lanjutan)	Rp	20.100.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10) Balai Makam Swangsang	Rp	26.502.000,00
11) Rehabilitasi Balai RW 02	Rp	20.222.000,00
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp51.585.250,00 pada:		
1) Kelurahan Tanjungsari berupa Renovasi Atap Makam Mbah Tanjung	Rp	22.100.000,00
2) Kelurahan Tlumpu berupa Pembangunan pagar makam RT 04/I	Rp	29.485.250,00
e. Penghapusan senilai Rp487.035.000,00 pada :		
1). Bagian Umum berupa Tanaman Perkebunan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188/34/KEP/410.010.3/2023 Tanggal 7 November 2023	Rp	5.000.000,00
2). Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp268.250.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 28 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal 20 September 2023 berupa :		
a) Binatang ternak	Rp	38.500.000,00
b) Induk Ikan	Rp	229.750.000,00
3). Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp213.785.000,00 berupa :		
a) Robot bicara/patung (King kong) di Taman Sentul berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 25 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal 04 September 2023	Rp	96.935.000,00
b) Binatang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 27 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal 18 September 2023	Rp	72.350.000,00
c) Tanaman berdasarkan SK Penghapusan : 188 / 24 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal 22 Agustus 2023	Rp	44.500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	Rp	799.087.050,00
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	Rp	1.307.091.862,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	43.560.247.409,34

6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		3.354.089.541,00	1.513.433.175,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.354.089.541,00 naik sebesar 121,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.513.433.175,00. Rincian mutasi KDP Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.513.433.175,00
<u>Mutasi Tambah:</u>		

- a. Reklasifikasi antar akun aset tetap-Gedung dan Bangunan ke aset tetap-Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Mall Pelayanan Publik

Rp 3.354.089.541,00

Jumlah **Rp 3.354.089.541,00**

Mutasi Kurang:

- a. Reklasifikasi antar akun ke aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Pembangunan Tanggul Cell TPA

Rp 1.513.433.175,00

Jumlah **Rp 1.513.433.175,00**

Jumlah mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	1.840.656.366,00
---	-----------	-------------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Rp 3.354.089.541,00

7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(1.532.324.896.223,75)	(1.392.581.785.067,15)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Blitar dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Blitar nomor 74 Tahun 2020.

Perhitungan penyusutan dihitung secara Tahunan pada akhir periode Tahun berjalan/saat penyusunan laporan keuangan, meskipun aset baru diperoleh dalam hitungan hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar (1.532.324.896.223,75) ini naik sebesar 10,03% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar (Rp1.392.581.785.067,15)

Tabel 75 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo	Mutasi	Mutasi	Saldo
		Awal	Tambah	Kurang	Akhir
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Peralatan dan mesin	(509.593.149.479,65)	(58.570.671.728,38)	(9.824.607.460,10)	(568.339.213.747,93)
2	Gedung dan bangunan	(390.472.584.132,13)	(37.150.231.883,18)	(3.928.898.387,15)	(423.693.917.628,16)
3	Jalan, instalasi jaringan	(492.155.142.505,37)	(48.315.306.961,72)	(0,00)	(540.470.449.467,09)
4	Aset tetap lainnya	(360.908.950,00)	(9.702.898.680,57)	(242.492.450,00)	(9.821.315.380,57)
	Jumlah	(1.392.581.785.067,15)	(153.739.109.453,85)	(13.995.998.297,25)	(1.532.324.896.223,75)





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 76 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

Uraian	Koreksi Kurang Catat	Beban Penyusutan	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah
Peralatan Dan Mesin	(114.011.804,07)	(58.456.659.824,31)	(0,00)	(58.570.671.728,38)
Gedung Dan Bangunan	(380.010.923,91)	(36.712.948.799,27)	(57.272.160,00)	(37.150.231.883,18)
Jalan, Instalasi Jaringan	(10.620.002,32)	(48.304.686.959,40)	(0,00)	(48.315.306.961,72)
Aset Tetap Lainnya	(9.071.044.473,45)	(631.854.407,12)	(0,00)	(9.702.898.880,57)
Jumlah	(9.575.687.303,75)	(144.106.149.990,10)	(57.272.160,00)	(153.739.109.453,85)

Tabel 77 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

Uraian	Penghapusan	Hibah	Koreksi Lebih Catat	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Kurang
Peralatan Dan Mesin	(8.018.087.180,10)	(1.806.520.280,00)	(0,00)	(0,00)	(9.824.607.460,10)
Gedung Dan Bangunan	(2.446.751.137,15)	(1.170.787.250,00)	(311.360.000,00)	(0,00)	(3.928.898.387,15)
Jalan, Instalasi Jaringan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)	(133.635.040,00)	(108.857.410,00)	(242.492.450,00)
Jumlah	(10.464.838.317,25)	(2.977.307.530,00)	(444.995.040,00)	(108.857.410,00)	(13.995.998.297,25)

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 10** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	Akumulasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a. Penyusutan		(Rp)	(Rp)
Peralatan dan Mesin		(558.339.213.747,93)	(509.593.149.479,65)

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp**558.339.213.747,93**) atau naik sebesar 9,57% dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp**509.593.149.479,65**). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp (509.593.149.479,65)
Mutasi Tambah:	
a. Beban Penyusutan	Rp (58.456.659.824,31)
b. Pencatatan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sd. Tahun 2022 atas penilaian aset yang dilakukan pada	





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tahun 2023 sebesar

Rp98.912.000,00 pada:

1) Dinas Perumahan Rakyat	Rp	(1.280.000,00)
2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	(97.632.000,00)
c. Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(15.099.904,07)
Jumlah	Rp	(58.570.671.728,38)

Mutasi Kurang:

a. Penghapusan sebesar

Rp8.018.087.180,10 pada

1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 2 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal 23 Januari 2023	Rp	(24.750.000,00)
2) Dinas Kesehatan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 39 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 05 Desember 2023	Rp	(213.087.194,40)
3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan SK Penghapusan 188 / 42 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 20 Desember 2023	Rp	(26.043.730,00)
4) Puskesmas Kecamatan Sananwetan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 38 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 05 Desember 2023	Rp	(58.500.000,00)
5) Puskesmas Kecamatan Sukorejo berdasarkan SK Penghapusan Noor 188 / 37 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 05 Desember 2023	Rp	(27.675.000,00)
6) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 190 / HK / 410.020.3 / 2023 tanggal 09/06/2023	Rp	(833.333.755,00)
7) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan	Rp	(68.800.000,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SK Penghapusan Nomor 188 / 288 / HK / 410.020.3 / 2023 tanggal 31/10/2023			
8) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 332 / HK / 410.020.3 / 2023 tanggal 29/12/2023	Rp	(637.427.050,00)	
9) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188/ 198 / HK / 410.020.3 / 2023 tanggal 26/06/2023	Rp	(6.128.470.450,70)	
b. Penerimaan Hibah sebesar Rp1.806.520.280,00 pada:			
1) Kantor Pertanahan Kota Blitar dari BPKAD Kota Blitar berdasarkan BAST antara Pemerintah Kota Blitar dan Kantor Pertanahan Kota Blitar Nomor 033.2/5850/410.202.1/2023 dan 02/ HIBAH/ X/2023	Rp	(58.381.480,00)	
2) Kepolisian Resor Blitar Kota dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor 033.2/3367/410.202.7/2023 dan NPHD-01/VIII/2023	Rp	(1.748.138.800,00)	
Jumlah	Rp	(9.824.607.460,10)	
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			Rp (48.746.064.268,28)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023			Rp (558.339.213.747,93)
Akumulasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	
b. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp)	(Rp)	
	(423.693.917.628,16)	(390.472.584.132,13)	

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp423.693.917.628,16) atau naik sebesar 8,51% dari saldo per 31



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Desember 2022 sebesar (Rp390.472.584.132,13). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022 **Rp (390.472.584.132,13)**

Mutasi Tambah:

a. Beban Penyusutan	Rp (36.712.948.799,27)
b. Pencatatan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sd. Tahun 2022 atas penilaian aset yang dilakukan pada tahun 2023 pada:	
1) Dinas Pekerjaan Umum	Rp (18.700.000,00)
c. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sd. Tahun 2022 atas reklasifikasi bangunan dari aset tetap - aset tetap lainnya ke aset tetap - gedung dan bangunan sebesar Rp57.272.160,00 pada :	
1) Kelurahan Ngadirejo	Rp (11.235.000,00)
2) Kelurahan Kepanjenlor	Rp (4.425.000,00)
3) Kelurahan Gedog	Rp (8.364.960,00)
4) Kelurahan Plosokerep	Rp (6.570.000,00)
5) Kelurahan Sananwetan	Rp (6.630.000,00)
6) Kelurahan Bendogerit	Rp (20.047.200,00)
d. Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (361.310.923,91)

Jumlah Rp (37.150.231.883,18)

Mutasi Kurang:

a. Penghapusan sebesar Rp2.446.751.137,15 pada:	
1) Dinas Kesehatan berupa Rumah Dinas dr. SpOg Berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 32 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal 07/11/2023	Rp (114.300.000,00)
2) UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo berupa Gedung Utama Puskesmas Sukorejo berdasarkan SK PENGHAPUSAN : 188 / 33 / KEP / 410.020.3 / 2023 tanggal	Rp (1.667.825.278,91)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

07 November 2023

- | | | |
|--|----|------------------|
| 3) Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 43 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 22 Desember 2023 | Rp | (534.297.108,24) |
| 4) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa rumah pompa berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 42 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 20 Desember 2023 | Rp | (6.518.000,00) |
| 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Bangunan Kantor Pasar Templek berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188 / 35 / KEP / 410.020.3 / 2023 Tanggal 24 November 2023 | Rp | (42.000.000,00) |
| 6) Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berupa Parkir Kantor Walikota berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188/45/KEP/410.010.3/2023 Tanggal 29 Desember 2023 | Rp | (81.810.750,00) |
| b. Hibah sebesar Rp1.170.787.250,00 di Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Blitar kepada : | | |
| 1) Kepolisian Resor Kota Blitar dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan BAST antara Pemerintah Kota Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor 033.2/3368/410.202.7/2023 | Rp | (968.442.250,00) |
| 2) AKN Putra Sang Fajar berupa Rumah Dinas di Jl. Muradi | Rp | (202.345.000,00) |
| c. Pencatatan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sd. Tahun 2022 atas penilaian aset graha patria yang akan digunakan sebagai Mall Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | |
| | Rp | (311.360.000,00) |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	Rp	(3.928.898.387,15)
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(33.221.333.496,03)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	(423.693.917.628,16)

	Akumulasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(Rp)	(Rp)
c.		(540.470.449.467,09)	(492.155.142.505,37)

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp540.470.449.467,09) atau naik sebesar 9,82% dengan dibandingkan dengan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp492.155.142.505,37). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022 **Rp** **(492.155.142.505,37)**

Mutasi Tambah:

a. Beban Penyusutan	Rp	(48.304.686.959,40)
b. Pencatatan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sd. Tahun 2022 atas penilaian aset yang dilakukan pada tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum	Rp	(10.619.999,98)
c. Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	(2,34)

Jumlah **Rp** **(48.315.306.961,72)**

Mutasi Kurang:

Jumlah **Rp** **(0,00)**

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	(48.315.306.961,72)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	(540.470.449.467,09)





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.821.315.380,57)	(360.908.950,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.821.315.380,57) atau naik 2.621,27% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp360.908.950,00). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 **Rp (360.908.950,00)**

Mutasi Tambah:

a. Beban Penyusutan	Rp (631.854.407,12)
b. Koreksi Kurang Catat	Rp (9.071.044.473,45)
Jumlah	Rp (9.702.898.880,57)

Mutasi Kurang:

a. Beban Penyusutan	Rp (0,00)
b. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sd. Tahun 2022 atas reklasifikasi bangunan dari aset tetap - aset tetap lainnya ke aset tetap - gedung dan bangunan sebesar Rp57.272.160,00 pada :	
1) Kelurahan Ngadirejo	Rp (11.235.000,00)
2) Kelurahan Kepanjenlor	Rp (4.425.000,00)
3) Kelurahan Gedog	Rp (8.364.960,00)
4) Kelurahan Plosokerep	Rp (6.570.000,00)
5) Kelurahan Sananwetan	Rp (6.630.000,00)
6) Kelurahan Bendogerit	Rp (20.047.200,00)
c. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sd. Tahun 2022 atas reklasifikasi bangunan dari aset tetap - aset tetap lainnya ke aset lainnya - Aset Lain Lain sebesar Rp51.585.250,00 pada:	
1) Kelurahan Tanjungsari	Rp (22.100.000,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Kelurahan Tlumpu	Rp	(29.485.250,00)		
d. Koreksi atas perubahan masa manfaat asset tetap yang direklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.635.040,00 pada:				
1) Kelurahan Ngadirejo	Rp	(26.215.000,00)		
2) Kelurahan Kepanjenlor	Rp	(10.325.000,00)		
3) Kelurahan Gedog	Rp	(19.518.240,00)		
4) Kelurahan Plosokerep	Rp	(15.330.000,00)		
5) Kelurahan Sananwetan	Rp	(15.470.000,00)		
6) Kelurahan Bendogerit	Rp	(46.776.800,00)		
Jumlah	Rp	(242.492.450,00)		
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			Rp	(9.945.391.330,57)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023			Rp	(9.821.315.380,57)

7.5.3.1.5 Dana Cadangan

Dana Cadangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	15.000.000.000,00	0,00

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini ditujukan untuk pendanaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 atau naik 100% dibandingkan dengan saldo Dana cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Saldo akhir dana cadangan tersebut merupakan saldo akhir di rekening deposito dana cadangan Bank Jatim dengan nomor rekening 0141050206 sebesar Rp15.000.000.000,00 a.n. Dana Cadangan Kota Blitar.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3.1.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Tabel 78 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)		
Uraian	2023	2022
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	421.257.013,00	11.056.871.128,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	83.712.500,00	243.637.500,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.442.800.000,00	3.114.000.000,00
Aset Tak Berwujud	20.475.140.477,29	21.193.741.302,29
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(14.857.461.755,55)	(13.385.067.164,34)
Aset Lain-lain	1.794.871.751,00	2.338.543.665,65
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(771.571.751,00)	(2.338.543.665,65)
Jumlah	12.588.548.234,74	22.243.182.765,95

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	(Rp)	(Rp)
	12.588.548.234,74	22.243.182.765,95

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.588.548.234,74 atau turun 43,40% dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.243.182.765,95. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		421.257.013,00	11.056.871.128,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Dibatasi Penggunaannya terdiri dari Jaminan Bongkar Sewa Reklame dan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Jaminan Bongkar Sewa Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat tersebut, akan tetapi apabila setelah masa berlaku reklame berakhir penyelenggara reklame membongkar reklame secara mandiri diperkenankan menarik kembali jaminan bongkar yang telah dibayarkan sebelumnya. Uang Jaminan Sewa Rusunawa adalah uang yang dijaminan oleh setiap calon penghuni kepada pengelola untuk dapat tinggal di rusunawa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila penyewa yang tidak bertanggungjawab meninggalkan rumah rusak/ada barang yang hilang maka uang sebagai pengganti untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh penghuni sewa rusunawa.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp421.257.013,00 atau turun 96,19% dibandingkan dengan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.056.871.128,00. Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp421.257.013,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79 Rincian Kas Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)				
No.	Uraian	SKPD	2023	2022
1.	Jaminan Bongkar Sewa Reklame	DPM dan PTSP	290.757.013,00	95.047.563,00
2.	Jaminan Sewa Rumah Susun	Dispera	130.500.000,00	130.500.000,00
3.	Dana Bagi Hasil Treasury	BPKAD	0,00	10.831.323.565,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	SKPD	2023	2022
	<i>Deposit Facility (TDF)</i>			
		Jumlah	421.257.013,00	11.056.871.128,00

Untuk saldo akhir kas dibatasi penggunaannya atas jaminan sewa rumah susun merupakan saldo akhir RC Bank Jatim Nomor rekening 0141032780 a.n UPTD Rusunawa DPU Kota Blitar sebesar Rp130.500.000,00

Sedangkan saldo akhir kas dibatasi penggunaannya atas jaminan bongkar sewa reklame terdiri atas saldo akhir RC Bank Jatim Nomor rekening 0141038184 a.n Jabong DPMPTSP sebesar Rp295.589.013,00 dikurangi Rp4.832.000,00 yang merupakan jaminan bongkar reklame yang sudah tidak berlaku per 31 Desember 2023, namun belum disetorkan ke Rekening Kasda per 31 Desember 2023.

Sebagai informasi tambahan, Tertanggal 30 Desember 2022 terdapat kelebihan setor atas Jaminan Bongkar Reklame yang masih berlaku dari Pemohon izin dari rekening 0141038 a.n. Jabong DPMPTSP ke nomor rekening 0141015672 a.n. RKUD Kota Blitar sebesar Rp50.045.968,00 dan diakui sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022. Jadi, saldo akhir utang jangka pendek lainnya untuk jaminan bongkar reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp345.634.981,00 (Rp295.589.013,00 + Rp50.045.968,00). Selanjutnya, untuk kelebihan setor sebesar Rp50.045.968,00 tersebut, yang masih berlaku per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.926.938,00.

Rincian Jaminan Bongkar Reklame pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 tersaji dalam **Lampiran 11**. Sedangkan untuk Rincian Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat per 31 Desember 2023 tersaji dalam **Lampiran 12** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tagihan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2. Tuntutan Ganti Rugi	(Rp) 83.712.500,00	(Rp) 243.637.500,00

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.712.500,00 atau turun sebesar 65,64% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp243.637.500,00. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi ini berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas 25 anggota DPRD Pemkot Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.

Tabel 80 Perhitungan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pembayaran s.d. 2022	Saldo 31/12/2022	Pembayaran 2023	Saldo 31/12/2023
1.	Sekretariat DPRD 1.429.470.000,00 (Juni 2019 s/d Mei 2021)	1.185.832.500,00	243.637.500,00	159.925.000,00	83.712.500,00

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 25 anggota DPRD Pemerintah Kota Blitar dibuat atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dengan nilai total sebesar Rp1.429.470.000,00. Nilai tersebut telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp1.345.757.500,00 sampai dengan TA 2023, sehingga pada 31 Desember 2023 terdapat saldo TGR sebesar Rp83.712.500,00. Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 karena jangka waktu pembayarannya sudah jatuh tempo (Juni 2019 s/d Mei 2021), sedangkan sisanya sebesar Rp83.712.500,00 disajikan pada Aset Lainnya. Perhitungan Rinci Saldo Akhir Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2023 disajikan pada



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 13 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	Kemitraan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.	dengan Pihak	(Rp)	(Rp)
	Ketiga	5.442.600.000,00	3.114.000.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.442.600.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 42,78% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.114.000.000,00. Saldo per 31 Desember 2022 tersebut merupakan nilai aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang dikerjasamakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) untuk *Blitar Square* berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar diaddendum dengan perjanjian Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 3.114.000.000,00

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi atas pencatatan nilai BGS BPR Artha Praja dengan lokasi di PIAIH dari Aset Tetap-Tanah Ke Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rp 2.328.600.000,00

Jumlah

Rp 2.328.600.000,00

Mutasi Kurang:

Jumlah

Rp

0,00

Jumlah mutasi bersih Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp 2.328.600.000,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2023

Rp 5.442.600.000,00



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	20.475.140.477,29	21.193.741.302,29

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.475.140.477,29 atau naik sebesar 6,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar sebesar Rp21.193.741.302,29. Aset Tak Berwujud merupakan aset software, masterplan, dan kajian dengan rincian mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 81 Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah		Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Akun	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Realisasi Belanja Modal	Reklasifikasi Antar Akun				
Aset Tak Berwujud	21.193.741.302,29	137.744.380,00	602.846.125,00	740.590.505,00	1.459.191.330,00	1.459.191.330,00	20.475.140.477,29

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 21.193.741.302,29

Mutasi Tambah:

- a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2023

	Rp	137.744.380,00
--	----	----------------
- b. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Lainnya -Aset Tidak Berwujud dari Gedung dan Bangunan Rp156.747.362,00 pada:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa Jasa Konsultansi Perencanaan UTD

	Rp	60.641.306,00
--	----	---------------
 - 2) Dinas Kesehatan berupa Perencanaan Konstruksi Bangunan PSC

	Rp	96.106.020,00
--	----	---------------
- c. Reklasifikasi antar akun ke aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp446.098.799,00
 - 1). Pemeliharaan Berkala Jalan. Untuk Termin I (80%) Perencanaan Jalan Tembus Jl. Kumpul Duryat - Jl.

	Rp	78.781.600,00
--	----	---------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Cakraningrat. Sesuai SPK
Nomor:
620/399.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 07/11/2023.
- 2). Pemeliharaan Berkala Jalan.
Untuk Termin I 80%
Perencanaan Inpres Jalan
Tahun 2023 Tahap II. Sesuai Rp 76.840.000,00
SPK Nomor:
620/130.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 22 Mei 2023.
- 3). Pemeliharaan Berkala Jalan.
Untuk Termin I 80%
Perencanaan Inpres Jalan
Tahun 2023 Tahap I. Sesuai Rp 76.896.000,00
SPK Nomor:
620/129.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 22 Mei 2023
- 4). Peningkatan Jaringan Irigasi
Permukaan. Untuk Termin I
(80%) Perencanaan DAK
Irigasi 2024. Sesuai SPK Rp 63.782.880,00
Nomor:
610/490.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 01/12/2023.
- 5). Pembangunan Jaringan Irigasi
Permukaan. Untuk
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi Permukaan I. Rp 12.567.919,00
Sesuai SPK Nomor:
610/39/SPK/410.103.4/2023
Tanggal 27 Februari 2023.
- 6). Rehabilitasi Jalan. Untuk
Termin I (80%) Perencanaan
Bangunan Pelengkap di Jl.
Brantas. Sesuai SPK Nomor: Rp 59.288.000,00
620/467.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 21/11/2023
- 7). Rehabilitasi Jalan. Untuk
000850_LS_PPN Termin I
(80%) Perencanaan DAK
Jalan 2024. Sesuai Kontrak Rp 77.942.400,00
Nomor :
620/466.SPK/410.103.4/2023
Tanggal 21/11/2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	Rp	740.590.505,00
<u>Mutasi Kurang:</u>		
a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap-Tanah berupa Appraisal Pengadaan Tanah Radius Lengkung Kel. Plosokerep pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	24.880.600,00
b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.218.121.730,00 ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan pada:		
1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp123.358.240,00 berupa:		
a) Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu 2017	Rp	44.500.000,00
b) Review DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu	Rp	78.858.240,00
2) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 berupa Perencanaan Atap Lapangan Basket	Rp	11.904.090,00
3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp580.162.400,00 berupa:		
a) penyusunan dokumen UKL-UPL/PKPLH Pembangunan Pasar Hewan Dimoro	Rp	97.047.500,00
b) Perencanaan Pembangunan Pasar Templek	Rp	98.597.400,00
c) Penyusunan UKL UPL Pembangunan Pasar temple	Rp	95.287.500,00
d) Perencanaan Pembangunan Pasar Dimoro	Rp	98.445.000,00
e) DED Kios PKL Jl Musi	Rp	91.322.000,00





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Barat			
f)	FS Kios PKL jl Musi Barat Kota Blitar	Rp	99.463.000,00
4)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp157.724.500,00 berupa:		
a)	Masterplan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.555.000,00
b)	Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.417.500,00
c)	Kajian BMX	Rp	58.752.000,00
5)	Kecamatan Sananwetan Kajian DED Kelurahan Rembang	Rp	78.800.000,00
6)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp266.172.500,00 berupa:		
a)	Andalalin Pembangunan Sirkuit	Rp	94.847.500,00
b)	Kajian Penyusunan Ded Pembangunan Sirkuit Bmx	Rp	95.892.500,00
c)	Kajian Penyusunan UKL UPL Pembangunan Sirkuit BMX	Rp	75.432.500,00
c.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.670.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum berupa:		
1)	Pembangunan Saluran Drainase di Kecamatan Sukorejo (Jl. Bogowonto, Jl. Kali Comal, Jl. Pinang Gg. 13, Jl. Tirtoyudo 1, RT 02 RW 14 Kel Sukorejo)	Rp	45.304.000,00
2)	Pembangunan Saluran Drainase di Kecamatan Sananwetan (Jl. Brau, Jl. Bunaken, Jl. Buru Barat, Jl. Buru Timur, Jl. Kalasan, Jl. Patimura, Jl. Ploso, Jl. Tidore Barat, Jl. Tidore Timur)	Rp	59.584.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Pembangunan Saluran Drainase di Kecamatan Kepanjenkidul (Jl. Ahmad dahlan timur)	Rp	15.782.000,00	
d. Reklasifikasi dari Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain sebesar Rp95.519.000,00 berupa:			
1) Perencanaan Gedung Kantor Kel. Kepanjenlor	Rp	50.029.000,00	
2) Perencanaan Revitalisasi Kantor Kelurahan Kepanjenlor	Rp	45.490.000,00	
Jumlah	Rp	1.459.191.330,00	
Jumlah mutasi bersih Aset Tidak Berwujud			Rp (718.600.825,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023			Rp 20.475.140.477,29

Daftar Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 14** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Lain-lain	1.794.871.751,00	2.338.543.665,65

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.794.871.751,00 atau turun 30,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.338.543.665,65. Aset Lain-lain terdiri dari kumpulan usulan penghapusan atas Aset Tetap SKPD sebelum diterbitkan SK Penghapusan atas pengadaan sampai dengan tahun 2023, Aset yang rusak dan Aset yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional dengan rincian mutasi tahun 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 82 Rincian Aset Lain-lain Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Reklasifikasi Antar Akun		Penghapusan		
Aset Lain-Lain	2.338.543.665,65	1.170.404.250,00	1.170.404.250,00	1.714.076.164,65	1.714.076.164,65	1.794.871.751,00

Saldo per 31 Desember 2022

Rp 2.338.543.665,65

Mutasi Tambah:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah ke Aset Lainnya-Aset Lain-Lain berupa tanah bawah jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bukan merupakan kewenangan Kota Blitar

	Rp 1.023.300.000,00
--	---------------------
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp51.585.250,00 pada:
 - 1) Kelurahan Tanjungsari berupa Renovasi Atap Makam Mbah Tanjung

	Rp 22.100.000,00
--	------------------
 - 2) Kelurahan Tlumpu berupa Pembangunan pagar makam RT 04/I

	Rp 29.485.250,00
--	------------------
- c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain sebesar Rp95.519.000,00 berupa:
 - 1) Perencanaan Gedung Kantor Kel. Kepanjenlor

	Rp 50.029.000,00
--	------------------
 - 2) Perencanaan Revitalisasi Kantor Kelurahan Kepanjenlor

	Rp 45.490.000,00
--	------------------

Jumlah	Rp 1.170.404.250,00
---------------	----------------------------

Mutasi Kurang:

- a. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp1.714.076.164,65 pada Bagian Umum berdasarkan:
 - 1). SK Penghapusan Nomor

	Rp 25.000.000,00
--	------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

188.4 /190
/KEP/410.010.2/2023 Tanggal
7 Januari 2023

- 2). SK Penghapusan Nomor 188 /
332 / HK / 410.020.3 / 2023 Rp 41.725.000,00
tanggal 29 Desember 2023
- 3). SK Penghapusan Nomor 188/
198 / HK / 410.020.3 / 2023 Rp 1.647.351.164,65
tanggal 26 Juni 2023

Jumlah	Rp	1.714.076.164,65		Rp	(543.671.914,65)
Jumlah mutasi bersih Aset Lain-lain				Rp	1.794.871.751,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023					

Daftar Aset Lain-Lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 15** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

6.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		(14.857.461.755,55)	(13.365.067.164,34)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp14.857.461.755,55) atau naik sebesar 10,04% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp13.365.067.164,34). Rincian mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 83 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Beban Penyusutan		Koreksi Lebih Catat		
Aset Tidak Berwujud	13.365.067.164,34	1.909.921.495,21	1.909.921.495,21	417.526.904,00	417.526.904,00	14.857.461.755,55

Saldo per 31 Desember 2022

Rp (13.365.067.164,34)

Mutasi Tambah:

a. Beban Amortisasi	Rp	(1.909.921.495,21)
Jumlah	Rp	(1.909.921.495,21)

Mutasi Kurang:





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Koreksi lebih catat

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp (417.526.904,00)

Jumlah **Rp** **(417.526.904,00)**

Jumlah Mutasi bersih Amortisasi Aset Tak Berwujud **Rp** **(1.492.394.591,21)**

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 **Rp** **(14.857.461.755,55)**

Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 16** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	Akumulasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.	Penyusutan	Aset	(Rp)	(Rp)
	Lain-Lain		(771.571.751,00)	(2.338.543.665,65)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar (Rp771.571.751,00) atau turun 203,09% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.338.543.665,65). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 84 Rincian Akumulasi Aset Lain-lain Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Koreksi Kurang Catat	Reklasifikasi antar Akun	Jumlah Mutasi Tambah	Penghapusan		
Aset Lainnya	2.338.543.665,65	95.519.000,00	51.585.250,00	147.104.250,00	1.714.076.164,65	1.714.076.164,65	771.571.751,00

Saldo per 31 Desember 2022

Rp (2.338.543.665,65)

Mutasi Tambah:

a. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sd. Tahun 2022 atas reklasifikasi bangunan dari aset tetap - aset tetap lainnya ke aset lainnya – Aset Lain Lain sebesar Rp51.585.250,00 pada:

1) Kelurahan Tanjungsari	Rp	(22.100.000,00)
2) Kelurahan Thumpu	Rp	(29.485.250,00)





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Pencatatan atas dampak kumulatif akumulasi penyusutan aset lain-lain atas dokumen perencanaan yang tidak relevan dan tidak dimanfaatkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp95.519.000,00

1) Perencanaan Gedung Kantor Kel. Kepanjenlor	Rp	(50.029.000,00)
2) Perencanaan Revitalisasi Kantor Kelurahan Kepanjenlor	Rp	(45.490.000,00)

Jumlah	Rp	(147.104.250,00)
---------------	-----------	-------------------------

Mutasi Kurang:

- a. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp1.714.076.164,65 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan:

1). SK Penghapusan Nomor 188.4 /190 /KEP/410.010.2/2023 tanggal 7 Januari 2023	Rp	(25.000.000,00)
2). SK Penghapusan Nomor 188 / 332 / HK /410.020.3 / 2023 tanggal 29 Desember 2023	Rp	(41.725.000,00)
3). SK Penghapusan Nomor 188/ 198 / HK / 410.020.3 / 2023 tanggal 26 Juni 2023	Rp	(1.647.351.164,65)

Jumlah	Rp	(1.714.076.164,65)
---------------	-----------	---------------------------

Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain

Rp	1.566.971.914,65
-----------	-------------------------

Saldo Akhir per 31 Desember 2023

Rp	(771.571.751,00)
-----------	-------------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 17** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

7.5.3.2 Kewajiban

Esensi dari Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa datang. Kewajiban dirinci menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.083.351.054,35 atau naik sebesar 4,06% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.871.922.680,45.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 Rp31.928.250.270,80 atau naik 6,88% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.871.922.680,45.

	Utang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Perhitungan	(Rp)	(Rp)
1.	Fihak Ketiga		
	(PFK)	0,00	0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau tetap dibandingkan saldo PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Diterima di	(Rp)	(Rp)
	Muka	1.292.142.683,90	1.265.788.539,66

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah namun belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar bagian manfaat yang belum diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.292.142.683,90 atau naik sebesar 2,08% dibandingkan saldo



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar
Rp1.265.788.539,66 yang terdiri dari:

Tabel 85 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2023	2022	Keterangan
1	RSUD Mardi Waluyo	12.000.000,00	12.000.000,00	Pendapatan BLUD - sewa tanah Kantor & ATM BPD Jatim
2	BPKAD	503.207.250,00	632.813.800,00	Hasil Sewa BMD - Sewa Tanah SPBU Kebonrojo
3	BPKAD	6.686.258,33	14.101.926,66	Hasil Sewa BMD - ATM BRI
4	BPKAD	17.505.391,00	33.419.395,00	Hasil Sewa BMD - ATM BPD Jatim dan PIPP
5	BPKAD	52.153.920,00	5.227.200,00	Hasil Sewa BMD - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Sananwetan
6	BPKAD	29.391.786,67	2.911.040,00	Hasil Sewa BMD - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Bendogerit
7	BPKAD	29.614.000,00	50.518.000,00	Hasil Sewa BMD-Sewa Tanah pada Alun-alun, Taman Pecut, Stadion Soeprijadi, PIPP, Taman Kebon rojo, Museum Bung Karno, GOR Soekarno Hatta, Makam Bung Karno, Pasar Legi, Agrowisata Blimbing
8	BPKAD	865.550,00	1.332.150,00	Hasil Sewa BMD - Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo
9	BPKAD	2.840.416,67	4.845.416,67	Hasil Sewa BMD - Pembangunan dan Penempatan jaringan utilitas kabel fiber optik dan pemasangan tiang untuk kabel udara
10	BPKAD	200.340,00	158.233.278,00	Pajak Reklame
11	BPKAD	163.842.400,00	0,00	Hasil Sewa BMD - Perumda BPR Kota Blitar
12	Kecamatan Sukorejo	81.666.666,67	64.750.000,00	Hasil Sewa BMD - Sewa Agrowisata Belimbing Karang Sari
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	275.000.000,00	222.750.000,00	Hasil Sewa BMD - Sewa Menyewa Waterpark Sumberdel Kota Blitar
14	Dinas Lingkungan Hidup	4.233.000,00	16.932.000,00	Hasil Sewa BMD - Sewa Menyewa SUTT
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.200.000,23	10.200.000,00	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - ATM BRI
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.083.334,33	1.666.666,66	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - Perangkat Telekomunikasi
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15.072.000,00	14.738.666,67	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - Bangunan Pasar Legi
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.265.666,67	19.349.000,00	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - Bangunan Pasar Legi
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.380.100,00	0,00	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - Bangunan Pasar Wage
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.402.083,33	0,00	Hasil Sewa BMD - Gedung KUD
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.400.000,00	0,00	Hasil Sewa BMD - Cold Storage
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000,00	0,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Kios Stadion Soeprijadi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	2023	2022	Keterangan
23	Kecamatan Sananwetan	32.332.520,00	0,00	Hasil Sewa BMD - Tanah Bengkok Kelurahan Karangtengah
Total		1.292.142.683,90	1.265.788.539,66	

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri Bank Jatim antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar dengan nomor perjanjian 10 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
- b. Sewa Bangunan (Kantor Kas Bank Jatim) antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar dengan nomor perjanjian 01 dengan dengan jangka waktu sewa dari tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
- c. Sewa Tanah Aset Pemerintah Kota Blitar – Kebonrojo Antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Moderna Teknik Perkasa dengan nomor perjanjian 032/3966/410.202.7/2022 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2027;
- d. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di Lingkungan Kantor Walikota Blitar - ATM BRI dengan nomor perjanjian 011/4547/410.206.6/2021 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- e. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di lingkungan PIPP Kota Blitar dengan nomor perjanjian 032.2/0164/410.206.6/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
- f. Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan, Penempatan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Dayamitra Telekomunikasi dengan nomor perjanjian



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 032/3603/410.202.7/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2028;
- g. Sewa tanah milik Pemerintah Kota Blitar pada area Ruang Milik Jalan di Wilayah Kota Blitar dengan nomor perjanjian 480/1911/410.206/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
- h. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo dengan nomor perjanjian 011/2958/410.403.11/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
- i. Sewa Tanah milik Pemerintah Kota Blitar Pada Area Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kota dengan nomor perjanjian 480/2004/410.206/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.
- j. Pajak Reklame dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 18.
- k. Sewa Tanah dan Bangunan Perumda BPR Kota Blitar dengan nomor perjanjian 032.2/0228/410.202.7/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- l. Sewa Menyewa Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karangsari dengan nomor perjanjian 011/2958/410.300.1/2023 dengan jangka waktu sewa dari 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
- m. Sewa Menyewa Waterpark Sumberudel Kota Blitar dengan nomor perjanjian 556/3721/410.107.3/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;
- n. Sewa Tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV New Kediri – New Tulungagung – New Wlingi Tower Nomor 168 di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo dengan nomor perjanjian 640/324A/410.105/2021 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024.





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- o. Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi - ATM BRI antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Blitar dengan nomor perjanjian 510/520.1/410.117.2/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- p. Sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan PT.Telekomunikasi Seluler dengan nomor perjanjian PKS.075/LG.05/AR.003/III/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- q. Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan Lukman Handoko dengan nomor perjanjian 503/130/410.108/2021 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
- r. Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan JoJoo Family Karaoke & Food Court dengan nomor perjanjian 510/544/410.117.2/2022 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
- s. Sewa Menyewa Tanah di Pasar Wage antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan Telkom area *office* Jawa, Bali& Nusa Tenggara dengan nomor perjanjian 510/457/410.117.2/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2026;
- t. Sewa Menyewa Gedung KUD antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dengan KUD Bina Tama dengan nomor perjanjian 518/594/410.112.2/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- u. Sewa Menyewa *ColdStorage* antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan PT Natura Produk International dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

nomor perjanjian 7 Tahun 2023 dengan jangka waktu sewa dari 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

v. Sewa Menyewa Kios Stadion Soeprijadi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan penyewa sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Retribusi Kios Stadion dan Kebonrojo;

w. Sewa Menyewa Tanah Bengkok Kelurahan Karangtengah antara Pemerintah Kota Blitar dengan penyewa dengan nomor perjanjian 970/0112/410.401.1/2024 dengan jangka waktu sewa dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Metode pengakuan pendapatan terutang atas perjanjian yang disusun pada tanggal pertengahan bulan berjalan yaitu dengan menghitung masa manfaat terutang pada awal bulan berikutnya. Rincian perhitungan Pendapatan diterima dimuka terdapat pada **Lampiran 18** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Utang Belanja	30.157.609.336,90	26.946.680.210,29

Utang Beban merupakan barang/jasa yang sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum terbayarkan. Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.157.609.336,90 naik sebesar 10,65% dibandingkan dengan saldo Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.946.680.210,29. Utang Belanja 2023 pada BLUD RSUD Mardi Waluyo dan seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar berupa tagihan listrik, telepon, air, internet, jasa kerja, jasa pelayanan kesehatan, premi jamkesda, bantuan sosial, dan BBM. Rincian utang beban disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 86 Rincian Utang belanja per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Utang Belanja	Utang Belanja 2023 Sesudah Revisi	Utang Belanja 2022
1	Belanja Insentif pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kdh/Wkdh		5.006.567,00
2	Belanja Insentif Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Kdh/wkdh)	2.430.000,00	13.178.600,00
3	Belanja Insentif Retribusi pemakaian kekayaan daerah (asn)	11.070.000,00	12.641.400,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Rincian Utang Belanja	Utang Belanja 2023 Sesudah Revisi	Utang Belanja 2022
4	Belanja Insentif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (ASN)		22.807.692,00
5	Belanja Insentif bagi KDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	2.915.400,00	2.562.500,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	11.306.000,00	9.937.500,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	45.121.749,00	31.174.349,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	54.088.900,00	120.895.651,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	3.860.000,00	7.892.500,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	932.600,00	1.732.500,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	1.177.400,00	1.025.000,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	4.566.200,00	3.975.000,00
13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	166.500,00	208.870,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	645.900,00	813.880,00
15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan	37.925.000,00	31.134.375,00
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan	147.074.600,00	120.740.625,00
17	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	72.900.000,00	46.980.000,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	301.725.000,00	214.020.000,00
19	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.816.600,00	
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.922.900,00	
21	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	25.875.000,00	
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	107.093.750,00	
23	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan P	432.167,00	
24	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	463.372,00	
25	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	298.408,00	
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	845.807.446,00	646.728.009,00
1	Belanja obat-obatan	4.451.323.830,58	4.800.584.272,70
2	Belanja obat-obatan lainnya	7.539.305.088,32	8.004.248.820,59
3	Belanja bahan bakar	23.748.265,00	11.551.400,00
4	Belanja makan dan minum rapat/kegiatan	33.300.000,00	-
5	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	1.969.240.906,00	
6	Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	380.371.779,00	
	Jumlah Utang Belanja Barang	14.397.289.868,90	12.816.384.493,29
1	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.400.000,00	46.301.800,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	13.475.975.265,00	11.692.437.721,00
3	Belanja Listrik	1.289.455.840,00	1.204.693.316,00
4	Belanja Air	5.455.550,00	5.739.850,00
5	Belanja Telepon	20.940.800,00	23.384.243,00
6	Belanja Internet	45.278.886,00	63.138.003,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan	11.868.025,00	1.600.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Rincian Utang Belanja	Utang Belanja 2023 Sesudah Reviu	Utang Belanja 2022
	BP Kelas 3		
8	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3		523.600,00
9	Belanja jasa Tenaga Kebersihan	1.241.316,00	9.444.955,00
10	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		5.898.711,00
11	Belanja Jasa Kantor- Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		67.500,00
12	Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.664.000,00	
13	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	
14	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.241.316,00	
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	
16	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	
	Jumlah Utang Belanja Jasa	14.867.520.998,00	13.053.229.699,00
	Jumlah Utang Belanja Perjalanan Dinas	46.991.024,00	3.036.294,00
	Jumlah Utang Belanja Pemeliharaan	-	
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		427.301.715,00
	Total Utang Belanja	30.157.609.336,90	26.946.680.210,29

Selanjutnya informasi terkait Rincian Utang Belanja per SKPD disajikan pada **Lampiran 19** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	478.498.250,00	1.659.453.930,50

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.498.250,00 atau turun 71,17% dibandingkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.659.453.930,50 .

Utang Jangka Pendek Lainnya 2023 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Penerimaan Kas yang Belum teridentifikasi kepemilikannya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 87 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi terdiri dari:	7.195.269,00	1.383.860.399,50
	a. Dinas Pendidikan		
	-Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	90.000,00	1.560.000,00
	-Honorarium Kinerja Guru	4.800.000,00	0,00
	b. Dinas Kesehatan		
	- Pendampingan Poskestren	2.305.269,00	1.552.600,00
	c. Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa		
	- Infrastruktur	0,00	1.380.747.799,50
2	Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya terdiri dari :	471.302.981,00	275.593.531,00
	a. Jaminan Bongkar Reklame (jambong) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*)	340.802.981,00	145.093.531,00
	b. Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat	130.500.000,00	130.500.000,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	478.498.250,00	1.659.453.930,50

*) Penjelasan nilai pada akun Kas Dibatasi Penggunaannya



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 88 Rincian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Khusus		Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus	Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus		Keterangan
		Tanggal Penerimaan	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Tgl Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
1.	Pendidikan (Sesuai Keputusan Gubernur Jatim dan Surat Sekda Provinsi Jatim yang diterima Kab/Kota) :	02-05-2023, 23-12-2023	1.489.530.000,00	1.484.640.000,00	4.890.000,00		Belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
a.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)		1.311.930.000,00	1.311.840.000,00	90.000,00		
b.	Honorarium Kinerja Guru		177.600.000,00	172.800.000,00	4.800.000,00		
2.	Kesehatan (Sesuai Surat Sekda Provinsi Jatim yang diterima Kab/Kota) :	21-03-2023	35.383.621,00	33.078.352,00	2.305.269,00		Belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
c.	Pendampingan Poskestren		35.383.621,00	33.078.352,00	2.305.269,00		
TOTAL			1.524.913.621,00	1.517.718.352,00	7.195.269,00		

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika kewajiban tersebut jatuh tempo lebih dari satu Tahun setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Blitar tidak mempunyai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023.

7.5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.837.111.338.670,73	2.808.219.964.285,10

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Blitar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Blitar. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.837.111.338.670,73 naik sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1,03% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2022 sebesar
Rp2.808.219.964.285,10.



7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

7.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. Realisasi Pendapatan Tahun 2023 LO sebesar Rp914.266.950.280,92. Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 89 Rincian Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan %
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	176.413.912.847,68	150.206.448.556,29	17,45
2	Pendapatan Transfer – LO	720.869.353.710,00	764.543.649.724,50	(5,71)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	16.983.683.723,24	16.201.594.459,57	4,83
Jumlah		914.266.950.280,92	930.951.692.740,36	(1,79)

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp176.413.912.847,68 mengalami kenaikan sebesar 17,45% dibandingkan tahun 2022 Rp150.206.448.556,29. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 90 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	58.016.800.324,00	45.624.175.215,10	27,16
2	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	7.877.491.553,33	6.782.325.952,50	16,15
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	1.042.119.574,56	885.196.947,24	17,73
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	109.477.501.395,79	96.914.750.441,45	12,96
Jumlah		176.413.912.847,68	150.206.448.556,29	17,45

Pendapatan		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1 Pajak Daerah-LO		(Rp)	(Rp)
		58.016.800.324,00	45.624.175.215,10

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO yang dipungut dan dikelola oleh BPKAD Kota Blitar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar. Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak termasuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 58.016.800.324,00 mengalami kenaikan sebesar 27,16% dibandingkan Tahun 2022 Rp45.624.175.215,10. Berikut adalah perhitungan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2023.

Pajak Daerah-Laporan Realisasi Anggaran
Mutasi Tambah:

Rp 56.381.185.255,00

1. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023	Rp 11.830.740.522,00
2. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022	Rp 158.233.278,00
Jumlah	11.988.973.800,00

Mutasi Kurang:

1. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022	Rp 10.353.008.391,00
--	----------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Pajak Daerah	Rp	150.000,00	
3. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023	Rp	200.340,00	
Jumlah	Rp	10.353.358.731,00	
Jumlah mutasi bersih			Rp 1.635.615.069,00
Pajak Daerah- Laporan Operasional			Rp 58.016.800.324,00

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 91 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan %
1	Pajak Hotel-LO	1.374.054.056,00	1.212.342.601,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	6.237.103.132,00	5.812.115.942,00	7,31
3	Pajak Hiburan-LO	1.288.621.999,00	1.479.532.011,00	(12,90)
4	Pajak Reklame-LO	784.389.357,00	361.078.375,10	117,24
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	12.223.532.725,00	11.727.142.722,00	4,23
6	Pajak Parkir-LO	615.479.921,00	484.739.957,00	6,34
7	Pajak Air Tanah-LO	72.748.262,00	64.794.580,00	12,28
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	16.146.931.275,00	14.460.861.150,00	11,66
9	Bee Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	19.373.939.597,00	10.021.567.868,00	93,32
	Jumlah	58.016.800.324,00	45.624.175.215,10	27,16

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2 Retribusi Daerah-LO	(Rp)	(Rp)
	7.877.491.553,33	6.782.325.952,50

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kota Blitar dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Blitar didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp7.877.491.553,33 mengalami kenaikan sebesar 16,15% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6.782.325.952,50. Berikut adalah perhitungan atas Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2023.

Retribusi Daerah-Laporan Realisasi Anggaran
Mutasi tambah :

Rp 7.830.222.821,23



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023	Rp	7.271.742.095,00	
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2022	Rp	45.954.333,33	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	7.317.696.428,33	
Mutasi Kurang :			
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022	Rp	7.201.626.595,00	
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2023	Rp	68.801.101,23	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	7.270.427.696,23	
Jumlah Mutasi Bersih			Rp 47.268.732,10
Retribusi Daerah- Laporan Operasional			Rp 7.877.491.553,33

Rincian penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	3.927.062.300,00	3.536.715.800,00	11,04
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	760.861.700,00	551.737.600,00	37,90
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	363.508.000,00	342.284.000,00	6,21
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.353.561.000,00	1.315.570.000,00	2,89
	Retribusi Pelayanan Pasar	962.385.000,00	841.127.000,00	14,42
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	342.409.700,00	392.750.200,00	(12,82)
	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	84.625.000,00	40.809.000,00	107,37
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	15.240.000,00	11.826.000,00	28,87
	Retribusi Tera Ulang	44.471.900,00	40.632.000,00	9,45
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	3.602.917.253,33	3.191.007.552,50	12,91
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.264.679.870,00	1.196.985.552,50	5,66
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	268.095.883,33	173.017.000,00	54,95
	Retribusi Terminal	127.414.500,00	121.553.000,00	4,82
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	558.133.000,00	468.485.000,00	19,64
	Retribusi Rumah Potong Hewan	384.075.000,00	373.903.000,00	2,72
	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	1.000.519.000,00	859.054.000,00	16,47
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	347.512.000,00	54.602.600,00	536,44
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	346.840.000,00	53.954.600,00	542,84
	Retribusi Ijin Trayek	672.000,00	648.000,00	3,70
	Jumlah (1+2+3)	7.877.491.553,33	6.782.325.952,50	16,15

	Pendapatan Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Pengelolaan Kekayaan	(Rp)	(Rp)
3	Daerah yang Dipisahkan-LO	1.042.119.574,56	885.196.947,24

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Blitar pada PT Bank Jawa Timur. Realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.042.119.574,56 mengalami kenaikan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar 17,73% dibandingkan Pendapatan LO 2022 sebesar Rp885.196.947,24. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada Tahun 2023 merupakan penerimaan *cash dividen/bagian laba* atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim dan Perumda BPR Kota Blitar Tahun buku 2022 yang dibayarkan pada Tahun 2023.

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4		109.477.501.395,79	96.914.750.441,45

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode tahun anggaran 2023. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 109.477.501.395,79, terdapat kenaikan sebesar 12,96% dibandingkan Pendapatan LO Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp96.914.750.441,45. Perhitungan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA		Rp 106.342.156.180,37
Mutasi tambah :		
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023	Rp 11.900.033.821,61
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022	Rp 1.061.600.928,33
3	Biaya Kliring penerimaan Klaim RSUD Mardi Waluyo	Rp 474.100,00
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp 12.962.108.849,94
Mutasi Kurang :		
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022	Rp 8.443.697.391,85
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023	Rp 1.223.141.242,67
3	Pembayaran TP/TGR	Rp 159.925.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp 9.826.763.634,52
	Jumlah Mutasi Bersih	Rp 3.135.345.215,42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan – LO		Rp 109.477.501.395,79



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 93 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	647.139.769,00	138.530.000,00	367,15
A	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	463.780.436,00	83.200.000,00	457,43
B	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	63.965.000,00	55.330.000,00	15,61
C	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	119.394.333,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.313.970.510,66	1.754.762.499,34	31,87
	Hasil Sewa BMD-LO	2.313.970.510,66	1.754.762.499,34	31,87
3	Jasa Giro-LO	872.975.140,23	1.160.242.202,06	(24,76)
4	Pendapatan Bunga -LO	2.428.812.786,38	1.165.835.621,74	108,33
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.428.812.786,38	1.165.835.621,74	108,33
5	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	22.504.260,00	0,00	100,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	22.504.260,00	0,00	100,00
6	Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	395.204,16	415.476.255,80	(99,90)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	205.101.199,33	310.576.766,48	(33,96)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	117.886.592,40	117.898.367,60	0,07
	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	2.904.784,52	2.225.960,00	30,50
	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	5.560.287,48	1.597.294,60	248,11
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	2.300.903,00	4.500,00	51.031,18
	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	24.572.344,60	0,00	100,00
	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	531.347,00	7.200,00	7.279,82
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	2.129.361,80	38.275,00	5.463,32
	Pendapatan Denda PBBP2-LO	79.987.564,00	114.025.138,00	(29,85)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	46.979.563,00	0,00	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	140.592.728,00	4.432.346,57	3.071,97
11	Pendapatan dari BLUD-LO	102.163.330.025,36	91.594.447.522,13	11,54
12	Pendapatan Denda qPemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.000.000,00	0,00	100,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda -LO	514.713.617,27	252.548.859,73	103,81
	Jumlah 1 s/d 12	109.477.501.395,79	96.914.750.441,45	12,96

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp720.869.353.710,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perhitungan atas Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Transfer - Laporan Realisasi Anggaran		Rp 747.967.798.768,00
Mutasi Kurang :		
1	Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022	Rp 6.210.167.100,00
2	Pembayaran TDF	Rp 10.831.323.565,00
3	Sisa Bantuan Keuangan Propinsi	Rp 7.195.269,00
4	Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Swasta yang seharusnya tidak masuk Laporan Operasional	Rp 5.028.516.824,00
5	Pendapatan DAK Non Fisik-BOP PAUD yang seharusnya tidak masuk Laporan Operasional	Rp 3.697.242.300,00
6	Pendapatan DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan yang seharusnya tidak masuk Laporan Operasional	Rp 1.324.000.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	27.098.445.058,00
	Jumlah Mutasi Bersih	Rp (27.098.445.058,00)
	Pendapatan Transfer - Laporan Operasional	Rp 720.869.353.710,00

Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenalkan/ Penurunan
				(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	585.819.235.458,00	606.715.971.751,00	(6,74)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	53.546.779.000,00	56.255.400.000,00	(4,81)
3	Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO	101.503.339.252,00	101.572.277.973,50	(0,07)
	Jumlah	720.869.353.710,00	764.543.649.724,50	(5,71)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	565.819.235.458,00	606.715.971.751,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 sebesar Rp565.819.235.458,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 95 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Naik/ Turun %
1.	Dana Bagi Hasil LO	81.679.234.000,00	141.117.631.595,00	(42,12)
	DBH PBB-LO	2.768.041.000,00	6.009.473.013,00	(53,94)
	DBH PPh Pasal 21-LO	14.320.830.000,00	19.230.902.511,00	(25,53)
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.280.691.000,00	1.233.271.063,00	84,83
	DBH CHT-LO	29.594.000.000,00	26.622.908.014,00	11,16
	DBH SDA Minyak Bumi-LO	28.417.615.000,00	77.541.775.241,00	(63,35)
	DBH SDA Gas Bumi-LO	2.128.731.000,00	4.486.402.212,00	(52,55)
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	9.939.000,00	49.481.992,00	(79,91)
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	702.505.000,00	3.300.135.576,00	(78,71)
	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	196.941.000,00	473.217.762,00	(58,38)
	DBH SDA Perikanan-LO	1.259.941.000,00	2.170.064.211,00	(41,94)
2.	DAU-LO	417.003.510.313,00	392.628.749.070,00	6,21
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	9.770.554.691,00	18.028.861.209,00	(45,81)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD-LO	1.092.674.150,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.076.789.802,00	3.485.588.317,00	(69,11)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.211.490.767,00	992.390.100,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	328.272.372,00	431.015.555,00	(23,84)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	323.158.521,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	410.866.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	878.072.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	1.475.780.000,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	650.440.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2023	2022	Naik/ Turun %
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	1.300.616.000,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Dan KB-Reguler-Peningkatan Keselamatan Sistem Kesehatan	2.175.396.000,00	3.455.786.639,00	(37,05)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB - LO	0,00	6.576.206.077,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-PAUD-LO	1.814.895.600,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	120.000.000,00	0,00	0,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	57.365.936.454,00	54.940.729.877,00	4,41
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	15.579.761.171,00	13.206.771.794,00	17,97
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	725.000.000,00	280.000.000,00	158,93
	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	32.377.915.700,00	31.800.974.200,00	1,81
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	514.750.000,00	454.500.000,00	13,26
	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	3.291.521.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.277.400.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.992.671.472,00	2.447.867.780,00	144,81
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.506.761.501,00	568.932.483,00	164,84
	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	415.431.100,00	402.684.200,00	3,17
	DAK Non Fisik-Fasilitas Pananaman Modal-LO	253.645.510,00	200.205.200,00	26,69
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	0,00	571.300.000,00	(100,00)
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	0,00	438.573.220,00	(100,00)
	Jumlah	565.819.235.458,00	606.715.971.751,00	(6,74)

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pemerintah Pusat-	(Rp)	(Rp)
Lainnya	53.546.779.000,00	56.255.400.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2023 sebesar Rp53.546.779.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar 4,81% dibandingkan pendapatan pada Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp56.255.400.000,00.

7.5.4.1.2.3 Transfer Antar Daerah-LO

Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Antar	(Rp)	(Rp)
Daerah-LO	101.503.339.252,00	101.572.277.973,50



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur-LO Tahun 2023 sebesar Rp101.503.339.252,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Transfer Antar Daerah-			
Laporan Realisasi Anggaran			Rp 107.720.701.621,00
Mutasi Kurang :			
Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022	Rp	6.210.167.100,00	
Sisa Bantuan Keuangan Propinsi	Rp	7.195.269,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	6.217.362.369,00	
Mutasi Bersih			Rp (6.217.362.369,00)
Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO			Rp 101.503.339.252,00

Rincian Realisasi Transfer Antar Daerah – LO pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Naik/Turun (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.749.779.800,00	28.499.530.400,00	4,39
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.369.315.100,00	9.075.869.880,00	36,29
3	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.478.075.700,00	19.479.718.440,00	25,66
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	374.181.600,00	270.478.040,00	38,34
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	33.014.268.700,00	34.123.478.613,00	(3,25)
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	1.517.718.352,00	10.123.202.600,50	(85,01)
	Jumlah	101.503.339.252,00	101.572.277.973,50	(0,07)

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	16.983.683.723,24	16.201.594.459,57

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp16.983.683.723,24. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,83% dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp16.201.594.459,57. Mutasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA	Rp	9.005.217.412,53
Mutasi Tambah : Pendapatan Hibah	Rp	<u>7.978.466.310,71</u>
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	Rp	16.983.683.723,24

Unsur Lain-lain Pendapatan yang Sah dari Pendapatan Lainnya Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 97 Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

(dalam Rupiah)

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
A	Pendapatan Hibah –LO	7.978.466.310,71	8.229.779.055,57	(3,05)
1	Pendapatan Hibah Persediaan	4.557.004.324,71	3.265.160.093,57	39,56
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	112.002.000,00	82.234.000,00	36,20
	DP3AP2KB	280.886.842,50	171.771.865,00	63,52
	Dinas Kesehatan	2.907.928.052,21	2.375.889.800,57	22,40
	RSUD Mardi Waluyo	0,00	83.500.860,00	(100,00)
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	238.208.660,00	551.963.568,00	(57,21)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.014.657.490,00	0,00	100,00
	Kelurahan Pakunden	1.773.760,00	0,00	100,00
	Kelurahan Rembang	1.773.760,00	0,00	100,00
	Kelurahan Kauman	1.773.760,00	0,00	100,00
	Pendapatan Hibah Aset Tetap:	3.421.461.986,00	4.964.618.962,00	(31,08)
	Dinas Kesehatan	0,00	39.365.568,00	(100,00)
	Dinas Pendidikan	0,00	358.360.000,00	(100,00)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	250.977.860,00	154.018.038,00	62,95
	Dinas Perumahan Rakyat	0,00	4.412.875.358,00	(100,00)
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.847.771.000,00	0,00	100,00
	Kelurahan Pakunden	97.803.042,00	0,00	100,00
	Kelurahan Rembang	97.803.042,00	0,00	100,00
	Kelurahan Kauman	97.803.042,00	0,00	100,00
	Dinas Perhubungan	29.304.000,00	0,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya –LO	9.005.217.412,53	7.971.815.404,00	12,96
	Lain-lain Pendapatan-LO	50.354.796,53	0,00	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO	8.954.862.616,00	7.971.815.404,00	12,33
	Jumlah	16.983.683.723,24	16.201.594.459,57	4,83





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Pendapatan Hibah-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		7.978.466.310,71	8.229.779.055,57

Realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 sebesar Rp7.978.466.310,71. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar 3,05% dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar Rp8.229.779.055,57.

2	Pendapatan Lainnya-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		9.005.217.412,53	7.971.815.404,00

Realisasi Pendapatan Lainnya - LO Tahun 2023 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO Rp8.954.862.616,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah Rp50.354.796,53. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan 12,96% dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar Rp7.971.815.404,00.

7.5.4.2 BEBAN LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

7.5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1	Beban Pegawai	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		315.064.932.339,00	323.805.795.710,00

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp315.064.932.339,00 atau turun 2,70% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp323.805.795.710,00. Rincian Beban Pegawai ada lah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 98 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	192.071.812.059,00	191.244.160.357,00	827.651.702,00	0,43
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	71.384.637.507,00	72.303.364.822,00	(918.727.315,00)	(1,27)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.244.595.330,00	38.356.205.057,00	(111.609.727,00)	(0,29)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.958.406.558,00	11.705.407.764,00	252.998.794,00	2,16
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	603.880.885,00	496.640.421,00	107.240.464,00	21,59
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	0,00	8.898.417.289,00	(8.898.417.289,00)	(100,00)
	Jumlah	315.064.932.339,00	323.805.795.710,00	(8.740.863.371,00)	(2,70)

Perhitungan Beban Pegawai pada Laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut.

Belanja Pegawai-Laporan Realisasi Anggaran **Rp 314.865.852.902,00**

Mutasi Tambah:

1	Hutang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	Rp	845.807.446,00
2	Koreksi saldo awal Hutang Belanja Pegawai	Rp	67.500,00
	Jumlah	Rp	845.874.946,00

Mutasi Kurang:

1	Hutang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	Rp	646.795.509,00
	Jumlah	Rp	646.795.509,00

Jumlah mutasi bersih Rp 199.079.437,00

Beban pegawai- Laporan Operasional **Rp 315.064.932.339,00**

2	Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		<u>457.684.754.330,22</u>	<u>483.146.683.592,79</u>

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp 457.684.754.330,22 atau turun 5,27% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp483.146.683.592,79. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 99 Rincian Beban Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Nalik(Turun)	%
Beban Persediaan :				
Beban Barang Pakai Habis	127.014.389.960,67	134.207.701.432,94	(7.193.301.472,27)	(5,36)
Beban Barang Tak Habis Pakai	141.757.500,00	8.445.300,00	133.312.200,00	1.578,54
Sub Jumlah Beban Persediaan	127.156.157.460,67	134.216.146.732,94	(6.761.884.373,28)	(5,26)
Beban Jasa :				
Beban Jasa Kantor	185.048.393.822,41	196.234.072.017,53	(11.185.678.195,12)	(5,70)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.336.308.991,00	30.250.820.194,00	85.488.797,00	0,28
Beban Sewa Tanah	8.739.100,00	29.331.500,00	(19.592.400,00)	(69,15)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.109.679.490,00	4.912.756.843,00	2.196.922.647,00	44,72
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	446.838.050,00	728.623.894,00	(281.785.844,00)	(38,67)
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	4.003.500,00	(4.003.500,00)	(100,00)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	51.160.600,00	(51.160.600,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.611.989.747,00	2.764.864.223,10	847.105.523,90	30,64
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.548.613.694,50	10.508.317.045,46	(959.703.350,96)	(9,13)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.212.660.300,00	15.767.494.019,00	(1.554.833.719,00)	(9,86)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.065.563.706,00	17.491.833.320,00	1.573.730.386,00	9,00
Sub Jumlah Beban Jasa	269.388.766.900,91	278.742.277.156,09	(9.353.510.255,18)	(3,36)
Beban Pemeliharaan :				
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	172.306.210,00	(172.306.210,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.725.517.720,00	9.211.025.625,95	(2.485.507.905,95)	(28,98)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.436.278.988,00	26.254.481.827,51	(9.818.182.839,51)	(37,40)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.300.107.370,00	8.629.878.376,00	2.670.228.994,00	30,94
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	144.284.900,00	89.827.700,00	54.457.200,00	60,62
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	169.352.000,00	0,00	169.352.000,00	100,00
Sub Jumlah Beban Pemeliharaan	34.775.540.978,00	44.357.499.739,46	(9.581.958.761,46)	(21,60)
Beban Perjalanan Dinas :				
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.364.288.990,64	25.712.352.136,30	651.936.854,34	2,54
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	118.407.828,00	(118.407.828,00)	(100,00)
Sub Jumlah Beban Perjalanan Dinas	26.364.288.990,64	25.830.759.964,30	533.529.026,34	2,07
Jumlah Beban Barang dan Jasa	457.684.754.330,22	483.146.683.592,79	(25.461.929.262,57)	(5,27)

Perhitungan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut.

**Belanja Barang dan Jasa-
Laporan Realisasi Anggaran**

Rp 443.446.489.987,36

Mutasi Tambah:

1	Hutang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023	Rp	29.311.801.890,90
2	Persediaan 31 Desember 2022	Rp	22.266.641.952,57
3	Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2022	Rp	69.627.083,33
4	Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	1.633.598.487,00
5	Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan	Rp	4.557.004.324,71



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Propinsi Jatim berupa barang persediaan		
6	Beban jasa transaksi keuangan	Rp	474.100,00
7	Koreksi saldo awal persediaan	Rp	25.616.385,00
	Jumlah	Rp	57.864.764.223,51

Mutasi Kurang:

1	Hutang Belanja Barang dan jasa per 31 Desember 2022	Rp	25.872.582.986,29
2	Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke asset tetap	Rp	3.769.200,00
3	Persediaan 31 Desember 2023	Rp	17.722.360.194,36
4	Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023	Rp	27.787.500,00
	Jumlah	Rp	43.626.499.880,65

Jumlah mutasi bersih Rp 14.238.264.342,86

**Beban barang dan jasa-
Laporan Operasional** **Rp 457.684.754.330,22**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3 Beban Hibah	40.015.047.175,00	24.582.902.981,00

Jumlah Beban Hibah pada Tahun 2023 sebesar Rp40.015.047.175,00 atau naik 62,78% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp24.582.902.981,00.

Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 100 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11.495.600.300,00	1.256.034.000,00	10.239.566.300,00	815,23
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.026.922.655,00	2.347.015.701,00	7.679.906.954,00	327,22
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.045.140.885,00	2.015.000.000,00	11.030.140.885,00	547,40
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.842.308.963,00	6.989.473.908,00	(4.147.164.945,00)	(59,33)
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.058.185.000,00	11.428.490.000,00	(9.370.305.000,00)	(81,99)
6.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	4.576.012.532,23	(100,00)
6.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	546.889.372,00	546.889.372,00	0,00	0,00
	Jumlah	40.015.047.175,00	24.582.902.981,00	15.432.144.194,00	62,78



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perhitungan Beban Hibah pada Laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut.

Belanja Hibah-Laporan Realisasi Anggaran **Rp 40.770.317.144,00**

Mutasi Tambah:

1. Hibah Aset Tetap ke Instansi Vertikal Rp 9.721.790.870,00

Jumlah **Rp 9.721.790.870,00**

Mutasi Kurang:

1. Hutang Belanja Hibah per 31 Desember 2022 Rp 427.301.715,00

2. Beban Hibah BOS kepada Sekolah Swasta yang seharusnya tidak masuk Laporan Operasional Rp 5.028.516.824,00

3. Beban Hibah BOP PAUD yang seharusnya tidak masuk Laporan Operasional Rp 3.697.242.300,00

4. Beban Hibah BOP Kesetaraan yang seharusnya tidak masuk Laporan Operasional Rp 1.324.000.000,00

Jumlah **Rp 10.477.060.839,00**

Jumlah mutasi bersih **(Rp 755.269.969,00)**

Beban hibah-Laporan Operasional **Rp 40.015.047.175,00**

4	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		20.627.654.900,00	23.569.922.320,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar Rp20.627.654.900,00 atau turun 12,48% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp23.569.922.320,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 101 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	140.999.880,00	(140.999.880,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.373.252.000,00	5.835.680.000,00	(462.428.000,00)	(7,92)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	15.254.402.900,00	17.593.242.440,00	(2.338.839.540,00)	(13,29)
	Jumlah	20.627.654.900,00	23.569.922.320,00	(2.942.267.420,00)	(12,48)

7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1 Beban Penyusutan	(Rp)	(Rp)
	<u>144.106.149.990,10</u>	<u>143.504.219.453,45</u>

Jumlah Beban Penyusutan pada tahun 2023 sebesar Rp144.106.149.990,10 atau naik 0,42% dengan tahun 2022 sebesar Rp143.504.219.453,45. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.456.659.824,31	63.993.102.638,52	(5.536.442.814,21)	(8,65)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.712.948.799,27	33.922.287.947,67	2.790.660.851,60	8,23
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48.304.686.959,40	45.588.828.867,26	2.715.858.092,14	5,96
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	631.854.407,12	0,00	631.854.407,12	100,00
	Jumlah	144.106.149.990,10	143.504.219.453,45	601.930.536,65	0,42

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2 Beban Amortisasi	(Rp)	(Rp)
	<u>1.909.921.495,21</u>	<u>2.324.592.018,81</u>

Jumlah Beban Amortisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp1.909.921.495,21 atau turun 17,84 % dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.324.592.018.81. Beban Amortisasi tersebut merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

7.5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	<u>685.906.059,00</u>	<u>782.911.736,75</u>





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 sebesar Rp 685.906.059,00 atau turun 12,39% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp685.906.059,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	452.432.864,80	623.172.487,80	(170.739.523,00)	(27,40)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	70.214.055,00	115.168.330,00	(44.954.275,00)	(39,03)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	130.415.160,00	35.771.782,75	94.643.367,25	264,58
4	Beban Penyisihan BLUD	32.843.879,20	8.799.126,20	24.044.753,00	273,26
	Jumlah	685.906.059,00	782.911.736,75	(97.005.677,75)	(12,39)

7.5.4.2.4 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>1.294.957.179,69</u>	<u>1.364.614.828,71</u>

Jumlah Beban Lain-lain pada Tahun 2023 sebesar Rp1.294.957.179,69 atau turun 5,10% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.364.614.828,71. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyisihan (Investasi) Tak Tertagih	99.590,00	0,00	99.590,00	100,00
2	Penurunan Nilai Investasi BPR Artha Praja	240.957.615,01	0,00	240.957.615,01	100,00
3	Penurunan Nilai Investasi PDAM Kota Blitar	1.053.899.974,68	1.364.614.828,71	(310.714.854,03)	(22,77)
	Jumlah	1.294.957.179,69	1.364.614.828,71	(69.657.649,02)	(5,10)

7.5.4.2.5 Beban Transfer

Beban Transfer	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Beban Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.2.6 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.410.644.851,00	2.189.702.500,00

Jumlah Beban Tak Terduga pada Tahun 2023 sebesar Rp2.410.644.851,00 atau naik 10,09% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.189.702.500,00. Rincian Beban Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga -Laporan Realisasi Anggaran		Rp 2.413.757.451,00
Mutasi Kurang :		
Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022 yang disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2023	Rp 3.112.600,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 3.112.600,00	
Mutasi Bersih		Rp (3.112.600,00)
Beban Tidak Terduga-LO		Rp 2.410.644.851,00

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	104.128.074.338,25	(251.147.136,55)

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 sebesar (Rp104.128.074.338,25) terdiri dari :

- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 109.418.288.136,00 atas koreksi penambahan dan/atau hasil pemecahan data inventaris jalan karena sertifikat terbit tahun 2023
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(5.290.213.797,75) terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Nilai buku Parkir Kantor Walikota Blitar pada Bagian Umum yang telah dibongkar dan telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/45/KEP/410.010.3/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar (Rp112.934.250).
- 2) Tanaman pada Bagian Umum yang telah mati dan dihapuskan sesuai SK Nomor 188/34/KEP/410.010.3/2023 tanggal 7 November 2023 sebesar (Rp5.000.000,00)
- 3) Nilai Buku Rumah pompa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/42/KEP/410.010.3/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebesar (Rp9.777.000,00).
- 4) Kambing, sapi dan induk koi pada Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/28/KEP/410.010.3/2023 tanggal 20 September 2023 sebesar (Rp268.250.000,00).
- 5) Nilai Buku Pagar dan taman aloon-alonn pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/43/KEP/410.010.3/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar (Rp213.496.368,86).
- 6) Nilai Buku Patung Kingkong di Taman Sentul pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/25/KEP/410.010.3/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar (Rp96.935.000).
- 7) Binatang, burung dan ayam pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/27/KEP/410.010.3/2023 tanggal 18 September 2023 sebesar (Rp72.350.000).
- 8) Tanaman pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/24/KEP/410.010.3/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebesar (Rp44.500.000).
- 9) Bangunan kantor dan los pasar templek pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

188/35/KEP/410.010.3/2023 tanggal 24 Nopember 2023 sebesar (Rp18.000.000).

- 10) Nilai buku Gedung Utama Puskesmas Sukorejo pada UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo yang telah dibongkar dan dihapuskan sesuai SK Nomor 188/33/KEP/410.010.3/2023 tanggal 7 Nopember 2023 sebesar (Rp1.805.877.543,09).
- 11) Nilai buku Tenda Posko Covid dan printer pada Bagian Umum yang telah dihapuskan dan dilaksanakan penjualan sesuai SK Nomor 188/198/H2/410.010.3/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar (Rp11.520.992,00).
- 12) Koreksi penyesuaian data tanah jalan yang disesuaikan nilainya karena sertifikat terbit tahun 2023 sebesar (Rp2.629.339.850,00).
- 13) Nilai buku tensi pada Dinas Kesehatan yang telah dihapuskan sesuai SK 188 /39/KEP/410.020.3/ 2023 Tanggal 5 Desesember 2023 sebesar (Rp2.232.793,60)

7.5.4.4 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat realisasi Pos Luar Biasa pada TA 2023

7.5.4.5 Surplus/Defisit-LO

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit LO	(Rp)	(Rp)
	34.595.056.299,95	84.420.996.656,40

Surplus merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.595.056.299,95.





7.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah meliputi transaksi anggaran dan non anggaran yang memuat perbandingan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengeluaran kas, yaitu semua aliran kas yang keluar dari BUD, termasuk aliran kas diluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu dana operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) & Dana Bantuan Operasioanl Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraandi Dinas Pendidikan serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah menghasilkan kas tanpa ada bantuan sumberdaya lain.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	927.921.560.242,69	918.429.680.280,52
Arus Keluar Kas	822.124.072.384,36	876.753.219.840,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi	105.797.487.858,33	41.676.460.439,64

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp 105.797.487.858,33 atau naik 153,85% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp41.676.460.439,64.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Arus Masuk Kas

Adalah kas masuk yang berasal dari Pendapatan APBD TA 2023 sebesar Rp927.921.560.242,69 terdiri dari arus masuk kas ke BUD dan termasuk Pendapatan yang dikelola BOSNAS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BLUD, BOK dan JKN FKTP. Pendapatan yang dikelola BLUD sebesar Rp98.850.950.817,36, Kapitasi JKN FKTP sebesar Rp8.954.862.616,00, BOK sebesar Rp3.525.398.000,00, BOP PAUD sebesar Rp3.697.242.300,00, BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.324.000.000,00 dan dana BOS sebesar Rp 21.333.277.995,00 sedangkan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp790.235.828.514,33 yang terdiri dari:

- 1) Kas masuk ke BUD yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp56.381.185.255,00.
- 2) Kas masuk ke BUD dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 7.830.222.821,23
- 3) Kas masuk ke BUD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penerimaan dividen kas atas Penyertaan Modal sebesar Rp1.042.119.574,56 terdiri dari penerimaan dividen dari Bank Jatim sebesar Rp901.844.289,56 dan dividen dari BPR Artha Praja sebesar Rp140.275.285,00.
- 4) Kas masuk ke BUD dan dana BLUD dari RSUD Mardi Waluyo yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp105.695.016.411,37. Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola BLUD sebesar Rp98.850.950.817,36 dan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp 6.844.065.594,01
- 5) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil sebesar Rp92.510.557.565,00.
- 6) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum sebesar Rp417.003.510.313,00.
- 7) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp9.770.554.691,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 8) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp67.415.695.578,00
- 9) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp53.546.779.000,00.
- 10) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi hasil pajak dari Propinsi sebesar Rp106.195.788.000,00.
- 11) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan sebesar Rp1.524.913.621,00.
- 12) Kas masuk yang berasal dari penerimaan pendapatan lainnya sebesar Rp9.005.217.412,53 terdiri dari pendapatan Kapitasi JKN FKTP sebesar Rp8.954.862.616,00 dan pendapatan atas pengembalian belanja hibah tahun sebelumnya sebesar Rp50.354.796,53. Pengembalian hibah tahun sebelumnya terdiri dari pengembalian belanja hibah KONI sebesar Rp7.200.117,20 dan pengembalian belanja hibah PMI tahun sebelumnya sebesar Rp42.070.090,00 serta pengembalian sisa kas SMP Yamanu yang tidak beroperasi lagi dan tahun sebelumnya mendapatkan hibah Dana BOS sebesar Rp1.084.589,33.

b. Arus Keluar Kas

Adalah kas keluar yang berasal dari belanja pegawai, barang dan jasa APBD termasuk Belanja yang dikelola dari dana BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOK dan Kapitasi JKN TA 2023 sebesar Rp822.124.072.384,36. Belanja yang dikelola dari dana BLUD sebesar Rp100.168.518.811,89, dana Kapitasi JKN sebesar Rp8.719.894.854,50, dana BOS sebesar Rp18.407.529.723,36, BOP PAUD sebesar Rp3.697.242.300,00, BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.324.000.000,00, serta BOK sebesar Rp2.801.682.540,00. Sedangkan kas keluar dari BUD yaitu sebesar Rp687.005.204.154,61, yang terdiri dari:

- 1) Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp314.865.852.902,00.
- 2) Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp443.446.489.987,36. Belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp318.377.380.881,61, dari dana BLUD RSUD sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp100.168.518.811,89 dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp8.719.894.854,50, dari dana BOS sebesar Rp13.379.012.899,36 serta dari dana BOK sebesar Rp2.801.682.540.

- 3) Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Hibah sebesar Rp 40.770.317.144,00. Belanja Hibah yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp30.720.558.020,00, dari dana BOS ke Sekolah Swasta sebesar Rp5.028.516.824,00, dari dana BOP PAUD sebesar Rp3.697.242.300,00 serta dari dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.324.000.000,00.
- 4) Kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp20.627.654.900,00.
- 5) Kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.413.757.451,00.

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	10.647.139.769,00	138.530.000,00
Arus Keluar Kas	161.638.025.990,00	162.877.763.265,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(150.990.886.221,00)	(162.739.233.265,39)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp150.990.886.221,00) atau naik 7,22% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 sebesar (Rp162.739.233.265,39)

a. Arus Kas Masuk

Adalah kas masuk ke BUD sebesar Rp10.647.139.769,00 yang terdiri dari :

- 1) Pencairan dana cadangan sebesar Rp10.000.0000.000,00 dalam rangka belanja hibah ke KPU dan Bawaslu pada TA 2023.
- 2) Penjualan peralatan mesin sebesar Rp463.780.436,00 atas penjualan alat angkutan dan peralatan kantor melalui lelang di KPKNL Malang.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp63.965.000,00 atas penjualan hewan dan tanaman.
- 4) Penjualan aset lainnya sebesar Rp119.394.333,00 atas penjualan hasil bongkaran Labkesda, hasil lelang aset tidak terpakai dan hasil penjualan scrap peralatan mesin/rosok.

b. Arus Kas Keluar

Adalah arus kas keluar dari BUD yang berasal dari Belanja APBD TA 2023 termasuk Belanja BLUD, dana BOS dan Kapitasi JKN dari 3 FKTP, yaitu sebesar Rp161.638.025.990,00 yang terdiri dari:

- 1). Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan dalam rangka kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00.
- 2). Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.322.308.618,00, Belanja Peralatan dan Mesin yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp23.670.720.458,00, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp387.232.800,00, dari dana Kapitasi JKN dari 3 FKTP sebesar Rp197.558.714,00 dan dana BOS sebesar Rp2.066.796.646,00.
- 3). Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.954.436.910,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp62.420.480.252,00 dan dari dana BLUD RSUD sebesar Rp533.956.658,00.
- 4). Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp45.263.635.846,00.
- 5). Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.097.644.616,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp433.454.380,00 dan dari dana BOS sebesar Rp1.664.190.236,00.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	133.830.522,46	175.827.797,81
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan/Pendanaan	133.830.522,46	175.827.797,81

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp133.830.522,46 atau turun 23,89% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2022 sebesar Rp175.827.797,81.

a. Arus Kas Masuk

Adalah arus kas masuk ke BUD yang berasal penerimaan Dana Bergulir sebesar Rp133.830.522,46

b. Arus Keluar Kas

Adalah arus kas keluar dari BUD sebesar Rp0,00.

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	71.185.258.464,00	81.069.865.517,87
Arus Keluar Kas	71.185.258.464,00	81.069.865.865,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(0,00)	(360,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2023 sebesar Rp0,00 atau naik 100% dibandingkan dengan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar (Rp360,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan arus kas bersih dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 yang berasal dari BUD, BLUD RSUD,



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kapitasi JKN dan BOK dari 3 FKTP, serta BOSNAS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023

Jenis PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Arus Kas Bersih
IWP 8%	9.894.225.417,00	9.894.225.417,00	0,00
IWP 1%	2.417.147.496,00	2.417.147.496,00	0,00
3,25% PPPK	235.589.465,00	235.589.465,00	0,00
Askes	9.667.862.103,00	9.667.862.103,00	0,00
JKK	293.563.306,00	293.563.306,00	0,00
JKM	880.689.693,00	880.689.693,00	0,00
PPh 21	11.414.754.830,00	11.414.754.830,00	0,00
PPN	22.695.478.796,00	22.695.478.796,00	0,00
PPh 22	1.267.217.230,00	1.267.217.230,00	0,00
PPh 23	1.214.731.565,00	1.214.731.565,00	0,00
PPh Final	2.283.533.596,00	2.283.533.596,00	0,00
BLUD	7.496.745.334,00	7.496.745.334,00	0,00
JKN	558.504.636,00	558.504.636,00	0,00
BOSNAS	754.377.746,00	754.377.746,00	0,00
BOK	110.837.251,00	110.837.251,00	0,00
JUMLAH	71.185.258.464,00	71.185.258.464,00	0,00

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.994.318.147,86 perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 106 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)			
No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(45.059.567.840,21)	(120.886.945.387,94)
2.	Koreksi saldo awal kas tahun lalu	(1.156.632,00)	0,00
3.	Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	110.678.628.471,16	135.692.032.351,00
4.	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5.	Saldo Awal Kas BOSNAS	2.287.545.568,42	5.768.370.111,29



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
6.	Saldo Awal Kas BLUD	5.891.140.308,28	98.141.163.549,83
7.	Saldo Awal Kas JKN	151.265.154,48	340.421.995,89
8.	Saldo Awal Kas BOP PAUD	1.156.632,00	0,00
9.	Saldo Awal Kas Bendahara Penerimaan	34.016.309,09	0,00
10.	Saldo Awal Kas Lainnya	11.290.176,64	0,00
11.	Saldo Akhir Kas BUD + Bendahara Pengeluaran + BOSNAS + BLUD + JKN + BOK	73.919.914.766,65	119.009.736.134,34
12.	Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	24.488.183,21	34.016.309,09
13.	Saldo Akhir Kas Bendahara Lainnya	49.917.198,00	11.290.176,64
	Saldo Akhir Kas (10+11+12)	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.6 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Saldo awal ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal ekuitas	(Rp)	(Rp)
	2.808.219.964.285,1	2.786.551.759.918,34

Pada Tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp2.808.219.964.285,10.

7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit-LO	(Rp)	(Rp)
	34.595.056.299,95	(74.570.799.537,70)

Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar sebesar 34.595.056.299,95 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Blitar Pada Tahun 2023.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh koreksi saldo awal TA 2023 sebesar (Rp5.703.681.914,32) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Piutang	150.000,00	(19.281.681,00)

Koreksi nilai piutang atas nilai Saldo Awal piutang 2023 sebesar Rp150.000,00 yaitu kurang catat piutang awal pajak restoran pada BPKAD sebesar Rp150.000,00 atas nama Bakso Gemini Masa Desember 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Penyisihan Piutang	23.902.384,21	172.800.848,50

Koreksi Penyisihan Piutang dikarenakan:

- a. Pengurang Piutang Pajak Parkir atas tahun-tahun sebelumnya pada BPKAD sehingga mengurangi saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp212.450,00.
- b. Pengurang Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas tahun-tahun sebelumnya sehingga mengurangi saldo Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.438.900,00.
- c. Pengurang Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Bunga atas Investasi Dana Bergulir) atas tahun-tahun sebelumnya pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dengan kategori macet sebesar Rp21.251.034,21 sehingga mengurangi saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp21.251.034,21.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Penyisihan Investasi Tak Tertagih	93.681.365,72	786.930.627,95

Koreksi Penyisihan Investasi Tak Tertagih dikarenakan pada tahun 2023 terdapat realisasi pembayaran Investasi Dana Bergulir atas tahun lalu pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dengan kategori macet sebesar Rp133.830.522,46 sehingga mengurangi saldo penyisihan investasi tak tertagih sebesar 70% dari Rp133.830.522,46 yaitu Rp93.681.365,72.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4. Hutang	1.380.815.299,50	(73.965.685,45)

Pada TA 2023, dampak kumulatif atas Hutang sebesar Rp1.380.815.299,50 terdiri dari:

- a. Hutang Jangka Pendek Lainnya atas utang kelebihan pembayaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur TA 2022 sebesar Rp1.380.747.799,50 yang pada TA 2023 dianggarkan kembali dalam P-APBD TA 2023 dan tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai Berita Acara Bantuan Keuangan Rekonsiliasi Propinsi Jawa Timur Nomor 2023.4/tripatid2022/V/2023.
- b. Hutang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan atas Honorarium Pengurus Barang pada TA 2022 sebesar Rp67.500, dan pada TA 2023 sudah tidak dianggarkan sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI TA 2022 sesuai Surat Keterangan Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Nomor 900.1.3.5/1/410.202.1/2024.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5. Persediaan	25.616.385,00	812.101.010,00

Pada TA 2023, dampak kumulatif atas Persediaan sebesar Rp 25.616.385, terdiri dari:

- a. Kurang catat saldo awal persediaan obat (intramox, limoxin dan suproldon) pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp6.674.100,00,
- b. Kurang catat saldo awal seragam SMP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.450.000,00.
- c. Kurang catat saldo awal persediaan alat tulis kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.348.000,00.
- d. Kurang catat saldo awal persediaan baju atasan SMP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.400.000,00.
- e. Kurang catat saldo awal persediaan kaos kaki pramuka dan bed SD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp744.285,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
6. Kas	(Rp)	(Rp)
	<u>(1.156.632,00)</u>	<u>0,00</u>

Pada TA 2023, dampak kumulatif atas Kas sebesar (Rp1.156.632,00) yang merupakan lebih catat saldo awal Kas BOP PAUD pada Dinas Pendidikan yang hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan TA 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
7. Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	<u>1.581.993.643,00</u>	<u>94.861.690.723,01</u>

Pada TA 2023, dampak kumulatif atas Aset Tetap sebesar Rp1.581.993.643,00 terdiri dari:

a. Penilaian Aset Tetap pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp451.500.000,00 berupa :

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1) Hidran Kebakaran Griya Tanggung Asri II | Rp | 6.400.000,00 |
| 2) Pagar Permanen Perum Wisma Indah Kepanjenlor | Rp | 88.200.000,00 |
| 3) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Perum Tirtomadu Residence III | Rp | 197.600.000,00 |
| 4) Saluran Drainage Perum Tirtomadu Residence I | Rp | 44.200.000,00 |
| 5) Saluran Drainage Perum Tirtomadu Residence III | Rp | 93.700.000,00 |
| 6) Jaringan Listrik Lainnya lampu Penerangan Jalan tanpa tiang Griya Tanggung Asri II | Rp | 21.400.000,00 |

b. Penilaian Aset Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp97.632.000,00 berupa :

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1) Sepeda motor honda nf 100lsd 4 buah | Rp | 12.832.000,00 |
| 2) Pick Up Mitsubishi L200 | Rp | 84.800.000,00 |

c. Penilaian Aset Tetap pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa:

- | | | |
|------------------------|----|------------------|
| 1) Gedung graha patria | Rp | (311.360.000,00) |
|------------------------|----|------------------|

d. Koreksi penyesuaian data tanah jalan yang Rp





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

disesuaikan nilainya karena sertifikat sd. tahun 2022		(18.191.729.003,00)
e. Koreksi penyesuaian data tanah saluran yang digabung dengan data tanah jalan karena sertifikat jadi satu sd. tahun 2022	Rp	(5.374.532.100,00)
f. Koreksi penambahan dan/atau hasil pemecahan data inventaris jalan karena sertifikat terbit tahun 2022	Rp	24.910.482.746,00
Jumlah	Rp	1.581.993.643,00

Akumulasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
8. Penyusutan Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	(9.264.327.303,75)	636.239.512,86

Pada Tahun Anggaran 2023 Dampak Kumulatif atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp9.264.327.303,75) terdiri dari:

a. Penilaian Aset Tetap pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp30.599.999,98 berupa :

1) Hidran Kebakaran Griya Tanggung Asri II	Rp	(1.280.000,00)
2) Pagar Permanen Perum Wisma Indah Kepanjenlor	Rp	(8.820.000,00)
3) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Perum Tirtomadu Residence III	Rp	(9.880.000,00)
4) Saluran Drainage Perum Tirtomadu Residence	Rp	(9.193.333,32)
5) Jaringan Listrik Lainnya lampu Penerangan Jalan tanpa tiang Griya Tanggung Asri II	Rp	(1.426.666,66)

b. Penilaian Aset Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp97.632.000,00 berupa :

1) Sepeda motor honda nf 100lsd 4 buah	Rp	(12.832.000,00)
2) Pick Up Mitsubishi L200	Rp	(84.800.000,00)

c. Pencatatan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sd. Tahun 2022 atas penilaian aset graha patria yang akan digunakan sebagai Mall Pelayanan Publik pada



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

d. Koreksi Kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(9.447.455.303,77)
Jumlah	Rp	(9.264.327.303,75)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	417.526.904,00	7.807.800,00

Koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2023 sebesar Rp417.526.904,00 merupakan koreksi kurang catat saldo awal amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
10. Investasi Permanen	0,00	(586.223.081,00)

Koreksi atas Investasi Permanen pada tahun 2023 sebesar Rp0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
11. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(95.519.000,00)	134.060.000,0

Koreksi nilai penyusutan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar (Rp95.519.000,00) merupakan koreksi lebih catat saldo awal penyusutan aset lain-lain Tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
12. Kurang/Lebih catat atas Perubahan Masa Manfaat	133.635.040,00	(186.054.497,41)

Koreksi kurang/lebih catat atas perubahan masa manfaat pada Tahun 2023 sebesar Rp133.635.040,00 merupakan Koreksi atas perubahan masa manfaat asset tetap yang direklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.635.040,00 pada :



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Kelurahan Ngadirejo	Rp	26.215.000,00
b. Kelurahan Kepanjenlor	Rp	10.325.000,00
c. Kelurahan Gedog	Rp	19.518.240,00
d. Kelurahan Plosokerep	Rp	15.330.000,00
e. Kelurahan Sananwetan	Rp	15.470.000,00
f. Kelurahan Bendogerit	Rp	46.776.800,00

13.	Kurang/Lebih catat atas Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>348.338.200,00</u>

Pada TA 2023, dampak kumulatif atas Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

14.	Pendapatan Diterima Di muka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>(516.664,00)</u>

Koreksi atas Pendapatan Diterima di Muka atas pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo akhir ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.837.111.338.670,73</u>	<u>2.786.551.759.918,3</u>

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada akhir periode pelaporan. Saldo Ekuitas akhir berasal dari:

Tabel 107 Perhitungan Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)	
Ekuitas Awal	2.808.219.964.285,10
Surplus Laporan Operasional	34.595.056.299,95
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Masalah Mendasar	(5.703.681.914,32)
Ekuitas Akhir	2.837.111.338.670,73



7.5.7 Informasi Penting Lainnya Yang Diperlukan

Dalam BAB ini akan disampaikan informasi-informasi yang perlu untuk diketahui oleh pemakai terkait dengan laporan keuangan. Informasi-informasi dimaksud sebagai berikut:

7.5.7.1 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Pemerintah Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Kota Blitar tidak mendapat Dana Tugas Pembantuan

7.5.7.2 Penerimaan Kas yang Tidak Diterima Melalui Kas Umum Daerah

Penerimaan Kas yang tidak diterima melalui RKUD terdiri dari :

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan (BOSP) di Dinas Pendidikan, yaitu:
 - 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah;
 - 2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD;
 - 3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan;
- b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Mardi Waluyo;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan;
- d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan.

Pengakuan pendapatan dan belanja diatas melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan Belanja oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan permintaan pengesahan pendapatan dan belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, RSUD Mardi Waluyo dan Dinas Kesehatan.

7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan kemajuan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan tahun anggaran berjalan. Berikut ini pengungkapan informasi penyelesaian kerugian daerah pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk TA 2023 melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 188/216/HK/410.020.3/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) TA 2023. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan TP-TGR melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Posisi kerugian daerah pada Pemerintah Kota Blitar sebanyak 470 kasus sebesar Rp8.125.003.721,15 terdiri dari:

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 150 kasus sebesar Rp4.214.249.943,38. Dari 150 kasus tersebut telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebanyak 93 kasus sebesar Rp1.494.103.499,98, pembayaran secara angsuran yang telah dilunasi sebanyak 57 kasus sebesar Rp2.439.333.943,40 sehingga kasus yang belum selesai sebesar Rp 280.812.500,00 (Rp4.214.249.943,38 – Rp1.494.103.499,98 – Rp2.439.333.943,40).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Tidak terdapat kasus kerugian yang sedang dalam proses pembebanan, baik yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lainnya, dan Pihak Ketiga.
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebanyak 320 kasus sebesar Rp3.910.753.777,77. Dari 320 kasus tersebut, telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebanyak 301 kasus sebesar Rp3.599.665.446,06, pembayaran angsuran sebanyak 19 kasus sebesar Rp311.088.331,71 sehingga sisa kasus yang belum selesai sebesar Rp0,00 ($Rp3.910.753.777,77 - Rp3.599.665.446,06 - Rp311.088.331,71$).

Tim MP TPTGR telah mengusulkan pembebasan dan penghapusan kerugian daerah sebanyak tiga kasus kerugian daerah yang telah diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM Tuntutan ganti rugi dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp225.116.229,00, atas usulan tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. H.M.Suwito Kurnia Wijaya telah didukung SKTJM sebesar Rp37.000.000,00 dan telah diangsur sebesar Rp12.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp25.000.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2005. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapus dengan diterbitkannya SK Walikota Blitar Nomor 188/732/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. H.M.

Suwito Kurnia Wijaya sebesar Rp25.000.000,00. Namun sisa kerugian daerah atas nama Drs.H.M.Suwito Kurnia Wijaya yang telah dihapuskan tersebut, ditindaklanjuti kembali oleh Ahli Waris dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp25.000.000,00.

- 2) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Heru Juswadi, yang terjadi pada tahun 2007 telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp3.016.229,00 dan belum terdapat angsuran. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dibebaskan dengan terbitnya SK Walikota Blitar Nomor 188/46/410.010.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pembebasan Kerugian Daerah a.n. Sdr. Drs. Heru Juswadi. Namun, sisa kerugian daerah atas nama Drs. Heru Juswadi yang telah dibebaskan tersebut, ditindaklanjuti kembali dengan menyetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.016.229,00.

- 3) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Agus Sularso telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp207.615.500,00 dan telah diangsur sebesar Rp10.515.500,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp197.100.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapuskan dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/731/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. Agus Sularso sebesar Rp197.100.000,00.

Penghapusan kewajiban penggantian kerugian daerah a.n. Drs. Agus Sularso (Alm) telah mendapatkan pertimbangan dari Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR pada tanggal 26 Juni 2013 mengenai ketidakmampuan Sdr. Drs. Agus Sularso dalam menyelesaikan ganti kerugian daerah dan persetujuan DPRD Kota Blitar sesuai surat persetujuan tanggal 11 September 2013. Akan tetapi karena SK Walikota Bitar Nomor 188/731/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. Agus Sularso sebesar Rp197.100.000,00 belum dilengkapi dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri maka penghapusan belum sah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada pasal 20 ayat (3). Untuk melengkapi dokumen pengesahan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah mengirimkan permohonan penghapusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 900/4128/410.206/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal permohonan pengesahan penghapusan kerugian daerah a.n. Drs. AS, M.Si., namun



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sampai saat ini belum ada jawaban dari Kementrian Dalam Negeri atas surat tersebut

7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi

a. Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim nomor rekening 0101028020 dengan posisi per 31 Desember 2023 tidak terdapat pembayaran dan hanya terdiri dari saldo minimal pada buku tabungan yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

b. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 11 (sebelas) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank Jawa Timur dan 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada Perumda Bank BPR Artha Praja Kota Blitar dengan posisi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 108 Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2022	Pendapatan Bunga Tahun 2023	Pemeliharaan Rekening Buku Tabungan Tahun 2023	Setoran Jasa Giro Tahun 2023 ke RKUD	Lebih Setor	Biaya Pajak dan Administrasi	Saldo per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4-5-6-7-8)
1	0142167484-Dalir UKM	273.500,14	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	377.500,14
2	0141038773-Dalir UKM	260.638,37	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	364.638,37
3	0142186217-Dalir UKM	275.061,07	109.344,91	200.000,00	4.024,61	100.000,00	117.868,99	362.512,38
4	0141036520-Dalir UKM	323.910,68	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	427.910,68
5	0142136325-Dalir UKM	350.586,41	1.389,32	200.000,00	0,00	0,00	96.277,88	455.697,87
6	0142136341-Dalir UKM	305.764,03	3.513,89	200.000,00	0,00	0,00	96.702,78	412.575,14
7	0142172470-Dalir UKM	306.407,17	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	410.407,17
8	0143003728-Dalir UKM	331.566,33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	441.566,33
9	0142132711-Dalir UKM	306.407,17	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	410.407,17
10	0142136333-Dalir Koperasi	306.407,17	0,00	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	410.407,17
11	10111000729-Dalir UKM	517.539,75	34.311,09	200.000,00	19.262,48	0,00	21.000,00	711.588,36
12	0141030671-	0,00	94,06	0,00	94,06	94,06	0,00	0,00





PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2022	Pendapatan Bunga Tahun 2023	Pemeliharaan Rekening Buku Tabungan Tahun 2023	Setoran Jasa Giro Tahun 2023 ke RKUD	Lebih Setor	Biaya Pajak dan Administrasi	Saldo per 31 Desember 2023
	Giro-Daif Koperasi							
	Jumlah	3.557.788,29	148.653,27	2.200.000,00	23.381,15	100.094,06	997.849,63	4.785.210,78

Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp4.785.210,78 Nilai tersebut terdiri dari:

- 1) Rp148.559,21 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang belum disetorkan ke RKUD yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- 2) Rp4.636.651,57 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan saldo untuk pemeliharaan rekening buku tabungan dana bergulir agar tetap aktif dengan realisasi SP2D Nomor 05.30/04.0/000041/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/P.05/12/2023 Tanggal 2 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00 dan SP2D Nomor 05.30/04.0/000034/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/P.05/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp200.000,00.

7.5.7.5 Dana Cadangan PILKADA

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2022, alokasi dana cadangan dilaksanakan pada APBD TA 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00. Pembentukan dana cadangan pada tanggal 4 Juli 2023 sesuai SP2D Nomor 09642/LSKB, BUD melaksanakan pemindahbukuan dana cadangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito dana cadangan sebesar Rp 25.000.000.000,00. Setelah itu tanggal 29 Nopember 2023 sesuai STS Nomor 49/PPKD/XI/2023, BUD melaksanakan pencairan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk belanja hibah kepada KPU sebesar Rp7.698.062.800,00 dan Bawaslu sebesar Rp2.301.937.200,00 dalam sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di





Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam APBD 2023 sebesar 40% dan APBD TA 2024 sebesar 60% dari total Dana Hibah.

7.5.7.6 Penerapan Investasi Properti

Tahun 2024 akan dilaksanakan inventarisasi/identifikasi aset sehingga dari data yang diperoleh akan dapat diidentifikasi aset yang bisa digolongkan dalam properti investasi sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.



7.5.8 Penutup

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar ini meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL periode per 31 Desember 2023. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Keuangan Negara dan Daerah. Semoga Laporan Keuangan dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada para pengguna laporan dan *stakeholder*.

WALIKOTA BLITAR



Lampiran 1 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas BOS di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		PENDAPATAN		BARANG/JASA	BELANJA MODAL		TUNAI	SALDO AKHIR	
		TUNAI	BANK	BOB REGULER	BOB KINERJA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH		BANK	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR : UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo	0,00	1.219.772,29	146.382.039,00	0,00	146.382.039,00	133.829.891,00	147.599.891,00	0,00	1.420,28	1.920,28
2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	0,00	0,00	203.406.000,00	0,00	203.406.000,00	158.884.800,00	203.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Bendo	0,00	7.391.354,26	364.719.000,00	0,00	364.719.000,00	338.713.999,00	371.038.975,00	0,00	1.273.439,26	1.273.439,26
4	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	0,00	0,00	118.800.000,00	0,00	118.800.000,00	108.793.700,00	118.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	0,00	866,49	275.289.599,00	22.500.000,00	297.799.599,00	255.517.500,00	297.840.000,00	0,00	90.448,49	90.448,49
6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo	0,00	48.590,12	130.451.064,00	0,00	130.451.064,00	120.700.809,00	138.491.069,00	0,00	99.586,12	99.586,12
7	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	0,00	30.275,36	122.369.725,00	0,00	122.369.725,00	103.275.200,00	122.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Bendo	0,00	1.674.279,82	59.699.935,00	22.500.000,00	81.199.935,00	78.611.214,00	82.874.214,00	0,00	0,82	0,82
9	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	31.537,20	120.868.545,00	22.500.000,00	149.368.545,00	122.172.700,00	149.400.000,00	0,00	82,20	82,20
10	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	382,49	190.300.000,00	0,00	190.300.000,00	154.620.100,00	140.305.000,00	0,00	905.382,49	905.382,49
11	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	3.814.854,37	127.585.146,00	22.500.000,00	150.085.146,00	129.479.900,00	153.005.000,00	0,00	0,37	0,37
12	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	87.694,12	341.116.094,00	0,00	341.116.094,00	180.756.900,00	60.422.405,60	0,00	34.088,12	29.088,12
13	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	1.678.395,19	106.191.484,00	0,00	106.191.484,00	86.113.030,00	20.985.500,00	0,00	141,19	141,19
14	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	17.251,07	144.333.903,00	0,00	144.333.903,00	123.347.700,00	5.352.300,00	0,00	100.200,97	100.200,97
15	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	866.726,28	144.333.903,00	0,00	144.333.903,00	130.208.400,00	145.789.400,00	0,00	31.289,28	31.289,28
16	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	823.013,17	154.821.211,00	22.500.000,00	157.121.211,00	141.726.324,00	157.814.224,00	0,00	30.000,17	30.000,17
17	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	1.405.501,08	126.584.800,00	0,00	126.584.800,00	110.508.600,00	17.477.700,00	0,00	3.001,08	3.001,08
18	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	121.700,89	103.378.300,00	0,00	103.378.300,00	96.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,89	0,89
19	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	887.938,36	240.385.209,00	0,00	240.385.209,00	218.537.900,36	22.662.100,00	0,00	73.147,00	73.147,00
20	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	2.047.702,23	118.562.300,00	0,00	118.562.300,00	85.917.900,00	34.682.100,00	0,00	0,23	0,23
21	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	11.934.162,69	300.385.875,00	22.500.000,00	322.865.875,00	316.009.209,00	18.790.700,00	0,00	37,69	37,69
22	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	0,00	102.600.000,00	45.000.000,00	147.600.000,00	126.414.500,00	21.185.500,00	0,00	0,00	0,00
23	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	354.771,09	283.241.690,00	0,00	283.241.690,00	231.287.481,00	51.553.000,00	0,00	56.000,09	56.000,09
24	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	140.000,00	132.695.841,00	0,00	132.695.841,00	111.808.401,00	20.801.240,00	0,00	0,00	0,00
25	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	0,56	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	64.101.500,00	7.898.500,00	0,00	0,56	0,56
26	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	640.562,23	155.087.400,00	45.000.000,00	205.067.400,00	189.878.700,00	29.281.300,00	0,00	1.587.962,22	1.587.962,22
27	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangjati	0,00	1.950.000,89	408.030.000,00	0,00	408.030.000,00	283.468.900,00	408.600.000,00	0,00	0,89	0,89
28	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangjati	0,00	1.353.757,16	73.085.139,00	0,00	73.085.139,00	68.035.000,00	4.709.200,00	0,00	0,16	0,16
29	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangjati	0,00	700,54	135.999.300,00	0,00	135.999.300,00	118.477.400,00	7.522.600,00	0,00	0,54	0,54

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		PENDAPATAN			BELANJA			SALDO AKHIR			
		TUNAI	BANK	JUMLAH	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH	BARANG/JASA	MODAL	JUMLAH	TUNAI	BANK	
30	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rumbung	0.00	2,991,189.89	2,991,189.89	120,811,087.20	80,000,000.00	206,811,087.09	155,212,100.00	74,387,900.00	208,600,000.00	0.00	2,273.98	2,273.98
31	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rumbung	0.00	72,986.24	72,986.24	148,427,014.00	0.00	148,427,014.00	126,881,205.00	21,638,800.00	146,520,000.00	0.00	0.34	0.34
32	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Surawajan	0.00	387.46	387.46	209,699,790.00	0.00	209,699,790.00	196,254,857.00	14,445,200.00	219,700,157.00	0.00	0.46	0.46
33	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sarawajan	0.00	710,707.13	710,707.13	344,889,559.00	0.00	344,889,559.00	313,866,465.00	31,003,800.00	345,592,266.00	0.00	8,000.13	8,000.13
34	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sarawajan	0.00	76,948.13	76,948.13	312,269,096.00	0.00	312,269,096.00	228,600,571.00	83,769,475.00	312,376,046.00	0.00	0.13	0.13
35	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sertu	0.00	348,559.30	348,559.30	140,363,062.00	22,000,000.00	162,863,062.00	149,117,600.00	13,356,400.00	162,468,000.00	0.00	743,651.30	743,651.30
36	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sertu	0.00	10,110,229.56	10,110,229.56	303,256,843.00	0.00	303,256,843.00	301,149,971.00	12,258,300.00	313,408,271.00	0.00	0.56	0.56
37	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sertu	0.00	4,279,791.82	4,279,791.82	148,729,639.00	0.00	148,729,639.00	139,336,700.00	13,663,300.00	153,000,000.00	0.00	430.62	430.62
38	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sertu	0.00	91,012.37	91,012.37	145,737,056.00	80,000,000.00	225,737,056.00	147,972,600.00	77,854,395.00	225,827,199.00	0.00	869.37	869.37
39	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sekeloa	0.00	439,403.62	439,403.62	102,520,132.00	0.00	102,520,132.00	87,838,000.00	14,817,900.00	102,655,900.00	0.00	303,715.62	303,715.62
40	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sekeloa	0.00	4,900,320.32	4,900,320.32	40,099,080.00	0.00	40,099,080.00	44,337,600.00	0.00	44,337,600.00	0.00	662,209.32	662,209.32
41	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sekeloa	0.00	79,469.95	79,469.95	99,842,325.00	0.00	99,842,325.00	96,737,675.00	3,162,325.00	99,900,000.00	0.00	21,814.95	21,814.95
42	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjung	0.00	1,522,761.51	1,522,761.51	134,377,239.00	0.00	134,377,239.00	114,291,000.00	21,098,000.00	135,900,000.00	0.00	0.51	0.51
43	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjung	0.00	4,255,370.89	4,255,370.89	127,705,168.00	0.00	127,705,168.00	115,609,658.00	16,400,900.00	132,010,558.00	0.00	0.89	0.89
44	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjung	0.00	1,473,062.23	1,473,062.23	139,627,450.00	0.00	139,627,450.00	135,036,960.00	11,644,200.00	136,681,160.00	0.00	4,619,412.23	4,619,412.23
45	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjung	0.00	457,576.58	457,576.58	148,949,572.00	0.00	148,949,572.00	134,999,500.00	14,362,300.00	149,362,800.00	0.00	111,148.58	111,148.58
46	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tumpu	0.00	0.26	0.26	147,690,000.00	22,000,000.00	170,000,000.00	149,766,472.00	20,333,528.00	170,000,000.00	0.00	0.26	0.26
47	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	0.00	961,806.44	961,806.44	126,283,720.00	0.00	126,283,720.00	114,798,900.00	12,087,100.00	126,886,000.00	0.00	39,526.44	39,526.44
48	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	0.00	3,887,650.77	3,887,650.77	215,712,350.00	0.00	215,712,350.00	181,826,550.00	37,677,450.00	219,504,000.00	0.00	96,000.77	96,000.77
1	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1	0.00	75,873,533.42	75,873,533.42	7,891,257,162.08	450,000,000.00	8,421,257,162.08	7,241,623,616.36	1,243,650,293.00	8,465,473,899.36	0.00	10,835,786.06	10,835,786.06
2	SMP Negeri 2	0.00	341,829,885.83	341,829,885.83	916,269,703.09	35,000,000.00	951,269,703.09	743,547,050.00	258,772,500.00	1,102,319,550.00	0.00	190,576,838.83	190,576,838.83
3	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	0.00	329,230,462.08	329,230,462.08	898,437,280.00	0.00	898,427,280.00	875,046,300.00	236,796,800.00	913,749,100.00	0.00	212,958,662.08	212,958,662.08
4	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4	0.00	191,151,354.42	191,151,354.42	974,380,373.00	35,000,000.00	1,009,380,373.00	816,172,468.00	189,848,450.00	998,020,918.00	0.00	214,510,809.42	214,510,809.42
5	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	0.00	351,519,639.89	351,519,639.89	917,373,163.00	70,000,000.00	987,373,163.00	730,362,726.00	273,244,700.00	1,003,607,426.00	0.00	335,285,276.89	335,285,276.89
6	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	0.00	205,688,235.40	205,688,235.40	729,259,086.00	0.00	729,259,086.00	528,166,400.00	292,558,900.00	929,727,300.00	0.00	114,212,941.40	114,212,941.40
7	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	0.00	301,651,709.45	301,651,709.45	744,202,595.00	35,000,000.00	779,202,595.00	668,996,700.00	349,444,694.00	1,018,443,394.00	0.00	62,410,900.45	62,410,900.45
8	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8	0.00	257,961,018.67	257,961,018.67	899,513,488.00	0.00	899,513,488.00	608,911,000.00	418,776,790.00	1,027,687,790.00	0.00	16,686,707.67	16,686,707.67
9	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	0.00	112,045,388.60	112,045,388.60	775,294,184.00	120,000,000.00	895,294,184.00	743,620,030.00	162,269,640.00	955,893,885.00	0.00	101,743,887.60	101,743,887.60
		0.00	150,706,510.66	150,706,510.66	918,483,247.00	0.00	918,483,247.00	822,902,610.00	223,512,100.00	945,074,710.00	0.00	223,115,047.66	223,115,047.66
		3,212,473,045.00	3,212,473,045.00	7,598,944,059.03	265,000,000.00	7,598,944,059.03	6,137,389,293.00	2,487,136,589.00	8,354,525,882.00	1,471,451,172.00	0.00	1,471,451,172.00	1,471,451,172.00

Lampiran 2 Pengelompokan Umur Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Kategori Piutang				
			Lancar (0 s.d 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Macet (>5 Tahun)	Jumlah
1.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah						
2.1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha						0,00
-	Piutang Denda Sewa Kios Stadion - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
-	Piutang Denda Sewa Kios Kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
-	Denda Sewa Kios Jl Mayang - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
-	Denda Sewa Kios Jl Kalud - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
-	Denda Sewa Kios Jl A Yani - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.654,00	0,00	0,00	0,00	39.654,00	39.654,00
2.2	Pendapatan denda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Hasil Sewa BMD						
-	Denda Sewa Waterpark Sumberutal	102.501.000,00	0,00	0,00	102.501.000,00	0,00	102.501.000,00
-	Denda Yayasan Masjid Hidayatullah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Hasil Sewa BMD						
-	Rusunawa - Dinas Perumahan Rakyat	382.706.024,00	77.916.595,00	74.506.250,00	117.261.717,00	112.973.462,00	382.706.024,00
-	BGS Bilal Square - BPKAD	336.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00
-	Kios Terminal Tipe C - Dinas Perhubungan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
-	Sewa tanah bengkok Kelurahan Kauman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Piutang BLUD :						
-	Piutang yayasan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)	631.429,00	631.429,00	0,00	0,00	0,00	631.429,00
-	Piutang Pasien Umum (BLUD)	296.422.928,00	5.924.756,00	17.752.382,00	48.391.896,00	221.354.094,00	296.422.928,00
-	Piutang BPJS (BLUD)	9.541.392.794,00	9.541.392.794,00	0,00	0,00	0,00	9.541.392.794,00
-	DINKES KABUPATEN - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)	14.910.237,00	14.910.237,00	0,00	0,00	0,00	14.910.237,00
-	Piutang Jasa Raharja BLUD	22.575.475,00	22.575.475,00	0,00	0,00	0,00	22.575.475,00
-	Piutang Bakorid BLUD	38.976.000,00	38.976.000,00	0,00	0,00	0,00	38.976.000,00
-	Piutang KEMENKES - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pemulasaran Jenazah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir :						
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - BNI (PPKD) - BPKAD	151.789.457,26	151.789.457,26	0,00	0,00	0,00	151.789.457,26
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	743.020.201,48	0,00	0,00	0,00	743.020.201,48	743.020.201,48
-	Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir - BPR JATIM - Bagian Perencanaan	3.176.200,00	0,00	0,00	0,00	3.176.200,00	3.176.200,00
2.7	Jasa Giro						
-	Piutang Jasa Giro Bank Jalim (PPKD) - BPKAD	67.893.201,89	67.893.201,89	0,00	0,00	0,00	67.893.201,89
2.8	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD BPR, Artha Praja						
-	Piutang Deviten PD BPR, Artha Praja - BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Piutang Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah						
-	Piutang Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Bunga PDAM - BPKAD)	193.616.520,00	53.655.320,00	53.664.090,00	86.057.110,00	0,00	193.616.520,00
-	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - BPKAD	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.980.033.821,61	10.145.315.265,15	315.512.722,00	355.160.523,00	1.384.045.311,48	11.980.033.821,61
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		0,00	31.551.272,20	177.580.261,50	1.384.045.311,47	1.293.176.845,17

Lampiran 3 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih 2023 Kategori Lancar, Kurang Lancar, Diragukan

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Kategori Piutang			
		Lancar (0 s/d 1 thn)	Kurang Lancar (1 s/d 2 thn)	Diragukan (2 s/d 5 thn)	
		2023	2022	2021	2019
Piutang Pajak					
1 Pajak Restoran :					
- Pajak Rumah Makan - BPKAD	471.181.938,00	410.699.740,00	3.175.029,00	250.000,00	11.129.150,00
- Pajak Cafeteria - BPKAD	30.796.528,00	30.796.528,00	0,00	0,00	0,00
2 Pajak Hotel :	0,00				
- Pajak Hotel - BPKAD	133.737.162,00	132.417.162,00	0,00	0,00	0,00
- Pajak Kos - BPKAD	7.230.000,00	5.625.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00
3 Pajak Hiburan - BPKAD	154.462.083,00	149.327.083,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4 Pajak Reklame - BPKAD	107.402.942,00	80.907.262,00	1.485.000,00	9.144.000,00	0,00
5 Pajak Air Tanah - BPKAD	25.068.566,00	17.019.352,00	4.442.238,00	277.390,00	0,00
6 Pajak Bumi dan Bangunan - BPKAD	9.711.596.649,00	1.341.063.077,00	727.786.569,00	618.631.665,00	635.520.288,00
7 Pajak Parkir - BPKAD	54.470.045,00	51.161.345,00	463.000,00	0,00	1.437.000,00
8 Pajak Penerangan Jalan Umum - BPKAD	1.134.794.609,00	1.134.794.609,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak	11.830.740.522,00	3.353.611.158,00	739.641.836,00	628.303.045,00	501.917.219,00
% Penyisihan		0%	10%	50%	50%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak	6.924.817.036,10	0,00	73.964.183,60	314.151.522,50	259.958.609,00

Lampiran 4 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih 2023 Kategori Macet

Uraian		Kategori Piutang											
		MACET > 5 TAHUN											
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
Piutang Pajak													
1	Pajak Restoran :												
-	Pajak Rumah Makan-BPKAD	4.385.000,00	2.875.000,00	3.220.000,00	6.415.000,00	14.954.800,00	6.753.200,00	1.710.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pajak Catering-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Hotel :												
-	Pajak Hotel-BPKAD	280.000,00	480.000,00	0,00	70.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pajak Kios-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hewan-BPKAD	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.500.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame-BPKAD	0,00	0,00	112.000,00	884.800,00	4.118.800,00	10.583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Air Tanah-BPKAD	25.000,00	18.170,00	48.510,00	35.000,00	3.192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan-BPKAD	415.511.888,00	794.310.387,00	202.137.273,00	222.715.818,00	385.555.942,00	396.268.835,00	391.518.458,00	281.758.020,00	158.251.727,00	31.438.583,00	164.785.036,00	0,00
7	Pajak Parkir-BPKAD	0,00	156.000,00	353.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Pemertan Jalan Umum-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak		420.452.828,00	761.816.557,80	205.985.763,00	230.435.624,00	411.311.792,00	413.705.036,00	393.226.377,00	281.758.020,00	158.251.727,00	31.438.583,00	144.689.036,00	100%
% Penyisihan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Pajak		420.452.828,00	761.816.557,80	205.985.763,00	230.435.624,00	411.311.792,00	413.705.036,00	393.226.377,00	281.758.020,00	158.251.727,00	31.438.583,00	144.689.036,00	100%

Uraian		Kategori Piutang											
		MACET > 5 TAHUN											
		2018	2015	2014	2013	2012	2011	2010	1999	1998	1997	1996	Tidak Tertentifikasi
Piutang Pajak													
1	Pajak Restoran :												
-	Pajak Rumah Makan-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pajak Catering-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Hotel :												
-	Pajak Hotel-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pajak Kios-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hewan-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Air Tanah-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan-BPKAD	192.028.523,00	222.379.342,00	290.521.976,00	228.553.636,00	113.188.548,00	300.724.638,00	270.818.279,00	348.724.961,00	346.607.745,00	45.590.850,00	154.722.515,00	0,00
7	Pajak Parkir-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Pemertan Jalan Umum-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak		192.028.523,00	222.379.342,00	290.521.976,00	228.553.636,00	113.188.548,00	300.724.638,00	270.818.279,00	348.724.961,00	346.607.745,00	45.590.850,00	154.722.515,00	100%
% Penyisihan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Pajak		192.028.523,00	222.379.342,00	290.521.976,00	228.553.636,00	113.188.548,00	300.724.638,00	270.818.279,00	348.724.961,00	346.607.745,00	45.590.850,00	154.722.515,00	100%

Lampiran 5 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tak Tertagih Tahun 2023

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2023	Kategori Piutang										MACET (> 3 thn)	
			2023	LANCAIR (0 s.d 1 thn) 2022	KURANG LANCAIR (1 s.d 2 thn) 2022	DIBAYARKAN (2 s.d 3 thn) 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Piutang Retribusi Daerah													
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00												
2	Retribusi Pelayanan Kelayakan Daerah :													
-	Sewa Toko Stasiun Supra-Dinas	178.851.000.00		9.000.000.00	9.000.000.00	6.860.000.00	8.300.000.00	8.460.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	5.400.000.00	6.400.000.00	9.808.000.00
-	Kepernyataan dan Oboraga	9.398.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.061.000.00	2.278.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Sewa lahan Stasiun Supra-Dinas													
-	Kepernyataan dan Oboraga	4.866.000.00		1.620.000.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Chitrigit	44.851.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.880.000.00	5.400.000.00	8.820.000.00
-	Sewa Kios Shopping Centre-Dinas	237.717.950.00		6.382.700.00	0.00	5.582.700.00	4.423.950.00	0.00	0.00	0.00	1.382.700.00	15.120.000.00	90.772.000.00	6.920.000.00
-	Sewa Tanah Jalan Mastip, KuduA Yari, Mayang, Di Vandein, Shopping Centre-Dinas													
-	Perdagangan dan Perindustrian	17.330.000.00		540.000.00	540.000.00	1.080.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00	2.160.000.00	540.000.00	1.820.000.00	3.160.000.00	0.00	540.000.00
-	Sewa Kios/Becek Ji Mayang-Dinas	22.600.000.00		0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.400.000.00	4.200.000.00
-	Perdagangan dan Perindustrian	35.985.000.00		6.000.000.00	3.180.000.00	1.140.000.00	3.480.000.00	1.890.000.00	1.200.000.00	0.00	1.740.800.00	1.200.000.00	1.780.000.00	1.780.000.00
-	Sewa Kios/Becek Ji Kudu-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.285.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.285.000.00	0.00
-	Sewa Tanah dan Bangunan Gedung BPKAD	4.232.000.00		1.592.000.00	0.00	2.540.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Sewa Kios Terminal MK-Dinas Perwisata dan Kebudayaan	77.008.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Sewa Kios Terminal MK-Dinas Perwisata dan Kebudayaan	41.849.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Sewa Kios Lusi Bangko PPK-Dinas Perwisata dan Kebudayaan	1.820.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Sewa Kios Terminal MK-Dinas Perwisata dan Kebudayaan	274.555.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.555.000.00
-	Perdagangan dan Perindustrian	18.541.700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Perdagangan dan Perindustrian	4.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Sewa Kios Terminal MK-Dinas Perwisata dan Kebudayaan	446.875.000.00		49.250.000.00	28.075.000.00	70.400.000.00	40.275.000.00	87.775.000.00	154.000.000.00	6.275.000.00	10.825.000.00	0.00	0.00	0.00
3	Retribusi Tempat Pemukiman Rakyat													
-	Sewa GGR-Dinas Kepernyataan dan Oboraga	105.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.000.00	0.00
4	Retribusi Pemasangan Perbaikan-Dinas	5.695.475.125.00		7.200.000.00	7.200.000.00	4.800.000.00	0.00	0.00	0.00	23.550.000.00	131.850.000.00	62.700.000.00	0.00	0.00
-	Perdagangan dan Perindustrian													
5	Retribusi Pelayanan Bangunan Gedung-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.864.450.00		0.00	0.00	989.000.00	37.985.000.00	8.050.000.00	53.885.000.00	3.166.500.00	12.319.800.00	9.244.200.00	1.408.400.00	9.501.350.00
6	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Dinas	2.477.770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.000.00	0.00	1.760.000.00	287.810.00
-	Langkungan Hsiup	7.285.416.985.08		53.815.000.08	53.815.000.08	93.431.700.00	97.343.950.00	115.786.000.00	216.823.500.00	33.531.500.00	180.786.500.00	98.704.300.00	45.401.300.00	316.212.100.00
-	Jumlah Piutang Retribusi % Penyisihan			0.00%	10.05%	85.00%	100%	100%	100%	100%	800%	100%	100%	100%
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi	1.168.461.229.00	0.00	5.361.590.08	46.715.858.00	46.715.858.00	97.343.950.00	115.786.000.00	216.823.500.00	33.531.500.00	180.786.500.00	98.704.300.00	45.401.300.00	316.212.100.00

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2022	Kategori Pluang MACE (> 3 thn)										Tindak Terlaksana
			2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	
	Pluang Retribusi Daerah												
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :												
-	Sewa Toko Stasion Suplai-Dinas	179.851.000,00	6.180.000,00	5.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.583.000,00
-	Sewa lahan Stadion Suplai-Dinas	9.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Kepemilikan dan Operasi	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sewa les keteloro-Dinas Kepemilikan dan												
-	Mahraga	44.551.000,00	9.810.000,00	7.020.000,00	7.200.000,00								3.721.000,00
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
-	Sewa Tanah JemberMasrip, KeludA Yari,	237.717.500,00	5.660.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.373.500,00
-	Mayang, Dr Wadim, Shopping Centre-Dinas												
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
-	Sewa Kios/Biosk II Mayang-Dinas	17.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
-	Sewa Kios/Biosk II Mayang-Dinas	22.800.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	1.890.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
-	Sewa Kios/Biosk II Mayang-Dinas	30.480.000,00	2.880.000,00	5.840.000,00	2.080.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
-	Sewa Tanah dan Bangunan Gaperdi-IPKAD	10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sewa Tanah Reklamasi-Dinas Perumahan	4.332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Model TK-APSP												
-	Sewa Kios Souvenir MBK-Dinas Pariwisata	77.005.000,00	0,00	3.773.000,00	3.327.000,00	6.935.000,00	5.777.000,00	1.586.000,00	43.795.000,00	12.595.800,00	0,00	0,00	0,00
-	dan Kios/Dinas												
-	Sewa Kios Terminal MBK-Dinas Pariwisata	41.848.000,00	0,00	7.775.000,00	4.025.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	23.873.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
-	dan Kios/Dinas												
-	Sewa Kios Les Bangjo PIPP-Dinas Pariwisata	1.820.000,00	0,00	80.000,00	840.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dan Kios/Dinas												
-	Sewa Kios Terminal-Dinas Pariwisata	274.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
-	Sewa Kios Terminal-Dinas Pariwisata	19.541.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	11.861.700,00	0,00
-	Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian												
-	Sewa Kios Lesahan PIAH-Dinas Kesehatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dan Pertanian												
-	Sewa Ruzuk-Dinas Perumahan Rakyat	466.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga												
-	Sewa GOR-Dinas Kepemilikan dan Olahraga	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pasar/Grocer Perbaikan-Dinas	5.086.475.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432.425.125,00
-	Penggunaan dan Pemeliharaan												
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-	137.664.400,00	1.444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang												
6	Retribusi Pengendalian Lahan Limas-Dinas	2.477.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Lingkungan Hidup												
	Jumlah Pluang Retribusi	7.265.416.595,98	27.774.700,00	43.768.000,00	19.248.500,00	8.235.000,00	7.252.300,00	1.586.000,00	68.078.000,00	16.995.800,00	7.880.000,00	11.861.700,00	5.851.853.825,00
	% Penyisihan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyisihan Pluang Tidak Tertagih-Pluang	1.168.881.220,00	27.774.700,00	43.768.000,00	19.248.500,00	8.235.000,00	7.252.300,00	1.586.000,00	68.078.000,00	16.995.800,00	7.880.000,00	11.861.700,00	5.851.853.825,00
	Retribusi												

7

Lampiran 6 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tak Tertagih Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Kategori Piutang					MACET (1-5 Tahun)				
			KURANG LANCAR (1 s.d 3 thn)		DAGUKAN (2 s.d 5 Tahun)							
			2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1	Pendapatan Denda Rambu Jalan Ular-9											
-	Piutang Denda Sewa Kios Sinden 3raas	1.352.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Kepemilikan dan Denda											
-	Piutang Denda Sewa Kios Kecamatan 2raas	22.500,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
-	Kepemilikan dan Denda											
-	Denda Sewa Vahana Sumberbeli 2raas	102.500.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	102.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pembiayaan dan Kepemilikan											
-	Denda Sewa Kios 3 Mayang Denda Perumahan	52.400,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
-	Pembiayaan											
-	Denda Sewa Kios 3 Mayang Denda Perumahan dan	34.800,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
-	Pembiayaan											
-	Denda Sewa Kios 3 Mayang Denda Perumahan dan	29.654,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,00	0,00
-	Pembiayaan											
2	Hati Sewa BMD											
-	Kios Terminal Tipe C-Denda Pemukiman	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ruang Sewa Denda Perumahan Rasyid	582.703.024,00	77.913.535,00	53.063.815,00	28.418.675,00	30.779.207,00	18.595.745,50	91.640.610,00	2.527.295,50	209.750,00	0,00	0,00
-	BGS Bilas Square BPKAD	335.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sewa Sewa bengkok Kukuatan Nauran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang BLUD											
-	Piutang Variasi Sewa PT TELKOM (BLUD)	531.429,00	531.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pemasaran Umum (BLUD)	296.402.528,00	17.750.382,00	37.033.044,00	11.743.488,00	825.184,00	0,00	32.844.500,00	673.200,00	30.727.260,00	6.268.753,00	72.782.545,00
-	Piutang BPJS (BLUD)	9.541.392.794,00	7.663.311.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	DINKES KASIHATEN-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang BPJS Kesehatan (BLUD)	14.910.237,00	14.910.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Jasa Raha BLUD	22.575.475,00	22.575.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Bakorek BLUD	36.975.000,00	36.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang KEMENKES-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pembiayaan Jansah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hati Penghasilan Dana Bergulir											
-	Piutang Program Dana Bergulir-SNI (PPK)-BPKAD	151.788.457,26	151.788.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Program Dana Bergulir-Denda Koperasi dan											
-	Utara Mico	747.003.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307.609,55	7.724.125,14	24.860.867,43
-	Piutang Bunga Program Dana Bergulir-BPH JATIM- Bagian Perumahan	2.173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Jasa Giro Bank-asim (PPK)-BPKAD	67.893.281,89	67.893.281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagian Utara 1000 perumahan modernisasi PG BPH Artha Pura											
-	Piutang Denda PG BPH Artha Pura-BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pendapatan Bunga atas Pembiayaan Uang Perumahan Denda											
-	Piutang Bunga Program Kepada Pemuda Tita Rata-BPKAD	155.613.520,00	53.964.080,00	85.100.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Rencanan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pendapatan Denda atas Pembiayaan Perumahan Denda-BPKAD	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.905.033.021,81	8.396.162.602,15	175.082.269,00	60.162.363,00	128.304.191,00	50%	124.255.170,00	20.580.446,50	44.562.085,05	16.309.482,14	97.675.812,63
-	% Penyisihan		0%	10%	50,00%	20%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lain- Lain PAD yang Sah	1.292.175.845,16	0,00	88.046.964,50	25.081.181,50	89.452.095,50	124.255.170,00	20.580.446,50	44.562.085,05	16.309.482,14	97.675.812,63	32.376.789,72

Lampiran 7 Daftar Persediaan Per Rekening Per SKPD

A. Badan dan Dinas

[illegible]

B. Dinas

REKENING	URAIAN	DHS05	DHS408	DISPENDUKAPIL	DISEKUPAR	DPURR	DISPERA	DISPERMADAG	DISKOMINFOTIK	DHKKOP UNIM & MAJEN	DISPORA	GNPP
1.1.12.01	Batang Pukul Habis											
1.1.12.01.01	Bahan											
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi											
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kiri		700.000,00									45.682.741,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Baku dan Pakarim											
1.1.12.01.01.0006	Bahan Batu											
1.1.12.01.01.0008	Bahan Keras Nalir											
1.1.12.01.01.0007	Batang Dalam Pipa											
1.1.12.01.01.0009	Bahan Batik Tansan											
1.1.12.01.01.0009	18) Tabung Perakam Kalamun											
1.1.12.01.01.0010	18) Tabung Gas											
1.1.12.01.01.0011	Bahan Batik Terak Gali Ikan											
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lemeng		11.083.500,00	317.400,00	5.420.000,00		314.000,00		1.477.000,00		6.081.700,00	37.250.500,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang											
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkut											
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Bekir											
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Pemukiman											
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium											
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar											
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komutasi											
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Perlatan											
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkok											
1.1.12.01.02.0010	Perbaikan dan Bantu Barikun Sosial											
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lemeng											
1.1.12.01.02	Alat Baku untuk Kegiatan Kantor											
1.1.12.01.02.0001	Alat Tulis Kantor		1.534.200,00	1.058.000,00		2.156.000,00	50.000,00		342.300,00		598.200,00	1.281.500,00
1.1.12.01.02.0002	Kertas dan Cover		3.253.500,00	851.000,00		2.753.000,00	549.000,00		1.080.250,00		816.110,00	857.000,00
1.1.12.01.02.0003	Bahan Cetak		74.031.280,00	15.153.500,00	13.716.629,35	587.275,00		42.236.077,00	35.843.000,00	1.436.000,00	2.409.000,00	9.263.990,00
1.1.12.01.02.0004	Benda Pos		100.000,00			312.000,00						
1.1.12.01.02.0005	Perbaikan Dokumen/Admistrasi Tasder											
1.1.12.01.02.0006	Bahan Kertas		706.900,00	1.570.600,00		744.000,00	70.000,00		42.503.000,00	276.000,00	1.344.600,00	668.050,00
1.1.12.01.02.0007	Perbaikan Kantor		70.830,00	97.600,00					7.091.654,00		2.786.400,00	13.217.422,00
1.1.12.01.02.0008	Alat Listrik		345.000,00	51.477.100,00					347.000,00			
1.1.12.01.02.0009	Pengalasan Dinas											
1.1.12.01.02.0010	Kapasitas dan Perbaikan Sistem											
1.1.12.01.02.0011	Perbaikan Fasilitas dan Raga											
1.1.12.01.02.0012	Bahan Cetak dan											
1.1.12.01.02.0013	Perbaikan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		205.600,00	964.400,00	3.487.500,00				375.000,00			2.893.500,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan								4.705.073,00			
1.1.12.01.04.0001	Obat											
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya											
1.1.12.01.05	Perbaikan untuk Diklat/Diseminasi											
1.1.12.01.05.0001	Perbaikan untuk Diklat/Diseminasi Kegiatan Masyarakat											
1.1.12.01.05.0002	Perbaikan untuk Diklat/Diseminasi Lainnya											
1.1.12.01.06	Perbaikan untuk Tujuan Strategis Lainnya											
1.1.12.01.06.0001	Perbaikan untuk Tujuan Strategis Lainnya											
1.1.12.01.06.0002	Perbaikan untuk Tujuan Strategis Lainnya											
1.1.12.01.06.0003	Perbaikan untuk Tujuan Strategis Lainnya											
1.1.12.01.06.0004	Perbaikan untuk Tujuan Strategis Lainnya											
1.1.12.01.07	Melara dan Pakaian											
1.1.12.01.07.0001	Melara											
1.1.12.01.07.0002	Pakaian											
1.1.12.01.07.0003	Melara dan Pakaian Lainnya											
1.1.12.01.08	Perbaikan Penelitian											
1.1.12.01.08.0001	Perbaikan Penelitian Baku											
1.1.12.01.08.0002	Perbaikan Penelitian Baku Lainnya											
1.1.12.01.08.0003	Perbaikan Penelitian Penelitian											
1.1.12.01.08.0004	Perbaikan Penelitian Lainnya											
1.1.12.01.09	Perbaikan Dalam Proses											

REKENING	URAIAN	DIGOS	DISHUB	DISENDUKAPIL	DISEBUDPAR	DIPUPB	DISPERA	DISPERINDAG	DISKOMINFOTIK	DINKOP UKM & NAKER	DISPORA	DKPP
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Bahan Pupuk											
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Bahan Pupuk Lainnya											
1.1.12.02	Batang Tak Hasil Pakul											
1.1.12.02.01	Komponen											
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jerbitan Gaji											
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jerbitan Praduan											
1.1.12.02.01.0003	Komponen Penjualan											
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rendaan											
1.1.12.02.01.0005	Alas Tanah											
1.1.12.02.01.0006	Koridoran Lainnya											
1.1.12.02.02	Pipa											
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersih Lainnya (RSC)											
1.1.12.02.02.0002	Pipa Air Bersih Lainnya (RSC)											
1.1.12.02.02.0003	Pipa Sisa											
1.1.12.02.02.0004	Pipa Bersih Lainnya											
1.1.12.02.02.0005	Pipa Bersih Lainnya											
1.1.12.02.02.0006	Pipa Lainnya											
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya											
1.1.12.03	Batang Bekas Dikawat											
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas											
1.1.12.03.01.0001	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas											
1.1.12.03.01.0003	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0004	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0005	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0006	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0007	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0008	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0009	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0010	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0011	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0012	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0013	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0014	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0015	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0016	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0017	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0018	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0019	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0020	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0021	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0022	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0023	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0024	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0025	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0026	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0027	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0028	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0029	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0030	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0031	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0032	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0033	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0034	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0035	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0036	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0037	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0038	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0039	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0040	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0041	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0042	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0043	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0044	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0045	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0046	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0047	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0048	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0049	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0050	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0051	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0052	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0053	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0054	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0055	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0056	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0057	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0058	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0059	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0060	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0061	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0062	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0063	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0064	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0065	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0066	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0067	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0068	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0069	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0070	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0071	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0072	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0073	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0074	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0075	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0076	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0077	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0078	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0079	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0080	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0081	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0082	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0083	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0084	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0085	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0086	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0087	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0088	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0089	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0090	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0091	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0092	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0093	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0094	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0095	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0096	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0097	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0098	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0099	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0100	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0101	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0102	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0103	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0104	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0105	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0106	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0107	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0108	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0109	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0110	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0111	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0112	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0113	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0114	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0115	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0116	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0117	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0118	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0119	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0120	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0121	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0122	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0123	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0124	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0125	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0126	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0127	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0128	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0129	Koridoran Bekas											
1.1.12.03.01.0130	Koridoran Bekas											

C. Dinas Pendidikan dan UPT SMPN

[illegible]

REKENING	URAIAN	DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8	SMPN 9
1.1.12.01.00.0001	Pembelian Bahan Proses										
1.1.12.01.00.0002	Pembelian Bahan Proses Lainnya										
1.1.12.02	Batang Tak Habis Pakai										
1.1.12.02.01	Komponen										
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jendolan Baju										
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jendolan Pakaian										
1.1.12.02.01.0003	Komponen Pakaian										
1.1.12.02.01.0004	Komponen Ransel-sandau										
1.1.12.02.01.0005	Alas kaki										
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya										
1.1.12.02.02	Pipa										
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersih (DCL)										
1.1.12.02.02.0002	Pipa Air Bersih (KCP)										
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja										
1.1.12.02.02.0004	Pipa Galvanis										
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass										
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)										
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya										
1.1.12.03	Batang Beker, Gelas										
1.1.12.03.01	Kemasan Beker dan Pipa Beker										
1.1.12.03.01.0001	Kemasan Beker										
1.1.12.03.01.0002	Pipa Beker										
1.1.12.03.01.0003	Kemasan Beker dan Pipa Beker Lainnya										
TOTAL		1.887.385.637.58	32.218.886.98	54.057.350.88	0.00	7.576.000.00	27.025.500.00	21.788.700.00	20.245.000.00	11.356.000.00	10.542.500.00

D. Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas

REKENING	URAIAN	DINKES	PKM KEPUDUL	PKM SUKOREJO	PKM SARANWETAN	RSUD
1.1.12.01	Barang Pakai Habis					
1.1.12.01.01	Bahan					
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi					
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	135,505,890.00	39,421,545.28	21,144,365.44	227,542,368.78	
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas					
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu					
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir					
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses					
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman					
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pensidam Ketakutan					
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			220,300.00		
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	241,019,588.00	60,668,000.00	32,736,466.00	60,783,148.80	87,619,266.00
1.1.12.01.02	Suku Cadang					
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkut					
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Busur					
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran					
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium		3,048,330.00		5,580,000.00	
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar					
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi					
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian					
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel					
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Balaia Bantuan Sosial					
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya					
1.1.12.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	302,069.00	4,316,600.00	15,735,501.00	6.00	285,192,997.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	372,111.00		1,127,185.00	111,416.00	
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	26,039,322.80	21,927,500.00	10,996,690.00	6,336,530.00	37,288,700.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos					
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0.00	1,879,800.00	5,174,054.00	627,766.00	2,850,000.00
1.1.12.01.03.0007	Pembot Kantor	47,350,000.00	972,150.00	6,927,375.00	0.00	140,146,424.00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0.00	75,000.00	876,484.00	0.00	579,958.00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas					
1.1.12.01.03.0010	Kopirap dan Perlengkapan Satwa					
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olah Raga					
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Candara Mata					
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	402,426,200.00		1,446,503.00	1,800,000.00	29,232,306.00
1.1.12.01.04	Obat-obatan					
1.1.12.01.04.0001	Obat	736,682,327.07	762,604,857.03	187,072,780.41	505,837,570.20	2,587,436,980.40
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	5,211,676,417.61	107,291,543.83	421,180,210.89	467,363,265.82	2,343,593,858.62
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan					
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		41,968,217.73	8,135,274.93	12,158,690.70	
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya					
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Barjaga-jaga					
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Barjaga-jaga					
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Barjaga-jaga Lainnya					
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan					
1.1.12.01.07.0001	Natura					
1.1.12.01.07.0002	Pakan					
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya					136,515,280.40
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian					
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi					
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya					
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi					
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya					
1.1.12.01.09	Persediaan Dalam Proses					
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses					
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya					
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai					
1.1.12.02.01	Komponen					
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja					
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Prefabrikasi					
1.1.12.02.01.0003	Komponen Perlatan		250,000.00			
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-rambu					
1.1.12.02.01.0005	Aktachment					
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya					
1.1.12.02.02	Pipa					
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersi Tumpang (DCI)					
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)					
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja					
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Prestekan					
1.1.12.02.02.0005	Pipa Riser Glass					
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)					
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya					
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai					
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas					
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas					
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas					
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya					
TOTAL		4,983,075,896.48	1,044,010,714.88	715,715,687.54	1,286,669,798.38	5,557,011,111.42

E. Sekretariat Daerah (Bagian)

REKENING	URAIAN	BAG PEMERINTAHAN	BAG HUKUM	BAG PEREKONOMIAN	BAG UMUM	BLP	BAG ORGANISASI
1.1.12.01	Barang Pakai Halus						
1.1.12.01.01	Bahan						
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi						
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia						
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas						
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu						
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir						
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses						
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman						
1.1.12.01.01.0009	Ial Tabung Pemadam Kabakaran				440,000.00		
1.1.12.01.01.0010	Ial Tabung Gas						
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan						
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya						
1.1.12.01.02	Suku Cadang						
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan						
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar						
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kepraktisan						
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium						
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar						
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi						
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian						
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Berginai						
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dan Belanja Berlainan Sosial						
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya						
1.1.12.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor						
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	64,500.00	318,400.00		165,000.00		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	295,000.00	290,000.00	121,012.00	121,000.00	118,000.00	
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1,919,500.00	644,000.00	190,000.00			
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos						
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		240,000.00				240,000.00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer						
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor						
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik						
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas						
1.1.12.01.03.0010	Kaportep dan Perlengkapan Sewa						
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olah Raga						
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendana Mata				1,560,000.00		
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						
1.1.12.01.04	Obat-obatan						
1.1.12.01.04.0001	Obat						
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya						
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diarsihkan						
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diarsihkan kepada Masyarakat						
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diarsihkan Lainnya						
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-juga						
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-juga						
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-juga Lainnya						
1.1.12.01.07	Nature dan Pakaian						
1.1.12.01.07.0001	Nature						
1.1.12.01.07.0002	Pakaian						
1.1.12.01.07.0003	Nature dan Pakaian Lainnya						
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian						
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi						
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya						
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi						
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya						
1.1.12.01.09	Persediaan Dalam Proses						
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses						
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya						
1.1.12.02	Barang Tak Halus Pakai						
1.1.12.02.01	Komponen						
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja						
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan						
1.1.12.02.01.0003	Komponen Perakitan						
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-rambu						
1.1.12.02.01.0005	Attachment						
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya						
1.1.12.02.02	Pipa						
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tiang (DCT)						
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)						
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja						
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan						
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass						
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)						
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya						
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai						
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas						
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas						
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas						
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya						
TOTAL		2,360,800.00	1,492,900.00	271,012.00	2,291,600.00	118,000.00	240,000.00

F. Kecamatan

REKREASI	URAIAN	KEPANJENKID	SUKOREJO	SANANWETAN
1.1.12.01	Barang Pakal Habis			
1.1.12.01.01	Bahan			
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas			
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu			
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			
1.1.12.01.01.0009	Ist Tabung Pemadam Kebakaran			
1.1.12.01.01.0010	Ist Tabung Gas			
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Rian			
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			14,000.00
1.1.12.01.02	Buku Cetak			
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			300,000.00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dan Belanja Bentuk Sosial			
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			
1.1.12.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	15,000.00	200,000.00	
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	487,790.00	590,000.00	804,395.82
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			830,334.48
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos			
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Keperluan Tander			
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	320,750.00		1,621,000.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			672,000.00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			1,058,580.00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			
1.1.12.01.03.0010	Keporok dan Perlengkapan Sewa			
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olah Raga			
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Candara Maba			
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5,103,120.00
1.1.12.01.04	Obat-obatan			
1.1.12.01.04.0001	Obat			
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-juga			
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-juga			
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-juga Lainnya			
1.1.12.01.07	Natura dan Pakaian			
1.1.12.01.07.0001	Natura			
1.1.12.01.07.0002	Pakaian			177,000.00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakaian Lainnya			
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian			
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			
1.1.12.01.09	Persediaan Dalam Proses			
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakal			
1.1.12.02.01	Komponen			
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Beton			
1.1.12.02.01.0003	Komponen Perlatan			
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-rambu			
1.1.12.02.01.0005	Attachment			
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			
1.1.12.02.02	Pipa			
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tumpang (DCT)			
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Prekaten			
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai			
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas			
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			
TOTAL		1,572,400.00	1,496,960.00	10,386,430.30



G. Kelurahan

REKREASI	URAIAN	KIPRODAL	NGADIREG	SCNPL	KAJMAN	TANGGUNG	BENDG	KEPLOR
1.1.12.01	Barang Pakai Habis							
1.1.12.01.01	Bahan							
1.1.12.01.01.0001	Bahan Senginan dan Konstruksi							
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia							
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas							
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu							
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir							
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses							
1.1.12.01.01.0008	Bahan Bibit Tanaman							
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran							
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas							
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan							
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			111,100.00				37,573.00
1.1.12.01.02	Suku Cadang							
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkut							
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Berat							
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kendaraan							
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium							
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar							
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi							
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian							
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel							
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Kanton Sosial							
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya							
1.1.12.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor							
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor			191,500.00		613,071.00	243,900.00	326,454.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover		364,038.00	329,400.00		549,181.00	243,000.00	423,542.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		516,400.00	179,700.00	744,968.00			51,840.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Fisik							
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender							
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputasi		240,771.00			913,000.00		81,654.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor							
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik						72,300.00	72,394.00
1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas							
1.1.12.01.03.0010	Kapal dan Perlongkangan Sewa							
1.1.12.01.03.0011	Perengkapan Perakutangan Dinas Raga							
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Condara Meja							
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya							
1.1.12.01.04	Obat-obatan							
1.1.12.01.04.0001	Obat							
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan lainnya							
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Ditawarkan							
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Ditawarkan kepada Masyarakat							
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Ditawarkan Lainnya							
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka Jaga							
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka Jaga							
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka Jaga Lainnya							
1.1.12.01.07	Natura dan Pakaian							
1.1.12.01.07.0001	Natura							
1.1.12.01.07.0002	Pakaian							
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakaian Lainnya							
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian							
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi							
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya							
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi							
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya							
1.1.12.01.09	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya							
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai							
1.1.12.02.01	Komponen							
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja							
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Beton							
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan							
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-rambu							
1.1.12.02.01.0005	Attachement							
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya							
1.1.12.02.02	Pipa							
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersih Tawar (DCT)							
1.1.12.02.02.0002	Pipa Air Bersih Saluran (ACP)							
1.1.12.02.02.0003	Pipa Gas							
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Perekat							
1.1.12.02.02.0005	Pipa Riser Glass							
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)							
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya							
1.1.12.03	Barang Bekas Stokasi							
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas							
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya							
	TOTAL	0.00	1,142,811.00	331,330.00	144,968.00	2,980,652.00	551,100.00	971,557.00



REKEND	URAIAN	PAKUNDEN	BLITAR	TLUMPU	TURI	KARANGSARI	SUKOREJO	TANJUNGSARI
1.1.12.01	Barang Pakai Habis							
1.1.12.01.01	Bahan							
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi							
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia							
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas							
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku							
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir							
1.1.12.01.01.0007	Bahan Dalam Proses							
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bahan Tersema							
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Peralatan Kebakaran							
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas							
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bahan Tembak/Bahan							
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya		15,546.00					327,044.00
1.1.12.01.02	Suku Cadang							
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan							
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Bekas							
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran							
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium							
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar							
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi							
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian							
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bangkai							
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Bahan Bantuan Sosial							
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya							
1.1.12.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor							
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1,263,912.00	17,996.00	57,000.00	55,000.00	281,900.00	234,190.00	35,500.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	484,000.00	119,864.00		120,000.00	169,300.00	836,750.00	181,250.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	649,640.00	151,546.00		255,500.00	510,000.00	0.00	425,816.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos							
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender							
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	355,956.00	120,360.00				322,200.00	340,772.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor							110,068.00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik							
1.1.12.01.03.0009	Pelengkapan Dinas							
1.1.12.01.03.0010	Kaporal dan Pelengkapan Satwa							
1.1.12.01.03.0011	Pelengkapan Pendukung Olah Raga							
1.1.12.01.03.0012	Buana/Cendana Masa							
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya							328,088.00
1.1.12.01.04	Obat-obatan							
1.1.12.01.04.0001	Obat							
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya							
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan							
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat							
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya							
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka							
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka							
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka Lainnya							
1.1.12.01.07	Nature dan Pakaian							
1.1.12.01.07.0001	Nature							
1.1.12.01.07.0002	Pakaian							
1.1.12.01.07.0003	Nature dan Pakaian Lainnya							
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian							
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi							
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya							
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi							
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya							
1.1.12.01.09	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya							
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai							
1.1.12.02.01	Komponen							
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja							
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Beton							
1.1.12.02.01.0003	Komponen Perawatan							
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-rambu							
1.1.12.02.01.0005	Alachman							
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya							
1.1.12.02.02	Pipa							
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersih Tumpukan (D)							
1.1.12.02.02.0002	Pipa Air Bersih Tumpukan (ACP)							
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja							
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan							
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass							
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)							
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya							
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai							
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas							
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya							
TOTAL		2,763,942.00	494,536.00	57,000.00	430,500.00	1,068,300.00	1,395,140.00	1,558,480.00



REKENING	URAIAN	PLOSKEREP	KLAMPOK	BAHAN WETAN	REMBANG	KARANG TENGAH	BENDOGERT	GEDOG
1.1.12.01	Barang Pokok Habis							
1.1.12.01.01	Bahan							
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi							
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia							
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas							
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu							
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir							
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses							
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman							
1.1.12.01.01.0009	Ial Tabung Pemadam Kebakaran							
1.1.12.01.01.0010	Ial Tabung Gas						286,010.00	
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan							
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya		35,000.00			610,000.00		
1.1.12.01.02	Suku Cadang							
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan							
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar							
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran							
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium							
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar							
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi							
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian							
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel							
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial							
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya							
1.1.12.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor							
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		345,400.00	828,648.00	593,200.00	230,300.00	312,907.00	775,099.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	242,024.00	1,838,000.00	1,637,422.00	302,500.00	1,414,500.00	636,310.00	212,814.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		1,529,900.00	582,527.00	774,375.00	632,000.00	361,480.00	262,119.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos							
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tander							
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	361,125.00			862,800.00	327,000.00	481,544.00	240,772.00
1.1.12.01.03.0007	Perakor Kantor		221,000.00					
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		2,234,800.00	166,902.00		507,000.00		
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas							
1.1.12.01.03.0010	Kaportas dan Perlengkapan Sahas							
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olah Raga							
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Candana Mata							
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		86,400.00					
1.1.12.01.04	Obat-obatan							
1.1.12.01.04.0001	Obat							
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya							
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan							
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat							
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya							
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga							
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga							
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga Lainnya							
1.1.12.01.07	Nature dan Pekar							
1.1.12.01.07.0001	Nature							
1.1.12.01.07.0002	Pekar							
1.1.12.01.07.0003	Nature dan Pekar Lainnya							
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian							
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi							
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya							
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi							
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya							
1.1.12.01.09	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya							
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai							
1.1.12.02.01	Komponen							
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja							
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Perakian							
1.1.12.02.01.0003	Komponen Perakian							
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-rambu							
1.1.12.02.01.0005	Attachment							
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya							
1.1.12.02.02	Pipa							
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersih Tawar (DOP)							
1.1.12.02.02.0002	Pipa Air Bersih Saluran (ACP)							
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja							
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Perakian							
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass							
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)							
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya							
1.1.12.03	Barang Bekas Dijual							
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas							
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya							
TOTAL		693,149.00	5,164,886.00	3,175,887.00	2,624,875.00	3,621,300.00	2,881,311.00	1,494,804.00

Lampiran 8 Investasi Dana Bergulir

No	SKPD	Jenis Pinjaman	Pinjaman per 31 Desember 2022	Penambah Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Pinjaman per 31 Desember 2023
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemberdayaan Masyarakat Pazar	95.030.000,00	0,00	0,00	95.030.000,00
		Tahun 2001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		Tahun 2002	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00
		Tahun 2003	10.465.000,00	0,00	0,00	10.465.000,00
		Tahun 2004	20.080.000,00	0,00	0,00	20.080.000,00
		Tahun 2005	10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00
		Tahun 2006	11.275.000,00	0,00	0,00	11.275.000,00
		Tahun 2007	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00
		Tahun 2008	11.605.000,00	0,00	0,00	11.605.000,00
		Tahun 2009	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
		Tahun 2010	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
		Tahun 2011	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2	Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitar	Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jafim Cabang Bitar	40.071.250,00	0,00	0,00	40.071.250,00
		Tahun 2005	8.863.850,00	0,00	0,00	8.863.850,00
		Tahun 2006	8.208.250,00	0,00	0,00	8.208.250,00
		Tahun 2007	20.999.150,00	0,00	0,00	20.999.150,00
		Tahun 2008	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	BPKAD	Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KOPUK) melalui Bank BNI	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00
		Saldo di rekening 0055306386 (Pembayaran Pokok Pinjaman pada rekening penampungan)	39.294.070,00	0,00	0,00	39.294.070,00
		Tahun 2002	307.100.945,00	0,00	0,00	307.100.945,00
		Tahun 2003	171.270.730,00	0,00	0,00	171.270.730,00
		Tahun 2004	29.342.381,00	0,00	0,00	29.342.381,00
		Tahun 2005	2.991.874,00	0,00	0,00	2.991.874,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		4.833.324.644,28	219.651.485,05	353.482.007,51	4.699.494.121,83
		a. Pinjaman UKM	3.751.688.428,89	206.967.006,99	333.785.971,23	3.625.069.464,65
		1) UM PERGULIRAN:				
		Tahun 2002	3.715.800,00	0,00	0,00	3.715.800,00
		Tahun 2003	25.682.500,00	0,00	4.353.448,27	21.329.051,73
		Tahun 2004	85.718.795,90	0,00	4.195.689,63	81.523.106,27
		Tahun 2005	536.551.379,31	0,00	3.326.920,69	533.224.458,62
		Tahun 2006	112.330.434,48	0,00	18.906.982,78	93.423.451,70
		Tahun 2007	296.493.050,66	0,00	29.891.506,62	266.601.544,04
		Tahun 2008 Tahap I	308.099.437,80	0,00	31.906.205,61	276.193.232,19
		Tahun 2008 Tahap II	279.783.536,32	0,00	48.933.804,27	230.849.732,05
		Tahun 2009 Tahap I	291.038.995,17	0,00	7.559.983,79	283.479.011,38
		Tahun 2009 Tahap II	380.934.052,75	0,00	39.036.581,52	341.897.471,23
		Tahun 2010 Tahap I	317.034.572,07	0,00	36.103.021,06	280.931.551,01
		Tahun 2010 Tahap II	281.551.652,10	0,00	57.891.756,50	223.659.895,60
		2) UM APBD (DKA/PAK)				
		DKA Tahun 2002	2.695.454,55	0,00	0,00	2.695.454,55
		PKA Tahun 2002	30.119.179,10	0,00	1.980.389,77	28.138.789,33
		DKA Tahun 2003	183.289.827,59	0,00	689.695,16	182.600.132,43
		PKA Tahun 2003	6.981.034,48	0,00	0,00	6.981.034,48
		PAK Tahun 2004	10.228.310,34	0,00	0,00	10.228.310,34
		DKA Tahun 2005	45.455.258,62	0,00	0,00	45.455.258,62
		DKA Tahun 2006	81.540.128,31	0,00	7.148.596,54	74.391.531,77
		PKA Tahun 2006	27.637.812,07	0,00	1.823.817,25	25.813.994,82
		DPA Tahun 2007	143.209.482,76	0,00	21.040.803,44	122.168.679,32
		APBD Tahun 2008	29.126.379,31	0,00	0,00	29.126.379,31
		3) DAC				
		Tahun 2010	35.936.891,00	0,00	1.041.241,00	34.895.650,00
		Realisasi 14 Februari 2011	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00
		Realisasi 17 Januari 2011	198.937.732,92	0,00	9.232.560,00	189.705.172,92
		Realisasi 9 Desember 2009	294.863.327,39	0,00	8.063.508,87	286.799.818,52
		Angsuran Tidak Terealisasi Pinjaman UKM	-250.717.168,10	206.967.006,99	603.448,27	-44.353.609,38
			1.081.436.215,38	12.684.478,97	19.696.036,28	1.074.424.657,16
		b. Pinjaman Koperasi				
		DKA TH. 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		DKA TH. 03	0,00	0,00	0,00	0,00
		DKA TH. 05	23.525.686,65	0,00	0,00	23.525.686,65
		DKA TH. 06	273.087.848,28	0,00	0,00	273.087.848,28
		DPA TH. 07	12.498.310,35	0,00	0,00	12.498.310,35

No	SKPD	Jenis Pinjaman	Pinjaman per	Penambah Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Pinjaman per
			31 Desember 2022			31 Desember 2023
		GULIR TH. 02	2.469.800,00	0,00	0,00	2.469.800,00
		GULIR TH. 03	0,00	0,00	0,00	0,00
		GULIR TH. 04	20.166.900,00	0,00	0,00	20.166.900,00
		GULIR TH. 05	14.224.137,94	0,00	0,00	14.224.137,94
		GULIR TH. 06	32.776.379,31	0,00	0,00	32.776.379,31
		GULIR TH. 07	106.033.922,42	0,00	0,00	106.033.922,42
		GULIR TH. 08	13.555.948,28	0,00	2.088.965,52	11.466.982,76
		GULIR TH. 09 TAHAP I	25.624.051,72	0,00	5.000.000,00	20.624.051,72
		GULIR TH. 09 TAHAP II	57.618.017,24	0,00	1.041.982,76	56.576.034,48
		GULIR TH. 10	15.065.321,77	0,00	0,00	15.065.321,77
		GULIR TH. 2011 TAHAP I	0,00	0,00	0,00	0,00
		GULIR TH. 2011 TAHAP II	0,00	0,00	0,00	0,00
		GULIR P APBD TAHUN 2011	45.188.534,48	0,00	0,00	45.188.534,48
		GULIR TH. 12 TAHAP I	0,00	0,00	0,00	0,00
		GULIR TH. 12 TAHAP II	0,00	0,00	0,00	0,00
		GULIR TH. 12 TAHAP III	27.082.884,48	0,00	2.083.168,97	24.999.715,51
		GULIR TH. 12 TAHAP IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		PAK TH. 02	14.916.800,00	0,00	0,00	14.916.800,00
		PAK TH. 03	6.666.700,00	0,00	0,00	6.666.700,00
		PAK TH. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
		PAK TH. 06	77.573.448,26	0,00	1.040.344,83	76.533.103,43
		Guliran 2013 Tahap I	4.165.332,56	0,00	6,50	4.165.326,06
		Guliran 2013 Tahap II	29.166.582,78	0,00	0,00	29.166.582,78
		Guliran 2013 Tahap III	21.956.136,56	0,00	200.018,00	21.756.120,56
		Guliran 2014	161.476.718,29	0,00	6.106.379,31	155.370.338,97
		Guliran 2015	48.275.074,86	0,00	0,00	48.275.074,86
		Guliran 2016	73.312.546,88	0,00	2.155.172,41	71.157.374,45
		Angsuran Tidak teridentifikasi Pinjaman Koperasi	-25.202.670,71	12.684.478,07	0,00	-12.518.192,64
		Total	5.518.425.894,28	219.651.485,05	353.482.867,51	5.384.595.371,82



Lampiran 9 Daftar Aset Tetap per SKPD

No	Nama SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	90.262.712.052,00	43.561.563.298,39	125.131.562.611,92	1.209.149.799,00	26.185.347.432,43	266.350.255.211,76
2	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	6.973.188.000,00	7.675.216.211,50	4.074.762.656,00	117.548.800,00	1.340.177.888,00	19.380.892.555,50
3	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	4.164.128.000,00	6.238.891.007,50	8.695.494.020,45	8.518.325,00	956.482.117,00	25.084.313.469,90
4	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	4.007.400.000,00	6.137.305.310,00	33.077.766.176,00	0,00	1.044.653.406,00	44.268.524.892,00
5	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	3.891.366.153,00	7.417.796.437,40	6.690.946.288,00	280.718.707,00	1.058.962.104,01	19.336.771.685,41
6	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	1.515.895.000,00	6.395.709.704,66	2.185.834.491,00	-	950.388.828,00	11.020.987.223,66
7	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	1.444.575.000,00	5.823.321.843,42	4.358.633.510,00	51.482.500,00	930.401.801,00	12.608.413.854,42
8	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	6.294.088.000,00	6.932.918.404,67	6.016.388.877,40	109.211.000,00	761.457.731,00	20.111.064.033,07
9	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	6.320.000.000,00	6.572.920.042,52	3.046.957.562,90	219.175.000,00	867.338.622,00	17.026.382.127,42
10	UPD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	2.309.016.000,00	6.063.484.363,50	5.398.949.520,00	70.052.000,00	976.183.743,02	14.806.665.628,52
11	Dinas Koperasi dan Olah Raga	39.097.866.000,00	5.524.149.083,73	45.362.115.043,25	1.066.581.260,47	665.740.000,00	91.716.471.393,45
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.507.500.000,00	32.617.743.635,30	5.031.194.130,00	504.540.000,00	52.222.500,00	113.338.702.142,92
13	Dinas Perhubungan	14.011.362.000,00	30.657.539.921,15	15.023.481.214,35	53.396.892.257,42	247.486.750,00	5.800.421.114,54
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.611.240.000,00	2.113.007.614,54	1.677.248.250,00	48.925.860,00	-	14.574.839.347,16
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-	10.724.143.397,16	3.063.608.075,50	787.087.874,50	-	17.130.422.700,47
16	Dinas Perumahan, Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.006.886.000,00	3.735.528.097,50	4.908.069.951,95	124.048.110,02	-	1.544.933.796.226,77
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	849.144.346.819,00	8.859.818.072,50	19.616.765.535,00	670.052.248.862,50	293.624.937,77	216.266.683.527,14
18	Dinas Perumahan Rakyat	88.617.990.778,00	2.793.040.505,42	47.915.081.138,76	78.735.551.104,96	4.420.000,00	60.033.201.686,00
19	Dinas Kesehatan	3.293.792.000,00	36.017.689.533,03	10.259.077.366,00	424.785.250,00	37.867.516,97	364.371.649.685,69
20	Rumah Sakit Umum Daerah Mardiyah Waluyo	6.789.587.261,00	216.257.155.852,61	138.131.783.573,08	3.137.195.724,00	96.117.275,00	23.991.427.528,30
21	UPD Kesehatan Kecamatan Kapanjenkidul	1.828.056.000,00	4.892.313.525,50	17.415.957.002,70	48.706.000,00	6.385.000,00	10.399.614.036,48
22	UPD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	3.480.048.000,00	4.479.726.355,48	3.393.282.380,00	40.656.306,00	-	18.570.150.551,10
23	UPD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	4.312.954.000,00	6.542.702.248,10	7.668.708.892,00	145.785.911,00	-	15.326.886.710,84
24	Dinas Sosial	5.237.946.000,00	4.440.885.247,84	4.516.746.963,00	66.758.560,00	64.780.000,00	187.414.186.068,07
25	Dinas Lingkungan Hidup	66.593.270.837,00	36.565.829.138,61	73.234.869.108,14	18.796.916.954,32	2.253.300.250,00	15.814.720.204,81
26	Dinas Reproduksi dan Pencatatan Sipil	3.748.658.000,00	7.131.749.067,49	4.889.860.779,52	94.560.000,00	48.892.957,60	8.673.367.921,51
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	-	6.474.697.000,51	1.981.915.221,00	76.385.700,00	140.490.000,00	85.332.625.459,27
28	Dinas Keluhan Pangan dan Pertanian	6.021.824.000,00	13.877.537.892,50	27.903.871.215,22	36.007.555.591,55	422.036.720,00	15.069.155.998,50
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	4.823.836.000,00	5.625.289.273,50	3.370.895.000,00	146.023.446,00	1.103.302.235,00	181.234.993.531,42
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	36.717.606.000,00	9.184.048.582,44	130.029.801.288,83	1.483.011.792,35	220.526.306,00	168.954.941.489,58
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	87.055.709.205,00	7.226.564.566,70	67.483.833.970,10	5.833.567.496,65	1.355.486.220,14	3.362.167.596,86
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3.108.733.096,86	157.724.500,00	95.710.000,00	-	3.634.339.933,75
33	Inspektoriat Daerah	1.013.384.000,00	3.996.432.443,85	4.713.822.480,00	701.000,00	-	4.300.832.535,50
34	Badan Kepegawaian Daerah	-	4.297.132.535,50	-	3.700.000,00	-	17.209.768.086,47
35	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.690.535.000,00	11.157.803.627,97	3.325.162.860,50	9.890.000,00	66.406.588,00	105.448.571.444,28
36	Bagian Umum	49.035.977.900,00	36.525.389.808,49	16.438.264.034,62	950.774.100,00	494.155.609,18	694.707.239,50
37	Bagian Tata Pemerintahan	-	693.250.530,50	-	-	1.456.700,00	942.030.354,00
38	Bagian Hukum dan Organisasi	-	926.157.064,00	-	-	15.873.300,00	489.881.796,00
39	Bagian Organisasi	-	489.881.796,00	-	-	-	2.212.210.281,50
40	Bagian Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	-	2.015.250.281,50	196.960.000,00	-	-	-

No	Nama SKPD	Tanah	Peralatan dan Meubel	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
41	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	-	1.475.395.145,29	-	-	1.250.000,00	1.474.845.145,29
42	Sekretariat DPRD	3.089.900.000,00	12.469.813.119,22	4.047.002.014,05	666.441.100,00	83.789.520,00	26.326.941.753,27
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	2.763.216.000,00	2.963.277.247,02	2.965.057.550,00	198.326.470,00	634.740.300,00	9.444.617.567,02
44	Kecamatan Kopenjengkul	5.838.640.000,00	2.868.076.491,03	6.585.168.184,78	1.863.323.810,90	34.057.350,00	17.187.265.836,72
45	Kecamatan Sukorjo	10.492.346.000,00	3.114.614.412,97	6.544.385.007,79	3.597.784.232,00	138.136.850,00	23.887.266.302,76
46	Kecamatan Sananwetan	1.555.625.000,00	2.821.821.827,85	8.067.600.035,17	2.996.795.803,64	27.344.000,00	16.698.186.666,56
47	Kelurahan Ngadirejo	7.685.000.000,00	641.814.804,00	911.051.400,00	1.046.186.320,00	-	10.288.912.524,00
48	Kelurahan Sontul	7.411.774.150,00	571.846.154,00	752.386.200,00	2.464.363.064,00	-	11.400.369.568,00
49	Kelurahan Kauman	24.696.178.000,00	885.681.825,50	9.281.684.000,00	1.882.970.000,00	15.430.272,00	32.744.844.197,50
50	Kelurahan Tanggung	7.841.097.000,00	753.686.895,51	894.477.851,00	3.139.392.167,00	-	12.428.653.913,51
51	Kelurahan Bendo	12.131.982.000,00	765.950.422,51	6.247.163.270,50	1.497.853.314,50	-	20.642.949.007,51
52	Kelurahan Kopenjengkul	9.658.928.000,00	700.007.284,50	1.821.332.800,00	1.418.788.600,00	420.000,00	13.000.477.534,50
53	Kelurahan Kopenjengkul	5.153.820.000,00	886.762.577,50	4.703.801.950,00	1.491.235.805,25	6.590.000,00	12.242.120.332,75
54	Kelurahan Pakunden	21.423.375.000,00	671.579.760,50	3.786.789.938,11	2.216.373.993,82	30.530.272,00	28.440.648.965,53
55	Kelurahan Bilar	10.135.008.685,00	892.470.820,50	1.748.816.189,00	847.041.000,00	10.000.000,00	13.636.336.474,50
56	Kelurahan Tlumpu	15.725.740.000,00	718.895.666,00	1.300.174.333,00	2.218.071.964,00	-	19.962.081.963,00
57	Kelurahan Turi	8.655.825.000,00	919.797.828,50	1.526.782.223,00	2.397.125.783,00	-	11.489.540.835,50
58	Kelurahan Karangari	8.301.775.000,00	732.002.398,50	1.838.758.824,00	1.208.894.805,00	3.482.000,00	10.084.884.032,50
59	Kelurahan Sukorjo	20.805.884.000,00	790.232.431,48	2.169.165.050,00	4.566.106.395,00	-	28.334.388.871,48
60	Kelurahan Tanjungari	20.306.851.714,00	1.028.762.755,00	3.108.351.134,00	3.282.209.242,00	16.850.000,00	27.739.964.845,00
61	Kelurahan Gedog	13.365.791.000,00	822.666.580,90	3.458.843.065,00	2.353.100.798,00	1.500.000,00	20.001.901.443,90
62	Kelurahan Plosokarep	7.679.700.000,00	829.970.878,10	888.826.804,71	1.499.573.300,00	-	10.878.470.982,81
63	Kelurahan Kemplak	3.790.300.000,00	700.671.834,50	547.190.678,60	2.168.679.236,00	-	7.206.841.748,60
64	Kelurahan Sananwetan	9.813.346.000,00	825.376.967,50	2.238.870.948,11	4.228.890.400,00	42.694.400,00	17.149.888.715,61
65	Kelurahan Rambeng	6.561.325.816,00	746.300.764,50	1.304.019.632,00	1.395.178.778,00	25.475.272,00	10.062.378.262,50
66	Kelurahan Karangtengah	9.729.190.000,00	896.504.573,50	615.748.100,00	2.209.814.179,00	-	13.221.017.852,50
67	Kelurahan Bendogerit	9.960.028.000,00	886.091.585,50	1.368.149.350,10	3.490.779.376,90	-	15.674.048.292,50
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	483.840.000,00	2.450.292.958,00	378.805.915,00	-	-	3.312.938.873,00
	Total	1.654.274.340.776,00	666.497.285.677,62	936.792.884.743,14	932.407.632.986,76	43.560.247.409,34	4.237.796.961.186,66

Lampiran 10 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD

NO	NAMA SKPD	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Penyusutan Aset Tetap
1	Dinas Pendidikan	40.472.988.374,89	75.803.014.248,84	606.266.662,53	3.396.473.547,85	120.279.741.833,84
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	6.378.637.251,50	2.843.749.400,95	75.184.746,62	385.772.006,00	9.683.213.399,08
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	5.378.890.947,06	2.630.040.763,19	8.518.325,00	270.745.000,00	8.288.195.035,25
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	5.122.263.434,90	1.655.490.762,29	0,00	235.219.506,00	7.012.973.717,19
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	6.311.536.717,20	3.897.584.869,42	87.991.462,98	240.153.400,00	10.537.236.449,60
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	5.135.798.581,34	6.954.981.021,75	34.296.349,94	250.973.000,00	12.376.048.953,03
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	4.365.162.557,70	4.235.782.482,65	21.524.038,41	305.324.000,00	8.947.793.078,76
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	5.942.807.824,55	2.087.427.458,97	46.224.733,31	42.790.000,00	7.739.250.016,83
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	5.298.937.405,78	1.646.155.942,85	89.352.582,05	52.116.429,00	7.086.562.369,68
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	5.141.693.365,79	2.282.650.658,40	26.138.999,98	168.724.000,00	7.619.507.024,25
11	Dinas Kesehatan	4.638.440.798,15	22.310.710.359,00	489.709.925,26	37.867.516,67	27.456.728.599,38
12	Rumah Sakit Umum Daerah Mardiyah	27.544.166.221,72	1.690.977.849,50	168.581.057,70	0,00	29.403.725.128,92
13	UPTD DINAS KESEHATAN KEC. KEPANJENKIDUL	27.495.006.810,20	6.690.181.017,81	38.155.306.868,92	6.385.000,00	72.256.879.696,93
14	UPTD DINAS KESEHATAN KEC. SANANWETAN	1.988.742.481,66	714.848.148,15	26.356.380,00	0,00	2.728.745.927,81
15	UPTD DINAS KESEHATAN KEC. SUKOREJO	9.888.714.670,66	1.213.524.000,39	453.096.541,20	0,00	11.553.335.218,55
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.065.821.763,59	1.551.427.093,55	101.581.200,08	250.938.937,77	5.989.568.994,97
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.493.975.361,46	7.834.183.995,89	407.827.837.509,89	0,00	422.955.976.867,04
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2.359.608.704,61	11.589.789.796,35	35.823.773.682,26	0,00	49.764.372.183,22
19	Dinas Sosial	30.352.094.206,57	2.187.935.392,79	207.808.229,74	60.155.000,00	32.808.892.918,10
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	175.895.704.110,24	98.060.394.751,23	2.258.826.396,43	50.100.000,00	246.285.025.257,90
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.078.054.586,84	10.482.869.008,01	29.892.426,58	288.004.320,00	14.879.330.341,43
22	Dinas Lingkungan Hidup	5.484.942.877,37	4.596.896.779,53	84.459.414,44	557.120.100,00	10.723.419.171,34
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.850.857.874,42	2.394.853.464,05	19.854.433,20	0,00	6.265.365.771,67
24	Dinas Perhubungan	4.277.648.681,35	2.593.648.825,50	31.406.746,59	122.888.750,00	7.025.574.603,44
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	31.076.533.053,67	29.350.127.806,15	9.954.800.908,18	29.801.500,00	70.419.793.298,00
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	6.084.779.574,18	1.922.755.581,85	43.655.999,98	0,00	8.051.181.136,01
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.940.814.480,03	1.387.001.073,55	50.536.226,81	0,00	7.388.351.780,19
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.633.232.012,50	17.996.782.974,56	20.943.890.531,82	550.868.000,00	52.124.893.516,88
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	4.655.111.931,54	1.285.315.458,00	52.474.783,87	1.514.391,04	5.995.416.564,45
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.011.768.194,88	41.674.424.779,99	786.572.088,23	1.340.338.220,14	50.813.102.879,44
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.588.537.329,60	37.654.184.004,47	2.498.126.139,93	23.995.000,00	46.762.842.474,30
32	Bagian Tata Pemerintahan	2.329.416.471,07	0,00	95.709.998,88	0,00	3.025.126.470,95
33	Bagian Hukum	3.456.905.874,87	1.883.388.747,98	700.999,95	0,00	5.340.976.622,78
34	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4.072.423.323,32	0,00	3.709.000,00	0,00	4.076.133.323,32
35	Bagian Umum	9.858.164.008,57	3.930.986.884,41	9.898.002,29	378.603.690,00	13.277.844.495,27
36	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	25.122.079.897,28	11.410.547.853,28	830.864.368,63	0,00	37.463.492.177,19
37	Bagian Organisasi	500.330.969,06	0,00	0,00	0,00	500.330.969,06
38	Sekretariat DPRD	653.212.069,11	0,00	0,00	8.890.000,00	672.102.069,11
39	Kecamatan Kepanjenkidul	1.302.308.466,61	9.848.000,00	0,00	16.452.360,00	1.328.609.816,61
40	Kelurahan Kepanjenkidul	1.498.010.328,56	378.865.915,00	0,00	5.000.000,00	1.881.876.243,56
41	Kelurahan Ngadirejo	224.088.400,58	0,00	0,00	0,00	224.088.400,58
42	Kelurahan Sentul	1.675.586.380,06	0,00	0,00	0,00	1.675.586.380,06
43	Kelurahan Kauman	9.888.120.433,04	2.374.526.196,48	417.862.930,00	0,00	12.680.509.569,52
44	Kelurahan Tanggung	2.264.869.888,48	1.466.049.790,28	112.976.161,22	0,00	3.843.895.839,98
45	Kelurahan Bendo	3.015.002.637,89	2.339.325.508,61	1.082.551.266,96	0,00	6.437.079.404,46
46	Kelurahan Kepanjenlor	2.611.720.909,43	2.459.883.449,61	1.703.096.588,23	420.000,00	6.775.090.917,47
47	Kecamatan Sukorejo	2.509.478.390,85	2.374.346.223,62	1.893.209.515,92	73.980.990,00	6.851.224.330,39
48	Kelurahan Pakunden	612.204.353,06	916.898.863,30	392.725.108,84	15.100.000,00	1.536.729.125,00
49	Kelurahan Blitar	570.936.920,06	396.775.820,00	642.230.885,51	4.000.000,00	1.615.943.605,57
50	Kelurahan Tlumpu	749.810.218,06	2.036.061.050,00	570.800.587,61	0,00	3.356.671.855,67
51	Kelurahan Turi	888.858.254,07	544.313.432,57	726.448.554,67	0,00	1.879.619.241,31
52	Kelurahan Karangasri	882.967.171,07	1.391.079.955,49	480.083.545,14	3.482.000,00	2.537.611.771,70
53	Kelurahan Sukorejo	610.235.573,06	811.931.037,24	415.124.188,19	0,00	1.837.290.798,49
54	Kelurahan Tanjung Sari	784.426.328,45	1.544.117.072,12	913.453.960,89	15.850.000,00	2.657.847.361,56
55	Kecamatan Sananwetan	800.537.737,06	1.280.106.545,22	614.215.023,86	7.204.000,00	2.702.063.307,14
56	Kelurahan Gedog	696.583.949,06	657.330.311,87	302.286.161,80	1.600.000,00	1.657.890.422,73
57	Kelurahan Plosokarap	858.065.346,46	925.384.101,04	706.881.834,50	0,00	2.290.331.282,00
58	Kelurahan Klampok	624.638.118,06	807.665.926,88	904.537.633,73	0,00	2.536.781.678,77
59	Kelurahan Sananwetan	818.255.024,66	1.003.134.011,72	330.058.893,22	39.438.520,00	1.988.886.449,60
60	Kelurahan Rembang	680.191.822,44	717.278.385,00	1.151.417.221,26	10.045.000,00	2.576.932.428,70
61	Kelurahan Karangjengah	932.240.495,78	1.333.039.351,84	1.177.474.229,79	0,00	3.442.754.077,41
62	Kelurahan Bendogerti	686.387.940,06	556.930.048,75	472.070.851,94	0,00	1.717.388.849,75



NO	NAMA SKPD	Penyusutan	Penyusutan	Penyusutan	Penyusutan	Penyusutan
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	764.222.671,86	256.206.403,47	376.634.559,44	530.286.800,00	1.927.550.234,77
64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	592.017.071,85	171.549.601,70	518.486.871,35	0,00	1.282.056.544,91
65	Inspektorat	660.204.269,66	649.798.031,00	1.002.181.521,05	0,00	2.312.183.821,71
66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	666.741.507,06	663.943.733,44	592.952.186,97	0,00	2.624.737.577,37
67	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	550.966.225,26	81.595.855,00	677.942.093,05	62.988.596,00	1.273.432.771,31
68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	706.338.208,48	456.289.069,63	992.097.501,35	0,00	2.156.724.779,04
TOTAL		556.339.213.747,93	423.693.917.628,16	340.470.443.467,89	9.821.315.360,57	1.532.324.896.223,75

Lampiran 11 Daftar Jaminan Bongkar Reklame pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGGAH	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
1	BANNER PURWOREJO REGENCY / FATIMATUZ ZAHRO	INSIDENTIL	45.313,00	45.376,00	45.383,00	315.000,00
2	BALIHO TANJUNGSARI REGENCY RESIDENT, GRAND PURWOREJO / FATIMATUZ ZAHRO	INSIDENTIL	45.313,00	45.373,00	45.380,00	60.000,00
3	BANNER TANJUNGSARI REGENCY, GRAND PURWOREJO, PURWOREJO / FATIMATUZ ZAHRO	INSIDENTIL	45.313,00	45.376,00	45.383,00	60.000,00
4	NEON BOX ELIZABETH J.L. MELATI / BETALIA PUSPITASARI	PERMANEN	45.217,00	45.583,00	45.613,00	220.500,00
5	NEON BOX KOPIL SOE J.L. AHMAD YANI / MEIKE EBELLIANA	PERMANEN	45.047,00	45.413,00	45.443,00	108.000,00
6	PAPAN BERSINAR SAMSUNG SEMERU CELL J.L. SEMERU / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.082,00	45.448,00	45.478,00	362.000,00
7	NEON BOX SAMSUNG SEMERU TANJUNG J.L. TANJUNG / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.082,00	45.448,00	45.478,00	964.250,00
8	PAPAN BERSINAR MARCOM CELL J.L. VETERAN / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.082,00	45.448,00	45.478,00	800.000,00
9	NEON BOX MARCOM 2 J.L. VETERAN / PT EXPO PARIWARA UT	PERMANEN	45.082,00	45.448,00	45.478,00	387.500,00
10	PAPAN BERSINAR PRIMA CELL J.L. MERDEKA / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.082,00	45.448,00	45.478,00	1.250.000,00
11	NEON BOX PRIMA CELL J.L. MERDEKA / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.082,00	45.448,00	45.478,00	500.000,00
12	NEON BOX KSB BLITAR J.L. KARTINI / BUDI SUROYO / CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.086,00	45.452,00	45.482,00	329.000,00
13	NEON BOX KSB BLITAR J.L. KARTINI / BUDI SUROYO / CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.086,00	45.452,00	45.482,00	161.000,00
14	NEON BOX NAAVAGREEN J.L. CEPAKA / EKANING SUCIATI	PERMANEN	45.131,00	45.497,00	45.527,00	600.000,00
15	NEON BOX NAAVAGREEN J.L. CEPAKA / EKANING SUCIATI	PERMANEN	45.131,00	45.497,00	45.527,00	450.000,00
16	SLAMET HARIYONO / HOTEL BLITAR INDAH	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	128.750,00
17	THE BOEN AN / AHASS SIDO MAKMUJR	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	300.000,00
18	MUHSIN / JAGAL SARI	PERMANEN	45.071,00	45.437,00	45.467,00	92.000,00
19	PAPAN NAMA VIVO SEMERU TELECOM J.L. SEMERU / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	2.250.000,00
20	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. TANJUNG / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	281.250,00
21	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. MASTRIP / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	562.500,00
22	PAPAN NAMA VIVO SEMERU TELECOM J.L. MASTRIP / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	1.686.000,00
23	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	180.000,00
24	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	637.500,00
25	PAPAN NAMA VIVO SEMERU TELECOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	1.822.500,00
26	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. SEMERU / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	495.000,00
27	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. SEMERU / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	150.000,00
28	NEON BOX VIVO SEMERU TELECOM J.L. KELUD / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	450.000,00
29	PAPAN NAMA VIVO SEMERU TELECOM J.L. KELUD / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	1.012.500,00
30	PAPAN NAMA VIVO MARCOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	1.500.000,00
31	NEON BOX VIVO MARCOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	44.901,00	45.266,00	45.296,00	172.500,00
32	NEON BOX VIVO MARCOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	180.000,00
33	PAPAN NAMA VIVO MARCOM J.L. VETERAN / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	44.901,00	45.266,00	45.296,00	1.035.000,00
34	NEON BOX VIVO MAHACELL J.L. SEMERU / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	150.000,00
35	PAPAN NAMA VIVO PRIMA CELL J.L. MERDEKA / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	675.000,00
36	NEON BOX VIVO PRIMA PHONE 1 J.L. SEMERU / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	240.000,00
37	PAPAN NAMA VIVO PRIMA PHONE 1 J.L. SEMERU / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	264.000,00
38	PAPAN NAMA VIVO ERLAD PULSA PHONE J.L. IR. SOEKARNO / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	44.901,00	45.266,00	45.296,00	900.000,00
39	NEON BOX VIVO ERLAD PULSA PHONE J.L. IR. SOEKARNO / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	44.901,00	45.266,00	45.296,00	450.000,00
40	FINSAH MARDI SAPUTRA / UBS EMAS GAJAH MUDA	PERMANEN	44.944,00	45.309,00	45.339,00	150.000,00
41	PAPAN NAMA VIVO GARDEN CELL J.L. TANJUNG / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.266,00	45.632,00	45.662,00	1.046.250,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGANG	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
42	NEON BOX VIVO GARDEN CELL JL. TANJUNG / PT. BLUE OCEAN HEART	PERMANEN	45.268,00	45.532,00	45.682,00	450.000,00
43	PAPAN BERTIANG INDOFOOD JL. MAWAR / PT INDOFOOD CBP SUKSES	PERMANEN	45.087,00	45.453,00	45.483,00	3.600.000,00
44	MUJIYANTO / BWS - BANK WOORI SAUDARA	PERMANEN	45.112,00	45.478,00	45.508,00	473.000,00
45	MUJIYANTO / BWS - BANK WOORI SAUDARA	PERMANEN	45.112,00	45.478,00	45.508,00	206.750,00
46	LINA SUGIARTI / APOTEK K24	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	266.000,00
47	LINA SUGIARTI / APOTEK K24	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	300.000,00
48	NEON BOX CIMB NIAGA JL. MERDEKA / NUR HINDAYATI	PERMANEN	45.113,00	45.479,00	45.509,00	500.000,00
49	M. ANDI WINIANTO / POLYTRON	PERMANEN	45.118,00	45.484,00	45.514,00	1.816.875,00
50	RUDY KURNIAWAN / MANDIRI UTAMA FINANCE	PERMANEN	45.139,00	45.505,00	45.535,00	785.000,00
51	NEON BOX ALFAMART JL. KELUD / CV. KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.062,00	45.428,00	45.458,00	185.000,00
52	NEON BOX ALFAMART JL. KELUD / CV. KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.062,00	45.428,00	45.458,00	170.000,00
53	NEON BOX ALFAMART JL. BALI / CV. KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.025,00	45.391,00	45.421,00	338.000,00
54	NEON BOX ALFAMART JL. BALI / CV. KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.025,00	45.391,00	45.421,00	170.000,00
55	NEON BOX ALFAMART JL. CEMARA / CV. KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.068,00	45.434,00	45.464,00	170.000,00
56	NEON BOX ALFAMART JL. CEMARA / CV. KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.068,00	45.434,00	45.464,00	185.000,00
57	NEON BOX PARTIDISTRO JL. VETERAN / EMI FASIRAH	PERMANEN	45.128,00	45.494,00	45.524,00	162.500,00
58	HENY DESIANA PURIKASARI / PASAR BAUT	PERMANEN	45.134,00	45.500,00	45.530,00	337.500,00
59	PAPAN BERSINAR AMANDA JL. MOH. HATTA / TJAHJADI INDRAYANA	PERMANEN	45.139,00	45.505,00	45.535,00	331.250,00
60	NEON BOX CJ CGV JL. MERDEKA / WILIH PRASTIKA	PERMANEN	45.129,00	45.495,00	45.525,00	2.195.000,00
61	RINI SYARIFAH / MULIA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	245.000,00
62	YANI SUMIATI / OPTIK AL-KASUM	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	375.000,00
63	YANI SUMIATI / OPTIK AL-KASUM	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	127.500,00
64	YANI SUMIATI / BPJS KESEHATAN AL-KASUM	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	81.000,00
65	NEON BOX ROCKET CHICKEN / DITA DWI SETYANINGRUM	PERMANEN	45.073,00	45.439,00	45.469,00	200.000,00
66	NEON BOX ROCKET CHICKEN / DITA DWI SETYANINGRUM	PERMANEN	45.073,00	45.439,00	45.469,00	125.000,00
67	PAPAN BERSINAR SAMSUNG MORSENG / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.143,00	45.509,00	45.539,00	500.000,00
68	PAPAN BERSINAR SAMSUNG MORSENG / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.143,00	45.509,00	45.539,00	1.625.000,00
69	PAPAN BERSINAR SAMSUNG ERAFONE / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.164,00	45.530,00	45.560,00	1.087.500,00
70	PAPAN NAMA HANNOCIS / WIJOYO TJANDRA	PERMANEN	45.001,00	45.367,00	45.397,00	150.000,00
71	PAPAN NAMA WIJAYA LISTRIK / WIJOYO TJANDRA	PERMANEN	44.997,00	45.363,00	45.393,00	216.000,00
72	PAPAN NAMA CORSA / PT MICHELIN INDONESIA	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	300.000,00
73	PAPAN BERTIANG ENEOS / FINSAH MARDI SAPUTRA	PERMANEN	44.944,00	45.309,00	45.339,00	150.000,00
74	PAPAN BERTIANG ENEOS / FINSAH MARDI SAPUTRA	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	450.000,00
75	PAPAN BERTIANG ENEOS / FINSAH MARDI SAPUTRA	PERMANEN	44.944,00	45.309,00	45.339,00	150.000,00
76	PAPAN NAMA NIPPON PAINT / ANDRI SUSANTO	PERMANEN	45.146,00	45.512,00	45.542,00	225.000,00
77	BALIKO MEXGARMENT / M. ABDUL WAHID RIDHO / ARDI WIDAYAT	INSIDENTIL	45.282,00	45.313,00	45.320,00	120.000,00
78	NEON BOX INDOMARET JL. PALEM / CV KARYA SETYA SEMBADA	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	387.500,00
79	NEON BOX BANK MUAMALAT / NOVIANA HANNY RACHMAWATI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	350.000,00
80	NEON BOX BANK MUAMALAT / NOVIANA HANNY RACHMAWATI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	140.000,00
81	PAPAN NAMA SUPER EYE / WIRA DAMMATANO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	2.917.500,00
82	PAPAN NAMA SUPER EYE / WIRA DAMMATANO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	553.500,00
83	PAPAN NAMA INOVEYE / BUDI PRASETIO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	792.000,00
84	PAPAN NAMA INOVEYE / BUDI PRASETIO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	288.000,00
85	PAPAN BERSINAR INOVEYE / BUDI PRASETIO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	554.000,00
86	PAPAN BERSINAR INDO OPTIK / MUJJI ASTUTI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	275.000,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGANG	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
87	NEON BOX INDOMARET JL. SEMERU / SUHARWANTO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	443.750,00
88	NEON BOX INDOMARET JL. BALI / PT INDOMARCO PRISMATAMA	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	387.500,00
89	NEON BOX INDOMARET JL. CILWUNG 36 / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
90	NEON BOX INDOMARET JL. ANJASMORO / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
91	NEON BOX INDOMARET JL. CILWUNG / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
92	NEON BOX INDOMARET JL. SUDANCO SOEPRADI 191 / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
93	NEON BOX INDOMARET JL. CEMARA / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
94	NEON BOX INDOMARET JL. AHMAD YANI / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
95	NEON BOX INDOMARET JL. IMAM BONJOL / SUHARWANTO	PERMANEN	45.195,00	45.561,00	45.591,00	387.500,00
96	NEON BOX PNTV PRODUK GUDANG GARAM / CV KARYA SATRIA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
97	NEON BOX PNTV PRODUK GUDANG GARAM / CV KARYA SATRIA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
98	PAPAN BERTANG PNTV PRODUK GUDANG GARAM / CV KARYA SATRIA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	150.000,00
101	PAPAN NAMA FSH WJAYA MAKMLUR / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	1.012.500,00
102	NEON BOX MAYANG COLLECTION / IRINE NOVA DITA MAHARANI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	140.000,00
103	NEON BOX MAYANG COLLECTION / IRINE NOVA DITA MAHARANI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	245.750,00
104	NEON BOX SPBU 54.66 12.5 / BAGUS HANANTOKO, SP	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	500.000,00
105	PAPAN BERSINAR BIZNET / PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	PERMANEN	45.538,00	45.903,00	45.933,00	1.298.000,00
106	PAPAN BERSINAR REKLAME DJARUM JL. BALI / PT ADHI KARTIKA JAYA / TJAHJO H.H.	PERMANEN	45.203,00	45.569,00	45.599,00	4.850.000,00
107	PAPAN BERSINAR BIZNET JL. KALIMANTAN / PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	PERMANEN	45.205,00	45.571,00	45.601,00	230.000,00
108	PAPAN NAMA BIZNET JL. CEPAKA (BUNDERAN) / HAFIZ RAKA PRADANA	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	3.600.000,00
109	PAPAN NAMA HAJJ CHICKEN JL. KALIMANTAN / AGUS SEPTIAN	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	150.000,00
110	PAPAN NAMA HAJJ CHICKEN JL. KALIMANTAN / AGUS SEPTIAN	PERMANEN	45.248,00	45.614,00	45.644,00	212.000,00
111	PAPAN NAMA NIPPON PAINT / ANDRI SUSANTO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	300.000,00
112	PAPAN NAMA ANGGREK MOTOR / NA ING SIANG	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	150.000,00
113	PAPAN NAMA GRAND SAND TOKO MERDEKA / HARJO DARMAWAN SANJAYA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	450.000,00
114	PAPAN NAMA KSP BINA USAHA MANDIRI / SALLY SUSANTO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	112.500,00
115	PAPAN NAMA INDOMOBIL / YUDI SETYABUDI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	300.000,00
116	NEON BOX BANK BTPN / EMBUN SUKMA MULYANI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	387.500,00
117	PAPAN NAMA BANK BTPN / EMBUN SUKMA MULYANI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	225.000,00
118	PAPAN NAMA SINAYA BTPN / EMBUN SUKMA MULYANI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	150.000,00
119	NEON BOX ALFAMART / CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	44.956,00	45.321,00	45.351,00	185.000,00
120	NEON BOX ALFAMART / CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	44.956,00	45.321,00	45.351,00	170.000,00
121	PAPAN NAMA SHOP AND DRIVE / RONY WIDJAYA ERWAN PUTRA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	103.125,00
122	PAPAN NAMA SHOP AND DRIVE / RONY WIDJAYA ERWAN PUTRA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	337.500,00
123	NEON BOX SHOP AND DRIVE / RONY WIDJAYA ERWAN PUTRA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
124	PAPAN NAMA BAF / PT. BUSSAN AUTO FINANCE	PERMANEN	44.917,00	45.282,00	45.312,00	225.000,00
125	NEON BOX BANK SYARIAH INDONESIA KCP BLITAR TANJUNG - BSI / MOHAMMAD FACHRUN ROZIQ	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	128.000,00
126	NEON BOX BANK SYARIAH INDONESIA KCP BLITAR TANJUNG / MOHAMMAD FACHRUN ROZIQ	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	1.022.000,00
127	NEON BOX BANK MEGA / FIBRIANA LARASATI P.	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	575.000,00
128	NEON BOX BANK MEGA / FIBRIANA LARASATI P.	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	162.500,00
129	PAPAN NAMA BANK MEGA / FIBRIANA LARASATI P.	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	450.000,00
130	NEON BOX PERMATA BANK / PT. BANK PERMATA TBK	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	950.000,00
131	PAPAN NAMA GAPLEK SANTOSO / JEFFRYANTO TEDJA	PERMANEN	44.969,00	45.334,00	45.364,00	600.000,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGGAH	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
132	PAPAN NAMA SERENITY / ADI KURNIAWAN WIDHANTO	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	150.000,00
133	PAPAN NAMA LADY AMERICANA / ADI KURNIAWAN WIDHANTO	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	150.000,00
134	PAPAN NAMA ACTIV / ADI KURNIAWAN WIDHANTO	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	150.000,00
135	PAPAN NAMA ELITE / ADI KURNIAWAN WIDHANTO	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	150.000,00
136	NEON BOX DANAMON / RESA SUBHAN EFENDY	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	725.000,00
137	NEON BOX DANAMON / RESA SUBHAN EFENDY	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	350.000,00
138	PAPAN NAMA TOYOTA AUTO 2000 / R MOHAMAD SUHJUD R.	PERMANEN	44.960,00	45.325,00	45.355,00	600.000,00
139	PAPAN BERTIANG DAIHATSU / AZIZ ROFI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	450.000,00
140	PAPAN BERTIANG DAIHATSU / AZIZ ROFI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	150.000,00
141	PAPAN NAMA DAIHATSU / AZIZ ROFI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	4.500.000,00
142	NEON BOX DAIHATSU / AZIZ ROFI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	500.000,00
143	NEON BOX DAIHATSU / AZIZ ROFI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	350.000,00
144	PAPAN BERSINAR TOKO KUNING / CV KUNING LANGGENG SENTOSA	PERMANEN	45.213,00	45.579,00	45.609,00	5.600.000,00
145	NEON BOX ADIRA FINANCE / MUHAMMAD ABDUL LATIF	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	360.000,00
146	PAPAN BERTIANG WADIMOR / MOHAMMAD JAMIL	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	450.000,00
147	NEON BOX BANK BCA (ATM BCA, FIRECASH, BANK BCA) AKHMAD A.M / PT BANK BCA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	420.000,00
148	KCU BLITAR	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	1.120.000,00
149	NEON BOX ATM BCA AKHMAD A.M / PT BANK BCA KCU BLITAR	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	868.750,00
150	NEON BOX BCA AKHMAD A.M / PT BANK BCA KCU BLITAR	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	90.000,00
151	PAPAN NAMA SHIMIZU - TOKO SUBUR / PT. BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	150.000,00
152	PAPAN NAMA SHIMIZU - TOKO IJO / PT. BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	150.000,00
153	PAPAN NAMA SHIMIZU - TB. MAYAR / PT. BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	150.000,00
154	PAPAN NAMA MIYAKO RINNAI - TOKO MATAHARI / PT. BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	450.000,00
155	PAPAN NAMA MIYAKO RINNAI - TOKO PESONA JAYA / PT. BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	300.000,00
156	PAPAN BERSINAR FOTOCOPY WUJAYA / WIDARTI	PERMANEN	44.908,00	45.273,00	45.303,00	173.750,00
157	PAPAN NAMA PT. BPR ARTHA PAMENANG / FARIDA CHOIRUL NIKMAL	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	675.000,00
158	PAPAN BERSINAR OLIE JUMBO VELOS / CV. SETIA BUDI FAST CO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	3.650.000,00
159	NEON BOX SPBU 54.681.04/KEBONROJO / FOMI ENDAH KUSUMAWATI, SH	PERMANEN	45.000,00	45.366,00	45.396,00	590.000,00
160	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
161	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
162	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
163	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
164	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
165	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
166	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
167	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
168	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
169	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
170	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
171	NEON BOX BNI / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	200.000,00
172	PAPAN BERSINAR RUMAH BATIK SEKAR TANJUNG / DANANG DEWANDARU	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	275.000,00
173	PAPAN NAMA TOKO POLYGON / GUNAWAN WIBISONO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	150.000,00
174	NEON BOX BANK NUSUMMA / SLAMET SUPRIH EDI	PERMANEN	44.977,00	45.342,00	45.372,00	200.000,00
175	NEON BOX REKLAME ATM BNI 24 JAM / SUSILO HARJANTA	PERMANEN	44.980,00	45.345,00	45.375,00	500.000,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGGANG	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
176	NEON BOX REKLAME ATM BNI GALLERY / SUSILO HARJANTO	PERMANEN	44.980,00	45.345,00	45.375,00	185.000,00
177	NEON BOX REKLAME BNI CABANG BLITAR / SUSILO HARJANTO	PERMANEN	44.980,00	45.345,00	45.375,00	500.000,00
178	NEON BOX REKLAME BNI ATM GALLERY / SUSILO HARJANTO	PERMANEN	44.980,00	45.345,00	45.375,00	185.000,00
179	PAPAN BERSINAR REKLAME DJARUM JL. IR. SOEKARNO / PT DJARUM	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	650.000,00
180	PAPAN BERSINAR REKLAME DJARUM JL. KALI BRANTAS / PT DJARUM	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	650.000,00
181	PAPAN BERSINAR REKLAME DJARUM JL. CEMARA / PT DJARUM	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	650.000,00
182	PAPAN BERSINAR REKLAME DJARUM JL. TANJUNG / PT DJARUM	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	650.000,00
183	NEON BOX HYFRESH / SUWARTONO	PERMANEN	45.003,00	45.369,00	45.399,00	458.825,00
184	NEON BOX JT EXPRESS JL. BALI / CV KAWI MAKMUR SENTOSA	PERMANEN	44.990,00	45.356,00	45.386,00	200.000,00
185	NEON BOX JT EXPRESS JL. BALI / CV KAWI MAKMUR SENTOSA	PERMANEN	44.990,00	45.356,00	45.386,00	893.750,00
186	NEON BOX LABORATORIUM PRODIA / KUKUH NGUDI TRISNO MARKUS	PERMANEN	44.976,00	45.341,00	45.371,00	650.000,00
187	NEON BOX CABIN 15 / ARIES TANINGRUM	PERMANEN	44.991,00	45.357,00	45.387,00	275.000,00
188	PAPAN NAMA TOKO ACCU YUASA JL. PANGGLIMA SUDIRMAN / ARIES PURNOMO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	225.000,00
189	PAPAN NAMA TOKO ACCU YUASA JL. TANJUNG / ARIES PURNOMO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	225.000,00
190	PAPAN NAMA TOKO ACCU YUASA JL. CEMARA / ARIES PURNOMO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	225.000,00
191	PAPAN NAMA TOKO ACCU YUASA JL. MAWAR / ARIES PURNOMO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	225.000,00
192	PAPAN NAMA TOKO ACCU YUASA BRAVO MOTOR JL. CEMARA / ARIES PURNOMO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	225.000,00
193	PAPAN NAMA TOKO KANSAL PAINT / CV SIDHARTA	PERMANEN	44.985,00	45.361,00	45.391,00	752.500,00
194	NEON BOX MIXUE / NANANG ANGGA RIFANO	PERMANEN	45.001,00	45.398,00	45.428,00	185.000,00
195	NEON BOX IMAGIC / FITRI LESTARI	PERMANEN	44.999,00	45.365,00	45.395,00	320.000,00
196	NEON BOX KAN BAKAR CIANJUR / EVA ALFIANI	PERMANEN	45.006,00	45.372,00	45.402,00	275.000,00
197	PAPAN BERSINAR JT EXPRESS JL. TANJUNG / CV KAWI MAKMUR SENTOSA	PERMANEN	44.975,00	45.340,00	45.370,00	146.000,00
198	PAPAN BERSINAR JT EXPRESS JL. TANJUNG / CV KAWI MAKMUR SENTOSA	PERMANEN	44.975,00	45.340,00	45.370,00	300.000,00
199	PAPAN NAMA TOKO BCA MULTIFINANCE / SELVI SANTOSA	PERMANEN	45.020,00	45.388,00	45.418,00	3.650.000,00
200	PAPAN BERSINAR SAMPOERNA GROUP / ALI MAS UDDIN / CV SAKURA	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	3.600.000,00
201	PAPAN BERTIANG UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	170.000,00
202	NEON BOX AL BAIK MART / IRFAUL ENDRI SUSILO	PERMANEN	45.002,00	45.368,00	45.398,00	300.000,00
203	PAPAN NAMA YAMAHYA PANDAWA MOTOR / FERRY ARDIAN SAPUTRA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	300.000,00
204	PAPAN NAMA YAMAHYA PANDAWA MOTOR / FERRY ARDIAN SAPUTRA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	600.000,00
205	PAPAN NAMA YAMAHYA PANDAWA MOTOR / FERRY ARDIAN SAPUTRA	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	591.500,00
206	NEON BOX ELIZABETH EZ / BETALIA PUSPITA SARI	PERMANEN	44.961,00	45.326,00	45.356,00	225.000,00
207	PAPAN NAMA WARUNG NASI PECEL MBOK BARI 2 / PT SINAR MEDIA DIGITAL	PERMANEN	45.148,00	45.514,00	45.544,00	180.000,00
208	PAPAN NAMA MIYAKO RINNAI / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	4.800.000,00
209	PAPAN BERTIANG REKLAME DJARUM - JL. ANGGREK / PT ADHI KARTIKA JAYA	PERMANEN	45.321,00	45.687,00	45.717,00	3.600.000,00
210	PAPAN BERTIANG SAMPOERNA JL. SUDAMCO SODEPRIADI / RUDY KUSUMA WARDHANA	PERMANEN	45.025,00	45.391,00	45.421,00	650.000,00
211	NEON BOX SAMPOERNA JL. IR. SOEKARNO / JACK ADVERTISING	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	3.650.000,00
212	PAPAN BERSINAR SAMPOERNA JL. DR. WAHIDIN / NISWATU RESITASARI	PERMANEN	44.926,00	45.291,00	45.321,00	3.650.000,00
213	PAPAN BERSINAR GUIDANG GARAM JL. DR. WAHIDIN / TENG JUNAIDI GUNAWAN	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	300.000,00
214	PAPAN NAMA SAH - TOKO TRIJAYA / CV KATWANG KARYA MANDIRI	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	300.000,00
215	PAPAN NAMA SAH - TOKO JODO / CV KATWANG KARYA MANDIRI	PERMANEN	45.108,00	45.474,00	45.504,00	450.000,00
216	PAPAN NAMA SRC - TOKO RESTU / CV KATWANG KARYA MANDIRI	PERMANEN	45.017,00	45.383,00	45.413,00	450.000,00
217	PAPAN NAMA SAH - TOKO BALIYAYA / CV KATWANG KARYA MANDIRI	PERMANEN	45.008,00	45.374,00	45.404,00	200.000,00
218	NEON BOX PACIFIC TOKO ALUMINIUM / FELIX ONGKOWIJOYO	PERMANEN	45.008,00	45.374,00	45.404,00	387.500,00
219	NEON BOX PACIFIC TOKO BESI / FELIX ONGKOWIJOYO	PERMANEN	45.008,00	45.374,00	45.404,00	151.250,00
220	NEON BOX ROSALIA INDAH / WAWAN ANDRI ARGO W	INSIDENTIL	45.042,00	45.408,00	45.415,00	

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGANG	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
221	NEON BOX KESHINI / LUSIANA CANDRA	PERMANEN	45.022,00	45.388,00	45.418,00	180.500,00
222	REKLAME BFI / CHOIRUL ANAM	PERMANEN	45.018,00	45.394,00	45.414,00	725.000,00
223	PAPAN BERSINAR PRUDENTIAL / PT LITE MEDIA NUSANTARA	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	500.000,00
224	PAPAN BERTIANG SHELL HELIX TOKO GARUDA OLI / PT PIXEL ART INDONESIA	PERMANEN	45.018,00	45.384,00	45.414,00	150.000,00
225	PAPAN BERSINAR MATJEO KOREAN GRILL / ANTONIUS OCTAVINO HERTANTO	PERMANEN	45.035,00	45.401,00	45.431,00	500.000,00
226	PAPAN BERTIANG SARUNG MANGGA JL TANJUNG / PT PANGGUNGJAYA INDAH	PERMANEN	45.047,00	45.412,00	45.442,00	600.000,00
227	PAPAN BERTIANG SARUNG MANGGA JL MASTRIPI / PT PANGGUNGJAYA INDAH	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	150.000,00
228	PAPAN NAMA SINAR MAKMUR JL TGP / HARIYADI	PERMANEN	45.069,00	45.435,00	45.465,00	750.000,00
229	PAPAN BERTIANG PETUNJUK ARAH GRAND MANSION / GUNAWAN SETIANTO	PERMANEN	44.986,00	45.352,00	45.382,00	1.175.000,00
230	PAPAN BERSINAR SAMSUNG SSG BLITAR PHONE / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	45.065,00	45.431,00	45.461,00	4.800.000,00
231	PAPAN BERTIANG REKLAME DUARUM JL VETERAN / FANNY FERDIAN HARION	PERMANEN	45.171,00	45.537,00	45.567,00	131.250,00
232	PAPAN NAMA TOKO DEWADEWI / MEGAH IRAWATI	PERMANEN	45.065,00	45.431,00	45.461,00	131.250,00
233	PAPAN NAMA NIKIMURA HOME MARKET / SIMON SANTOSO	PERMANEN	45.065,00	45.431,00	45.461,00	393.750,00
234	PAPAN NAMA NIKIMURA HOME MARKET / SIMON SANTOSO	PERMANEN	45.065,00	45.431,00	45.461,00	656.250,00
235	PAPAN NAMA NIKIMURA HOME MARKET / SIMON SANTOSO	PERMANEN	45.076,00	45.442,00	45.472,00	1.687.500,00
236	NEON BOX BLESSINGS SHOP / LAVINNA OCTA R.	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	400.000,00
237	PAPAN NAMA OPTIK AL KASUM / YANI SUMIATI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	127.500,00
238	PAPAN NAMA OPTIK AL KASUM / YANI SUMIATI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	375.000,00
239	PAPAN BERTIANG OPTIK AL KASUM / YANI SUMIATI	PERMANEN	44.927,00	45.291,00	45.321,00	81.000,00
240	PAPAN NAMA TOKO SAMSUNG MERDEKA ELEKTRONIK / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	44.928,00	45.293,00	45.323,00	450.000,00
241	PAPAN NAMA TOKO SAMSUNG MERDEKA ELEKTRONIK / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	44.928,00	45.293,00	45.323,00	337.500,00
242	PAPAN NAMA TOKO SAMSUNG MERDEKA ELEKTRONIK / PT EXPO PARIWARA UTAMA	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	150.000,00
243	PAPAN NAMA MIRACLE BREAD / LILIS SUMIATI	PERMANEN	45.261,00	45.627,00	45.657,00	562.400,00
244	NEON BOX KFC / ACHMAD FANANY	PERMANEN	44.972,00	45.337,00	45.367,00	340.000,00
245	NEON BOX IN OUT KFC / ACHMAD FANANY	PERMANEN	44.986,00	45.352,00	45.382,00	4.850.000,00
246	PAPAN BERSINAR STIKO YOGYAKARTA / EKO SANTOSO	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	3.650.000,00
247	PAPAN BERSINAR GUDANG GARAM JL MAWAR (SELATAN REL) / ANASTASIA CHRISTINA	PERMANEN	45.108,00	45.474,00	45.504,00	7.550.000,00
248	PAPAN BERSINAR GUDANG GARAM JL SUDANCO SOEPRADI (HERLINGGA) / ANASTASIA CHRISTINA	PERMANEN	45.067,00	45.433,00	45.463,00	7.550.000,00
249	PAPAN BERSINAR GUDANG GARAM JL CEMARA / ANASTASIA CHRISTINA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	7.550.000,00
250	PAPAN BERSINAR GUDANG GARAM JL MERDEKA (DEPAN PEMKOT) / ANASTASIA CHRISTINA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	7.550.000,00
251	PAPAN BERSINAR GUDANG GARAM JL SUDANCO SOEPRADI (TMP) / ANASTASIA CHRISTINA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	3.650.000,00
252	PAPAN BERSINAR FRESY LAUNDRY / SEKAR AYU LUTFIANA	PERMANEN	45.125,00	45.491,00	45.521,00	1.047.500,00
253	NEON BOX 57 MART JL CILIWUNG / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	161.000,00
254	NEON BOX 57 MART JL CILIWUNG / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	329.000,00
255	NEON BOX 57 MART JL CILIWUNG / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	161.000,00
256	NEON BOX MAHAKAM MART JL MAHAKAM / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	329.000,00
257	NEON BOX MAHAKAM MART JL MAHAKAM / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	161.000,00
258	NEON BOX MAHAKAM MART JL MAHAKAM / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	329.000,00
259	NEON BOX MAHAKAM MART JL MAHAKAM / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.119,00	45.485,00	45.515,00	161.000,00
260	NEON BOX KSB KARTINI BLITAR JL RA KARTINI / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.086,00	45.452,00	45.482,00	329.000,00
261	NEON BOX KSB KARTINI BLITAR JL RA KARTINI / BUDI SUROYO CV KARYA BERSAMA	PERMANEN	45.086,00	45.452,00	45.482,00	329.000,00
262	PAPAN NAMA CASTROL / CV LIMA DIMENSI	PERMANEN	45.075,00	45.441,00	45.471,00	375.000,00
263	NEON BOX PNTV LIGHTED MAXXIS / PT MAXXIS INTERNATIONAL	PERMANEN	45.134,00	45.500,00	45.530,00	134.375,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGGAH	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
264	NEON BOX PNTH LIGHTED MAXXIS / PT MAXXIS INTERNATIONAL	PERMANEN	45.134,00	45.500,00	45.530,00	302.000,00
265	PAPAN NAMA BCA FINANCE BLITAR / PT BCA FINANCE BLITAR	PERMANEN	45.033,00	45.308,00	45.428,00	270.000,00
266	NEON BOX APOTEK SURYA SEHAT / RENDY YOYOK PRESTIWA	PERMANEN	45.061,00	45.427,00	45.457,00	200.000,00
267	PAPAN NAMA MIYAKO RINNAI JL MERDEKA 37 / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	337.500,00
268	PAPAN NAMA MIYAKO RINNAI JL MERDEKA 88 / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	675.000,00
269	PAPAN NAMA RINNAI MIYAKO JL MERDEKA 84 / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	450.000,00
270	PAPAN NAMA SHIMIZU JL TANJUNG 35 / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	150.000,00
271	PAPAN NAMA SHIMIZU JL MERDEKA 37 / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	45.103,00	45.469,00	45.499,00	150.000,00
272	PAPAN NAMA MIYAKO RINNAI JL MERDEKA 18-20 / PT BHAKTI IDOLA TAMA	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	603.750,00
273	NEON BOX NAKAMURA / PUTU MURWADI	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	266.000,00
274	NEON BOX NAKAMURA / PUTU MURWADI	PERMANEN	44.946,00	45.311,00	45.341,00	598.000,00
275	PAPAN BERSINAR NAKAMURA / PUTU MURWADI	PERMANEN	45.133,00	45.499,00	45.529,00	950.000,00
276	PAPAN NAMA BOGASARI TOKO BROMO / PT DNA JAYA GROUP	PERMANEN	45.133,00	45.499,00	45.529,00	150.000,00
277	PAPAN NAMA BOGASARI TOKO KALIYAYA / PT DNA JAYA GROUP	PERMANEN	45.133,00	45.499,00	45.529,00	150.000,00
278	PAPAN NAMA BOGASARI TOKO DUA BELAS / PT DNA JAYA GROUP	PERMANEN	45.036,00	45.402,00	45.432,00	200.000,00
279	NEON BOX GRIYA KOSMETIK SRIKATON / YOKA RANTAUWAN	PERMANEN	45.126,00	45.482,00	45.522,00	162.500,00
280	NEON BOX PARTIDISTRO / EVI FASIRAH	PERMANEN	45.126,00	45.482,00	45.522,00	171.500,00
281	NEON BOX PARTIDISTRO / EVI FASIRAH	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	300.000,00
282	PAPAN NAMA LABORATORIUM KLINIK VETERAN / ANTON SUSANTO	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	225.000,00
283	PAPAN NAMA APOTEK JAYA SEHAT / ANTON SUSANTO	PERMANEN	45.337,00	45.703,00	45.733,00	150.000,00
284	PAPAN NAMA FAJAR BAKERY / ANTON SUSANTO	PERMANEN	45.169,00	45.535,00	45.565,00	90.000,00
285	PAPAN BERTANG MAK TAM / RENDRA EKA SETYAWAN	PERMANEN	45.130,00	45.496,00	45.526,00	4.850.000,00
286	PAPAN BERSINAR KLIEN UD SUMBER KALI / ADI WUJAYA	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	270.000,00
287	PAPAN NAMA APOTEK SUMBER SEHAT / MARIA VIANNEY LUKIAN	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	140.000,00
288	NEON BOX APOTEK SUMBER SEHAT MEDICA / MARIA VIANNEY LUKIAN	PERMANEN	45.190,00	45.546,00	45.576,00	4.850.000,00
289	PAPAN BERSINAR DJARUM JL TANJUNG / TJAHJO HARTONO HADI	PERMANEN	45.170,00	45.536,00	45.566,00	195.350,00
290	NEON BOX A MILD (HAYANA KOPI) / CHRISTIAN EKA P.	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	393.750,00
291	PAPAN NAMA LABORATORIUM KLINIK ARRAHMAN / ANING PUJASTUTI	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	185.000,00
292	NEON BOX LABORATORIUM KLINIK ARRAHMAN / ANING PUJASTUTI	PERMANEN	45.175,00	45.541,00	45.571,00	162.500,00
293	NEON BOX BAKSO TETELAN CAK TAM / ZAIM FATAMI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	950.000,00
294	NEON BOX 99NINETYNINE FASHION HIJAB / NOVAN SETIAWAN	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	170.000,00
295	NEON BOX 99NINETYNINE FASHION HIJAB / NOVAN SETIAWAN	INSIDENTIL	45.194,00	45.265,00	45.292,00	3.000,00
296	NEON BOX 99NINETYNINE FASHION HIJAB / NOVAN SETIAWAN	INSIDENTIL	45.194,00	45.265,00	45.292,00	3.000,00
297	SPANDUK GROW TOKO RIZKY / CV SEJAHTERA	PERMANEN	44.901,00	45.266,00	45.296,00	158.000,00
298	NEON BOX HAPPY FROZEN AND FRESH / CV PLATINUM JAYA MANDIRI	PERMANEN	45.194,00	45.560,00	45.590,00	150.000,00
299	PAPAN NAMA TOKO KING KOIL INTERIOR GALERI / YAYAN DAYANTI	PERMANEN	45.194,00	45.560,00	45.590,00	150.000,00
300	PAPAN NAMA TOKO FLORENCE INTERIOR GALERI / YAYAN DAYANTI	PERMANEN	45.180,00	45.546,00	45.576,00	455.000,00
301	PAPAN NAMA TOKO SERTA INTERIOR GALERI / YAYAN DAYANTI	PERMANEN	45.180,00	45.546,00	45.576,00	200.000,00
302	PAPAN BERSINAR MEOO BASOEKI PETSHOP / PT PERFECT COMPANION	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
303	PAPAN BERSINAR MEOO BASOEKI PETSHOP / PT PERFECT COMPANION	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
304	PAPAN BERSINAR SMART HEART BASOEKI PETSHOP / PT PERFECT COMPANION	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
305	PAPAN BERSINAR MANLY / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
306	PAPAN BERSINAR GABRIELLE / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
307	PAPAN BERSINAR ZONE 2000 / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
308	PAPAN BERSINAR EMBA / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00
309	PAPAN BERSINAR CARDINAL / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.175.000,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGANG	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
310	PAPAN BERSINAR TOP TEN / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.586,00	45.596,00	1.175.000,00
311	PAPAN BERSINAR MCB / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.586,00	45.596,00	1.100.000,00
312	PAPAN BERSINAR TRIPL3 / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.586,00	45.596,00	1.100.000,00
313	NEON BOX APOLLO SUPER STORE / APOLLO	PERMANEN	45.200,00	45.586,00	45.596,00	443.750,00
314	PAPAN BERSINAR BIZNET JIL AHMAD YANI / HAFIZ RAKA PRADANA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	3.650.000,00
315	PAPAN BERSINAR PEGADAIAN - JIL KERANTIL / HAFIZ RAKA PRADANA	PERMANEN	45.292,00	45.657,00	45.687,00	3.650.000,00
316	NEON BOX AYAM GEPEK SAI JIL KALIMANTAN / PUJI SUSANTO	PERMANEN	45.211,00	45.577,00	45.607,00	388.000,00
317	NEON BOX PANDERMAN RESIDENCE / AHMAD ZAINI	PERMANEN	45.214,00	45.580,00	45.610,00	142.813,00
318	PAPAN BERSINAR HOTEL SRI REJEKI / WIDA MAHANI	PERMANEN	45.116,00	45.482,00	45.512,00	218.750,00
319	PAPAN BERTIANG I JIL KELUD / SUTANTO, SH	PERMANEN	45.281,00	45.627,00	45.657,00	3.600.000,00
320	PAPAN BERTIANG I SUPRAPTO JIL DR WAHIDIN / SUPRAPTO	PERMANEN	45.281,00	45.627,00	45.657,00	3.600.000,00
321	PAPAN BERTIANG I SUPRAPTO JIL SEMERU / SUPRAPTO	PERMANEN	45.208,00	45.574,00	45.604,00	200.000,00
322	NEON BOX KIMIA FARMA APOTEK JIL VETERAN / ARIANI HIDAYANTI	PERMANEN	45.204,00	45.570,00	45.600,00	600.000,00
323	PAPAN NAMA HONDA MPM MOTOR / HAMAM NASRODIN	PERMANEN	45.170,00	45.536,00	45.566,00	600.000,00
324	PAPAN NAMA RM PACIFIC / KWAN HAN SWIE	PERMANEN	45.186,00	45.552,00	45.582,00	482.000,00
325	NEON BOX ERAFONE / LINDA WILAJA	PERMANEN	45.186,00	45.552,00	45.582,00	1.278.500,00
326	PAPAN BERSINAR ERAFONE / LINDA WILAJA	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	200.000,00
327	NEON BOX KIMIA FARMA APOTEK JIL MAWAR / CHUSNUJ RODLIANA DWI	PERMANEN	45.181,00	45.547,00	45.577,00	200.000,00
328	PAPAN BERSINAR JAM MIRAH JIL MASTRIP / EKO ARISTAMA	PERMANEN	45.179,00	45.545,00	45.575,00	3.650.000,00
329	PAPAN BERSINAR JIL MASTRIP / HAFIZ RAKA PRADANA	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	3.650.000,00
330	PAPAN BERSINAR GUDANG GARAM JIL IR. SOEKARNO / ARI SETIAWAN	PERMANEN	45.078,00	45.444,00	45.474,00	3.650.000,00
331	PAPAN BERSINAR JIL TANJUNG (PEREMPATAN PAKUNDEN) / HAFIZ RAKA PRADANA	PERMANEN	45.108,00	45.474,00	45.504,00	3.600.000,00
332	PAPAN BERTIANG JIL TANJUNG (PERTIGAAN JIL JATI) / HAFIZ RAKA PRADANA	INSIDENTIL	45.285,00	45.313,00	45.320,00	12.000,00
333	BANNER PERUMAHAN GRIYA CARANI ASRI / SETO KUNTO AJI	PERMANEN	45.153,00	45.519,00	45.549,00	1.800.000,00
334	PAPAN NAMA DEA BAKERY JIL MAWAR / PRASETIYAWAN	PERMANEN	45.153,00	45.519,00	45.549,00	425.000,00
335	NEON BOX DEA BAKERY JIL MAWAR / PRASETIYAWAN	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	200.000,00
336	NEON BOX CASABLANCA JIL MASTRIP / INEKE	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	760.500,00
337	PAPAN NAMA CAFU JIL MASTRIP / INEKE	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.998.000,00
338	PAPAN NAMA CONNEX & VELO / INEKE	PERMANEN	45.177,00	45.543,00	45.573,00	225.000,00
339	PAPAN NAMA TOA JIL KAPUAS / CV BERUANG MAS PUTRA	PERMANEN	45.170,00	45.536,00	45.566,00	500.000,00
340	PAPAN BERSINAR WOMILEX JIL MERDEKA / CV BERUANG MAS PUTRA	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	303.125,00
341	PAPAN BERSINAR WOMILEX JIL CEMARA / CV BERUANG MAS PUTRA	PERMANEN	45.170,00	45.536,00	45.566,00	303.125,00
342	PAPAN BERSINAR JOTUN JIL CEMARA / CV BERUANG MAS PUTRA	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	7.550.000,00
343	JUNAIDI GUNAWAN	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	7.550.000,00
344	PAPAN BERSINAR KLIEN PT SANTOS JAYA ABADI JIL RA. KARTINI / TENG JUNAIDI	PERMANEN	45.231,00	45.597,00	45.627,00	112.500,00
345	PAPAN NAMA MASPION TOKO SURYA TERANG JIL BALI / EDY LUKITO	INSIDENTIL	44.996,00	45.362,00	45.392,00	240.000,00
346	BALIKO CALON ANGGOTA DPD RI / RIZA INDIRANI	INSIDENTIL	45.258,00	45.319,00	45.326,00	450.000,00
347	BALIKO CALON ANGGOTA DPD RI / MOCH ERDYN SUBCHIAN	INSIDENTIL	45.284,00	45.326,00	45.333,00	180.000,00
348	BALIKO HERU SANTOSO - GOLKAR / GUNAWAN	INSIDENTIL	45.258,00	45.288,00	45.295,00	27.000,00
349	SPANDUK DAMAI SUKA CITA NATAL DISKON / SUYATNO	PERMANEN	44.958,00	45.323,00	45.353,00	2.700.000,00
350	PAPAN NAMA GOODYEAR AUTOCARE BANDARA BAND JIL. SUDANCO SOEPRADI / PT	PERMANEN	45.240,00	45.606,00	45.636,00	600.000,00
352	PAPAN NAMA ROYAL FOAM ARTHA WILAJA JIL. ANGGREK / PT BESTARI MULIA	PERMANEN	45.240,00	45.606,00	45.636,00	600.000,00

NO.	DATA SETORAN	JENIS REKLAME	MASA BERLAKU		MASA TENGANG	NOMINAL (Rp)
			AWAL	AKHIR		
353	PAPAN NAMA SHELL HELIX JL. TANJUNG / PT PIXEL ART INDONESIA	PERMANEN	45.280,00	45.626,00	45.658,00	300.000,00
354	NEON BOX WARUNG KUNING JL. MASTRIP / TRS YOKO HERMAWAN	PERMANEN	44.998,00	45.364,00	45.394,00	200.000,00
355	NEON BOX CAFE KUNING JL. SUDANCO SOEPRADI / FELICIA DWI JATMIKO	PERMANEN	45.008,00	45.372,00	45.402,00	200.000,00
356	PAPAN NAMA AGOUNG GROUP JL. BALI / WIKI SUMARTIWI	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	1.050.000,00
357	PAPAN NAMA FSH TOKO MSAH KAMAH JL. BALI / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	45.200,00	45.566,00	45.596,00	180.000,00
358	PAPAN NAMA FSH SDO MUNCUL JL. DR. WAHIDIN / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	45.291,00	45.657,00	45.687,00	562.500,00
359	PAPAN NAMA FSH TOKO KEMBANGMAK KANAH JL. BALI / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	45.221,00	45.587,00	45.617,00	180.000,00
360	PAPAN NAMA FSH BU MURTI JL. BALI / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	45.221,00	45.587,00	45.617,00	180.000,00
361	PAPAN NAMA FSH MAK TIE FLOWER JL. BALI / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	45.221,00	45.587,00	45.617,00	180.000,00
362	SPANDUK COFFEE BEAN NEW / PT VICTORY SUPRA SIGARET	INSIDENTIL	45.285,00	45.285,00	45.292,00	18.000,00
363	BANNER V BANNER COFFEE BEAN NEW / PT VICTORY SUPRA SIGARET	INSIDENTIL	45.286,00	45.294,00	45.301,00	15.000,00
364	SPANDUK SELAMAT NATARU INDOMARET / LUKMAN SUROKO	INSIDENTIL	45.275,00	45.306,00	45.313,00	3.000,00
365	PAPAN BERSINAR UT JL. IMAM BONJOL / HAFIZ RAKA PRADANA	PERMANEN	45.108,00	45.474,00	45.504,00	3.650.000,00
366	SPANDUK PROMO MENU NATAL HOTEL TUGU / HENDRI SULAHUDIN	INSIDENTIL	45.269,00	45.300,00	45.307,00	6.000,00
367	SPANDUK LAYAR COVER AML / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	15.000,00
368	SPANDUK LAYAR COVER AML / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	30.000,00
369	SPANDUK LAYAR COVER AML / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	495.000,00
370	SPANDUK LAYAR COVER AML / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	90.000,00
371	SPANDUK LAYAR COVER AML / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	75.000,00
372	SPANDUK LAYAR COVER DSSK / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	90.000,00
373	SPANDUK LAYAR COVER DSSK / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	6.000,00
374	BANNER KIRIM BARANG GUEDE PAXEL / PUTU MURWADI	INSIDENTIL	45.274,00	45.302,00	45.309,00	24.000,00
375	BANNER SCHOOL ADMISSION / SIMON SANTOSO	INSIDENTIL	45.281,00	45.309,00	45.316,00	3.000,00
376	SPANDUK LAYAR COVER DSSK / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.272,00	45.303,00	45.310,00	15.000,00
377	SPANDUK LAYAR COVER AML / CV KATWANG KARYA MANDIRI	INSIDENTIL	45.264,00	45.295,00	45.302,00	9.000,00
378	SPANDUK PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI / RIZWAN NORMA ZAKKI	INSIDENTIL	45.273,00	45.304,00	45.311,00	6.000,00
379	SPANDUK YEAR END SALE / BETALIA PUSPITA	INSIDENTIL	45.281,00	45.311,00	45.318,00	180.000,00
380	PAPAN NAMA FSH TOKO KEMBANG MAK KAH JL. BALI / CV WASKITHO COMMUNICATION	PERMANEN	45.221,00	45.587,00	45.617,00	120.000,00
381	BALIHO BARLEY END YEAR SALE / ARDI WIDAYAT	INSIDENTIL	45.303,00	45.334,00	45.341,00	120.000,00
382	BALIHO BARLEY END YEAR SALE / ARDI WIDAYAT	INSIDENTIL	45.303,00	45.334,00	45.341,00	6.000,00
383	SPANDUK DINER NEW YEAR HOTEL TUGU / HENDRI SULAHUDIN	INSIDENTIL	45.280,00	45.311,00	45.318,00	290.757.013,00
					JUMLAH	

91

Lampiran 12 Rincian Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat per 31 Desember 2023

NO	NAMA	LANTAI	NO.HUNIAN	JAMINAN (Rp)	KETERANGAN	BULAN MASUK	TAHUN
1	Sinta Kumalasari	1	DIF 2	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
2	Rahmanto Adi Purwanto	2	A2-02	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
3	Sukarni	2	A2-03	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
4	Yuni Puji Lestari	2	A2-04	500,000.00	AKTIF	Juli	2017
5	Arif Mashudi	2	A2-05	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
6	Supiah	2	A2-06	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
7	Sulastris	2	A2-07	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
8	Marti	2	A2-08	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
9	Yeny Susilowati	2	A2-09	500,000.00	AKTIF	Maret	2015
10	Mujiati	2	A2-10	500,000.00	AKTIF	Maret	2015
11	Sukirah	2	A2-11	500,000.00	AKTIF	Maret	2015
12	Sri Yatin	2	A2-12	500,000.00	AKTIF	Januari	2018
13	Katini	2	B2-03	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
14	Arifin	2	B2-04	500,000.00	AKTIF	Nopember	2023
15	Kristianus Laksono	2	B2-05	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
16	Siti Aminah	2	B2-06	500,000.00	AKTIF	September	2021
17	Snumiati	4	B2-07	500,000.00	AKTIF	Maret	2018
18	Rini Sunarwati	2	B2-08	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
19	Slamet Siswanto	2	B2-09	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
20	Rika Sarce	2	B2-10	500,000.00	AKTIF	Mei	2022
21	Suhamo	2	B2-11	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
22	Bedjo	2	B2-12	500,000.00	AKTIF	Agustus	2017
23	Jonni Tansah Agung	2	C2-02	500,000.00	AKTIF	September	2015
24	Atman	2	C2-03	500,000.00	AKTIF	Februari	2016
25	Siswanto	2	C2-04	500,000.00	AKTIF	Nopember	2023
26	Lidia Hamanik	2	C2-05	500,000.00	AKTIF	Desember	2019
27	Suwarno	2	C2-06	500,000.00	AKTIF	Nopember	2015
28	Tawar	2	C2-07	500,000.00	AKTIF	September	2021
29	Sih Enawati	2	C2-08	500,000.00	AKTIF	Oktober	2015
30	Sugeng Santoso	2	C2-09	500,000.00	AKTIF	Desember	2020
31	Mesini	2	C2-10	500,000.00	AKTIF	Juli	2016
32	Siti Hawati	2	C2-11	500,000.00	AKTIF	Juni	2016
33	Jayeng Sutrisno	2	C2-12	500,000.00	AKTIF	Oktober	2015
34	Sulastris	2	D2-02	500,000.00	AKTIF	Februari	2016
35	Antok Budianto	2	D2-03	500,000.00	AKTIF	September	2015
36	Men Ali Gani	2	D2-04	500,000.00	AKTIF	September	2016
37	Edy Purwanto	2	D2-05	500,000.00	AKTIF	Agustus	2021
38	Wasono	2	D2-06	500,000.00	AKTIF	Juni	2019
39	Basuki	2	D2-07	500,000.00	AKTIF	Oktober	2018
40	Endri Asmoro	2	D2-08	500,000.00	AKTIF	Desember	2020
41	Fedjar Ariyanto	2	D2-09	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
42	Sutiah	2	D2-10	500,000.00	AKTIF	Juni	2016
43	Noto Badi Hendrik Lukman					September	
44	Diono	2	D2-11	500,000.00	AKTIF		2017
45	Mujinah	2	D2-12	500,000.00	AKTIF	Nopember	2021
46	Sumiyati	2	E2-02	500,000.00	AKTIF	April	2020
47	Wamatin	2	E2-03	500,000.00	AKTIF	September	2023
48	Yudhi Purwanto	2	E2-04	500,000.00	AKTIF	Juni	2017
49	Agus Pramono	2	E2-05	500,000.00	AKTIF	Februari	2023
50	Muslih Hartono	2	E2-06	500,000.00	AKTIF	Agustus	2022
51	Sutilah	2	E2-07	500,000.00	AKTIF	Nopember	2016
52	Tri Asih	2	E2-08	500,000.00	AKTIF	Desember	2018
53	Pujianto	2	E2-09	500,000.00	AKTIF	Desember	2019
54	Indah Oktina	2	E2-10	500,000.00	AKTIF	September	2018
55	Sugianto	2	E2-11	500,000.00	AKTIF	Juni	2017
56	Eko Setyono	2	E2-12	500,000.00	AKTIF	Desember	2021
57	Suprapti	2	F2-02	500,000.00	AKTIF	Nopember	2016
58	Salamun	2	F2-03	500,000.00	AKTIF	Maret	2017
59	Supiatin	2	F2-05	500,000.00	AKTIF	April	2017
60	Mudjiono	2	F2-05	500,000.00	AKTIF	Februari	2020
63	Sutikno	2	F2-06	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
64	Edy Aryono	2	F2-07	500,000.00	AKTIF	Oktober	2018
65	Dwi Enik Susanti Ningsih	2	F2-08	500,000.00	AKTIF	Maret	2019
66	Pitoyo	2	F2-09	500,000.00	AKTIF	Januari	2023
67	Syaikh Rochman	2	F2-10	500,000.00	AKTIF	September	2017

NO	NAMA	LANTAI	NO.HUNIAN	JAMINAN (Rp)	KETERANGAN	BULAN MASUK	TAHUN
68	Agus Dhinar	2	F2-12	500,000.00	AKTIF	Mei	2017
69	Edy Subagyo	3	A3-02	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
70	Guntur Santoso	3	A3-03	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
71	Sutianik	3	A3-04	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
72	Winarsih Sri Rejeki	3	A3-05	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
73	Mochamad Karim	3	A3-06	500,000.00	AKTIF	Juni	2015
74	Muji Astutik	3	A3-07	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
75	Irwan Harianto	3	A3-08	500,000.00	AKTIF	Maret	2018
76	Halimah	3	A3-09	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
77	Maronah	3	A3-10	500,000.00	AKTIF	Maret	2015
78	Suplanto	3	A3-12	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
79	Sukristiana	3	A3-11	500,000.00	AKTIF	September	2019
80	Putri Wulandari	3	B3-02	500,000.00	AKTIF	Desember	2020
81	Lisa Kurniawati	3	B3-03	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
82	Suminah	3	B3-04	500,000.00	AKTIF	Mei	2016
83	Supriono	3	B3-05	500,000.00	AKTIF	Juni	2019
84	Supriyanto	3	B3-06	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
85	Fix Andi W	3	B3-07	500,000.00	AKTIF	September	2018
86	Agus Suprayitno	3	B3-08	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
87	Sriyati	3	B3-09	500,000.00	AKTIF	Nopember	2018
88	Davit Rendik Kristianto	3	B3-10	500,000.00	AKTIF	Juni	2015
89	Agus Widodo	3	B3-11	500,000.00	AKTIF	Juli	2017
90	Waskito	3	B3-12	500,000.00	AKTIF	Mei	2022
91	Maryuni	3	C3-02	500,000.00	AKTIF	Agustus	2016
92	Purwanto	3	C3-03	500,000.00	AKTIF	Januari	2016
93	Nico Dirgantara	3	C3-04	500,000.00	AKTIF	Agustus	2021
94	Siti Yuliamah	3	C3-05	500,000.00	AKTIF	Februari	2016
95	Yeni Novia	3	C3-06	500,000.00	AKTIF	Desember	2015
96	Nahrowi	3	C3-07	500,000.00	AKTIF	Nopember	2021
97	Sri Tjanti	3	C3-08	500,000.00	AKTIF	Juni	2018
98	Dodik Santoso	3	C3-09	500,000.00	AKTIF	Maret	2016
99	Wahyu Ningsih	3	C3-10	500,000.00	AKTIF	Desember	2020
100	Edy Purnomo	3	C3-11	500,000.00	AKTIF	Februari	2016
101	Istiqomah	3	C3-12	500,000.00	AKTIF	Januari	2016
102	Nurul Hidayah	3	D3-02	500,000.00	AKTIF	Nopember	2019
103	Sukinah	3	D3-03	500,000.00	AKTIF	September	2020
104	Moch Ali Mustofa	3	D3-04	500,000.00	AKTIF	Maret	2016
105	Hery Santo	3	D3-05	500,000.00	AKTIF	Nopember	2023
106	Iwan Herwanto	3	D3-06	500,000.00	AKTIF	Desember	2023
107	Supandi	3	D3-07	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
108	Krismawati	3	D3-08	500,000.00	AKTIF	September	2021
109	Siti Mukaromah	3	D3-09	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
110	Agus Utomo	3	D3-10	500,000.00	AKTIF	Oktober	2022
111	Anik Dwi Saputro	3	D3-11	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
112	Sas Iham Enre	3	D3-12	500,000.00	AKTIF	Oktober	2015
113	Rulijah	3	E3-02	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
114	Loeki Sardito	3	E3-03	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
115	Moch Nur Sururi	3	E3-04	500,000.00	AKTIF	Nopember	2016
116	Eko Wahyudi	3	E3-05	500,000.00	AKTIF	Maret	2017
117	Mikael Jendi	3	E3-06	500,000.00	AKTIF	Desember	2017
118	Yudi Istanto	3	E3-07	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
119	Karyono	3	E3-08	500,000.00	AKTIF	April	2021
120	Sigit Priyanto	3	E3-09	500,000.00	AKTIF	Agustus	2022
121	Timur Widotami	3	E3-10	500,000.00	AKTIF	Januari	2018
122	Okta Remy Basuki	3	E3-11	500,000.00	AKTIF	Juni	2023
123	Suratiningsih	3	E3-12	500,000.00	AKTIF	April	2020
124	Titik Sugiarti	3	F3-02	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
125	Stefanus Luan Kieu	3	F3-03	500,000.00	AKTIF	Maret	2017
126	Roys Welly Indarto	3	F3-04	500,000.00	AKTIF	September	2023
127	Winarti	3	F3-05	500,000.00	AKTIF	Mei	2017
128	Dedy Cahyono	3	F3-06	500,000.00	AKTIF	Nopember	2018
129	Enik Merawati	3	F3-07	500,000.00	AKTIF	Nopember	2021
130	Supriyah	3	F3-08	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
131	Lusi Andayani	3	F3-09	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
132	Yoga Dimas Praditya	3	F3-10	500,000.00	AKTIF	Juni	2023
133	Endro Sugandi	3	F3-11	500,000.00	AKTIF	September	2018
134	Tri Retno Hastutik	3	F3-12	500,000.00	AKTIF	April	2020
135	Moch Nur Choliz	4	A4-02	500,000.00	AKTIF	Oktober	2017
136	Imam Sugoro Putra	4	A4-03	500,000.00	AKTIF	April	2015
137	Nunik Januarti	4	A4-04	500,000.00	AKTIF	Agustus	2022
138	Pujianto	4	A4-05	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
139	Imam Rosyidin	4	A4-06	500,000.00	AKTIF	Juni	2015

NO	NAMA	LANTAI	NO.HUNIAN	JAMINAN (Rp)	KETERANGAN	BULAN MASUK	TAHUN
140	Wahyu Yudianto	4	A4-07	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
141	Bambang Sujatmiko	4	A4-08	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
142	Wiji Guntoro	4	A4-09	500,000.00	AKTIF	April	2020
143	Tiu Santoso	4	A4-10	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
144	Muji Haris Santoso	4	A4-11	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
145	Wahyu Imam Safi'i	4	A4-12	500,000.00	AKTIF	Agustus	2022
146	Endik Biantoro	4	B4-02	500,000.00	AKTIF	Juli	2017
147	Susilo	4	B4-03	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
148	Hendy Feblanto	4	B4-04	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
149	Karyanto	4	B4-05	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
150	Leny Sunarsih	4	B4-06	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
151	Muhamad Ansori	4	B4-07	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
152	Samproni	4	B4-08	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
153	Cholib	4	B4-09	500,000.00	AKTIF	September	2018
154	Slamet Puji Gunawan	4	B4-10	500,000.00	AKTIF	Februari	2015
155	Anita Gustiana	4	B4-11	500,000.00	AKTIF	Agustus	2018
156	Angga Senda Maulana	4	B4-12	500,000.00	AKTIF	Oktober	2016
157	Tety Idayani	4	C4-02	500,000.00	AKTIF	September	2015
158	Yustika Irawati	4	C4-03	500,000.00	AKTIF	April	2020
159	Muhammad Qorudin	4	C4-04	500,000.00	AKTIF	April	2017
160	Ridwan	4	C4-05	500,000.00	AKTIF	Juni	2023
161	Sri Lestari	4	C4-06	500,000.00	AKTIF	Juli	2016
162	Yuyun Mariana	4	C4-07	500,000.00	AKTIF	Maret	2016
163	Agung Prasetyo	4	C4-08	500,000.00	AKTIF	Agustus	2016
164	Ongki Irawan	4	C4-09	500,000.00	AKTIF	Agustus	2022
165	Riko Oktariano	4	C4-10	500,000.00	AKTIF	Januari	2023
166	Agus Windarto	4	C4-11	500,000.00	AKTIF	Juli	2016
167	Mujianto	4	C4-12	500,000.00	AKTIF	Desember	2020
168	Yayuk Eko Lestari	4	D4-02	500,000.00	AKTIF	November	2018
169	Agus Wuwuh	4	D4-03	500,000.00	AKTIF	April	2016
170	Husin Asari	4	D4-04	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
171	Erika Yepi P	4	D4-05	500,000.00	AKTIF	Juni	2016
172	Rudi Santoso	4	D4-06	500,000.00	AKTIF	Desember	2019
173	Sudarsih	4	D4-07	500,000.00	AKTIF	Agustus	2018
174	Tegar Anggoro Kasih	4	D4-08	500,000.00	AKTIF	November	2021
175	Amir Ayusta	4	D4-09	500,000.00	AKTIF	Agustus	2016
176	Santoso	4	D4-10	500,000.00	AKTIF	Agustus	2017
177	Jain	4	D4-11	500,000.00	AKTIF	Juni	2016
178	Sulistyaningsih	4	D4-12	500,000.00	AKTIF	Juli	2017
179	Hadi Purnomo	4	E4-02	500,000.00	AKTIF	Oktober	2018
180	Zaenal Rifai	4	E4-03	500,000.00	AKTIF	Januari	2019
181	Endang Suwarsih	4	E4-04	500,000.00	AKTIF	Mei	2019
182	Neti Edi Ningsih	4	E4-05	500,000.00	AKTIF	Februari	2017
183	Praningsih	4	E4-06	500,000.00	AKTIF	November	2016
184	Utoro	4	E4-07	500,000.00	AKTIF	Agustus	2021
185	Sudamani	4	E4-08	500,000.00	AKTIF	September	2018
186	Novi Kristiani	4	E4-09	500,000.00	AKTIF	Februari	2017
187	Wisma Betris Lutfiana	4	E4-10	500,000.00	AKTIF	Desember	2021
188	Darsono	4	E4-11	500,000.00	AKTIF	Februari	2017
189	Iis Septiningsih	4	E4-12	500,000.00	AKTIF	November	2017
190	Mahmud	4	F4-02	500,000.00	AKTIF	Desember	2019
191	Sunardi	4	F4-03	500,000.00	AKTIF	November	2021
192	Seno Prakoso	4	F4-04	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
193	Syahrul Maulidul A	4	F4-05	500,000.00	AKTIF	November	2016
194	Nur Hidayati	4	F4-06	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
195	Rahayu Winami	4	F4-07	500,000.00	AKTIF	Mei	2018
196	Hani Triono	4	F4-08	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
197	Fitria Yunitasari	4	F4-09	500,000.00	AKTIF	Desember	2018
198	Andika Panca Setiyawan	4	F4-11	500,000.00	AKTIF	September	2022
199	Windi Rismawati	4	F4-12	500,000.00	AKTIF	Desember	2022
200	Daud Prahara Yuda	5	A5-02	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
201	Teguh Wibowo	5	A5-03	500,000.00	AKTIF	Agustus	2018
202	Puji Priyo Utomo	5	A5-04	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
203	Oscar Wibisono	5	A5-06	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
204	Aris Dwi Pristian	5	A5-05	500,000.00	AKTIF	Januari	2020
205	Maulana Vito Rahma S.	5	A5-07	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
206	Amir Mahmud	5	A5-08	500,000.00	AKTIF	Januari	2015
207	Linda Susanti	5	A5-10	500,000.00	AKTIF	November	2021
208	Yulianto	5	A5-11	500,000.00	AKTIF	Desember	2023
209	Warda Muntaza Dewo	5	A5-12	500,000.00	AKTIF	Februari	2023

NO	NAMA	LANTAI	NO.HUNIAN	JAMINAN (Rp)	KETERANGAN	BULAN MASUK	TAHUN
210	Dian Fernando	5	B5-02	500,000.00	AKTIF	Agustus	2018
211	Setyo Puji Rahayu	5	B5-03	500,000.00	AKTIF	September	2018
212	Anang Fahrul Rozi	5	B5-04	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
213	Arif Setiawan	5	B5-05	500,000.00	AKTIF	Oktober	2018
214	Ribut Wahono	5	B5-06	500,000.00	AKTIF	Mei	2015
215	Deni Kurniawan	5	B5-07	500,000.00	AKTIF	Juni	2016
216	Fungki Andriawan	5	B5-08	500,000.00	AKTIF	Maret	2016
217	Adi Dwi Hertanto	5	B5-09	500,000.00	AKTIF	Juni	2015
218	Anna Oktavia	5	B5-10	500,000.00	AKTIF	September	2018
219	Guntur Yenuar	5	B5-11	500,000.00	AKTIF	Oktober	2023
220	Yudi Riyanto	5	B5-12	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
221	Bambang Setyawan	5	C5-02	500,000.00	AKTIF	Juli	2016
222	Annatha Rizkya Putri Ani	5	C5-03	500,000.00	AKTIF	Agustus	2022
223	Sulichah	5	C5-04	500,000.00	AKTIF	Januari	2019
224	Suja'i	5	C5-05	500,000.00	AKTIF	Januari	2018
225	Sunarko	5	C5-06	500,000.00	AKTIF	Juni	2023
226	Novia Putri Ayuna	5	C5-07	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
227	Agus Budi Hariyanto	5	C5-08	500,000.00	AKTIF	Nopember	2021
228	R.Hendra Dhika Arista	5	C5-09	500,000.00	AKTIF	April	2016
229	Ariyanto	5	C5-10	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
230	Sodik	5	C5-11	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
231	Aditya Putra	5	C5-12	500,000.00	AKTIF	Februari	2016
232	Rico Setiawan	5	D5-02	500,000.00	AKTIF	September	2019
233	Sumarsono	5	D5-03	500,000.00	AKTIF	Oktober	2019
234	Supinah	5	D5-04	500,000.00	AKTIF	Februari	2023
235	Fenny Yuliana	5	D5-04	500,000.00	AKTIF	September	2022
236	Dico Maradino	5	D5-06	500,000.00	AKTIF	Nopember	2015
237	Agus Setiono	5	D5-07	500,000.00	AKTIF	April	2016
238	Susilo Pranoto	5	D5-08	500,000.00	AKTIF	Mei	2016
239	Abdul Eko Hermawan	5	D5-09	500,000.00	AKTIF	Februari	2021
240	Yulis Irawanto	5	D5-10	500,000.00	AKTIF	Juni	2023
241	Fera Kristianti	5	D5-11	500,000.00	AKTIF	Januari	2023
242	Wahyu Abriyanto	5	D5-12	500,000.00	AKTIF	Nopember	2021
243	Bayu Avianto	5	E5-02	500,000.00	AKTIF	Januari	2019
244	Yan Mahesa Yuditra	5	E5-03	500,000.00	AKTIF	September	2018
245	Suyatno	5	E5-04	500,000.00	AKTIF	Desember	2017
246	Reno Giswara Nandra P.	5	E5-05	500,000.00	AKTIF	Februari	2020
247	Subur Santoso	5	E5-06	500,000.00	AKTIF	April	2019
248	Sunarto	5	E5-07	500,000.00	AKTIF	Mei	2017
249	Andik Surya Putra	5	E5-08	500,000.00	AKTIF	Februari	2023
250	Titis Meliana Wati	5	E5-09	500,000.00	AKTIF	Agustus	2020
251	Pujianto	5	E5-10	500,000.00	AKTIF	April	2018
252	Ismiono	5	E5-11	500,000.00	AKTIF	Mei	2017
253	Mariana	5	E5-02	500,000.00	AKTIF	Maret	2017
254	Ichma Suryani	5	F5-02	500,000.00	AKTIF	Oktober	2018
255	Argo Prasetya	5	F5-03	500,000.00	AKTIF	Juli	2022
256	Rina Eka Sari	5	F5-04	500,000.00	AKTIF	Agustus	2019
257	Eva Susanti	5	F5-04	500,000.00	AKTIF	Juni	2022
258	Hengky Siswanto	5	F5-06	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
259	Alex Wibisono	5	F5-07	500,000.00	AKTIF	Nopember	2016
260	Ani Saputri	5	F5-08	500,000.00	AKTIF	Januari	2017
261	Alain Smith Ray J.	5	F5-09	500,000.00	AKTIF	Nopember	2018
262	Dwi Agus Waluyo	5	F5-10	500,000.00	AKTIF	April	2017
263	Bayu Ariyanto	5	F5-11	500,000.00	AKTIF	Desember	2017
264	Peni Anshih	5	F5-12	500,000.00	AKTIF	Desember	2021
Total Jaminan				130,500,000.00			

Lampiran 13 Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

NO	Nama	Realisasi	Beharunya	Setelah	TOTAL	SKLJH		RINCIAN			Angsuran s/d 2023	Sisa Angsuran 10-5-9
						Nilai	Tanggal	Jangka waktu	Angsuran Perbulan			
		1	2	3+1-2	4	5	6	7	Angsuran Perbulan			
1	BAMBANG PRIYO W. ST	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	63,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	16,693,750.00	216,856,250.00	
2	BASUKI RACHMAD, SH	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
3	BAYU SETYO KUNCORO	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
4	DEDIK HENDRIWANTO, ST	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
5	DR. BLAMET	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	73,710,000.00	73,710,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	3,071,250.00	73,710,000.00	0.00	
6	DR. SYAHRI ALIM	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
7	EKOPURWANTO, S.Pd	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
8	Salah (Ard Wars Cebod Cebod)	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	103,950,000.00	103,950,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	4,331,250.00	103,950,000.00	0.00	
9	AGUSZUMADI, SE	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
10	HR. NURHAN EKO WAHYUDI SH	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
11	HENRI PRADIPATANWAR	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
12	H. ROFOH, S.Ag	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
13	H. YASIN HERNANTO	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
14	ITOTURAGUSADITYA, SE	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
15	JOHAN MARHOT	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
16	MAYANGSARAWATI	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	
17	MUCHAMMADMUSTAFAID	107,100,000.00	64,260,000.00	42,840,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d Mei 2021	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00	

NO	Nama	Realisasi	Seluruhnya	Selisih	TOTAL	SKTJM		RINCIAN		Anggaran s/d 2023	Sisa Anggaran
						Nilai	Tanggal	Jangka waktu	Anggaran Perbulanan		
16	RACHMADFAUZI, S.Sos. I	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Mei 2021		53,550,000.00	0.00
								Jun 2019 s/d	2,231,250.00		
								Mei 2021			
19	RIHOMANPOKO, S.Pd	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00
								Mei 2021			
								Mei 2021			
20	SAED WOFANDU, ST	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Mei 2021		53,550,000.00	0.00
								Jun 2019 s/d	2,231,250.00		
								Mei 2021			
21	SUTANTO, SH	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00
								Mei 2021			
								Mei 2021			
22	SUDARWATI	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00
								Mei 2021			
								Mei 2021			
23	TOTOK SUGIARTO	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	73,710,000.00	73,710,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d	3,071,250.00	73,710,000.00	0.00
								Mei 2021			
								Mei 2021			
24	YOHANTRIALIYO	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00
								Mei 2021			
								Mei 2021			
25	YOSSEY YULIARIZ	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	53,550,000.00	53,550,000.00	20 Mei 2019	Jun 2019 s/d	2,231,250.00	53,550,000.00	0.00
								Mei 2021			
								Mei 2021			
		26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	1,439,470,800.00	1,439,470,800.00				1,345,757,500.00	83,712,580.00

Lampiran 14 Daftar Aset Tidak Berwujud per SKPD


No	Nama SKPD	Aset Tidak Berwujud
1	Dinas Pendidikan	810.577.750,00
2	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	91.500.000,00
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	-
4	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	32.039.000,00
5	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	-
6	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	1.948.000,00
7	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	6.500.000,00
8	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	-
9	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	-
10	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	19.350.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	296.355.500,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.803.105.500,00
13	Dinas Perhubungan	698.248.780,28
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	162.840.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	19.760.000,00
16	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	411.566.500,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.580.240.539,00
18	Dinas Perumahan Rakyat	159.106.849,70
19	Dinas Kesehatan	618.450.325,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	1.524.070.306,00
21	UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul	1.250.000,00
22	UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	-
23	UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	5.211.000,00
24	Dinas Sosial	44.400.000,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	433.087.100,00
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	611.514.750,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	74.567.555,00
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.021.500,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	400.420.249,81
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	587.892.424,00
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.138.355.898,50
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.080.673.450,00
33	Inspektorat Daerah	159.230.000,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	404.818.300,00
35	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.689.007.400,00
36	Bagian Umum	211.590.500,00

No	Nama SKPD	Aset Tidak Berwujud
37	Bagian Tata Pemerintahan	55.000.000,00
38	Bagian Hukum dan Organisasi	29.865.000,00
	Bagian Organisasi	108.871.500,00
39	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	61.730.000,00
40	Bagian Humas dan Protokol	-
41	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	310.755.600,00
42	Sekretariat DPRD	70.738.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	163.720.000,00
44	Kecamatan Kepanjenkidul	112.103.500,00
45	Kecamatan Sukorejo	365.791.700,00
46	Kecamatan Sananwetan	49.540.000,00
47	Kelurahan Ngadirejo	-
48	Kelurahan Sentul	-
49	Kelurahan Kauman	-
50	Kelurahan Tanggung	-
51	Kelurahan Bendo	-
52	Kelurahan Kepanjenlor	-
53	Kelurahan Kepanjenkidul	-
54	Kelurahan Pakunden	-
55	Kelurahan Blitar	-
56	Kelurahan Tlumpu	-
57	Kelurahan Turi	-
58	Kelurahan Karang Sari	19.000.000,00
59	Kelurahan Sukorejo	-
60	Kelurahan Tanjungsari	2.325.000,00
61	Kelurahan Gedog	-
62	Kelurahan Plosokerep	-
63	Kelurahan Klampok	-
64	Kelurahan Sananwetan	-
65	Kelurahan Rembang	-
66	Kelurahan Karangtengah	-
67	Kelurahan Bendogerit	-
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
	Total	20.475.140.477,29

Lampiran 15 Daftar Aset Lain-lain per SKPD

No	Nama SKPD	Aset Lain-lain
1	Dinas Pendidikan	-
2	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	0,00
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	-
4	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	-
5	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	-
6	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	-
7	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	-
8	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	-
9	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	-
10	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	-
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
13	Dinas Perhubungan	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-
16	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.118.819.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat	-
19	Dinas Kesehatan	-
20	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	-
21	UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul	-
22	UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	-
23	UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	-
24	Dinas Sosial	-
25	Dinas Lingkungan Hidup	-
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	-
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
33	Inspektorat Daerah	-
34	Badan Kepegawalan Daerah	-
35	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-
36	Bagian Umum	624.467.501,00

No	Nama SKPD	Aset Lain-lain
37	Bagian Tata Pemerintahan	-
38	Bagian Hukum dan Organisasi	-
	Bagian Organisasi	-
39	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-
40	Bagian Humas dan Protokol	-
41	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	-
42	Sekretariat DPRD	-
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	-
44	Kecamatan Kepanjenkidul	-
45	Kecamatan Sukorejo	-
46	Kecamatan Sananwetan	-
47	Kelurahan Ngadirejo	-
48	Kelurahan Sentul	-
49	Kelurahan Kauman	-
50	Kelurahan Tanggung	-
51	Kelurahan Bendo	-
52	Kelurahan Kepanjenlor	-
53	Kelurahan Kepanjenkidul	-
54	Kelurahan Pakunden	-
55	Kelurahan Bilar	-
56	Kelurahan Tumpu	29.485.250,00
57	Kelurahan Turi	-
58	Kelurahan Karang Sari	-
59	Kelurahan Sukorejo	-
60	Kelurahan Tanjungsari	22.100.000,00
61	Kelurahan Gedog	-
62	Kelurahan Plosokerep	-
63	Kelurahan Klampok	-
64	Kelurahan Sananwetan	-
65	Kelurahan Rembang	-
66	Kelurahan Karanglengah	-
67	Kelurahan Bendogent	-
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
	Total	1.794.871.751,00



Lampiran 16 Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD

NO	NAMA SKPD	Penyusutan Aset Tidak Berwujud
1	Dinas Pendidikan	780.153.750,00
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	76.200.000,00
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	-
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	32.039.000,00
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	-
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.948.000,00
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	6.500.000,00
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	-
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	-
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	19.050.000,00
11	Dinas Kesehatan	296.975.300,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	2.323.145.100,00
13	UPTD DINAS KESEHATAN KEC.KEPANJENKIDUL	554.030.362,08
14	UPTD DINAS KESEHATAN KEC.SANANWETAN	162.840.000,00
15	UPTD DINAS KESEHATAN KEC.SUKOREJO	-
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	386.587.200,00
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.295.338.476,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	72.685.000,00
19	Dinas Sosial	338.744.146,40
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	1.424.984.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.250.000,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	5.211.000,00
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
24	Dinas Perhubungan	44.400.000,00
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	249.654.900,00
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	506.817.070,00
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	48.567.960,00
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.296.000,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	172.834.345,87
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	250.036.120,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	754.326.300,00
32	Bagian Tata Pemerintahan	1.307.293.450,00
33	Bagian Hukum	139.234.000,00
34	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	366.735.300,00
35	Bagian Umum	2.027.314.936,00
36	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	197.238.200,00
37	Bagian Organisasi	48.000.000,00
38	Sekretariat DPRD	29.865.000,00
39	Kecamatan Kepanjenkidul	67.624.100,00
40	Kelurahan Kepanjenkidul	-
41	Kelurahan Ngadirejo	95.784.600,00
42	Kelurahan Sertul	294.261.419,20
43	Kelurahan Kauman	38.877.800,00
44	Kelurahan Tanggung	143.763.800,00
45	Kelurahan Bendo	90.382.800,00
46	Kelurahan Kepanjenlor	99.897.520,00
47	Kecamatan Sukorejo	81.040.000,00
48	Kelurahan Pakunden	-
49	Kelurahan Bitar	-
50	Kelurahan Tlumpu	-
51	Kelurahan Turi	-
52	Kelurahan Karang Sari	-
53	Kelurahan Sukorejo	-
54	Kelurahan Tanjungsari	-
55	Kecamatan Sananwetan	-
56	Kelurahan Gedog	-
57	Kelurahan Plosokerep	-
58	Kelurahan Klampok	-
59	Kelurahan Sananwetan	15.200.000,00
60	Kelurahan Rembang	-
61	Kelurahan Karangtengah	2.325.000,00
62	Kelurahan Bendogerit	-
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
65	Inspektorat	-
66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
67	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-

NO	NAMA SKPD	Penyusutan Aset Tidak Berwujud
68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
TOTAL		14.857.461.755,55



Lampiran 17 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD

NO	NAMA SKPD	Penyusutan Aset Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan	-
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	-
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	-
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	-
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	-
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	-
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	-
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	-
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	-
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	-
11	Dinas Kesehatan	-
12	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	-
13	UPTD DINAS KESEHATAN KEC.KEPANJENKIDUL	-
14	UPTD DINAS KESEHATAN KEC.SANANWETAN	-
15	UPTD DINAS KESEHATAN KEC.SUKOREJO	-
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95.519.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	-
19	Dinas Sosial	-
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	-
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
22	Dinas Lingkungan Hidup	-
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
24	Dinas Perhubungan	-
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	-
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
32	Bagian Tata Pemerintahan	-
33	Bagian Hukum	-
34	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-
35	Bagian Umum	-
36	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	624.467.501,00
37	Bagian Organisasi	-
38	Sekretariat DPRD	-
39	Kecamatan Kepanjenkidul	-
40	Kelurahan Kepanjenkidul	-
41	Kelurahan Ngadirejo	-
42	Kelurahan Sentul	-
43	Kelurahan Kauman	-
44	Kelurahan Tanggung	-
45	Kelurahan Bendo	-
46	Kelurahan Kepanjenlor	-
47	Kecamatan Sukorejo	-
48	Kelurahan Pakunden	-
49	Kelurahan Blitar	-
50	Kelurahan Tlumpu	-
51	Kelurahan Turi	-
52	Kelurahan Karangsan	-
53	Kelurahan Sukorejo	-
54	Kelurahan Tanjungsari	-
55	Kecamatan Sananwetan	-
56	Kelurahan Gedog	-
57	Kelurahan Plosokerep	29.485.250,00
58	Kelurahan Klampok	-
59	Kelurahan Sananwetan	-
60	Kelurahan Rembang	-
61	Kelurahan Karanglengah	22.100.000,00
62	Kelurahan Bendogerit	-
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
65	Inspektorat	-
66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
67	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-

NO	NAMA SKPD	Penyusutan Aset Lain-Lain
68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
TOTAL		771.571.751,00



Lampiran 18 Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023

NO	Nomor Perjanjian	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Durasi	Durasi Telah Berjalan	Keterangan	Nilai Sesuai Perjanjian	Realisasi Pembayaran	Sewa per Bulan	Pendapatan Disetor Dlmjka
1	510520.14/13.117.2/2023	4 September 2023	3 September 2024	12	4	Sewa Menyewa Kios Tersebut BRT di Pasar Legi	15.300.000,00	15.300.000,23	1.275.000,00	10.200.000,23
2	510467.14/10.117.2/2023	1 Oktober 2021	30 September 2022	12	12	Sewa Menyewa Tanah di Pasar Wage Menara Telekomunikasi	9.056.000,00	6.056.000,00	504.666,67	9,00
		1 Oktober 2022	30 September 2023	12	12		6.358.600,00	6.358.600,00	529.800,00	6,00
		1 Oktober 2023	30 September 2024	12	3		8.877.000,00	6.577.000,00	559.750,00	5.007.750,00
		1 Oktober 2024	30 September 2025	12	0		7.010.850,00	7.010.850,00	584.237,50	7.010.850,00
		1 Oktober 2025	30 September 2026	12	0		7.361.500,00	7.361.500,00	613.458,33	7.361.500,00
3	5031304.20/108/2021	5 September 2023	5 September 2024	12	4	Sewa Menyewa Lahan Bangunan di Pasar Legi atas nama Lukman Harzoku	22.608.000,00	22.608.000,00	1.884.000,00	15.072.000,00
4	PKS.075/LG.06/AR.06/31/12/2020	1 Februari 2023	31 Januari 2024	12	11	Sewa Menyewa Lahan untuk Pemukiman dan Perumahan Pasirgugat Sleman, Telekomunikasi Soluler dan Perumahan Perumahan dengan PT Telekomunikasi Soluler	25.000.000,00	25.000.001,00	2.083.333,33	2.083.334,33
5	5105444.10.117.2/2022	1 Desember 2023	1 Desember 2024	12	1	Sewa Menyewa Lahan Bangunan di Pasar Legi atas nama Jolito Family Karaoke & Food Court	22.108.000,00	22.108.000,00	1.842.333,33	20.265.666,67
6	19	28 Agustus 2023	28 Agustus 2024	12	4	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan untuk Ajudan Tunai Mandiri Bank Jalin antara RSUD Meru Widyad Koba Bilar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Bilar	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	4.000.000,00
7	04	25 April 2023	25 April 2024	12	8	Perjanjian Sewa Menyewa antara RSUD Meru Widyad Koba Bilar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Bilar dan/atau Bangunan (Kantor Kios Bank Jalin)	24.800.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
8	506372.14/10.107.2/2020	21 November 2023	20 November 2024	12	1	Perjanjian Sewa Menyewa Waterpark Sumberdel Koba Bilar	300.000.000,00	300.000.000,00	25.000.000,00	275.000.000,00
9	011129584.10.300.1/2023	1 Agustus 2023	31 Juli 2024	12	5	Sewa Menyewa Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pokok yang berwujud di Lingkungan Agropolis Bading Kandang	140.000.000,00	140.000.000,00	11.666.666,67	81.666.666,67
10	032.2780234.10.300.2/2023	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	60	4	Sewa penempatan menara telekomunikasi	55.879.200,00	55.879.200,00	961.320,00	52.153.600,00
11	032.2780234.10.300.6/2020	2 Januari 2020	30 Desember 2021	12	12	Sewa Perjanjian antara Pemernintah Kota Bilar dengan PT. BPD Jawa Timur Cabang Bilar tentang Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berwujud di lingkungan Jipiro Kantor Wilayah Kota Bilar dan di lingkungan ppp yang abstrak oleh Pemernintah Kota Bilar	11.956.426,00	11.956.426,00	1.005.005,67	0,00
		2 Januari 2021	30 Desember 2022	12	12		1.205.608,33	1.205.608,33	1.005.005,67	0,00
		2 Januari 2023	30 Desember 2023	12	12		1.326.167,00	1.326.167,00	1.096.005,67	0,00
		2 Januari 2024	30 Desember 2024	12	0		1.458.782,56	1.458.782,56	1.205.608,33	0,00
		2 Januari 2026	30 Desember 2026	12	0		0,00	0,00	0,00	0,00
12	489/151/14/10.206/2020	3 Juni 2020	2 Juni 2025	60	43	Surat Perjanjian antara Pemernintah Kota Bilar dengan PT. Supra Primadana Nusantara (SPHET) tentang sewa lahan milik Pemernintah Kota Bilar pada area Ruang Milik Jalan di Wilayah Kota Bilar	194.520.000,00	194.520.000,00	1.742.000,00	29.514.000,00
13	032.2780234.10.206.4/2020	5 Oktober 2020	5 Oktober 2021	12	12	Surat Perjanjian antara Pemernintah Kota Bilar dengan PT. BPD Jawa Timur Cabang Bilar tentang Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungan Kecamatan Sukorejo	422.500,00	422.500,00	35.208,33	0,00
		5 Oktober 2021	5 Oktober 2022	12	12		441.500,00	441.500,00	36.791,67	0,00
		5 Oktober 2022	5 Oktober 2023	12	12		481.400,00	2.311.500,00	38.450,00	0,00
		5 Oktober 2023	5 Oktober 2024	12	3		682.200,00	682.200,00	40.183,33	361.650,00
		5 Oktober 2024	5 Oktober 2025	12	6		593.900,00	593.900,00	41.991,67	503.900,00
14	489/2004/10.206/2020	16 Juni 2020	9 Juni 2025	60	43	Surat Perjanjian antara Pemernintah Kota Bilar dengan PT. Mega Akses Perkasa tentang Sewa Tanah milik Pemernintah Kota Bilar pada Area Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kota Bilar	10.025.000,00	10.025.000,00	167.083,33	2.840.416,67
15	01145674/10.206.6/2021	23 Oktober 2021	23 Oktober 2022	12	12	Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berwujud di Lingkungan Kantor Wilayah Bilar - ATN BRI	6.631.000,00	6.631.000,00	552.583,33	0,00
		23 Oktober 2022	23 Oktober 2023	12	12		7.284.100,00	21.948.510,00	607.841,67	0,00
		23 Oktober 2023	23 Oktober 2024	12	2		8.020.510,00	8.020.510,00	668.375,83	6.686.258,33
16	649/244/10.185/2021	3 Mei 2019	2 Mei 2020	12	12	Sewa Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUPTT) 150 kV New Kediri - New Tulungagung - New Widyad Tasek Nomor 108 di Kelurahan Tanjungdel	7.875.000,00	7.875.000,00	656.250,00	0,00
		3 Mei 2020	2 Mei 2021	12	12		12.699.000,00	12.699.000,00	1.058.250,00	0,00
		3 Mei 2021	2 Mei 2024	36	32		38.097.000,00	38.097.000,00	1.058.250,00	4.233.000,00

NO	Norma Perjanjian	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Durasi	Durasi Telah Berjalan	Keterangan	Nilai Sesuai Perjanjian	Realisasi Pembayaran	Sewa per Bulan	Pendapatan Disertakan Dmsuka
17	032.2122B410.202.7/2023	1 Januari 2023	31 Desember 2027	60	12	Sewa Tanah Bangunan Jalan Masjid [Puranda BPR Kota Bharu]	204.803.000,00	204.803.000,00	3.413.363,33	163.842.400,00
18	302.9168/410.202.7/2022	17 Oktober 2022	17 Oktober 2023	12	12	Sewa Tanah Aset Pemerintah Kota Bharu Aset Pemerintah Kota Bharu dengan PT Energi Megah Sukses - SPUK Kabanjaya	134.188.600,00	654.833.600,00	10.673.266,67	0,00
		17 Oktober 2023	17 Oktober 2024	12	3		134.188.600,00		11.182.383,33	100.641.400,00
		17 Oktober 2024	17 Oktober 2025	12	0		134.188.600,00		11.182.383,33	134.188.600,00
		17 Oktober 2025	17 Oktober 2026	12	0		134.188.600,00		11.182.383,33	134.188.600,00
		17 Oktober 2026	17 Oktober 2027	12	0		134.188.600,00		11.182.383,33	134.188.600,00
19	7 Tahun 2023	7 Maret 2023	6 Maret 2024	12	10	Sewa Menyewa ColdStorage di UFT Rymah Pening Hutan	32.400.000,00	32.400.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00
20	518594410.112.2/2023	24 Juli 2023	24 Juli 2024	12	5	Sewa Gudang KUD	10.375.000,00	10.375.000,00	814.583,33	8.402.083,33
21	Berita Acara Rekomendasi Pembayaran Retribusi Kios Stasion dan Kabanjaya	1 Januari 2024	31 Januari 2024	1	0	Sewa Kios Stasion Sempit An Dama Wana	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Berita Acara Rekomendasi Pembayaran Retribusi Kios Stasion dan Kabanjaya	1 Januari 2024	31 Januari 2024	1	0	Sewa Kios Stasion Sempit An M Mahendra	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Berita Acara Rekomendasi Pembayaran Retribusi Kios Stasion dan Kabanjaya	1 Januari 2024	31 Januari 2024	1	0	Sewa Kios Stasion Sempit An Sri Wilujang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	Berita Acara Rekomendasi Pembayaran Retribusi Kios Stasion dan Kabanjaya	1 Januari 2024	31 Januari 2024	1	0	Sewa Kios Stasion Sempit An Wiji Lantari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	Berita Acara Rekomendasi Pembayaran Retribusi Kios Stasion dan Kabanjaya	1 Januari 2024	31 April 2024	4	0	Sewa Kios Stasion Sempit An Wijayagra	800.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
26	Berita Acara Rekomendasi Pembayaran Retribusi Kios Stasion dan Kabanjaya	1 Januari 2024	31 Januari 2024	1	0	Sewa Kios Stasion Sempit An Sirembu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27	60305086410.113.3196/2022	01 April 2023	01 April 2024	12	9	PAPAN REKLAME BERTANDA "EMEDS"	546.000,00	546.000,00	45.500,00	136.500,00
28	5030104011410.113.3196/2022	01 Mei 2023	01 Mei 2024	12	8	MECH BOX "KOPRI KONE"	191.600,00	191.600,00	15.960,00	63.640,00
29	002.216031410.202.7/2023	29 Agustus 2023	28 Agustus 2028	60	4	Sewa Tanah Marana Telekomunikasi di Taman Kabanjaya	31.491.200,00	31.491.200,00	524.852,33	29.391.766,67
30	97001121410.401.1/2024	1 Januari 2024	31 Desember 2024	12	0		50.332.500,00	32.333.600,00	2.694.376,67	32.532.500,00
Jumlah										1.292.142.683,90

Lampiran 19 Rincian Utang Belanja Per SKPD

No.	SKPD	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Utang Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN-Tembelahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atau Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atau Pemungutan Pajak Restorasi	Utang Belanja Insentif bagi ASN atau Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemutihan Kelengkapan Daerah	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atau Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemutihan Kelengkapan Daerah	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
1	Dinas Perhubungan								3.852.847,00
2	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1								51.507,00
3	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2								42.294,00
4	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3								51.507,00
5	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4								48.548,00
6	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5								49.867,00
7	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6								37.757,00
8	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7								43.307,00
9	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8								37.757,00
10	LPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9								68.840,00
11	Dinas Kependidikan dan Olah Raga								43.307,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik								119.348,00
13	Dinas Perhubungan								185.248,00
14	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	452.167,00						620.658,00	1.069.064,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja								87.488,00
16	Dinas Perencanaan, Monev, Tenaga Kerja dan Riset dan Teknologi								111.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								756.046,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Kawasan Permukiman Kota Bharu						11.070.000,00		228.671,00
19	Dinas Kesehatan								6.888.315,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah Mayel Wulung								169.128,00
21	LPTD Puskesmas Kecamatan Kupertentulu								59.957,00
22	LPTD Puskesmas Kecamatan Sukowyo								78.164,00
23	LPTD Puskesmas Kecamatan Sempawan								61.400,00
24	Dinas Sosial								381.500,00
25	Dinas Lingkungan Hidup								318.257,00
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								167.182,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB								
28	Dinas Kesehatan Pagar dan Pertanian								
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan		463.372,00	258.408,00				620.658,00	
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								

No.	SKPD	Utang Belanja Jasa Kantor-Tuphan Ar	Utang Belanja Jasa Kantor-Sagihan Lank	Utang Belanja Jasa Kantor-Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga KeolahRATAN	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai PBI/PU dan BP Kelas 3	Utang Belanja Barang Faks Habis-Bahan-Bahan Bakar dan lainnya	Utang Belanja Barang Faks Habis-Obat-Obat-Obat-Obat-Obat
1	Dinas Pendidikan	1.297.700,00	40.695.235,00	17.640.670,00				
2	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1		3.129.000,00	1.585.100,00				
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2		3.895.100,00	962.720,00				
4	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3		5.115.100,00	1.702.596,00				
5	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4		2.556.300,00	1.571.100,00				
6	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5		2.874.900,00	985.350,00				
7	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6		3.153.000,00	1.388.266,00				
8	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7		5.493.850,00	1.325.089,00				
9	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8		4.843.600,00	1.246.660,00				
10	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9		2.621.700,00	1.483.155,00				
11	Dinas Koperasi dan Otsda Raga	894.600,00	15.422.685,00					
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		31.834.102,00					
13	Dinas Pertambangan	776.750,00	602.334.266,00					
14	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	41.400,00	5.548.369,00					
15	Bantuan Pital Peningkatan	654.250,00	10.583.676,00					
16	Dinas Perencanaan, Monev, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terhadap Suku Pulu		10.342.344,00	1.967.700,00				
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.500,00	9.766.803,00					
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	57.000,00	38.166.128,00					
19	Dinas Kesehatan		21.452.728,00	5.414.800,00		11.880.025,00		4.451.323.830,59
20	Kemah Sakti Umum Daerah Mangrove	31.500,00	166.936.696,00		13.438.025.036,00		12.193.725,00	
21	UPTD Puskesmas Kecamatan Keparjengkulu		9.051.821,00	1.496.545,00	20.636.196,00			
22	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukatirjo	243.500,00	4.212.429,00	1.756.100,00	4.812.727,00			
23	UPTD Puskesmas Kecamatan Srahmetan	115.800,00	9.034.836,00	1.845.860,00	12.702.303,00			
24	Dinas Sosial	18.000,00	5.562.340,00	289.614,00				
25	Dinas Lingkungan Hidup		32.430.392,60					
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.500,00	11.168.618,00	132.937,00				
27	Dinas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan KIP dan KIP	63.000,00	8.554.408,00	930.960,00				
28	Dinas Kelautan, Perikanan dan Perikanan		13.713.948,00					
29	Dinas Perencanaan dan Keuangan	83.000,00	7.489.516,00					
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		16.955.282,00					
31	Dinas Perencanaan dan Pembangunan	185.560,00	26.543.196,00				7.789.790,00	
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) (Jang)							
33	Inspektur		5.874.676,00					

No.	SPRD	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Fiber/Internet/TV Berlangganan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kosehatahan	Beban Iuran-Jumlah Kesehatan bagi Peserta PPSU dan BP Keras 3	Utang Belanja Barang Pakai Kecil-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Utang Belanja Barang Pakai Kecil-Habis-Habisan-Obat-obat-Obat-Obat
34	Beban Kegiatan Dasar (Isk ada utang)		359.931,00					
35	Beban Pendidikan, Kesehatan dan Asst Daerah	148.200,00	95.533.505,00	1.424.250,00				
36	Bayan Umum		15.632.507,00				3.804.750,00	
37	Sekretariat DPRD							
38	Beban Kebutuhan Bangun dan Perek		2.845.224,00					
39	Kecamatan Kapanankerakul	78.100,00	1.542.654,00					
40	Kecamatan Sukorejo	167.400,00	4.045.777,00	128.200,00				
41	Kecamatan Sangnawetan		4.595.148,00					
42	Kabupaten Ngadirejo		981.130,00					
43	Kabupaten Sidal	36.000,00	386.430,00					
44	Kabupaten Kauran		3.485.847,00			4.000.000,00		
45	Kabupaten Janggung		3.123.360,00					
46	Kabupaten Benda		2.223.537,00					
47	Kabupaten Kapanankerakul		711.031,00					
48	Kabupaten Kapanankerakul		358.290,00			7.000.000,00		
49	Kabupaten Pakunden		1.967.660,00					
50	Kabupaten Blar	43.900,00	1.048.440,00					
51	Kabupaten Turapa	86.400,00	703.476,00					
52	Kabupaten Turi	31.500,00	501.480,00					
53	Kabupaten Karangasari		631.384,00					
54	Kabupaten Sukorejo		1.098.210,00					
55	Kabupaten Tanggung		900.352,00					
56	Kabupaten Golog		1.234.812,00			2.400.000,00		
57	Kabupaten Plosokirep	57.300,00	1.968.680,00					
58	Kabupaten Klaten		1.970.606,00					
59	Kabupaten Sragen	320.000,00	838.802,00					
60	Kabupaten Rembang		1.466.295,00					
61	Kabupaten Karangduren							
62	Kabupaten Bembel							
JUMLAH PER JENIS-UTANG		5.455.560,00	1.288.425.840,00	45.278.846,00	13.475.975.200,00	11.868.025,00	23.748.245,00	4.451.323.830,00

No.	GOPO	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Gubuk, Obahan, Obahan Lainnya	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan Kimia	Utang Selanjuta Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Utang Belanja Perjalanan Dinas Besar	Utang Belanja Jasa Kantor Honorarium, Honorarium atau Penghasilan, Modifikasi, Perbaikan, Asuransi, dan Pemeliharaan	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natural dan Pakai Habis-Natural Lainnya	Utang Selanjuta Insentif bagi KDH/WDH atas Penugasan Pajak Reklame	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WDH atas Penugasan Pajak Air Tanah
1	Dinas Pendidikan							
2	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1							
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2							
4	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3							
5	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4							
6	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5							
7	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6							
8	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7							
9	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8							
10	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9							
11	Dinas Komunikasi dan Olah Raga							
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik							
13	Dinas Perhubungan							
14	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja							
15	Satuan Polisi Pamong Praja							
16	Dinas Perencanaan, Model, Tenaga Kerja dan Penyediaan Tenaga Suku Poda							
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bego							
19	Dinas Kesehatan							
20	Rumah Sakit Umum Daerah Wandi Wadaya	7.530.365.088,32	1.968.240.906,00	2.791.024,00		380.371.779,00		
21	UPTD Puskesmas Kecamatan Kapatjehid			44.200.000,00	2.664.000,00	33.300.000,00		
22	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo							
23	UPTD Puskesmas Kecamatan Sinaliwetan							
24	Dinas Sosial							
25	Dinas Lingkungan Hidup							
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB							
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
29	Dinas Perindustrian dan Koperasi							
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian							
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas)							
33	Inspektorat							

No	SKPD	Utang Belanja Barang Pokok Habis-Obat-Obat-obat Lain-lain	Utang Belanja Bahan Pokok Habis-Bahan-Bahan Kimia	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar	Utang Belanja Jasa Kantor Konsumsi atau Pembelian, Moderasi, Perbaikan, Acara, dan Pemas	Utang Belanja Barang Pokok Habis-Nature dan Pakaian Lainnya	Utang Belanja Insentif bagi KDHWKDH atau Peningkatan Pajak At Tanah	Utang Belanja Insentif bagi KDHWKDH atau Peningkatan Pajak At Tanah
34	Badan Kependidikan Daerah (tidak ada utang)							166.500,00
35	Badan Pendidikan, Keuangan dan Aspek Daerah							932.600,00
36	Bagian Umum							
37	Sekretariat DPRD							
38	Badan Kajian Bangsa dan Perekonomian							
39	Kecamatan Keparipikutan							
40	Kecamatan Sukorejo							
41	Kecamatan Samudra							
42	Kelurahan Ngelono							
43	Kelurahan Sural							
44	Kelurahan Kuman							
45	Kelurahan Tanggung							
46	Kelurahan Bendo							
47	Kelurahan Keparipikutan							
48	Kelurahan Keparipikutan							
49	Kelurahan Pakunden							
50	Kelurahan Blitar							
51	Kelurahan Turi							
52	Kelurahan Turi							
53	Kelurahan Kemuning							
54	Kelurahan Sukorejo							
55	Kelurahan Tanjung							
56	Kelurahan Gading							
57	Kelurahan Pongkorep							
58	Kelurahan Kumpang							
59	Kelurahan Samudra							
60	Kelurahan Ronggong							
61	Kelurahan Karanganyar							
62	Kelurahan Bendogerit							
Jumlah		7.539.305.088,32	1.869.246.905,00	48.991.624,00	2.664.000,00	33.300.000,00	380.371.779,00	902.600,00
PER JENIS UTANG								166.500,00

9

No.	SKPD	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Tanah dan Bangunan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penetapan Jalan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Utang Beban Insentif bagi ASN atau Pemungutan Pajak Air Tanah
1	Dinas Pendidikan								
2	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1								
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2								
4	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3								
5	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4								
6	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5								
7	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6								
8	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7								
9	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8								
10	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9								
11	Dinas Kependidikan dan Olah Raga								
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik								
13	Dinas Perhubungan								
14	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja								
15	Satuan Polisi Pamong Praja								
16	Dinas Perencanaan, Pengembangan, Koperasi, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Negeri								
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bharu								
19	Dinas Kesehatan								
20	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Negeri								
21	UPTD Puskesmas Kecamatan Kassembil								
22	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukunep								
23	UPTD Puskesmas Kecamatan Sarawetan								
24	Dinas Sosial								
25	Dinas Lingkungan Hidup								
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, GP dan KB								
28	Dinas Ketenagakerjaan dan Perencanaan								
29	Dinas Perencanaan dan Kearsifan								
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
31	Dinas Peristiwa dan Kebudayaan								

No.	SKPD	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penawangan Jalan	Utang Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Utang Beban Insentif Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
32	Badan Pencanangan Pembangunan Daerah (Badan Adm)							
33	Inspektariat							
34	Badan Kependidikan Daerah (Badan Adm)							
35	Badan Perindustrian, Keuangan dan Aset Daerah	37.925.000,00	2.915.400,00	2.816.800,00	25.875.000,00	1.177.400,00	3.860.000,00	945.900,00
36	Bagian Umum							
37	Sekretariat DPRD							
38	Badan Keutuhan Bangsa dan Politik							
39	Kecamatan Kapanjeruk							
40	Kecamatan Sukorejo							
41	Kecamatan Samawitan							
42	Kecamatan Ngadirejo							
43	Kecamatan Sorot							
44	Kecamatan Kauman							
45	Kecamatan Tanggung							
46	Kecamatan Bendu							
47	Kecamatan Kapanjeruk							
48	Kecamatan Kapanjeruk							
49	Kecamatan Pakunden							
50	Kecamatan Bharu							
51	Kecamatan Tamsu							
52	Kecamatan Tunj							
53	Kecamatan Karangasen							
54	Kecamatan Sukorejo							
55	Kecamatan Tanggung							
56	Kecamatan Gedeg							
57	Kecamatan Plozokerep							
58	Kecamatan Himpok							
59	Kecamatan Samawitan							
60	Kecamatan Hurdang							
61	Kecamatan Karanglegah							
62	Kecamatan Bendogereh							
JUMLAH PER JENIS UTANG		37.925.000,00	2.915.400,00	2.816.800,00	25.875.000,00	1.177.400,00	3.860.000,00	945.900,00

No.	SKPD	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Pemilikan dan Perolehan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Utang Beban Jasa Tenaga Keamananan	Jumlah
1	Dinas Perakibahan									63.760.855,00
2	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1									4.762.937,00
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2									4.895.114,00
4	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3									6.869.203,00
5	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4									4.176.948,00
6	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5									3.910.117,00
7	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6									4.590.147,00
8	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7									7.062.196,00
9	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8									6.147.917,00
10	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9									4.473.735,00
11	Dinas Koperasi dan Ombudsman									16.360.496,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									31.953.450,00
13	Dinas Perhubungan									603.276.355,00
14	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja									6.659.833,00
15	Sekolah Padi Paming Pagi									12.290.753,00
16	Dinas Perikanan, Mada, Tenaga Kerja dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu									12.397.532,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									9.912.103,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Binar									52.512.174,00
19	Dinas Kesehatan									58.965.024,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah Nard Waluyo									27.954.715.534,90
21	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkul									123.870.418,00
22	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo									10.884.913,00
23	UPTD Puskesmas Kecamatan Sarenwetan									23.576.900,00
24	Dinas Sosial									5.910.854,00
25	Dinas Lingkungan Hidup									32.493.792,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									11.714.403,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPP dan KB								1.241.316,00	10.176.270,00
28	Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian									13.691.140,00
29	Dinas Perindustrian dan Koperasi									10.855.202,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									34.831.367,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan ada yang)									5.947.846,00
33	Inspektorat									-
34	Badan Kependidikan Daerah (tidak ada utang)									89.1473.430,00
35	Badan Perindustrian, Koperasi dan Aspek Daerah	147.074.600,00	301.725.000,00	11.356.050,00	54.048.900,00	10.922.600,00	107.080.750,00	4.566.200,00		102.847.962,00
36	Badan Umum									16.761.778,00
37	Sekretariat DPRD									6.751.886,00
38	Badan Kajian Bangsa dan Politik									1.866.511,00
39	Kecamatan Kejenjeron									4.405.884,00
40	Kecamatan Sukorejo									

No.	SKPD	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Bangunan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restorasi	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Peningkatan Jalan	Utang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Utang Beban Jasa Tenaga Kelembagaan	Jumlah
41	Kecamatan Sandakan									4.605.555,00
42	Kabupaten Ngadirejo									995.995,00
43	Kabupaten Sentul									693.495,00
44	Kabupaten Karimun									7.524.604,00
45	Kabupaten Tanggung									1.460.365,00
46	Kabupaten Bendo									2.276.487,00
47	Kabupaten Kasepuhan									800.150,00
48	Kabupaten Kepanjenkul									7.393.137,00
49	Kabupaten Patunden									1.890.422,00
50	Kabupaten Blitar									1.146.896,00
51	Kabupaten Tumpang									848.376,00
52	Kabupaten Turi									676.267,00
53	Kabupaten Karangas									78.501,00
54	Kabupaten Sukorejo									682.891,00
55	Kabupaten Tanjungan									1.096.216,00
56	Kabupaten Gedeg									1.022.402,00
57	Kabupaten Pacurep									3.760.863,00
58	Kabupaten Karangas									4.071.234,00
59	Kabupaten Samarwalan									2.410.206,00
60	Kabupaten Rumbang									950.582,00
61	Kabupaten Karangbongkah									1.324.795,00
62	Kabupaten Bendoget									84.841,00
Jumlah		147.074.806,00	301.725.000,00	11.306.090,00	54.088.900,00	10.422.900,00	107.093.750,00	4.566.200,00	1.284.310,00	30.157.609.336,00



